

BUKU CHAPTER

NELAYAN

Suatu Tinjauan Sosiologi Ekonomi

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUKU CHAPTER

NELAYAN

Suatu Tinjauan Sosiologi Ekonomi

Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si.

Dr. Harnita Agusanty, S.Pi., M.Si.

Muh. Dalvi Mustafa, S.Pi., M.Sc. & Ruslan Smith, S.Pi.

Nadir, S.Pi., M.Si.

Haeruddin, S.Pi., M.Si.

Kasri, S.Pi., M.Si.

Sajriawati, S.Pi., M.Si.

Rudi Hardi, S.Sos., M.Si.

Godefridus Samderubun, SS., M.Si.

Dr. Hamja Abdul Halik, S.Pi., M.Si.

Muhammad Bibin, S.Pi., M.Si.

Untari, S.TP., M.Si.

Dr. Irma Sribianti, S.Hut., M.P.

Benny Audy Jaya Gosari, S.Kel., M.Si. & Dr. Abd. Wahid, S.Pi., M.Si.

Editor : Dr. Andi Adri Arief, S.Pi, M.Si

Dr. Harnita Agusanty, S.Pi, M.Si

 deepublish

Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

NELAYAN SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI EKONOMI

Andi Adri Arief ... [et al.]

Editor :

Andi Adri Arief & Harnita Agusanty

Desain Cover :

Nama

Sumber :

Link

Tata Letak :

Penulis

Ukuran :

viii, 287 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :

No ISBN

Cetakan Pertama :

Bulan 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2021 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR PENERBIT

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, Penerbit Deepublish dapat menerbitkan judul ***Buku Chapter: Nelayan Suatu Tinjauan Sosiologi Ekonomi***

Sebagai penerbit yang sejak semula lebih mengutamakan perannya untuk mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, Penerbit Deepublish tidak hanya bertumpu kepada karya penulis mapan saja, tetapi harus ada ruang bagi siapapun untuk secara kreatif dan dengan inovasi menuliskan dan menyampaikan gagasan dan nilai-nilai untuk ikut membantu upaya tersebut. Buku yang berjudul ***Buku Chapter: Nelayan Suatu Tinjauan Sosiologi Ekonomi*** memuat berbagai macam pembahasan mengenai nelayan dari beberapa sudut pandang. Dimulai dengan Sosiologi Ekonomi, Jaringan Sosial Nelayan, hingga mengenai Pemberdayaan Nelayan yang bertujuan untuk memajukan nelayan-nelayan tersebut.

Terima kasih dan penghargaan terbesar bagi penulis yang telah memberikan perhatian, kepercayaan, dan kontribusi demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, serta dapat mencerdaskan, memuliakan umat manusia dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Tanah Air pada umumnya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR PENERBIT	v
	DAFTAR ISI	vi
I	Chapter 1 RUANG LINGKUP SOSIOLOGI EKONOMI : Pengantar Sosiologi Ekonomi, <i>Editor</i>	1
II	Chapter 2 MORAL EKONOMI NELAYAN : Studi Hubungan antara <i>Ponggawa</i> dengan <i>Sawi</i> dalam Etika Subsistensi Komunitas Nelayan di Desa Pajukang, Kabupaten Maros. <i>Andi Adri Arief</i>	19
III	Chapter 3 PRODUKSI DAN LINGKUNGAN SOSIOKULTUR NELAYAN: Pengetahuan Lokal Nelayan dalam Eksploitasi Sumberdaya Perikanan di Desa Tamasaju, Kabupaten Takalar <i>Harnita Agusanty</i>	45
IV	Chapter 4 JARINGAN SOSIAL NELAYAN : Relasi Aktor Pengelolaan Ikan Karang di Kawasan Konservasi Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar <i>Muhammad Dalvi Mustafa, Ruslan Smith</i>	66
V	Chapter 5 MODAL SOSIAL NELAYAN : Peran Modal Sosial Nelayan <i>Patorani</i> dalam Pola Kemitraan Usaha di Kabupaten Takalar <i>Nadir</i>	83
VI	Chapter 6 SISTIM PEMBIAYAAN NELAYAN : Relasi Nelayan dalam Kelembagaan Pembiayaan Non Formal di Desa Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar <i>Haeruddin</i>	103

VII	Chapter 7	USAHA EKONOMI NELAYAN : Analisis Usaha Penangkapan Ikan Terbang di Perairan Selat Makassar <i>Kasri</i>	118
VIII	Chapter 8	SISTIM BAGI HASIL NELAYAN : Sistem Bagi Hasil Nelayan pada Usaha Penangkapan Gelembung Ikan di Kabupaten Merauke, Papua, <i>Sajriwati</i>	132
IX	Chapter 9	POLA HIDUP NELAYAN : Konsumsi dan Gaya Hidup Nelayan di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene <i>Rudi Hardi</i>	147
X	Chapter 10	GENDER DAN RUMAH TANGGA NELAYAN: Relasi Gender Pada Keluarga Nelayan Di Distrik Malind Kabupaten Merauke, Papua <i>Godefridus Samderubun</i>	162
XI	Chapter 11	KEMISKINAN NELAYAN: Tipologi Kemiskinan Nelayan Di Kabupaten Bantaeng <i>Andi Adri Arief</i>	176
XII	Chapter 12	ADAPTASI NELAYAN TERHADAP KRISIS: Resilensi dan Strategi Nafkah Nelayan Torani Di Kabupaten Takalar <i>Hamja Abdul Halik</i>	197
XIII	Chapter 13	KONFLIK NELAYAN: Analisis Konflik Nelayan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo <i>Muhammad Bibin</i>	212
XIV	Chapter 14	NELAYAN DAN SUMBERDAYA PERAIRAN: Perilaku Komunitas Nelayan DALAM Pengelolaan Sumberdaya Perairan Di Wilayah Pesisir Kota Merauke <i>Untari</i>	232

XV	Chapter 15	NELAYAN DAN NILAI EKONOMI EKOSISTEM PESISIR: Persepsi Nelayan dan Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove Di Kabupaten Takalar <i>Irma Sribianti</i> 253
XVI	Chapter 16	PEMBERDAYAAN NELAYAN: Pemberdayaan Nelayan Melalui Koperasi Perikanan Sebagai Katalisator Perekonomian Di Kabupaten Gowa <i>Benny Audy Jaya Gosari, Abdul Wahid</i> 273

Chapter 1

RUANG LINGKUP SOSIOLOGI EKONOMI

PENGANTAR SOSIOLOGI EKONOMI

Editor

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diskursus sosiologi ekonomi berangkat dari dua disiplin ilmu sosial yang sama-sama mapan, masing-masing memiliki perspektif, metodologi dan teori dalam cara melihat dan mempelajari perilaku individu, kelompok dan masyarakat. Dari beberapa catatan sejarah mengenai persoalan ekonomi, nampak bahwa persoalan ekonomi tidak hanya menyangkut ekonomi *an sich*, tetapi berkait dan melekat (*embedded*) pada institusi-institusi lain dari masyarakat, seperti; agama, politik, pemerintahan, sistem sosial, budaya dan seterusnya, yang korelasinya sangat berpengaruh untuk dapat memperlancar atau menghambat aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh aktor-aktor ekonomi. Oleh karena itu, sesungguhnya persoalan-persoalan ekonomi yang terdapat pada tingkat individu, komunitas, masyarakat, negara bahkan internasional, diasumsikan tidak dapat dipecahkan jika hanya mengandalkan ilmu-ilmu ekonomi saja, tetapi ia harus berkejasama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti; sosiologi, psikologi, antropologi dan politik.

Perdebatan mengenai daerah perbatasan bidang kajian antara sosiologi dan ekonomi, telah lama menjadi diskursus ilmiah antara para sosiolog dan para ekonom. Misalnya, Max Weber (1978), yang dikenal sebagai sosiolog, telah memberikan garis batasnya dengan menekankan bahwa, sosiologi ekonomi memperhatikan tindakan ekonomi sejauh ia mempunyai dimensi sosial dan selalu melibatkan makna serta berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan dari pihak ekonom Joseph Schumpeter (1989), membuat pembagian kerja di antara kedua bidang ilmu tersebut dengan memberi batasan bahwa sosiologi ekonomi berkaitan dengan konteks institusional dari ekonomi sedangkan ilmu ekonomi berkaitan dengan ekonomi itu sendiri.

Masalah perbatasan antara kedua disiplin ilmu ini, oleh para pewarisnya baik dari sosiologi maupun ekonomi, telah melakukan diskusi intensif sebagai kaji ulang yang harus dicermati dengan serius. Kemudian Richard Swedberg melakukan interviu sebagai upaya pertimbangan akademis dengan beberapa pakar ekonomi seperti Gary S. Becker, George A. Akerlof dan Oliver E. Williamson, Kenneth J. Arrow, Albert O. Hirschman, Mancur Olson, Robert M. Solow, Thomas C. Schelling, dan Amartya Sen dan beberapa pakar sosiologi seperti James S. Coleman, Harrison C. White, Mark Granovetter, Neil J. Smelser, Daniel Bell, Arthur L. Stinchcombe, dan Aage B. Sorensen, tentang garis pemisah yang jelas antara dua disiplin ilmu tersebut. Hasil interviu yang dilakukan, kemudian di tulis oleh Richard Swedberg dalam buku *Economic and Sociology; Redefining their Boundaries; Conversation with Economists and Sociology* (1992). Swedberg menyimpulkan bahwa terdapat tiga kecenderungan yang telah terjadi pada pembagian kerja antara ekonom dan sosiolog, yaitu : *Pertama*, para ekonom memperluas bidang kajiannya pada topik yang secara tradisi digeluti oleh para sosiolog; *Kedua*, para sosiolog memperluas bidang kajiannya pada masalah yang sama seperti yang dikaji oleh ekonom, dan *Ketiga*, munculnya perpaduan baru antara ekonomi dan sosiologi. *Bagaimana hasil akhir dari situasi ini ?* merupakan sesuatu yang masih sulit diramalkan. Namun yang jelas adalah, telah mulai terjadi suatu perubahan, kata Swedberg (1992), perubahan tersebut adalah tidak mungkin ekonomi mengambil alih sosiologi, atau juga tidak sebaliknya sosiologi mencaplok ekonomi. Dengan demikian, perspektif memisahkan aspek sosial dari aspek ekonomi apalagi mendikotomikan antara keduanya, merupakan perspektif yang kurang tepat dalam menganalisis fenomena ekonomi dalam tindakan sosial masyarakat. Biarkan saja secara konseptual irisan-irisan itu (sosial dan ekonomi) saling menyentuh, saling menyatu, saling melengkapi bahkan berkelindan diantaranya.

Pada beberapa dekade belakangan ini, perkembangan studi Sosiologi Ekonomi semakin tumbuh dan berkembang sejalan dengan fenomena ekonomi yang tentunya tidak terlepas dari cakupan aspek sosiologis yang melingkupinya. Pada sisi lain, persoalan ekonomi setiap waktu semakin kompleks dan merambah segi kehidupan non ekonomi. Demikian pula dengan kecenderungan sosiolog yang memperluas fokus analisisnya pada bidang yang menjadi tradisi kajian ekonomi.

Menurut Smelser dan Swedberg (1994) sosiologi ekonomi memfokuskan perhatian tentang fenomena ekonomi, terutama terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa sumber daya yang terbatas. Perspektif itu meliputi interaksi personal, kelompok (*group*), struktur sosial, kelembagaan, dan kontrol sosial termasuk sanksi, norma dan nilai. Dalam perkembangan selanjutnya, kontribusi sub disiplin Sosiologi Ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan pembangunan. Maka dengan itu, sangat menarik pandangan Prof. Kishore Mahbubani, intelektual Lee-Kuan Yew School of Public Policy Singapura, yang sangat disegani kalangan intelektual AS ataupun Eropa karena pandangannya tentang ekonomi Asia. Menurut Mahbubani, negara di Asia menempatkan ekonomi pasar dengan pragmatis dalam apa yang disebut *march to modernity*. Ia mengatakan, Asia akan menjadi “pusat peradaban dan pembangunan”, yang kini masih di Barat. Konteks itu ia contokan dengan negara-negara, seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, India, Malaysia, Thailand, Singapura yang sukses mekanisme pasarnya tanpa harus meninggalkan nilai agama, nilai tradisional sebagai kearifan lokal, serta memiliki peran dan demokrasi politik yang unik dan bervariasi. Disitulah peranan Sosiologi Ekonomi beroperasi (Damanhuri, 2021).

Peletak Dasar Teori dan Perkembangan Sosiologi Ekonomi

Beberapa tokoh yang telah berjasa dalam meletakkan pondasi sosiologi ekonomi menjadi *grand theory*, seperti Marx, Durkheim, Weber dan Simmel, sehingga menjadi rujukan oleh penerus pada tataran *middle range theory*, bahkan mampu melahirkan pemikiran teoritis di level mikro. Berikut ini akan dikemukakan beberapa catatan ringkas, mengenai perkembangan teori Sosiologi Ekonomi yang dominan mempengaruhi studi-studi sampai era kini. Mengingat sedemikian banyaknya teori yang berkembang saat ini, maka pada tulisan berikut, akan disarikan beberapa teori penting yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar, bagi perkembangan terkini (*state of the art*) studi-studi sosiologi ekonomi di Indonesia.

Karl Marx (1818 - 1883).

Karya awal Marx tentang *the economic and philosophical Manuscripts of 1844* ([1844] 1964) menarik banyak perhatian para ahli ilmu-ilmu sosial, terhadap karyanya yang berjudul, *the Power of Money in Bourgeois Society* dan *Estranged Labor*. Judul yang disebut pertama Marx mengembangkan idenya tentang nasib hubungan-hubungan sosial, ketika segala sesuatu menjadi komoditas yaitu dapat dijual dan dibeli. Sedangkan yang disebut terakhir Marx membahas tentang tenaga kerja khususnya, menekankan distorsi dari proses kerja ketika tenaga kerja menjadi suatu komoditas. Marx mendiskusikan keterasingan yang dialami oleh para pekerja dalam masyarakat yang didominasi oleh hak milik pribadi. Keterasingan dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi di mana manusia didominasi oleh kekuatan yang mana dia ciptakan sendiri, yang menghadirkannya sebagai sesuatu kekuasaan yang asing bagi dirinya. Singkatnya, manusia terasing dari obyek yang dia hasilkan, dari proses-proses produksi dari dirinya sendiri, dan dari komunitasnya.

Dalam *The Communist Manifesto* ([1848] 1978) Marx mengembangkan hal yang mendasar tentang pandangan dunianya secara keseluruhan yaitu bahwa sejarah digerakkan oleh perjuangan kelas, bahwa hanya terdapat dua kelas dalam masyarakat kapitalis yaitu kelas proletar dan kelas borjuis, dan kelas yang disebut pertama akan menjadi pelayan utama bagi masyarakat tanpa kelas yang dihasilkan melalui revolusi sosial.

Dalam *A Contribution to The Critique of Political Economy* ([1859] 1970 : 20-21) Marx menjelaskan bahwa ekonomi merupakan fondasi dari masyarakat dan di atas fondasi ini dibangun super struktur politik dan hukum. Fondasi struktural dari masyarakat, sering juga disebut dengan infrastruktur, merupakan keseluruhan dari kekuatan-kekuatan produksi (mesin, tenaga kerja, pengetahuan teknis) dan kekuatan-kekuatan sosial (hak milik, otoritas dan hubungan kelas). Pada stadia tertentu dari perkembangan, kekuatan-kekuatan produksi menjadi kontradiksi dengan hubungan-hubungan produksi, dan hasilnya adalah krisis yang berakhir dengan suatu revolusi sosial. Sedangkan dalam *Capital* ([1867] 1906 : 13) Marx menegaskan bahwa komoditas diciptakan melalui tenaga kerja; kemudian komoditas tersebut ditukarkan demi memperoleh uang; selanjutnya uang diubah menjadi modal; dan modal menciptakan penindasan dan pertentangan kelas.

Max Weber (1864-1920).

Dari sekian banyak sumbangan Weber terhadap pengembangan sosiologi ekonomi, ada beberapa tulisannya yang penting, salah satunya adalah *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Dalam tulisan tersebut, Weber menyatakan bahwa ketelitian khususnya perhitungan dan kerja keras dari "Bisnis Barat" didorong oleh perkembangan etika protestan yang muncul pada abad keenambelas, dan digerakkan oleh doktrin Calvinisme, yaitu doktrin tentang takdir. Pemahaman tentang takdir menuntut adanya kepercayaan bahwa, Tuhan telah memutuskan tentang keselamatan dan kecelakaan. Selain itu, doktrin tersebut menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengetahui apakah dia termasuk salah seorang yang terpilih. Dalam kondisi seperti ini, menurut Weber, pemeluk Calvinisme mengalami "panik terhadap keselamatan". Cara untuk menenangkan kepanikan tersebut adalah orang harus berpikir bahwa, seseorang tidak akan berhasil tanpa diberkahi Tuhan. Oleh karena itu, keberhasilan adalah tanda dari keterpilihan. Untuk mencapai keberhasilan seseorang harus melakukan aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi, yang dilandasi oleh disiplin dan bersahaja, yang didorong oleh ajaran keagamaan. Menurut Weber etika kerja dari Calvinisme yang berkombinasi dengan semangat kapitalisme, membawa masyarakat Barat kepada perkembangan masyarakat kapitalis modern. Jadi, doktrin Calvinisme tentang takdir memberikan daya dorong psikologis bagi rasionalisasi.

Dalam *Economy and Society* ([1922] 1978), Weber telah menetapkan garis pemisah antara ekonomi dan sosiologi ekonomi, dengan mengajukan 3 unsur, yaitu : tindakan ekonomi adalah sosial; tindakan ekonomi selalu melibatkan makna; tindakan ekonomi selalu memperhatikan kekuasaan. Di samping itu Weber juga telah berjasa dalam meletakkan landasan metodologis bagi sosiologi ekonomi. Dia telah mengajukan tipe ideal untuk menganalisis fenomena sosial, dan telah memberikan contoh dalam pemakaiannya, seperti tipe ideal dari birokrasi, patrimonial, dan seterusnya. Selain itu, ia juga mengajukan metode *verstehen* (pemahaman interpretatif) dalam menganalisis terhadap fenomena sosial.

Emile Durkheim (1858-1917).

Studinya tentang *The Division of Labor in Society* ([1893] 1984), memberikan sumbangan tersendiri kepada perkembangan pemikiran sosiologi ekonomi. Jika para ekonom memandang pembagian kerja sebagai suatu cara untuk menciptakan kesejahteraan, dan lebih jauh lagi efisiensi. Bagi Durkheim, pembagian kerja mempunyai fungsi yang lebih luas. Pembagian kerja merupakan sarana utama bagi penciptaan kohesi dan solidaritas dalam masyarakat modern. Tingginya tingkat pembagian kerja dan peranan yang berbeda antar setiap orang, menyebabkan orang menggantikan basis ikatan (penyatuan) atas dasar kesamaan (solidaritas mekanis) dengan dasar ketidaksamaan (solidaritas organis). Mereka tergantung satu sama lain, karena mereka memiliki tugas yang berbeda, dan oleh sebab itu mereka saling membutuhkan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Dalam masyarakat modern, hak dan kewajiban berkembang dan saling terkait yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Hak dan kewajiban inilah, bukan pertukaran atau juga bukan struktur pasar, yang mengikat masyarakat. Dalam masyarakat modern, saling ketergantungan direfleksikan pada moralitas dan mentalitas kemanusiaan, dalam realitas solidaritas organis itu sendiri. Masyarakat yang berlandaskan solidaritas organis, menjunjung tinggi nilai-nilai kesamaan, kebebasan, dan hukum. Kontrak dalam masyarakat seperti ini menjadi lebih penting.

Pada saat yang sama, Durkheim memperkenalkan situasi yang terjadi apabila integrasi dari diferensiasi tidak berjalan sempurna. Dengan mengambil analogi biologis, Durkheim menjelaskan bahwa akan terjadi *anomie* (keadaan yang kacau, tanpa peraturan) apabila terjadi kegagalan dalam pengaturan organ, yang membentuk batang tubuh dari suatu masyarakat. Dalam masyarakat industrial modern, pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat yang tidak diikuti oleh hukum, dan pengaturan yang tepat untuk menjaga kedamaian, akan menghasilkan *anomie* ekonomi yang berakibatkan penderitaan pada manusia dan masyarakat.

Joseph Schumpeter (1883-1950).

Meskipun sebagai seorang ekonom, Schumpeter tertarik dengan sosiologi ekonomi. Dibandingkan dengan ekonom lain, yang mencoba memasuki bidang sosiologi ekonomi, Schumpeter lebih berhasil dan perspektifnya lebih dekat kepada tradisi sosiologi. Bagi

Schumpeter, dengan mengikuti istilah Weber, *sozialoekonomik* adalah merupakan multi disiplin dari ilmu ekonomi yang terdiri dari beberapa lapangan penyelidikan : 1) teori ekonom, 2) sejarah ekonomi (termasuk antropologi ekonomi), 3) sosiologi ekonomi, dan 4) statistik ekonomi.

Schumpeter juga telah mencoba meletakkan dasar pembagian kerja antara sosiologi ekonomi dan ekonomi. Menurut Schumpeter, dengan sosiologi ekonomi (*wirtschaftssoziologie*) kita menggunakan deskripsi dan interpretasi (deskripsi interpretatif) tentang institusi-institusi yang relevan secara ekonomi, termasuk kebiasaan dan semua bentuk perilaku umumnya, seperti pemerintahan, hak milik, perusahaan swasta, perilaku rasional atau tradisional. Sedangkan dengan ekonomi, kita menggunakan deskripsi interpretatif tentang mekanisme ekonomi yang bekerja dalam keadaan institusi tersebut telah ada ([1949] 1989). Dalam pengantar dari bukunya tentang *History of Economic Analysis* (1954), dia menegaskan lagi bahwa analisis ekonomi adalah untuk mempelajari bagaimana orang bertingkah laku pada suatu waktu tertentu, dan apa pengaruh dari tingkah laku mereka tersebut. Sementara sosiologi ekonomi bertugas untuk mempelajari mengapa mereka melakukan tingkah laku tersebut dalam konteks institusional yang lebih luas, di mana aktivitas ekonomi dilakukan. Dengan demikian, bagi Schumpeter sosiologi ekonomi berhubungan dengan konteks institusional dari ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi berhubungan dengan ekonomi itu sendiri.

Schumpeter juga telah meramaikan diskusi sosiologi ekonomi tentang kapitalisme. Dalam bukunya *Capitalism, Socialism and Democracy* ([1942] 1975), dia memberikan pernyataan yang sangat provokatif “dapatkah kapitalisme bertahan? Tidak, saya tidak berpikir bahwa kapitalisme dapat bertahan”. Untuk mendukung pernyataannya tersebut, dia memberikan banyak alasan, seperti tidak munculnya kewiraswastaan individu, kapitalisme tidak berdaya terhadap musuhya sendiri, dan seterusnya. Oleh karena itu, menurut Schumpeter, kapitalisme sedang mengalami keruntuhan secara perlahan dan digantikan oleh sosialisme. Dengan keruntuhan negara-negara sosialisme di Eropa Timur maka tesis Schumpeter ini ikut runtuh pula atau tertunda pembuktiannya..!

Karl Polanyi (1886 – 1964).

Karl Polanyi mengembangkan suatu pemikiran tentang ekonomi yang lebih luas daripada yang ditawarkan oleh tradisi ekonomi politik. Ada dua tema sentral yang diajukan oleh Polanyi dalam tulisan-tulisannya : kelahiran dan perkembangan lebih lanjut suatu masyarakat yang didominasi oleh pasar di abad kesembilanbelas dan abad kedua puluh, dan hubungan antara ekonomi dan masyarakat pada masyarakat primitif. Dalam bukunya yang pertama dan paling terkenal *The great Transformation* ([1944] 1957), ia menjelaskan tentang evolusi historis mentalis pasar. Polanyi mencatat munculnya ide dari “pasar yang mengatur dirinya sendiri” (*self regulating market*) pada tahun 1834, ketika pembaharuan hukum bagi orang miskin diperkenalkan di Inggris dan pasar tenaga kerja bebas secara total diciptakan untuk pertama kali. Alasan diperkenalkan hukum ini adalah suatu usaha untuk menghapuskan konsekuensi dari *The Speenhamland Act of 1795*, yang mencegah mobilitas tenaga kerja yang didukung oleh orang-orang miskin pedesaan, sehingga melemahkan motivasi mereka untuk mencari pekerjaan di mana saja.

Tesis sentral Polanyi dalam bukunya, adalah pasar yang mengatur dirinya sendiri, dan merupakan mekanisme institusional yang utama dari regulasi ekonomi dalam masyarakat kapitalis, tetapi pasar yang demikian tidak akan ada tanpa menghilangkan hakikat kemanusiaan dan kealamiahannya dari masyarakat ([1944] 1957 : 33). Secara fisik akan merusak kemanusiaan dan mengubah lingkungan menjadi gurun. Ekonomi terstruktur atas dasar pasar yang mengatur dirinya sendiri, dan secara radikal melepaskan dirinya sendiri dari institusi sosial lainnya, serta menghambat institusi sosial lainnya untuk berfungsi menurut hukumnya. Dalam pada itu, tanah dan tenaga kerja ditransformasikan ke dalam komoditas rekaan.

Pembahasan tentang hubungan antara masyarakat dan ekonomi dalam masyarakat primitif, dimuat dalam buku *Trade and Market in the Early Empires* ([1957] 1971) yang diedit bersama Arensberg dan Pearson. Dalam esainya yang berjudul *The Economy as an Instituted Process*, Polanyi mengajukan gagasannya yang terkenal *embeddedness* (untuk seterusnya diterjemahkan sebagai “keterlekatan”) “ekonomi manusia ... terlekat dan terjaring dalam institusi-institusi, ekonomi dan non ekonomi. Memasukkan institusi non-ekonomi ke dalam ekonomi manusia adalah penting. Agama dan pemerintahan mungkin

menjadi penting terhadap struktur dan berfungsinya ekonomi sebagai institusi moneter” (Polanyi, Arensberg, dan Pearson [1957] 1971 : 250). Selain itu Polanyi dan koleganya juga membedakan antara makna formal dan substantive dari ekonomi. Yang disebut pertama, dipakai oleh ekonom, mendefinisikan ekonomi dalam arti tindakan rasional, yang disebut kedua, ekonomi adalah sesuatu yang tampak secara institutional dan berpusat disekitar gagasan tentang pencapaian nafkah kehidupan.

Talcott Parsons (1902 – 1979)

Di antara sosiologi modern yang memberikan sumbangan berarti bagi perkembangan sosiologi ekonomi adalah Talcott Parson. Karya Parsons yang pertama, merupakan dasar bagi pengembangan pemikiran ia berikutnya (*The Structure of Social Action* ([1937] 1968). Buku ini mencoba mensintesis beberapa pemikiran dari Pareto, Marshal, dan Weber. Sumbangan Parsons yang paling penting pada sosiologi ekonomi adalah penterjemahan karya Weber ke dalam Bahasa Inggris *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Juga penterjemahan beberapa bab karya Weber tentang *Economy and Society*. Serta karya Parsons bersama Smelser tentang *Economy and Society* (1956). Dalam buku tersebut, Parsons dan Smelser tidak mengembangkan suatu filosofi sejarah seperti karya Marx, juga tidak melakukan studi perbandingan budaya dan institusi seperti dibuat Weber, dan juga tidak berusaha membuat teori khusus tentang dinamika dan kontradiksi kapitalis seperti dilakukan Schumpeter dan Polanyi. Mereka mengembangkan suatu teori sistem yang bersifat abstrak dalam analisis.

Menurut Parsons dan Smelser, ekonomi merupakan salah satu dari beberapa sub sistem masyarakat (atau juga sering disebut *system social*), konteks itu sering disingkat dengan isitilah AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration, Latensi* atau *patterns of maintenance*) : (a) Adaptasi (A). Tujuan-tujuan yang melembaga dan sah misalnya, produktivitas ekonomi, peperangan tidak direalisasikan secara otomatis dan masyarakat harus mengeluarkan sejumlah energi untuk mencapainya, cadangan dari sarana-sarana masyarakat. Fungsi adaptasi terstruktur dalam ekonomi. (b) Pencapaian tujuan (G). Fungsi ini merujuk kepada cara di mana masyarakat menciptakan tujuan khusus yang dilegitimasi oleh nilai-nilai yang dominan dan menggerakkan penduduk untuk mencapai tujuan tersebut. Sub sistem ini diidentifikasi sebagai *society's polity* (politik

masyarakat), yang dibentuk sebagian besar tetapi tidak secara eksklusif oleh lembaga pemerintahan. (c) Integrasi (I). Agar tidak terjadi pertentangan di antara individu-individu, kelompok-kelompok atau subsistem yang ada, diperlukan integrasi sehingga terjadi keseimbangan dalam system secara keseluruhan. Fungsi integrasi ini dipenuhi oleh sistem hukum. (d) Pola pemeliharaan laten dan sistem manajemen (L). Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem nilai dan kepercayaan, yang beroperasi sebagai rancangan yang melegitimasi dan berkelanjutan bagi institusi utama, dan sebagai pola motivasional yang terstruktur bagi anggota-anggotanya. Bagian dari energi yang melembaga dari masyarakat bergerak kearah pemeliharaan konsistensi dan integritas, dari nilai-nilai yang ada dan memberikan jalan keluar bagi ketegangan yang muncul dalam hubungan keselarasannya di antara mereka. Institusi khusus yang berfungsi sebagai pemeliharaan laten adalah agama, ilmu pengetahuan, keluarga dan pendidikan.

Neil J. Smelser (1930 - 2017)

Sumbangan lain yang diberikan oleh Smelser terhadap perkembangan sosiologi ekonomi adalah karya tentang *The Sociology of Economic Life* (1963) dan buku yang diedit bersama Martinelli *Economic and Society : Overview in Economic Sociology* (1990). Dikatakan dalam buku tersebut bahwa, keuntungan dari pendekatan multi-segi terhadap sosiologi kehidupan ekonomi ini, adalah bahwa kita dapat menentukan kelemahan-kelemahan lapangan itu disamping kekuatan-kekuatannya. Telah ditemukan bukan saja apa yang telah diketahui, tetapi juga apa-apa yang tidak diketahui. Terus menerus berusaha untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gaps*) dan ketidakpastian dalam pengetahuan. Oleh karena itu, lapangan sosiologi ekonomi akan memegang peranan unik yang membantu pengembangan kedua lapangan yang dicakupnya.

James S Coleman (1926 - 1995)

Teori pilihan rasional, berada dalam tataran *middle range theory* yang berlandaskan kepada teori umum (*grand theory*), yakni tindakan rasional yang digagas oleh Max Weber. Berlandaskan *grand theory* dari Weber mengenai rasionalitas atau lebih spesifiknya adalah tindakan rasional, serta perspektif pilihan rasional pada tataran *middle range theory* seperti yang dikemukakan oleh Coleman, Implikasi dari itu, maka berkembanglah studi-studi yang mengkaji capital sosial secara khusus, dan representasi capital secara umum,

dari sudut pandang sosiologi ekonomi. Konteks itu dikaitkan dengan pengambilan keputusan dan transaksi sosial ekonomi. Oleh karenanya, dalam tindakan rasional ada beberapa kata kunci yang harus dikaitkan satu dengan lainnya, yakni; aktor (yang diasumsikan rasional); pilihan dari beragam sumber yang tersedia; penguasaan atas sumber-sumber itu oleh si aktor; serta kepentingan pribadi.

Granovetter (1943)

Granovetter mengetengahkan gagasan mengenai pengaruh struktur sosial terutama yang dibentuk berdasarkan jaringan sosial (*network*), terhadap manfaat ekonomi, khususnya yang menyangkut kualitas informasi. Granovetter lebih lanjut menjelaskan mengenai empat prinsip utama, yang melandasi pemikiran mengenai adanya hubungan pengaruh antar jaringan sosial (*network*) dengan manfaat ekonomi, yakni : (1) Norma dan densitas *network*; (2) *The Strength of Weak Ties*, yakni manfaat ekonomi yang ternyata cenderung didapat dari jalinan ikatan yang lemah. Untuk hal ini, ia menjelaskan bahwa pada tataran empiris, informasi baru misalnya, akan cenderung didapat dari kenalan baru dibandingkan dengan teman dekat, yang umumnya memiliki wawasan yang hampir sama dengan individu, dan kenalan baru relatif membuka cakrawala dunia luar individu; (3) *The Importance of Structural Holes*, yakni adanya peran lubang structural diluar ikatan lemah maupun ikatan kuat, yang ternyata berkontribusi untuk menjembatani relasi individu dengan pihak luar (*outsider*); (4) *The Interpenetration of Economic and Non Economic Action*, yaitu adanya kegiatan-kegiatan non ekonomis, yang dilakukan dalam kehidupan sosial individu, yang ternyata mempengaruhi tindakan ekonominya. Dalam hal ini Granovetter menyebutnya sebagai ketertambahan tindakan non ekonomi dalam kegiatan ekonomi sebagai akibat adanya jaringan sosial.

Teori New Institutionalism (Victor Nee, 2005)

Secara ringkas pemikiran Nee (2005) mengenai *new institutionalism*, diawali dengan gagasannya untuk menjelaskan bagaimana institusi berinteraksi dengan jaringan sosial (*social network*) dan norma-norma sosial dalam mengarahkan tindakan-tindakan ekonomi. Ia memulainya dengan menjelaskan pendekatan yang dikemukakan oleh Granovetter dalam memandang jaringan sosial yang menyatakan bahwa, aktor ekonomi bukan atom (lepas dari konteks masyarakat), bukan pula sepenuhnya patuh pada aturan

sosial; tingkah laku aktor melekat pada realitas relasi sosial (*concrete, on going social relation*); hubungan sosial bukan institusi; institusi makro melahirkan *trust* dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, pandangan *new institutionalism* mengemukakan bahwa Granovetter hanya menjelaskan *proximate causes* (penyebab terdekat) tanpa menjelaskan *large/macro causes*. Menurut Nee, Granovetter tidak menjelaskan mengapa aktor *decouple* (terpisah/terlepas) dari hubungan sosial untuk mengejar kepentingan ekonomi...? Berlandaskan kritik terhadap pendekatan *new institutionalism economic* dan mencermati pandangan Granovetter, Nee mengemukakan model *Institutional Economic* baru dari perspektif sosiologi ekonomi. Model ini memandang mekanisme institusional memiliki penyebab yang lebih dalam karena sangat menentukan insentif. Dalam pandangan *New Institutionalism* (perspektif sosiologi ekonomi), norma-norma yang ada akan berinteraksi dengan *formal rules* dalam merealisasikan kepentingan individu. Pada intinya Nee (2005) mengemukakan adanya mekanisme integrasi hubungan formal dan informal pada setiap level *causal*, yakni pada tataran mikro (individu), meso (kelompok ataupun organisasi), dan tataran makro berupa lingkungan kebijakan (*policy environment*), termasuk ketentuan dalam pengembangan sistem dan usaha, semisal konteks agribisnis yang harus terbangun dalam pendekatan integratif.

Sistematika Buku Ini

Mengawali tulisan sebelumnya dengan penggambaran mengenai daerah perbatasan maupun *intercept* bidang kajian antara sosiologi dan ekonomi, serta intisari teori yang diargumenkan oleh beberapa tokoh pemikir Sosiologi Ekonomi, merupakan narasi kecil sumbangsi pemikiran dari editor. Konteks ini dimaksudkan untuk mengajak para pembaca yang budiman, dalam merefleksi dan mendiskusikan secara dialektis, terhadap untaian-untaian pemikiran dari hasil penelitian, mengenai komunitas nelayan dengan pendekatan sosiologi ekonomi, yang dituliskan oleh para peneliti dari chapter ke chapter di dalam keseluruhan buku ini. Rangkaian dari tulisan (hasil penelitian) oleh para peneliti, maka buku chapter ini telah tersusun dalam 15 chapter. Dalam membaca keseluruhan isi dari buku chapter ini, kita akan dipedomani oleh tiga jenis pertanyaan: *Pertama*, apa yang perlu kita ketahui di bidang sosiologi ekonomi jika dikorelasikan dengan tindakan ekonomi dalam realitas sosial, khususnya resiprositas, redistribusi dan

pertukaran pasar pada komunitas nelayan ?; *Kedua*, apa sebenarnya yang telah kita ketahui sebagai hasil penelitian yang dituliskan oleh para peneliti terkait dengan sosiologi ekonomi pada komunitas nelayan ? dan *Ketiga*, apakah penemuan-penemuan sosiologi ekonomi pada komunitas nelayan memiliki hubungan yang sejati dengan apa yang perlu kita ketahui dalam bidang ini? Apakah yang terutama “tidak diketahui” dalam teori dan penelitian empirik..?

Pemaparan dari keseluruhan chapter, para penulis (peneliti) telah berusaha memperluas dan menajamkan tafsir-tafsir pemikirannya, dan mengembangkan tema-tema yang dianggap penting bahkan esensial, untuk bertahannya sosiologi ekonomi sebagai disiplin ilmu dan mode penelitian.

Sistematika buku ini, setelah Chapter 1 mengenai Pengantar Sosiologi Ekonomi dari editor. Chapter berikutnya (Chapter 2) mendeskripsikan moral ekonomi yang mengulas etika subsistensi dan norma resiprositas yang berlaku pada komunitas nelayan. Chapter 3, membahas unsur-unsur *cultural* yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi (produksi). Chapter 4, mengenai jaringan sosial yang melibatkan banyak orang (anggota) dalam komunitas nelayan, dan berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran norma, mempermudah penyebaran informasi dan meningkatkan solidaritas sosial. Chapter 5, mengulas mengenai modal sosial komunitas nelayan dalam bangunan norma yang melandasi tindakan aktor, membentuk kepercayaan dan jejaring yang efektif dalam pencapaian tujuan ekonomi, baik individu maupun kelompok. Chapter 6, deksrispsi tindakan ekonomi komunitas nelayan, dalam aktivitas kelembagaan informal yang dilandaskan kepada nilai-nilai kepercayaan (*trust*). Chapter 7, analisis usaha kegiatan ekonomi nelayan. Chapter 8, gambaran pola distribusi kegiatan ekonomi nelayan melalui *sharing produksi* dengan mekanisme sistem bagi hasil yang dilandasi oleh aturan-aturan lokal. Chapter 9, penggambaran gaya hidup dan konsumsi dari kelompok nelayan dengan status tertentu sebagai ciri dari kelompok status. Chapter 10, mengulas bagaimana identitas gender pada komunitas nelayan dikonstruksi secara sosial. Aspek gender sangat penting dewasa ini terkait dengan semakin kuatnya gerakan feminisme untuk melawan aktivitas ekonomi yang sering mengabaikan peran dan kontribusi perempuan. Chapter 11, mengulas mengenai kemiskinan pada komunitas nelayan, sebagai masalah multidimensi

karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik, sosial budaya, dan partisipasi dalam masyarakat. Chapter 12, mengulas bagaimana kemampuan adaptasi nelayan dalam menghadapi krisis, termasuk *household strategy*. Chapter 13, mendeskripsikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik nelayan dan menjelaskan peranannya dalam upaya penyelesaian konflik, sebagai realitas sosial dalam perebutan sumberdaya. Dua Chapter selanjutnya (Chapter 14 dan 15) mengulas mengenai persepsi dan perilaku nelayan terhadap sumberdaya perairan serta ulasan mengestimasi nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam (ekosistem pesisir) dan lingkungan yang memungkinkan para *stakeholder* untuk dapat menentukan penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan yang efektif dan efisien serta berkelanjutan. Chapter 16 sebagai chapter penutup, mendeskripsikan bagaimana konteks pemberdayaan diinisiasi melalui peningkatan asset dan kemampuan nelayan untuk terlibat, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol dan mendorong akuntabilitas pada kelembagaan yang mempengaruhi kehidupannya.

Buku chapter ini “tumbuh” selama rentang waktu yang panjang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti (penulis chapter) di wilayah pesisir dan pulau kecil, yang memiliki kepentingan akademis dalam mengembangkan perspektif sosiologi terhadap fenomena ekonomi (Sosiologi Ekonomi) yang dipakai sebagai pendekatan teori oleh para peneliti (penulis chapter) terhadap fenomena komunitas nelayan.

Selanjutnya, dengan mengkaji kasus yang ada di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Papua), maka Buku Chapter ini juga menyumbang dan memperkaya karya-karya ilmiah mengenai komunitas nelayan dengan karakteristik-karakteristik spesifik yang ada di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia.

Dengan demikian, Tentu saja Buku Chapter ini, tidak menyimpang sebuah kesempurnaan yang sesungguhnya tentang hakikat sebuah karya akademis, namun, gagasan-gagasan serta hasil-hasil penelitian yang telah dituliskan oleh para peneliti, dapat memberi manfaat bagi kalangan mahasiswa, akademisi, praktisi sosial, advocator rakyat, dan para penentu kebijakan pembangunan sosial ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa kami sampaikan kepada para peneliti (penulis chapter) atas sumbangsi pemikiran akademiknya, yang telah berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya persepektif Sosiologi Ekonomi pada komunitas nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kepada penerbit Deepublish, ucapan terima kasih kami juga sampaikan sebesar-besarnya atas kerjasama yang terbangun selama ini, sehingga Buku Chapter “Nelayan Suatu Tinjauan Sosiologi Ekonomi” dapat terbit. Akhirnya, segala puji bagi Allah Swt, Tuhan yang Maha Kuasa kami ucapkan terima kasih, semoga semuanya bernilai ibadah untuk kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, Didin, S. (2021). Opini. *Ekonomi Berbasis Pengetahuan*. Republika, Jakarta Kamis 12 Agustus 2021.
- Durkheim, Emile. [1893] 1984. *The Division of Labor in Society*. New York: The Free Press.
- Granovetter, Mark. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology* 91: 481 – 510.
- Granovetter, Mark and Richard Swedberg (eds), (1992). *The Sociology of Economic Life*. Boulder: Westview Press.
- Lin, N. (2000). Inequality in Social Capital. *Contemporary Sociology*. Washington : Nov 2000. Vol. 29.
- Martinelli, Alberto and Neil Smelser. (1990). *Economy and Society: Overviews in Economic Sociology*. London: Sage.
- Marx, Karl. [1848] 1978. *Manifesto of the Communist Party in The Marx Engels Reader*, diedit R. C. Tucker. New York: W. W. Norton & Company.
- _____. [1859] 1970. *A Contribution to the Critique of Political Economy*, New York: International Publishers.
- _____. [1867] 1906. *Capital: A Critique of Political Economy*. New York: the Modern Library.
- Mitchell, J.C. (1969). *The Concept and Use of Social Network* dalam J.C. Mitchell (ed) *Social Networks in Urban Situations*. Manchester: Manchester University Press.

- Parsons, Talcott. [1937] 1968. *The Structure of Social Action. A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*. 2 Vols. New York: Free Press.
- Parsons, T and Neil Smelser, (1956). *Economy and Society: A Study in the Intergration of Economy and Social Theory*. Glencoe, IL: The Free Press.
- Polanyi, Karl. [1944] 1957. *The Great Transformation*. Boston: Beacon Press.
- _____. (1971). *Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi*. Dedit oleh George Dalto. Boston: Beacon.
- Schumpeter, Joseph. [1942] 1975. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper & Row.
- _____. [1949] 1989. *Essay on Entrepreneurs, Innovations, Business Cycles, and the Evolution of Capitalism*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- _____. (1954). *History of Economic Analysis*. London: Allen & Unwin.
- Smelser, Neil, J. (1963). *The Sociology of Economic Life*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- _____. (1990). *Sosiologi Ekonomi*. Bandung, Jawa Barat: Penerbit Wira Sari, Cetakan Kedua (Edisi Bahasa Indonesia).
- Swedberg, Richard. (1990). *Economic and Sociology. Redefining Their Boundaries: Conversations with Economists and Sociologists*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Weber, Max. [1922] 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*. 2 Vol. Berkeley: University of California Press.

Chapter 2

MORAL EKONOMI NELAYAN

STUDI HUBUNGAN ANTARA PONGGAWA DENGAN SAWI DALAM ETIKA SUBSISTESI KOMUNITAS NELAYAN DI DESA PAJUKUKANG KABUPATEN MAROS

Andi Adri Arief



Andi Adri Arief adalah Dosen pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Makassar. Meraih gelar *S1 Manajemen Sumberdaya Perairan di Universitas Hasanuddin (1997)*, *Magister Sains pada Program Manajemen Lingkungan di Universitas Hasanuddin (2002)* dan gelar *Doktor dalam bidang Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2007)*.

* Email : andi_adriunhas@yahoo.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberadaan pranata ekonomi nelayan, fakta empirik memperlihatkan bahwa kelembagaan-kelembagaan tersebut mampu menyelamatkan komunitas nelayan dari beragam bentuk resiko krisis dan ketidakpastian. Sistem ekonomi lokal nelayan dengan segala permasalahannya, tetap memiliki daya *survivalitas* hingga saat ini. Nampak bahwa, daya *survivalitas* tersebut berakar dari aspek struktural termasuk pranata (kelembagaan lokal) ekonomi nelayan. Menurut Mirajiani *at all*, (2014) oleh karena bekerjanya pranata ekonomi lokal akan mengkait dengan tindakan pemenuhan penghidupan rumah tangga nelayan, khususnya mengatasi *survivalitas* dari krisis.

Dengan demikian, pranata ekonomi akan terkait dengan struktur ekonomi dan struktur sosial yang terbentuk. Pengertian pranata dalam konteks ini, memaknai dari teori Weber (1958) tentang struktur sosial dan institusi sosial. Menurut Weber, struktur sosial akan tampil berupa kemantapan hubungan antar individu dalam konfigurasi hubungan sosial atau konfigurasi jejaring sosial yang kompleks, saling mempertukarkan sesuatu yang dianggap bernilai dan memiliki ekspektasi bersama (*shared expectation*) secara mantap dalam sistem sosial. Kemudian, pranata sosial akan berkembang dari kebiasaan bersama hingga kelakuan normatif yang dikukuhkan dengan aturan-aturan termasuk sistem *reward* dan *sanction* yang dipelihara oleh sistem norma dan hukum dalam masyarakat. Artinya,

dalam skala mikro, setiap perilaku masyarakat akan tertuntun oleh pranata yang menjadi aturan main dalam sistem sosial masyarakat. Kaitan dengan penelitian ini, konsep pranata ekonomi yang menjadi kajian adalah bagian dari pranata sosial yang berfungsi mengatur tata hubungan sosial dan ekonomi (*rules of the game*) antara satu individu dengan individu lainnya yang tergabung dalam satu kelompok kerja (*working group*).

Dalam masyarakat desa pantai¹ di Sulawesi Selatan, terdapat sejenis kelompok sosial yang warganya terdiri dari para nelayan. Dalam bahasa daerah setempat (Bugis, Makassar dan Mandar), pemimpin kelompok ini disebut, "*pongawa*". Sedang warga lainnya yang merupakan pengikut dalam kelompok, disebut, "*sawi*". Kelompok ini dikenal dengan nama, "*kelompok sosial pongawa-sawi*". Menurut Peter M Blau dan Joan W Moore (1972) bahwa, setiap kelompok sosial yang ada di masyarakat, mewujudkan suatu jaringan hubungan sosial yang rumit (kompleks). Berdasar dari itu, maka kelompok "*pongawa-sawi*" sebagai suatu kelompok sosial, juga diasumsikan mempunyai hubungan jaringan sosial ekonomi yang kompleks. Jaringan sosial ekonomi yang kompleks inilah, menarik perhatian untuk dipelajari dan diteliti dalam perspektif moral ekonomi pada kelompok kerja nelayan yang rawan subsistensi. Khususnya pola hubungan antara *pongawa* sebagai pemimpin dengan para *sawi* sebagai pengikutnya.

Konteks moral ekonomi dalam kajian sosiologi, disebutkan sebagai suatu analisa tentang apa yang menyebabkan seseorang berperilaku, bertindak, beraktifitas dalam kegiatan perekonomian, dan nampak sebagai gejala sosial yang berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat. Menurut James C. Scott (1976) bahwa moral ekonomi petani di dasarkan atas norma subsistensi dan norma resiprositas. Di mana ketika seorang petani mengalami suatu keadaan yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya, maka petani akan menjual dan menggadaikan harta bendanya atau akan meminjam kepada relasinya. Kondisi ini dinyatakan sebagai norma subsistensi. Sedangkan resiprositas tergambar jika ada sebagian dari anggota masyarakat menghendaki adanya bantuan

¹ Dengan istilah masyarakat desa pantai, dimaksudkan adalah masyarakat desa yang sebagian atau seluruh warganya dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kehidupan laut. Khususnya mempunyai mata pencaharian di sektor pemanfaatan potensi sumber alam yang terdapat di laut. Misalnya bermatapencaharian di sub sektor penangkapan ikan di laut, budidaya ikan di tambak, pelayaran dan sebagainya. Biasanya, hal ini banyak bertalian dengan kedekatannya dengan laut atau adanya sisi fisik wilayah desa yang berbatasan dengan laut (Sallatang, 1976).

dari anggota masyarakat yang lain. Kondisi yang sama juga nampak dalam kehidupan nelayan di desa pantai.

Lebih jauh James C. Scott (1976) mengemukakan bagaimana “etika subsistensi” (etika untuk bertahan hidup dalam kondisi minimal) melandasi segala perilaku kaum tani dalam hubungan sosial mereka di pedesaan. Menurut Scott, wujud dari ekonomi moral dapat dilihat dalam konteks, yaitu; “desa” dan “ikatan patron-klien”. Kedua aspek ini merupakan “institusi kunci” yang berperan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan anggota komunitas. Adapun fungsi operasional desa adalah menjamin suatu ‘pendapatan minimum’, dan meratakan kesempatan serta menjamin resiko hidup warganya dengan jalan memaksimalkan keamanan dan meminimalkan kerentangan bagi warganya. Dalam fungsinya itu, desa menerapkan aturan dan prosedur bagi terciptanya sebuah kondisi di mana warga desa yang miskin (siapa mendapatkan apa) akan tetap memperoleh jaminan pemenuhan kebutuhan subsisten minimum dengan cara menciptakan mekanisme kedermawanan dan bantuan dari warga desa yang kaya (siapa memberi apa). Desa akan memberikan jaminan kebutuhan subsisten minimum kepada seluruh warga desa sejauh sumber-sumber kehidupan yang dimiliki desa memungkinkan untuk itu. Demikian halnya dengan masyarakat di desa pantai. Bagi komunitas nelayan (nelayan lokal), lautan merupakan *food security* (cadangan untuk kehidupan subsistensi) sehingga secara habis-habisan mereka akan mempertahankan kelestariannya dari segala perilaku yang mengancam keberlanjutan sumberdaya perikanan. Fenomena ini banyak dijumpai sebagai kasus pemicu konflik nelayan, dimana satu sisi ada kelompok nelayan berusaha menjaga sumberdaya perikanan untuk cadangan subsistensi, sementara disisi lain ada kelompok nelayan yang mengeksploitasi sumberdaya perikanan dengan cara-cara destruktif demi kepentingan ekonomi saja. Kedua orientasi yang berbeda ini lah, yang menimbulkan konflik nelayan secara horisontal (Arief, A. Adri *at all.* 2021)

Selanjutnya, institusi kedua yang menjadi pasangan desa, adalah ikatan patron-klien. Insituti ini tercipta dalam kondisi sosial ekonomi yang timpang, ada sebagian orang yang menguasai sumber-sumber kehidupan, sementara yang lainnya tidak. Ikatan patron-klien bersifat rangkap (*dyadic*), yang meliputi hubungan timbal-balik antara dua orang yang dijalin secara khusus (pribadi) atas dasar saling menguntungkan, serta saling

memberi dan menerima (Legg, 1983). Dalam ikatan ini pihak patron memiliki kewajiban untuk memberi perhatian kepada kliennya layaknya seorang bapak kepada anaknya. Dia juga harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan kliennya. Sebaliknya, pihak klien memiliki kewajiban untuk menunjukkan perhatian dan kesetiaan kepada patronnya layaknya seorang anak kepada bapaknya. Langgeng tidaknya sebuah ikatan patron-klien bergantung pada keselarasan antara patron dan kliennya dalam menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Fenomena patron-klien pada desa pantai di Sulawesi Selatan², teramati pada kelompok kerja (*working group*) *pongawa-sawi*³ yang memosisikan dirinya sebagai lembaga ekonomi dan sosial berdasarkan fungsi-fungsi dan peran yang dilakukan.

Dengan demikian, desa dan ikatan patron-klien diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Desa berperan dalam mengatur distribusi sumber-sumber kehidupan yang tersedia untuk menjamin subsistensi warganya, sementara ikatan patron-klien menjadi institusi yang mendistribusikan sumber-sumber kehidupan tersebut melalui praktik-praktik ekonomi dan pertukaran-pertukaran sosial di antara warga desa. Jaminan yang diberikan desa dan ikatan patron-klien tertuju pada pemenuhan kebutuhan subsisten warga desa.

Kaitan dengan hal tersebut, dalam mempelajari hubungan sosial pada kelompok kerja di desa pantai, maka dipilih satu kelompok kerja *pongawa-sawi* yang berskala kecil

² Kooreman, pegawai kolonial Belanda tahun 1883, mencatat bahwa "orang kecil hampir kehilangan perlindungan sama sekali terhadap keangkuhan dan kekejaman para *anakkaraeng*. Akibatnya, orang kecil terpaksa mencari perlindungan pada pihak yang melakukan kekejaman atau kejahatan tersebut, yaitu kaum bangsawan. Mereka ini memberikan perlindungan tersebut, namun dengan syarat, yaitu *anakkaraeng* menghendaki dari orang yang dilindunginya suatu ketaatan (kepatuhan) dari mana berkembang kemudian suatu hubungan yang bisa disebut sebagai hubungan kepengikutan (*volgelingsijn*)" (dikutip Ahimsa Putra, 1988: 14). Tujuh puluh lima tahun kemudian, Chabot (1984) masih menemukan fenomena tersebut dalam bentuk hubungan antara seorang *karaeng* (patron) dengan *ana-ana* (klien). Perlas (1981) juga mencatat hubungan serupa antara *ajjoareng* (patron) dan *joa* (klien) dalam hubungan kekuasaan/politik serta antara *punggawa* dan *sawi* dalam kehidupan ekonomi. Sallatang (1982) menemukan fenomena serupa pada masyarakat nelayan, antara *punggawa* dan *sawi*. Fenomena selanjutnya pada masyarakat nelayan banyak ditulis oleh Salman (2002); Agusanty (2004); Arief, A. Adri (2007) dan lain sebagainya.

³ Struktur berdasarkan produksi di desa pantai Sulawesi Selatan, dicirikan dalam bentuk kelompok-kelompok sosial (*social groups*), yang dominan ialah "kelompok nelayan" sebagai kelompok kerja. Pemimpin kelompok ini disebut "*pongawa*", sedang warga lainnya yang merupakan pengikut dalam kelompok, disebut "*sawi*". Eksistensi dari kelompok ini dikenal dengan sebutan kelompok "*Pongawa-Sawi*". Sebagai kelompok kerja, pada umumnya menamakan dirinya sesuai dengan nama alat yang dipergunakan seperti; kelompok *pa'gae*, *pa'rengge*, *pa'nambe*, *pa'taripang*, *pa'karamba*, *pa'lambere* dan sebagainya (Arief, A. Adri, 2021).

sebagai unit kasus di desa pantai (Desa Pajukukang) di Sulawesi Selatan. Pengertian berskala kecil, dimaksudkan bahwa jumlah warga/anggota kelompok tidak lebih dari sepuluh orang.

Tujuan

Studi ini bertujuan untuk memperoleh keterangan ilmiah terhadap, keterlekatan sosial dalam tindakan ekonomi para warga dalam kelompok kerja (*working group*) nelayan, yang termanifestasikan dalam entitas hubungan antara *pongawa* dengan *sawi* dalam dimensi moral ekonomi subsistensi komunitas lokal.

Metodologi

Kelompok sosial *pongawa-sawi* yang dipilih menjadi kasus pada penelitian ini, adalah sebuah kelompok *pongawa-sawi* yang terdapat di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Letaknya pada pantai barat agak keselatan dari provinsi Sulawesi Selatan, berjarak 9 km di sebelah utara ibukota kecamatan (Pajallangan), 12 km sebelah utara ibukota kabupaten (Maros), dan 42 km sebelah utara ibukota provinsi Sulawesi Selatan (Makassar). Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa desa ini sebagian besar atau seluruh warganya bermata pencaharian di sektor perikanan tangkap atau nelayan.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penentuan metode merujuk pada penjelasan bahwa *social researches often speak of case studies, which focus attention on one or few instances of some social phenomenon, such as a village, family, or a juvenile gang* (Babbie, 2004).

Rancangan dan pelaksanaannya (teknik pengumpulan data) bersifat responsif dan kreatif. Peneliti melakukan pengamatan terlibat aktif, mengintensifkan observasi dan wawancara sedalam mungkin (*in-depth*). Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data primer diperoleh dari beberapa orang sebagai *key informan*, Mereka itu, diantaranya adalah tokoh nelayan, *pongawa*, *sawi*, aparat desa, dengan tetap mengacu pada prinsip triangulasi (Milles & Huberman, 1992). Selama penelitian berlangsung, dijumpai kurang lebih 20 informan yang sekaligus sebagai sampel penelitian di studi.

Data kualitatif⁴ yang diperoleh di lapangan, kemudian ditafsir dan didalami melalui *interpretative understanding* atau *verstehen*. Data dianalisis secara komponensial (*componetial analysis*) melalui proses reduksi data kasar dari catatan lapangan, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Profil Wilayah Penelitian

Desa Pajukukang sebagai wilayah kasus penelitian, merupakan salah satu desa pantai dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Berbatasan dengan Desa Tupabiring di sebelah utara; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tunikamaseang; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bonto Bahari, dan; sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Mempunyai luas 226,87 Ha, terdiri dari 3 dusun dan 18 rukun tetangga. Topografi desa ini, bahwa di sepanjang pesisir pantai barat Selat Makassar, terhampar fisiografi tanah yang datar. Tinggi permukaan laut berkisar antara 0 sampai dengan 5 m, dengan topografi yang relatif rata. Terdapat sebuah sungai kecil (Sungai Balosi) yang fungsinya sangat vital, karena merupakan alur lalu-lintas nelayan yang pergi dan pulang dari melaut, dan merupakan pula tempat menambat perahu-perahu dan kapal-kapal kayu "*nelayan pagatan*"⁵.

Desa Pajukukang beriklim tipe C (menurut klasifikasi Schmidt-Fergusson) dengan rata-rata 5 bulan mengalami bulan basah dan 7 bulan mengalami bulan kering. Musim hujan mulai sekitar bulan November dan berakhir sekitar bulan Mei. Puncak musim hujan jatuh pada bulan-bulan Desember, Januari dan Februari. Musim kemarau mulai pada bulan Juni dan berakhir sekitar bulan Oktober. Desa ini dipengaruhi oleh dua macam angin, yaitu; angin musim-barat yang basah dan berkekuatan lemah, kecuali yang bertiup dari barat daya, dan angin musim-timur yang bersifat kering. Angin inilah yang menjadi pedoman masyarakat di desa ini dalam melakukan aktivitas kenelayanan.

Dihuni oleh penduduk dari latar belakang yang heterogen. Di antara penduduk-penduduk tersebut, Suku Bangsa Makassar dan Suku Bangsa Bugis adalah yang paling

⁴ Pengertian kualitatif di sini bermakna bahwa data yang disajikan berwujud kata-kata ke dalam bentuk teks yang diperluas bukan angka-angka (Miles dan Huberman, 1992).

⁵ "*Nelayan Pagatang*" atau "*Pappagatang*" adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat Desa Pajukukang bagi nelayan musiman yang berasal dari desanya dan melakukan penangkapan ikan dilemba (perairan) Kalimantan Selatan pada musim-musim tertentu (migrasi musiman) (Nazaruddin, 1988).

dominan. Satu rumah tangga di desa ini, biasanya terdiri atas beberapa orang yang diam bersama dan hidup bersama dari satu anggaran belanja (seperiuik), mereka itu biasanya terdiri atas kepala rumah tangga dan anggota lainnya adalah istri dan anak-anak yang dilahirkan. Suami bersama istri dan anak-anaknya, khususnya anak yang masih kecil atau belum kawin untuk kehidupan sehari-hari masih dalam tanggungan ayah dan ibu atau kedua orang tuanya yang merupakan keluarga batih atau keluarga inti (*nuclear family*). Selain itu, juga adakalanya ditambah dengan keluarga atau kerabat dekat lain baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, bisa saja mertua, mungkin pula ipar bahkan juga menantu.

Sesuai registrasi penduduk pada tahun 2018, jumlah penduduk di Desa Pajukukang sebanyak 3954 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, terbagi atas penduduk laki-laki sebanyak 1994 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1960 jiwa dengan latar belakang usia yang cukup variatif, mulai dari kelompok penduduk yang berusia antara 1-12 tahun (28,39%) sampai pada kelompok penduduk yang berusia 49 tahun keatas (15,70%) dan selebihnya sebanyak 55,91% adalah usia produktif (BPS Kecamatan Bontoa, 2019).

Penduduk yang sebagian besar berprofesi di bidang perikanan (nelayan dan petambak), memiliki pendidikan yang sangat rendah. Hampir separuh diantaranya masih buta huruf atau hanya mampu mengenyam atau menyelesaikan pendidikan sebatas sekolah dasar saja. Demikian halnya dengan mereka yang gagal (menggagalkan) penyelesaian pendidikannya (*drop out*) atau putus sekolah di tiap tingkatan sekolah juga cukup besar jumlahnya terutama ditingkat Sekolah Dasar (71,25%) (Kantor Desa Pajukukang, 2018).

Kondisi pemukiman di Desa Pajukukang menyebar di tiga dusun dengan pola *lay-out* pemukiman berupa tipe memanjang-berseberangan mengikuti *lay-out* jalan dengan kondisi yang cukup bervariasi antara rumah panggung, rumah kayu yang beralas tanah, rumah semi permanen dan rumah tembok. Atap rumah pada umumnya terdiri dari atap seng. Disamping itu terdapat pula bentuk rumah bawah seperti gambaran bentuk perumahan-perumahan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Rumah-rumah yang bentuknya rumah bawah dikalangan elit lokal (*upper class*), pada umumnya adalah rumah batu (permanen) sedang rumah bawah dikalangan lapisan bawah (*lower class*) adalah dari

papan atau bambu. Konstruksi bangunan ini juga sekaligus menjadi salah satu ciri khas yang membedakan antara rumah-rumah *pongawa* atau golongan masyarakat ekonomi menengah keatas dan rumah-rumah lapisan bawah lainnya.

Desa Pajukukang memiliki prasarana jalan desa yang beraspal (12 km) dan 5 km merupakan jalan tanah, yang menghubungkan antara satu desa dengan desa lainnya atau ke ibukota kecamatan. Jalan beraspal berjarak 12 km yang menghubungkan dunia luar. Sistem transportasi darat khususnya transportasi umum (*pete-pete*) masih sangat kurang di desa ini. Untuk saat ini keberadaan transportasi ojek cukup membantu aksesibilitas masyarakat. Terdapat bangunan kantor desa untuk keperluan administrasi desa. Sementara lampu penerangan penduduk sebagian besar telah menggunakan lampu penerangan dari tenaga listrik generator milik pemerintah (PLN). Sekolah Dasar ada 3 buah, Sekolah Lanjutan Pertama 1 buah, sarana peribadatan (mesjid) 3 buah, Puskesmas 1 buah. Toko, kios dan warung ada sekitar 80 buah yang tersebar di tiga dusun. Layanan perbankan belum tersedia. Pada umumnya masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas perbankan masih harus pergi ke ibukota kecamatan. Oleh karena itu, kebutuhan akan modal usaha yang dibutuhkan oleh penduduk mengandalkan praktek peminjaman dengan pola-pola lama (lembaga non-formal; pelepas uang) dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi (tengkulak).

Berkaitan dengan berbagai jenis usaha yang digeluti oleh masyarakat di Desa Pajukukang, pekerjaan yang bergerak di bidang perikanan menjadi sentral okupasi di desa ini. Ditunjang oleh karakteristik daerahnya yang merupakan desa pantai. Konsentrasi penduduk pada sektor perikanan yakni sebagai nelayan yaitu sebesar 53,40%, kemudian disusul sektor pertanian sebagai petani yaitu sebesar 23,96%. Profesi sebagai petambak menempati posisi ketiga 17,33%. Sementara pekerjaan di sektor lain berkisar 0,60% - 2,58% (Kantor Desa Pajukukang, 2018).

Potensi Perikanan Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir pantai dan laut cukup besar. Data dari dinas peternakan dan perikanan tahun 2013 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap meningkat signifikan pada beberapa tahun terakhir. Produksi perikanan tangkap tahun 2013 yaitu 2790,66 ton. Adapun jenis alat tangkap yang

digunakan oleh nelayan di Kabupaten Maros adalah bagang, pancing, pukot, jaring insang (*gae*), jaring lingkaran (*rengge*), pancing dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Hubungan Sosial dalam Kelompok *Ponggawa-Sawi*

Konteks ini akan teruraikan dalam uraian kasus melalui teknik *life-history*⁶ yang dipadukan dengan perpektif teori. Kelompok sosial *pongawa-sawi* yang dipilih menjadi kasus pada penelitian ini, adalah sebuah kelompok kerja (*working group*) yang dimiliki dan dikelola oleh H. Baco Cinda⁷. Para *pongawa* sebagai pemimpin tiap kelompok sosial yang ada di desa ini, dikenal sebagai pemuka masyarakat, khususnya di kalangan nelayan, Selanjutnya, dari tiga kelompok kerja yang dimiliki oleh H. Baco Cinda, keseluruhan anggotanya berjumlah sebanyak 16 orang. Diantara 16 orang pengikut ini, terdapat 3 orang juragan dan 13 orang *sawi*. Masing-masing juragan satu diantaranya membawahi 9 orang *sawi*, dua juragan lainnya, masing membawahi 2 orang *sawi*. Para juragan lebih dikenal oleh para *sawi* dengan gelar, "*pongawa kecil*", sementara H. Baco Cinda, para *sawi* lebih mengenalnya dengan gelar "*pongawa besar*".

Jumlah juragan sebanyak 3 orang ini adalah sebanyak dengan jumlah perahu yang dimiliki dan dikelola oleh *pongawa besar*, sedang jumlah *sawi* yang dipimpin atau *diponggawai* oleh tiap juragan, bergantung pada besarnya (volume) perahu. Ada dua jenis atau tipe perahu yang digunakan oleh kelompok ini. Menurut istilah setempat, yang pertama adalah tipe "*Lakara*" dan yang kedua adalah "*balolang*". Tipe pertama relatif lebih besar (2-3 ton), Jumlah awak (juragan bersama *sawi*) lebih banyak (9-10 orang) dan digunakan untuk operasi penangkapan diperairan lepas pantai (daerah laut sejauh lebih 3 kilometer dari daratan), sedang tipe kedua relatif lebih kecil (kurang dari 1 ton) jumlah

⁶ Koenjaraningrat (1994) menegaskan bahwa, untuk memperoleh gambaran yang sangat mendalam tentang detil dari hal yang tidak mudah diceritakan orang dengan metode interview berdasarkan pertanyaan langsung mengenai fenomena yang terjadi dalam masyarakat, maka teknik yang dapat dipergunakan dalam memperoleh gambaran permasalahan tersebut adalah melalui metode *life-history* dengan menampilkan uraian kasus dari pengalaman-pengalaman yang diceritakan kembali oleh *key informan*.

⁷ Haji Baco Cinda (HBC), dikenal sebagai pemuka masyarakat khususnya di perikanan laut, HBC memiliki jumlah pengikut sebanyak 25 orang. Diantara 25 orang pengikut ini, terdapat 4 orang juragan dan 21 orang *sawi*. Para juragan lebih dikenal oleh para *sawi* dengan gelar : "*pongawa kecil*". Sementara *pongawa* "HBC" di sini, para *sawi* lebih mengenalnya dengan gelar "*pongawa besar*".

awak lebih kecil (3 orang) dan hanya untuk penangkapan ikan di perairan pantai (daerah laut sampai 3 kilometer dari daratan sepanjang pantai).

Sesuai dengan keadaan perahu seperti disebutkan di atas, maka semua juragan (*pongawa kecil*) pengikut *H. Baco Cinda* (*pongawa besar*), yang terdiri dari 3 orang, mempunyai *sawi* yang jumlahnya bervariasi, masing-masing adalah juragan dengan jumlah *sawi* 9 orang. Mereka ini adalah juragan pada perahu tipe *lakara*, sedang para juragan lainnya (2 orang) pada perahu tipe *balolang*, tiap-tiapnya mempunyai hanya 2 orang *sawi* saja yang pada umumnya adalah anggota keluarga tanggungan mereka sendiri, yaitu anak atau adik kandung atau kadangkala menantunya sendiri.

Nampaknya, kelompok ini (kelompok yang *diponggawai* oleh *H. Baco Cinda*), dengan juragan sebanyak 3 orang dan *sawi* 13 orang merupakan suatu kelompok yang terbentuk "terpusat berantai", khususnya mengenai hubungan antar warga dalam usaha penangkapan ikan. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya bahwa, para juragan yang lebih dikenal oleh para *sawinya* sebagai *pongawa kecil*⁸, bersama *sawi* pengikutnya adalah suatu kelompok kecil yang merupakan bagian atau sub kelompok dari kelompok besar *H. Baco Cinda*. Oleh karena itu, kelompok ini memiliki 3 sub kelompok atau kelompok kecil. Diantara 3 sub kelompok termaksud diatas, yang dipilih menjadi kasus pada penelitian ini lebih lanjut, adalah sub kelompok yang dipimpin oleh *Sakka* sebagai juragan atau *pongawa kecil*, dengan jumlah *sawi* sebanyak 9 orang⁹.

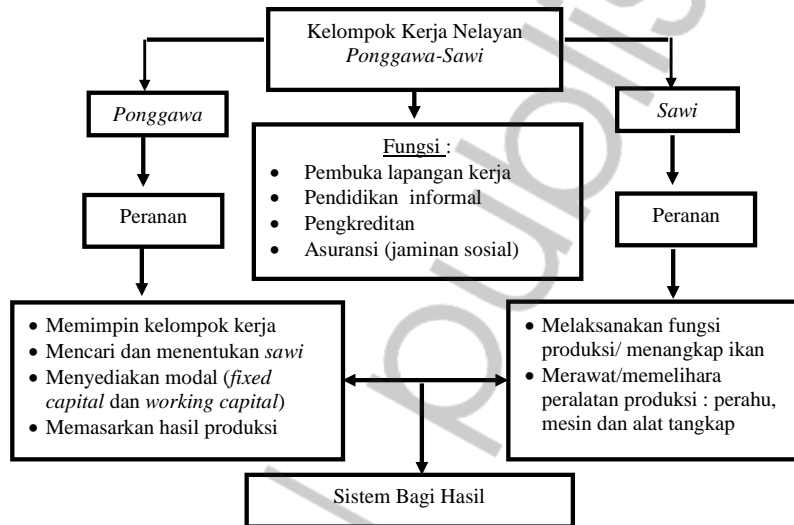
⁸ Fenomena terbentuknya struktur baru dalam kelompok kerja (*working group*) nelayan di Sulawesi Selatan, tergambar dari penelitian yang dilakukan Arief, A. Adri (2007), bahwa sejarah lahirnya fungsi baru dalam kelompok kerja nelayan yang diistilahkan sebagai *pongawa laut* atau *juragan lopi* diawali sekitar tahun 1983, kondisi itu dilatari oleh ketika volume tangkapan mulai meningkat (penggunaan alat-alat tangkap moderen) sehingga pemasaran memerlukan penanganan khusus. *Pongawa* sebagai pemilik alat produksi sekaligus pemimpin operasional di laut telah memposisikan diri kepada fungsi pemasaran. Untuk keberlanjutan dan kelancaran kegiatan penangkapan ikan oleh anggota kelompok, maka *pongawa* mendelegasikan dirinya kepada salah satu anggota kelompoknya (*sawi*) untuk menjadi pemimpin kelompok kerja di laut yang diistilahkan sebagai *pongawa laut* atau *juragan lopi*. Munculnya *pongawa laut* atau *juragan lopi*, jika dihubungkan dengan sistim stratifikasi sosial dalam kelompok kerja (diferensiasi secara vertikal) telah memperlihatkan lahirnya satu lapisan baru yakni lapisan tengah dalam hirarki struktur kelompok kerja. Dimana lapisan atas diperankan oleh *pongawa darat/bonto*, lapisan tengah diperankan oleh *pongawa kecil / juragan lopi* (sebagai lapisan baru) dan lapisan bawah di perankan oleh *sawi*.

⁹ Nama masing-masing *sawi* yang dipimpin oleh *Sakka* (*pongawa kecil*) adalah : Rabang; Ummase; Sangkala; Tompo; Tahe; Selli; Base; Muing dan Juma.

Peranan Aktor dalam Kelompok. Setiap warga yang menjadi anggota dalam kelompok *H. Baco Cinda*, senantiasa mempunyai status atau kedudukan (kadang-kadang dinamakan juga peran) dan peranan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bahasan sebelumnya, bahwa masing-masing status yang disandang dalam kelompok kerja (*working group*), memiliki peranan sebagai konskuensi dari status yang terbentuk. Secara sederhana pembagian peranan dalam kelompok ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut; *ponggawa besar* mempunyai peranan ; (1) memimpin dan mengorganisasikan kelompok dalam kegiatan produksi, (2) menyediakan modal, (3) menyediakan alat tangkap (*fishing gear*), termasuk (4) menyediakan kapal tangkap atau perahu. Sebagai bagian dari peranan pemimpin dan mengorganisasikan kelompok yang dilakukan oleh *ponggawa besar* ialah : perekrutan anggota kelompok, pembagian hasil, pemberian pinjaman kepada para *sawi* dalam bentuk uang atau bahan sebagai biaya hidup (*cost of living*), termasuk keluarganya yang mereka tinggalkan selama mereka berada di laut.

Ponggawa pada kelompok *H. Baco Cinda* terbagi atas dua orang yaitu : (1) *ponggawa darat* yang biasa juga digelar sebagai *ponggawa besar*, dan (2) jurangan atau *ponggawa kecil*. *Ponggawa besar* adalah pemimpin tertinggi kelompok dan memimpin langsung berbagai kegiatan di darat khususnya kegiatan pemasaran. Sedang *ponggawa kecil* atau juragan, berperanan memimpin operasional penangkapan ikan di laut. Secara umum gambaran fungsi dan peranan kelompok (unit kasus) dapat dilihat pada gambar 1.

Bagaimana peranan antara kedua pelaku dalam hal peranan *ponggawa besar*, peranan *ponggawa kecil*, dan peranan *sawi* terhubung atau bertaut satu sama lainnya, diatur oleh perangkat aturan peranan yang selanjutnya membentuk pola-pola melalui proses pelembagaan sosial (*social institutionalization process*), yang biasanya berlangsung dalam jangka waktu panjang dan disebut sebagai pola atau pola-pola hubungan peranan. Pola inilah yang mewujudkan “struktur sosial produksi” (*social structure of production*) yang selanjutnya mempolakan hubungan sosial dalam sistem produksi perikanan tangkap kelompok ini di wilayah kajian dan kelompok nelayan pada umumnya.



Gambar 1. Peranan dan Fungsi Kelompok Kerja Nelayan di Wilayah Penelitian.

Motivasi Bergabung dalam Kelompok. Apa yang menjadi pendorong atau motif bagi orang untuk menjadi warga pada kelompok ini, pertama adalah hasrat yang bersifat sosial serta hal yang bersifat ekonomi sebagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok untuk melakukan penangkapan yang termaknai sebagai suatu usaha bersama.

Usaha atau pekerjaan ini merupakan suatu pekerjaan yang relatif telah lama dikenal oleh semua warga. Dikatakan demikian, karena semua warga termaksud, lahir dan besar atau didewasakan di desa ini (Desa Pajukukang) sebagai suatu desa nelayan. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa mereka itu dengan sendirinya telah mengalami proses sosialisasi yang berorientasi pada bidang usaha penangkapan ikan di laut.

Memilih bergabung dengan kelompok *H. Baco Cinda* dengan juragan (*Sakka*), keterangan-keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa, ketertarikan para *sawi* untuk ikut bergabung karena adanya kekerabatan dalam arti hubungan darah dan semenda¹⁰ antar mereka, khususnya antara *punggawa kecil* (*Sakka*) dengan para *sawi*. Selain itu, juga

¹⁰ Satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain. Misalnya orang yang kawin dengan saudara atau kemenakan istri atau suami, hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan.

nampak di tunjang oleh adanya hubungan kesamaan sumber pengetahuan dan keterampilan pada penangkapan ikan di laut, termasuk pula ketetangaan. Dalam perspektif teori sosiologi ekonomi yang konservatif dinyatakan bahwa, keterlekatan sosial dalam perilaku aktor ekonomi sangat kuat terjadi pada masyarakat praindustri, dan semakin melemah pada masyarakat industri karena pengaruh modernisasi. Pandangan ini mengasumsikan bahwa pada masyarakat modern transaksi ekonomi adalah berdasarkan kalkulasi rasional dari aktor ekonomi, tidak lagi dipengaruhi oleh ikatan sosial dan kekerabatan. Sebaliknya pada masyarakat praindustri (tradisional atau masyarakat transisi), keterlekatan sosial dalam pilihan dan tindakan ekonomi menjadi faktor pertimbangan yang dominan. Meskipun pandangan ini banyak ditentang oleh penganut teori sosiologi ekonomi komtemporer, bahwa tindakan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, sehingga baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern tetap akan mengalami hal yang sama dalam hal tindakan ekonomi yang selalu diwarnai oleh konteks sosial (Damsar, 2002).

Selanjutnya, adanya hubungan kekerabatan, baik antara *pongawa kecil (Sakka)* dengan para *sawi* maupun antar warga keseluruhannya, dibuktikan oleh peneliti berdasarkan hasil sosiometri¹¹ yang dilakukan dengan menelusuri hubungan darah dan semenda, para warga anggota kelompok kerja. Hasil yang diperoleh ditemukan keterangan bahwa, pada umumnya *sawi* dalam kelompok kerja memiliki hubungan darah (sepupu, derajat satu, dua bahkan tiga) dengan juragannya (*Sakka*). Sementara mengenai kesamaan sumber pengetahuan dan keterampilan, diperoleh keterangan bahwa ada empat orang warga yang sekarang berusia lebih tua dari warga lainnya yang sejak kecil telah memulai karirnya dengan menjadi *sawi* bersama *Sakka* pada juragan *Daeng Sikki* (almarhum) ayah *Sakka* sendiri. Keempat *sawi* yang dimaksud adalah *sawi Tahe; Base; Muing* dan *Ummase*. Sementara lima orang warga lainnya dalam kelompok ini, yaitu; *Rabang; Tompo; Sangkala; Juma*, dan *Selli* memulai karirnya sebagai *sawi* pada *pongawa kecil (Sakka)*.

¹¹ Sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan.

Tersimpulkan bahwa, lima orang warga yang disebutkan pertama di atas di mana diantaranya adalah *pongawa kecil* sendiri, merupakan warga yang sudah lama pada kelompok ini, sedang lima orang lainnya yang disebutkan terakhir merupakan warga baru dalam kelompok kerja. Meskipun demikian, nampak bahwa kesemuanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari sumber yang relatif sama, di mana lima orang warga yang disebutkan pertama menyatakan memperolehnya langsung dari *Daeng Sikki* dan lima orang warga lainnya yang disebutkan terakhir memperolehnya pada tingkatan kedua yaitu dari *Sakka* anak *Daeng Sikki*.

Faktor keturunan turut memainkan peranan penting dalam kelompok kerja nelayan. Konteks ini dapat dibuktikan bahwa lima orang warga yang disebutkan pertama, sejak kecil sudah menjadi *sawi* pada ayah *Sakka* dan dengan ajakan, kelima orang ini seterusnya menjadi *sawi* pada *Sakka*. Dapat disimpulkan bahwa keturunan telah menjadi pola umum yang dipraktekkan dalam kelompok kerja nelayan di desa ini. Pola tersebut familiar terpraktekkan baik pada pihak *sawi*, maupun pada pihak juragan atau *pongawa kecil* dan juga pada pihak *pongawa besar*. Hal ini dibuktikan oleh pengikutsertaan anak kandung *H. Baco Cinda* yaitu *Rabang* menjadi *sawi* pada *Sakka* sekarang. Apa yang dilakukan *H. Baco Cinda* terhadap anaknya, termaknai sebagai upaya dia dalam mempersiapkan *Rabang* untuk menggantikan dirinya kelak sebagai *pongawa besar* pada kelompok kerja yang sementara dipimpinya

Dalam hal ketetanggaan, juga menjadi menarik untuk diuraikan. Ditunjukkan oleh adanya saling kunjung-mengunjungi satu sama lain yang banyak sedikitnya bertalian dengan kedekatan jarak fisik antar rumah kediaman tiap warga. Walaupun sekarang ini terdapat tiga orang anggota kelompok yaitu, *Sakka* sendiri bersama *Base* dan *Sangkala* tinggal agak jauh dari Desa Pajukukang yaitu Desa Tupabiring (sebelah utara Desa Pajukukang), namun pada masa kanak-kanak ketiganya tinggal berdekatan rumah dengan tujuh warga lainnya dalam satu kampung di Desa Pajukukang. Kepindahan *Sakka*, *Base* dan *Sangkala* ke Desa Tupabiring karena isteri-isteri mereka berasal dan bertempat tinggal di Desa Tupabiring. Namun sebelum itu, dikalangan mereka yang berusia sebaya, sejak kecilnya bukan saja kenal mengenal dan sadar akan adanya hubungan darah antar

mereka, tetapi juga satu sama lain merupakan teman sepermainan yang kurang lebih berarti sekelompok permainan.

Apa yang teruraikan dalam penjelasan sebagai hasil penelusuran informasi di tingkat aktor, merupakan upaya peneliti untuk menjelaskan bagaimana refleksi dari teori sosiologi ekonomi yang membuat tafsir terhadap perilaku ekonomi di tingkat aktor, yang dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat. Oleh karena itu, Schumpeter (1908) dalam J. Smelser (1987) menjelaskan bahwa, meskipun titik tolak sosiologi adalah kelompok, institusi, dan masyarakat, namun dalam mendiskusikan individu, sosiolog memfokuskan pada aktor sebagai entitas yang dikonstruksikan secara sosial. Dengan demikian sosiolog akan menempatkan kelompok dan level struktur sosial sebagai fenomena *sui generis*.¹²

Aktivitas dalam Kelompok Kerja

Aktivitas kegiatan kerja dimaksudkan adalah kegiatan-kegiatan kerja yang langsung menyangkut pelaksanaan operasi penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh kelompok pada penangkapan lepas pantai. Dalam uraian yang lalu telah disebutkan bahwa motif kelompok adalah untuk mempertahankan diri dan mengembangkan hidup. Aspek yang bersifat ekonomi, menjadi tujuan kelompok yang diwujudkan dengan usaha penangkapan ikan. Karena itu, maka kegiatan utama kelompok adalah penangkapan ikan, yang kurang lebih sama halnya dengan kegiatan-kegiatan lainnya di bidang agraris, kegiatan inipun mengikuti irama musim sepanjang tahun. Dalam satu tahun, ada dua musim yang dikenal di desa ini. Pertama adalah musim barat (musim hujan) dan kedua adalah musim timur (musim kemarau). Biasanya, musim barat berlangsung dalam bulan-bulan November sampai dengan Mei, sedang musim timur mulai dari bulan Juni hingga Oktober.

Pembagian Tugas dalam Kelompok. Pembagian tugas antar anggota dalam kelompok, dilakukan dalam hubungannya dengan operasional penangkapan ikan. Juragan memimpin operasi penangkapan termasuk navigasi dari tempat bertolak (*fishing based*) ke daerah penangkapan (*fishing ground*) pergi pulang dan selama dalam waktu penangkapan.

¹² *Sui generis* adalah frasa Latin yang berarti "dari jenisnya sendiri dalam kelas itu sendiri", oleh karena itu "unik". *Sui generis* sering digunakan dalam analisis filsafat untuk menunjukkan ide, entitas, atau suatu realita yang tidak dapat dimasukkan dalam konsep lebih luas.

Dalam navigasi, juragan dibantu oleh seorang *sawi* (*Ummase*) menjalankan mesin dan mengendalikan perahu. Sebelum mesin dihidupkan oleh *Ummase*, para *sawi* lainnya menggerakkan perahu dari tempat yang dangkal ke tempat atau bagian yang dalam dengan kayuh dan bambu.

Dalam navigasi, baik pada waktu menuju daerah tempat penangkapan maupun pada waktu pulang ke tempat pendaratan, *Sakka* selaku juragan senantiasa meninjau haluan, namun karena ini sudah merupakan kebiasaan, semuanya dilakukan secara santai, kecuali cuaca buruk yang biasanya dialami pada trip di awal dan di akhir bulan-bulan badai.

Di daerah penangkapan, baik diperairan pantai maupun lepas pantai, juragan memasang alat-alat penangkapan yang juga dibantu oleh *sawi Ummase* serta para *sawi* lainnya. Pada waktu tangkapan berlangsung, mesin dimatikan dan mulailah kayuh berfungsi. Empat orang *sawi* yang berkayuh di bagian depan yaitu *Sangkala*, *Selli*, *Tahe*, dan *Rabang*, dua orang mengayuh dibagian belakang yaitu *Base* dan *Tompo*, sedang *sawi Ummase* dan *Muing* membantu juragan dalam pemasangan alat-alat penangkapan. Sementara itu, *sawi Juma* selalu siap dengan timbahnya untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu, terutama kala ombak cukup besar.

Ikan-ikan yang tertangkap, diambil atau dikeluarkan dari alat penangkap oleh para *sawi*, khususnya *sawi Muing* yang juga menghitung jumlah ikan hasil tangkapan. Pada penangkapan *torani* (ikan terbang) yang selalu dilakukan diperairan lepas pantai, ikan diawetkan dengan garam sementara telur ikan dikeringkan. Pekerjaan ini dilakukan oleh para *sawi*. Para *sawi* yang mendapat tugas berkayuh atau mendayung adalah *sawi* yang relatif berusia muda karenanya lebih kuat terutama yang ditempatkan di bagian depan. Sedang *sawi* yang relative berusia tua dan kurang kuat lagi, diberikan pekerjaan yang ringan seperti halnya dengan *sawi Muing* pada kelompok ini. Adapun *sawi Ummase*, lebih banyak langsung membantu juragan atau *pongawa kecil*, karena itu diberi tugas sebagai pembantu *juragan*. Tugas penting bagi *sawi Ummase*, ialah bahwa sementara penangkapan berlangsung, ia tidak tidur (berjaga-jaga) sepanjang malam, untuk menghindari tabrakan kapal laut lewat ditempat penangkapan. Diperoleh keterangan bahwa ada sekitar dua belas jenis ikan yang biasanya ditangkap oleh kelompok ini sepanjang tahun. Dalam bahasa daerah setempat, masing-masing adalah : *rambeng*, *layang*, *tembang*, *torani* (ikan

terbang), *banyara*, *sunu*, *giang*, *kaneke*, *cakalang*, *tinumbu* dan *maridi*. Lima jenis diantaranya ditangkap di perairan pantai (*rambeng*, *layang*, *sibula*, *tembang* dan *banyara*) dan selebihnya ditangkap di perairan lepas pantai. Empat jenis (*rambeng*, *layang*, *sibula*, dan *cakalang*) yang biasanya ditangkap di musim barat dan enam jenis diantaranya (*tembang*, *torani*, *banyara*, *sunu*, *giang* dan *kaneke*) di musim timur serta dua jenis (*tinumbu* dan *maridi*) yang biasanya ditangkap di musim barat dan timur (sepanjang tahun).

Aktivitas Luar Kerja. Di samping adanya kegiatan kerja yang secara akumulatif berlangsung selama kurang lebih tujuh sampai delapan bulan, juga terdapat aktivitas-aktivitas luar kerja. Aktivitas ini dimaksudkan adalah kegiatan yang hubungannya tidak langsung dengan usaha penangkapan ikan. Akan tetapi, dipandang masih tetap sebagai kegiatan kelompok karena tiap anggota kelompok melakukannya atas kesadaran kelompok.

Aktivitas yang dimaksud adalah kegiatan yang menyangkut peristiwa penting mengenai diri dan anggota keluarga terdekat (orang tua, anak, isteri, saudara, mertua, menantu dan ipar) dari salah seorang anggota kelompok. Baik peristiwa-peristiwa yang mengandung kesedihan atau malapetaka, misalnya sakit, meninggal dunia, teraniaya, kekurangan biaya hidup untuk keluarga atau paceklik dan sebagainya, maupun yang mengandung kegembiraan atau kebahagiaan misalnya perkawinan, isteri bersalin, pembangunan rumah, sunatan, khitanan, termasuk juga pada acara selamatannya ataupun upacara atau pesta keagamaan misalnya pesta maulid.

Jika salah satu atau beberapa peristiwa penting tersebut diatas terjadi pada diri atau anggota keluarga dekat dari salah seorang anggota dalam kelompok, maka anggota lainnya akan memberikan respons dan turut serta mengambil bagian dalam berbagai kegiatan pemecahan masalah yang sering timbul sehubungan dengan peristiwa itu yang sifatnya membantu warga yang bersangkutan. Ikut bersedih jika peristiwa itu mengandung kesedihan dan ikut bergembira jika peristiwa itu mengandung kegembiraan atau kebahagiaan. Konteks ini didasari oleh pertimbangan ikatan komunal (kekerabatan) yang masih kuat, yang menurut James Scot (1976) sebagai etika subsistensi komunitas lokal, dimana pertimbangan-pertimbangan sosial masih ditempatkan sebagai pertimbangan yang utama dalam aktivitas keseharian masyarakat dibanding pertimbangan individu dan

ekonomi (kalkulatif). Sementara Weber (1978) menyebutnya sebagai tindakan tradisional (*traditional rationality*) dimana individu bertindak berdasarkan kebiasaan yang muncul sebagai praktek yang telah mapan dan menghormati otoritas yang ada.

Adapun bantuan yang saling diberikan satu sama lain antar warga dalam kelompok pada umumnya berbentuk pikiran, tenaga dan materi (uang tunai dan bahan). Baik yang dinyatakan sebagai pinjaman (biasanya diberikan atas permintaan yang bersangkutan), Maupun pencairan. Namun, bantuan yang berstatus pemberian dirasakan oleh anggota yang menerima bantuan itu, sebagai suatu yang juga harus dapat diberikannya pula kelak jika terjadi peristiwa yang sama atau serupa pada anggota kelompok lainnya. Demikianlah sehingga setiap anggota kelompok kerja merasakan bahwa, sedikit banyaknya ia pasti akan memperoleh respons, partisipasi dan bantuan dari sesamanya anggota kelompok jika ia mengalami peristiwa-peristiwa penting. Respon partisipasi dan bantuan itu, para *sawi* terutama mengharapkannya dari juragan (*pongawa kecil*), dan sebaliknyaapun demikian. Nampaknya, saling mengharapkan bantuan dalam peristiwa penting, antara para *sawi* dengan *pongawa kecil*, dan sebaliknya semakin besar dari saling berharap yang ada antara sesama *sawi*.

Dalam padangan sosiologi ekonomi, peristiwa-peristiwa seperti ini adalah kategori resiprositas umum (*generalized reciprocity*). Resiprositas ini, individu atau kelompok memberikan barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa menentukan batas waktu pengembalian. Dalam resiprositas umum tersebut tidak ada hukum yang dengan ketat mengontrol seseorang untuk memberi atau mengembalikan. Hanya moral saja yang mengontrol dan mendorong pribadi-pribadi untuk menerima resiprositas umum sebagai kebenaran yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran mungkin akan dinilai sebagai suatu perbuatan munafik, dosa, durhaka, tidak bermoral dan sebagainya. Orang yang melanggar kerja sama resiprositas ini bisa mendapat tekanan moral dari “masyarakat” atau “kelompok” berupa peringatan atau gunjingan yang dapat menurunkan martabat dalam pergaulan di masyarakat. Sistem resiprositas umum biasanya berlaku di lapangan-lapangan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dekat. Berdasarkan faktor-faktor genetis mereka, yang mempunyai naluri untuk meneruskan keturunan dan melindungi anggota-anggotanya bukan semata-mata dilandasi oleh harapan-harapan akan

pengembalian dan haknya, tetapi sebagai suatu kodrat yang dibenarkan secara subyektif (Polanyi, 1977).

Ada kalanya masalah yang timbul sehubungan dengan peristiwa penting terjadi atas diri atau anggota keluarga dekat dari seseorang warga kelompok, cukup dan sukar untuk dipecahkan. Pada umumnya kesukaran yang dialami adalah menyangkut pengadaan uang dalam jumlah yang relatif besar. Dalam keadaan demikian ini, biasanya juragan atau *pongawa kecil* menyampaikan pada *pongawa besar* untuk pemecahannya. Sepanjang keterangan yang diperoleh, banyak atau sedikitnya uang yang dimiliki *pongawa besar*, biasanya ia berusaha untuk memberikan bantuannya. Disamping uang, turut pula diberikan pemikiran-pemikiran. *Sentimen community*¹³ yang terwujud dalam *sentimen group* dipraktekkan oleh Haji Baco Cinda sebagai *pongawa besar* dalam membina hubungan-hubungan sosial dengan para *sawinya*. Oleh karena itu peranan pemimpin (*pongawa besar*) sangat besar artinya dalam hal menjaga integritas anggota kelompok¹⁴.

Dalam hal-hal serupa diatas, khususnya jika bantuan yang diharapkan adalah berupa uang dengan status pinjaman yang biasa jumlahnya relatif besar, maka tidak ada satupun *sawi* yang dapat berhubungan dengan *pongawa besar*. Kalau ada *sawi* yang menghubungi *pongawa besar* secara langsung, biasanya *pongawa besar* menyarankan kepadanya untuk lebih dahulu membicarakannya dengan juragan atau *pongawa kecil*, kemudian *pongawa kecil* lah yang membicarakan kepadanya. Hal ini tidak terkecuali pada anak kandung *pongawa besar* (*Rabang*) yang menjadi *sawi* pada juragan atau *pongawa kecil* (*Sakka*). Dari sudut pandang moral ekonomi, subsistensi¹⁵ konteks itu merupakan hak,

¹³ Munculnya *sentimen community* akibat adanya *social relationship* yang terbangun karena ikatan kultural, sehingga memunculkan karakter-karakter seperti : (1) seperasaan, yakni individu berusaha untuk mengidentifikasi dirinya sebanyak mungkin dalam kelompok, (2) sepenanggungan, yakni individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri sangat memungkinkan peranannya dalam kelompok dijalankan, (3) saling butuh, yakni individu yang tergantung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada komunitasnya, kelompoknya yang meliputi kebutuhan fisik, materi maupun psikologis (Rober M Mac Iver dan Charles H. Page, 1975).

¹⁴ Sidney Verba (1961) dalam Sallatang (1983) mengemukakan bahwa, "pemeliharaan kesetimbangan antara kepuasan-kepuasan anggota-anggota kelompok dan pencapaian kemajuan pekerjaan atau tujuan kelompok, merupakan tugas paling penting bagi kelompok pemimpin"

¹⁵ Pengertian subsisten menurut Cifton dan Wharton (1969) ada dua, yaitu sebagai tingkat hidup dan sebagai suatu bentuk perekonomian. Pengertian pertama menggambarkan suatu kondisi ekonomi yang berfungsi sekedar untuk dapat bertahan hidup, sedangkan pengertian kedua merupakan sistem produksi yang hasilnya jika dipasarkan tidak dapat mencapai keuntungan yang komersil untuk mengakumulasi modal.

oleh sebab itu ia sebagai tuntunan moral. Maksudnya adalah *sawi* merupakan kaum yang miskin mempunyai hak sosial atas subsistensi. Oleh karenanya, setiap kebutuhan hidup esensial *sawi* dan keluarganya, maka *pongawa besar* sebagai elit, tidaklah adil apabila melanggar kebutuhan-kebutuhan subsistensi (tidak memfasilitasi pemenuhan kebutuhan).. Pandangan moral ini mengandung makna bahwa kaum elit tidak boleh melanggar cadangan subsistensi kaum miskin pada musim baik, dan memenuhi kewajiban moralnya yang positif untuk menyediakan kebutuhan hidup pada musim jelek (Scott, 1976).

Norma dalam Kelompok

Bagaimana seharusnya seseorang anggota kelompok bertindak atau bertingkah laku terhadap anggota lainnya. Penjelasan berikut menggambarkan bagaimana aturan-aturan atau norma kelompok dijalankan. Perspektif norma dapat dilihat dari berbagai segi atau sudut pandang. Dari segi ikatannya, ada norma yang dirasakan kuat dan ada yang kurang mengikat. Hal ini erat kaitannya dengan apa yang disebut norma-norma pokok atau inti dan norma-norma pinggiran.

Menurut sumbernya, ada norma yang bersumber dari luar dan ada yang dari dalam kelompok, tetapi juga ada norma yang baru dan ada yang lama biasanya bersumber dari generasi-generasi lampau. Dari segi fungsinya, ada norma yang berfungsi untuk pencapaian tujuan-tujuan kelompok dan ada untuk penguatan solidaritas antar warga kelompok. Disamping itu dapat pula dikemukakan bahwa ada kalanya untuk tindakan atau tingkah laku yang sama tetapi pada situasi yang berbeda, aturan-aturan tingkah lakunya pun berbeda satu sama lain (Sallatang,1984).

Norma-norma dalam Kegiatan Kerja Kelompok. Seperti telah dituliskan sebelumnya, kegiatan kerja kelompok meliputi pelaksanaan tiap trip penangkapan sepanjang tahun. Termasuk pemeliharaan dan perbaikan perahu, mesin (motor) dan alat-alat penangkapan. Para anggota kelompok memahami bahwa kegiatan kerja kelompok, mulai dari *fishing based* ke daerah *fishing ground* hingga tibanya kembali ke rumah masing-masing. Selain kegiatan kerja berlangsung, sejumlah pantangan bagi tiap warga terutama pada saat bertolak. Beberapa tingkah laku (ucapan dan perbuatan) yang tidak boleh dilakukan oleh tiap warga tanpa kecuali, tetapi juga ada tingkah laku yang diharuskan

melakukannya. Hal yang disebutkan terakhir ini terutama bagi juragan atau *pongawa kecil*.

Menjelang kelompok bertolak, mereka berkumpul di perahu, tetapi ada kalanya di rumah juragan (*pongawa kecil*) atau di rumah *pongawa besar*. Tempat berkumpul di rumah *pongawa besar*, terutama dilakukan pada waktu keberangkatan pertama untuk penangkapan di perairan lepas pantai tiap musim penangkapan (musim timur). Berkumpulnya anggota kelompok sebelum bertolak, adalah untuk berkemas, sedangkan perkemasan bukan saja memeriksa dan membenahi perahu, mesin (motor) dan alat-alat penangkapan serta perlengkapan lainnya, tetapi terutama untuk menunggu adanya suara-suara yang datangnya dari lingkungan sekitar (alam metafisik). Baik dari manusia lain di luar kelompok, maupun dari binatang yang ada di alam. Yang mengenal atau menandai suara termaksud adalah juragan (*pongawa kecil*) dan inilah yang merupakan salah satu kelebihanannya sebagai *pongawa kecil* atau sebagai pemimpin kelompok, kalau suara termaksud itu telah ada atau telah datang, juragan memberi isyarat kepada seluruh warga kelompok untuk berangkat¹⁶.

Pantangan-pantangan maupun keharusan-keharusan merupakan sesuatu yang bersifat mitologik atau kepercayaan bagi tiap anggota dalam kelompok bahkan dapat dikatakan kepercayaan kelompok, tetapi justru kepercayaan inilah yang banyak mendasari aturan-aturan tingkah laku tiap anggota dalam kelompok dan menjadikan tiap anggota berdisiplin dalam kerja kelompok. Tiap anggota kelompok bukan saja mengetahui tugasnya masing-masing, tetapi juga benar-benar menguasai dan melakukannya dengan cermat yang kebanyakannya tanpa disuruh atau diperintah. Tiap anggota kelompok sadar bahwa kelalaiannya akan berakibat buruk bagi seluruh warga kelompok, misalnya saja kelalaian

¹⁶ Menurut Arief. A. Adri *at all* (2021), tampak bahwa lapangan pencaharian hidup sebagai nelayan amat menantang untuk mempercayai kekuatan-kekuatan gaib. Mengarungi laut dalam pandangan nelayan adalah sebuah misteri yang fenomenanya terkadang tidak dapat dirasionalkan. Mereka selama berada di lautan merasa sedang mempertaruhkan jiwa raga dalam mendapatkan rejeki yang disediakan Tuhan untuknya. Menurut informan, laut kadang tenang penuh dengan "persahabatan" tetapi tiba-tiba bisa secepat itu berubah dengan ombak yang sangat tinggi seakan penuh "amarah". Pada saat yang lain mereka juga terkadang menjumpai ikan-ikan yang sangat besar dan dapat menenggelamkan perahu. Begitu pula pengalaman yang diceritakan terkait dengan *antulau* (hantu laut), makhluk aneh yang mereka jumpai selama dalam perjalanan menangkap/berburu ikan. Oleh karena itu seorang *pongawa laut* (pemimpin kegiatan produksi di laut; nahkoda) disamping memiliki pengalaman tentang perahu dan pelayaran, juga harus memiliki keahlian atau ilmu gaib yang dapat menolak bahaya untuk keselamatan selama berada di tengah laut menangkap ikan.

seorang *sawi* dapat mengakibatkan rusaknya mesin (motor) dan tenggelamnya perahu atau rusaknya alat penangkap dan sebagainya. Lebih dari itu, tiap orang bukan saja mahir melakukan tugasnya, tetapi juga dapat melakukan tugas-tugas lainnya. Hal ini terutama sangat diperlukan oleh kelompok, khususnya dalam keadaan darurat, misalnya jika ada salah seorang warga yang tiba-tiba terserang sakit atau perahu terserang badai dan sebagainya.

Ikan hasil tangkapan kelompok adalah hasil bersama bagi tiap warga kelompok karena itu maka jika ada norma-norma dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antar warga, juga ada norma-norma untuk pembagian hasil bersama. Sistem yang diakui, dipraktikkan dan ditaati dalam kelompok ialah bahwa tiap anggota kelompok yang terlibat dalam proses produksi dan faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi, memperoleh satu bagian hasil setelah dikeluarkan seluruh biaya dan komisi untuk *pongawa besar* sebesar 15% dari hasil kotor. Faktor-faktor produksi di sini adalah perahu, mesin (motor) dan alat-alat penangkap, yang semuanya dikonversi dengan orang, untuk perahu dinilai dua orang atau dua bagian hasil, untuk mesin dinilai tiga orang atau tiga bagian dan untuk alat-alat penangkap dua bagian sedang tiap orang warga kelompok termasuk *pongawa besar* memperoleh satu bagian. Akan tetapi juragan karena kedudukannya mempertanggungjawabkan bukan saja warga kelompok tetapi juga keselamatan perahu, mesin (motor) dan alat-alat penangkap, memperoleh lagi satu bagian hasil dari bagian hasil yang diperuntukkan pada alat penangkap atau mesin (motor) atau perahu.

Bagian yang diperoleh *pongawa besar*, terdiri dari lima bagian karena jasanya sebagai pemasar hasil sebesar satu bagian dan sebagai *pongawa besar (kepongawaan)* memperoleh komisi sebesar 15% dari hasil kotor seperti telah disebutkan di atas. Apakah sistem bagi hasil yang dipraktikkan ini memuaskan dan cukup adil menurut pandangan dan penilaian para warga kelompok? Jawaban yang diperoleh dari para *sawi* ialah bahwa bagaimanapun ini sudah merupakan kebiasaan di desa ini. Semua *sawi* mengemukakan bahwa mereka merasa bersukur dan beruntung akan adanya *pongawa* bersama juragan (*pongawa kecil*) memberikan lapangan dan kesempatan kerja baginya.

Dalam kerangka ini, kelanggengan dan keberhasilan seorang patron dalam menjalankan peranannya bersandar kepada kualitas jaminan subsisten yang dia berikan kepada kliennya. Kehendak patron untuk memperoleh kemakmuran/kekayaan bersandar pada usahanya untuk mempertahankan keabsahannya (legitimasi) di mata kliennya, yakni dengan cara mempertahankan jaminan subsisten mereka atas kliennya. Selama patron berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah moral (etika subsistensi) yang mengatur praktik ekonomi dan pertukaran-pertukaran sosial di antara warga desa, kemungkinan akan terjadinya kemarahan moral dan pemberontakan dari pihak klien akan dapat dihindari (Scott, 1976).

Norma-norma dalam Kegiatan Luar Kerja. Kegiatan luar kerja bagi kelompok adalah kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan menangkap ikan. Kegiatan-kegiatan ini menyangkut peristiwa-peristiwa penting yang dialami atau terjadi pada diri atau keluarga dekat dari seseorang anggota kelompok.

Peristiwa-peristiwa penting tersebut seperti perkawinan, pembangunan rumah, kematian, khitanan dan sebagainya, yang didalamnya terkandung upacara-upacara selamatan ataupun pesta. Apalagi kalau peristiwa penting itu memang merupakan upacara atau pesta-pesta keagamaan misalnya maulid dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, membutuhkan pikiran, tenaga dan biaya, yang diharapkan dapat diperoleh dari sesama warga kelompok di samping dari luar kelompok kasus ini.

Sudah menjadi kebiasaan dalam kelompok bahwa jika juragan (*pongawa kecil*) mengadakan selamatan, pesta atau upacara-upacara yang menyangkut peristiwa penting seperti telah disebutkan, para *sawi* berdatangan memberikan bantuannya terutama berupa tenaga, di samping itu, bantuan ala kadarnya berupa bahan-bahan kebutuhan upacara, yang diberikan menurut kemampuannya. Para *sawi* biasanya datang bersama istri dan anak-anaknya. Mereka ini seolah-olah sebagai tuan rumah dan bukan sebagai tamu.

Kalau hal yang serupa di atas diadakan oleh *pongawa besar*, maka biasanya *pongawa kecil* mengkoordinasikan bantuan-bantuan para *sawinya* yang pada pokoknya berupa tenaga. Beberapa hari sebelum upacara dilakukan, para *sawi* bersama istri dan anak-anaknya telah berdatangan di rumah *pongawa besar* untuk membantu menyiapkan segala sesuatunya yang bertalian dengan upacara.

Kalau ini diadakan oleh seseorang *sawi*, biasanya juragan (*pongawa kecil*) berbuat serupa di atas sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berat menjadi ringan. Juragan (*pongawa kecil*) di samping memberi bantuan-bantuan berupa uang dan bahan juga memberikan pengaruhnya kepada anggota kelompok untuk memberikan bantuannya kepada anggota yang bersangkutan yang mengadakan selamatan, pesta atau upacara. Sudah barang tentu bahwa *pongawa besar* tidak ketinggalan dalam hal ini. Biasanya, jauh sebelum selamatan, pesta atau upacara berlangsung, *pongawa besar* telah mengetahuinya dengan pemberitahuan langsung dari anggota kelompok yang bersangkutan.

Anggota keluarga dekat dari tiap anggota kelompok, khususnya isteri-isteri mereka. Mereka mempunyai hubungan yang erat satu sama lain dalam pergaulan hidup sehari-hari, terutama selama mereka ditinggalkan suami dalam masa penangkapan ikan di perairan lepas pantai. Mereka inipun saling bantu membantu dalam kesulitan. Kalau ada kesulitan-kesulitan yang tidak dapat mereka atasi, maka oleh isteri *Sakka* selaku juragan (*Maradia*) menyampaikannya pada isteri *Haji Baco Cinda* selaku *pongawa besar* (*Daeng Kanang*). Dengan demikian, yang terjadi dalam kelompok kasus ini, telah bertaut satu sama lain bukan saja diri para anggota kelompok tetapi juga termasuk anggota keluarga dekatnya, khususnya para isteri dari warga kelompok. Kondisi ini juga didukung oleh karena adanya hubungan pertetangaan diantara mereka.

Oleh karena itu, meskipun hubungan antara *pongawa* dengan *sawi* terkonstruksi dalam relasi *patron-klien*, dengan ciri kesenjangan ekonomi yang tajam, tetapi para *sawi* tidak akan pernah melakukan perlawanan kepada pemilik modal (*pongawa*). Karena diantara mereka terdapat ikatan berlapis setetangga, sekerabat, sesahabat, sekomunitas, seokupasi yang pertukaran ekonominya dibarengi pertukaran sosial (Salman, 2006; Perlas, 1981; Sallatang, 1983). Maka bagaimana mungkin, *sawi* (*klien*) bisa sakit hati terhadap sistem bagi hasil yang senjang dan eksploitatif, bila ketika istrinya terjepit pakeklik, semetara ia ditengah laut, istri *patron* (*pongawa*) lah yang datang menolongnya. Bila ketika *sawi* menderita sakit, sang *patron* lah (*pongawa*) menjemput dan membayar biaya pengobatannya, bila ketika *sawi* butuh dana besar untuk upacara siklus kehidupan, maka *pongawa* pula lah yang paling tulus membantunya. Dengan demikian, meskipun jarak ekonomi sangat senjang dan manifest, tetapi jarak sosial sangat dekat dan berkelindan

(Salman, 2012). Oleh karena itu, dalam moral ekonomi dengan prinsip etika subsistensi komunitas lokal, berlaku “biarkan kesenjangan ekonomi di depan mata, yang penting subsistensi tetap terjaga aman”.

SIMPULAN

Demikianlah beberapa hal mengenai hubungan antara *pongawa* dengan *sawi*, dalam etika subsistensi sebagai wujud dari ekonomi moral dalam kelompok kerja nelayan. Apa yang digambarkan dalam uraian-uraian di depan, tentulah tidak memadai sebagai gambaran menyeluruh, mengenai keadaan keterlekatan dan repositas dalam tindakan ekonomi nelayan sebagai fakta sosial yang terikat sangat statis dalam aktivitas ekonominya, dan berkemungkinan memiliki pengaruh yang besar terhadap tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa pantai. Namun apapun itu, kita tidak bisa memungkiri sebagai fakta sosial bahwa, pada ikatan siapakah harmoni itu tetap dapat terjaga sampai saat ini dengan segala romantismenya? kecuali pada relasi *pongawa-sawi* pada komunitas nelayan di desa pantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusanty, Harnita. (2004). *Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Nelayan dalam Eksploitasi dan Konservasi Sumberdaya Hayati Perairan di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara)* (Tesis). Makassar: PPS-UNHAS.
- Ahmisa Putra, H.S. (1998). *Minawang : Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan Abad 19*. Yogyakarta: UGM Press.
- Arief, A. Adri (2007). *Artikulasi Modernisasi dan Dinamika Formasi Sosial Nelayan Kepulauan di Sulawesi Selatan* (Disertasi). Makassar: PPS Unhas.
- _____ (2021). *Nelayan Pulau Kecil dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arief, A. Adri., Agusanty, H., & Mustafa, M. D. (2021). Kepercayaan dan Pamali Nelayan Pulau Kambuno di Sulawesi Selatan. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 56–68.
- Damsar. (2002). *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Geertz, Clifford (1978). *The Interpretation of Culture: Selected Essays*. New York: Basic Books Inc. Publishers.

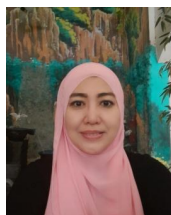
- J. Smelser. (1987). *Sosiologi Ekonomi* (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: Wira Sari.
- Koentjaraningrat, (1994). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Perlas C. (1981). *Hubungan Patron-klien pada Masyarakat Bugis-Makassar*. Ujung Pandang: Monograph.
- Polanyi, Karl. (1977). *The Livelihood of Man*. Diedit oleh Harry W. Pearson. New York: Academic Press.
- Sallatang, M. Arifin. (1982). *Pinggawa-Sawi; Suatu Studi Sosiologi Kelompok Kecil*. Jakarta: Depdikbud.
- _____. (1976). *Desa Pantai di Sulawesi Selatan dan Strategi Pengembangannya*. Ujung Pandang: Team Studi Pedesaan Unhas.
- _____. (1983). *Pinggawa-Sawi; Suatu Studi Sosiologi Kelompok Kecil*. (Disertasi). Ujung Pandang: Unhas.
- Salman, Darmawan. (2012). *Sosiologi Desa : Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*. Makassar: Innawa.
- _____. (2006). *Jagad Maritim : Dialektika Modernitas dan Artikulasi Kapitalisme pada Komunitas Konjo Pesisir di Sulawesi Selatan*. Makassar: Innawa.
- _____. (2002). *Tahap Transisi dalam Transformasi Industrial pada Komunitas Maritim di Sulawesi Selatan : Studi tentang Pergeseran Hubungan Industrial pada komunitas Industri Pembuatan Perahu, Wisata Pantai dan Penangkapan Ikan*. (Disertasi). Bandung: PPS-UNPAD.
- Scott, J.C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant*. New Haven : Yale University Press
- Wahyuni, E. S., Satria, A., & Kusumastanto, T. (2014). Transformasi pranata patronase masyarakat nelayan: dari ekonomi moralitas menuju ekonomi pasar. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 6(1), 116-135.
- Weber, Max. 1978. *Max Weber: Selection in Translation* (Ed: W.G. Runciman). Cambridge: Cambridge University Press.

Chapter 3

PRODUKSI DAN LINGKUNGAN SOSIOKULTUR NELAYAN

PENGETAHUAN LOKAL NELAYAN DALAM EKSPLOITASI SUMBERDAYA PERIKANAN DI DESA TAMASAJU, KABUPATEN TAKALAR

Harnita Agusanty



Harnita Agusanty adalah Dosen LLDIKTI Wilayah IX, DPK pada Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Meraih gelar S1 Manajemen Sumberdaya Perairan di Universitas Hasanuddin, Makassar (2000), Magister Sains pada Program Manajemen Lingkungan di Universitas Hasanuddin (2004) dan gelar Doktor dalam bidang Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2009).

* Email : harnitaagusanty@unismuh.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) modern dibidang perikanan telah memberi kesempatan yang luas pada masyarakat pesisir dalam mengeksploitasi sumberdaya hayati laut semaksimal mungkin. Namun manfaat teknologi yang terperagakan tersebut mulai pula dipertanyakan akibat merosotnya kualitas dan kuantitas sumberdaya hayati perairan serta kualitas lingkungan (keraf, 2002). Dalam perspektif sosiologi ekonomi, membahas unsur-unsur cultural yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, memunculkan dua pertanyaan penting, yaitu; (1) Evaluasi. Apakah aktivitas ekonomi menduduki tempat terpenting dalam nilai kebudayaan? Apakah ia dinilai tinggi atau rendah, positif atau negative? Apakah ia dianggap sebagai tujuan atautkah hanya alat untuk mengejar kekayaan, kekuasaan dan sebagainya; (2) Eksistensi. Apakah orang dianggap sebagai makhluk bermotif ekonomi, atau tidak? Bagaimana sifat masyarakat itu? Adakah ia memberikan kesempatan untuk aktivitas orientasi ekonomi semata, atautkah dianggap ada nilai lain yang tetap menjadi aktivitas-aktivitas yang harus dipertahankan.

Dengan demikian pertanyaan-pertanyaan mengenai rangkaian kepercayaan cultural akan tergambarkan dari tindakan-tindakan warga masyarakatnya dalam tindakan ekonomi (produksi) hubungannya dengan nilai-nilai dan ideologi satu pihak dengan kegiatan produksi pada pihak lainnya.

Dalam kajian ini, aktivitas produksi nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, mengacu pada pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) penduduk setempat, yang diasumsikan sebagai salah satu faktor yang berperan penting dalam menunjang keberlanjutan dan ketangguhan ekosistem laut. tetapi yang kerap kali justru terabaikan dalam upaya-upaya eksploitasi sumberdaya perikanan. Bahkan, terpinggirkan oleh domain pengetahuan ilmiah, serta pranata-pranata sosial hasil reka-cipta para birokrat atau agen pembangunan.

Dalam dasa warsa terakhir, telah semakin besar perhatian para ilmuwan, dan agen pembangunan pada pentingnya pengintegrasian ilmu pengetahuan moderen dan praktek-praktek tradisi yang masih relevan dalam upaya penanggulangan degradasi lingkungan. Realitasnya, sebagian besar nelayan tradisional dan semi tradisional, bukanlah orang-orang yang lantas bersikap pasrah terhadap berbagai persoalan dan kesulitan yang mengancamnya. Sebaliknya, mereka sejak dahulu merupakan individu-individu dan kelompok-kelompok yang tidak habis habisnya berpikir dan tidak mengenal lelah mencari cara pemecahan masalah tersebut. Aplikasi unsur-unsur pengetahuan tradisional dan pengetahuan baru secara selektif, diadopsi dan dimodifikasi sebagai teknologi perikanan yang banyak ditempuh nelayan dalam rangka meningkatkan produksinya. Dengan demikian, pada saat yang bersamaan nelayan dapat menerima dan mengambil manfaat dari model pengetahuan moderen dan dapat pula menerapkan pengetahuan lokal mereka sebagai warisan yang diwarisi dari generasi sebelumnya (Arief, A. Adri at all, 2021).

Dengan demikian, kerangka pemikiran secara konseptual dapat menjelaskan, bagaimana tindakan manusia (nelayan) melalui apa yang menjadi pengetahuan individualnya, sekaligus menerapkan keteraturan-keteraturan yang ada dalam kehidupan sosialnya. Mengikuti apa yang dikatakan oleh Bourdieu (1990) tentang *habitus*, maka Strauss dan Quinn (1997) melihat bahwa selama individu-individu mengalami kejadian-kejadian yang mengikuti pola-pola yang kurang lebih sama, maka mereka akan belajar untuk membentuk skema-skema yang sama dalam menginterpretasi situasi-situasi yang mereka hadapi. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa skema bisa dimiliki bersama. Skema itu sendiri berupa pengkombinasian berbagai unsur pengetahuan dan perasaan individual yang dipakai untuk memproses informasi (Strauss dan Quinn 1997). Masalah unsur mana

saja yang dikombinasikan adalah sesuatu yang dipelajari individu, sehingga kita bisa memahami bagaimana pengetahuan yang sama bisa membuahkan skema-skema yang berbeda dari satu individu ke individu yang lain, maupun dari situasi ke situasi.

Teori skema¹⁷ membantu dalam menjelaskan daya-daya sentripetal dan sentrifugal dalam kehidupan sosial. Daya sentripetal menyangkut masalah bagaimana kebudayaan bertahan dan direproduksi, baik selama kehidupan individu maupun antar generasi. Sebaliknya, daya sentrifugal menyangkut kecenderungan-kecenderungan timbulnya variasi antar individu atau antar waktu (perubahan). Hal yang dapat menjadi pertanyaan adalah, mengapa ada individu-individu atau kelompok yang secara konsisten mempraktekkan hal-hal tertentu dalam kondisi-kondisi sosial dan fisik yang berubah dan kadangkala merugikan mereka? Mengapa ada individu atau kelompok lain yang berubah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menyangkut proses belajar yang dialami individu atau kelompok, sebagai suatu proses yang kompleks. Namun, hal yang ingin ditekankan dalam tulisan ini adalah bagaimana proses belajar ini sangat terkait pada pengamatan dan pengalaman langsung yang dialami oleh individu atau kelompok, dan sedikit sekali berupa hasil pengajaran yang bersifat formal (lihat Strauss & Quinn 1977 dan Bourdieu 1990). Proses belajar ini bersifat *trial and error*, sehingga tidak semua yang diamati dan dialami pada masa lalu menjadi bagian dari skema dalam memahami dan bertindak terhadap situasi baru. Skema-skema tertentu bertahan karena 'berhasil' membantu individu untuk memahami dengan baik sebuah situasi, atau memungkinkannya mengatasi suatu masalah. 'Keberhasilan' ini juga dimaksudkan terhadap perolehan dukungan sosial yang positif dari warga masyarakat sebagai lingkungan sosiokulturalnya.

¹⁷ Teori skema yang diajukan oleh Strauss dan Quinn (1997) banyak mengambil dari pendekatan *connectionism* yang berkembang dalam bidang *artificial intelligence*. Pada dasarnya, Strauss dan Quinn telah memodifikasi teori *behaviorialistic* klasik dan memadukannya dengan pendekatan-pendekatan ideasional. Setiap rangsangan yang diterima individu akan mengaktifkan pengetahuan-pengetahuan dan perasaan-perasaan tertentu, dan meredam yang lainnya, sehingga terbentuklah skema untuk menginterpretasi rangsangan tersebut.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkah laku serta pengetahuan lokal nelayan dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan yang dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya lokal yang berpenetrasi (menembus) ke dalam sistem sosial masyarakat, sebagai tindakan ekonomi (produksi) hubungannya dengan nilai-nilai dan ideology satu pihak, dengan kegiatan produksi pada pihak lainnya.

Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan penekanan pada makna-makna (*verstehen*) yang terdapat di balik tindakan perseorangan (aktivitas) maupun kelompok yang terwujudnya gejala sosial tersebut (Miles, 1992). Teknik pengumpulan data adalah investigasi, wawancara dan studi literatur. Analisis data yang digunakan adalah analisis holistik (*a holistic perspective*) melalui observasi objek informan nelayan secara menyeluruh (*the entire individual*) dengan mengekstraksi “teks-teks” hasil wawancara dalam bentuk narasi dan logika klasifikasi melalui abstraksi deskriptik terhadap realitas sosial (*sociological representativeness*) yang diteliti (Salam, 2005).

Berdasarkan proses ini, didapatkan suatu deskripsi komprehensif mengenai tindakan dan praktik dalam menjalankan aktivitas sebagai nelayan. Selama penelitian berlangsung, dijumpai sebanyak 25 informan sebagai sumber data primer. Pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka. Dalam Penggalan informasi data primer menyangkut pengetahuan lokal, wawancara mendalam dilakukan kepada *key informant* yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Adapun orang-orang yang dijadikan sebagai informan kunci adalah tokoh nelayan, tokoh masyarakat, tokoh adat, *punggawa*, dan *sawi*.

Kompilasi hasil wawancara melalui teknik *snowball* dengan mengacu pada prinsip triangulasi (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014) melalui tiga tahap: tahap pertama, analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data kasar dari catatan lapangan. Tahap kedua, penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Tahap ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan

berlangsung bertahap dari kesimpulan umum pada tahap reduksi data, kemudian menjadi lebih spesifik pada tahap penyajian data, dan lebih spesifik lagi pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat menggabungkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang dan bersiklus.

Profil Wilayah Penelitian

Desa Tamasaju merupakan salah satu desa dari 9 desa yang ada di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, yang merupakan pemekaran dari Desa Bontolebang dan Desa Bontosunggu. Tinggi dari permukaan laut berkisar antara 0 - 5 m, dengan topografi yang relatif rata. Rumah-rumah cukup bervariasi antara rumah panggung dengan rumah tembok yang seluruhnya beratap seng. Jalanannya beraspal menghubungkan Desa Tamasaju dengan jalan poros Makassar-Gowa, merupakan pula poros jalan desa yang menghubungkan desa ini dengan dunia luar. Selain jalan yang beraspal, juga terdapat jalan-jalan tanah yang menghubungkan antara kampung satu dengan lainnya serta poros jalan desa yang beraspal tadi. Desa Tamasaju dapat ditempuh dari Kota Makassar dengan jarak sekitar 45 Km dan berjarak sekitar 2 Km dari Ibu Kota Kecamatan Galesong Utara.

Secara geografis, batas wilayah desa ini adalah sebagai berikut, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bonto Lebang, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Biringngala, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bonto Sunggu. Sebelah Barat adalah Selat Makassar. Sedangkan pembagian administrasi dan luas wilayah Desa Tamasaju yang luasnya 1,13 km², kurang lebih dari 5,20% dari luas wilayah Kecamatan Galesong Utara 21,75 km², terdiri dari tiga dusun yaitu, Dusun Beba dengan 3 RK (Rukun Kampung) dan 6 RT (Rukun Tetangga) ; Dusun Sawakung, 3 RK dan 6 RT serta Dusun Campagaya dengan 4 RK dan 8 RT.

Desa Tamasaju beriklim tipe C (menurut klasifikasi Schmidt-Fergusson) dengan rata-rata 5 bulan mengalami bulan basah dan 7 bulan mengalami bulan kering. Musim hujan mulai sekitar bulan Oktober dan berakhir sekitar bulan Februari dan musim kemarau mulai pada bulan Maret dan berakhir sekitar bulan September. Kecepatan angin rata-rata 3,17 knots. Kecepatan angin maksimum terjadi umumnya pada bulan November

sampai dengan Februari. Pada bulan-bulan tersebut curah hujan mencapai puncaknya. Suhu udara rata-rata 26,24°C, suhu maksimum dapat mencapai 35°C dan suhu minimum dapat mencapai 13,60°C. Suhu yang panas biasanya terjadi pada bulan Oktober, sedang suhu yang dingin terjadi pada bulan Agustus. Kelembaban udara rata-rata 78,37% dengan intensitas penyinaran sebesar 71,45% (Dinas PU. Kab. Takalar, 2018).

Di desa ini menurut kalender musim penangkapan ikan oleh para nelayan diberlakukan dua musim, yakni Musim Barat sekitar bulan Oktober sampai Februari dan Musim Timur pada bulan Maret sampai dengan September. Pada penangkapan Musim Barat, kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh kelompok *pa'rengge*, dan untuk *pa'torani* kegiatan penangkapan atau pengumpulan telur ikan terbang dilakukan pada bulan Maret atau bulan April (Musim Timur).

Penduduk Desa Tamasaju sesuai registrasi penduduk pada tahun 2018 sebanyak 4106 jiwa, terdiri atas penduduk pria 1960 jiwa dan penduduk wanita 2146 jiwa. Sebagian besar dari penduduk kehidupannya sangat tergantung dari sektor perikanan, dengan komoditi ikan dan berprofesi sebagai nelayan. Fasilitas dan pusat pelayanan di Desa Tamasaju, hampir semuanya terpusat pada Dusun Beba dan sebagian berada pada Dusun Sawakung dan Campagaya. Adapun infrastruktur umum di desa ini, diantaranya adalah; mesjid, kantor desa, tempat pelelangan ikan, balai pertemuan masyarakat, puskesmas, sekolah (TK, SD, SMP). Sementara aktivitas ekonomi banyak difasilitasi oleh took, kios dan warung yang hampir merata di tiap dusun.

Kabupaten Takalar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya perikanan tangkap yang cukup besar di Sulawesi Selatan. Total produksi hasil perikanan tangkap rata-rata mencapai 35.931 ton/tahun (DKP Kabupaten Takalar, 2017). Alat tangkap yang dipergunakan oleh nelayan di desa ini adalah : *purse seine (rengge)*, *gill net (gae)*, *torani*, trawl mini (*rere*), pancing ikan karang dan sebagainya. Selain potensi perikanan tangkap, juga memiliki potensi sumber daya budidaya perikanan meliputi budidaya laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar. Komoditas perikanan budidaya laut adalah rumput laut jenis *eucheuma cottonii*. Komoditas budidaya air payau (tambak) adalah udang windu, bandeng, rumput laut jenis *glacilaria sp* dan garam. Sedangkan komoditas budidaya air tawar (kolam) adalah ikan mas dan nila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Lokal Komunitas Nelayan

Guna mengetahui dan memahami serta menginterpretasikan secara baik berbagai gejala dan peristiwa yang terdapat dalam suatu lingkungan tertentu, kebudayaan memiliki model-model kognitif yang berperan sebagai kerangka untuk memahaminya. Oleh karenanya, pola-pola kelakuan tertentu yang diwujudkan oleh manusia adalah sesuai dengan rangsangan dan tantangan yang sedang dihadapinya. Dengan demikian, suatu kebudayaan merupakan serangkaian aturan, nilai, struktur, kepercayaan, strategi, pengetahuan maupun petunjuk sebagai perwujudan model-model kognitif yang dipakai oleh manusia yang memilikinya guna menghadapi dan mengadaptasi lingkungannya (Soekanto, 2001).

Sistem budaya saling berinteraksi dengan sistem sosial (individu, kelompok dan masyarakat) dimana sistem budaya memberikan arus informasi dan sebaliknya sistem sosial memberikan arus energi (penguatan). Dari interaksi ini, melahirkan suatu persepsi yang mengarah kepada tindakan baik yang dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama berdasarkan cara pandang mereka dan seberapa besar kepentingan atau keterpenuhan hidupnya dapat terakomodasi (Jovchelovitch, S. 2019). Dari cara pandang (persepsi) yang melahirkan aksi atau tindakan didalam sistem sosial masyarakat pantai, menunjukkan adanya realitas pemanfaatan (eksploitasi) dan realitas pelestarian (konservasi) yang disengaja ataupun tidak terhadap sumberdaya alam yang dimilikinya. Tindakan eksploitasi dan konservasi ini banyak terpraktekkan melalui pengetahuan lokal yang mereka miliki sebagai warga yang tetap merawat tradisi. Berikut uraian mengenai unsur-unsur budaya di Desa Tamasaju yang mengatur tindakan setiap warganya (nelayan) dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan.

Struktur Berdasarkan Produksi. Masyarakat nelayan di Desa Tamasaju, terdiri atas kelompok-kelompok sosial (*social groups*). Namun, yang dominan diantaranya ialah "kelompok nelayan" yang mengoperasikan berbagai jenis alat tangkap seperti *renge* (*purse seine*), *rere* (*drift gill net*), *lanra* (*gill net*), serta *torani* dengan alat tangkap *pakkaja* atau *balla-balla* (pengumpul telur ikan terbang). Kelompok ini adalah "kelompok kerja" (*working groups*) yang dinamakan sesuai dengan nama alat yang digunakan seperti unit

kelompok *pa'rengge, pa'rere, pa'joloro, pa'torani*. Pemimpin kelompok disebut (bergelar) "*punggawa*" dan para pengikutnya disebut "*sawi*". Hubungan kerja antara *punggawa* dengan *sawi* itulah membentuk sistem sosial nelayan, yang melibatkan warga masyarakat dan kelompok-kelompoknya. *Punggawa* mempunyai peranan ; (1) memimpin dan mengorganisasikan kelompok untuk menangkap ikan dan atau mengumpulkan telur ikan terbang, (2) menyediakan modal, (3) menyediakan alat tangkap (*fishing gear*), termasuk (5) menyediakan kapal tangkap atau perahu. Sebagai bagian dari peranan pemimpin dan mengorganisasikan kelompok yang dilakukan oleh *punggawa* ialah : perekrutan anggota kelompok, pembagian hasil, pemberian pinjaman kepada para *sawi* dalam bentuk uang atau bahan sebagai biaya hidup (*cost of living*) bagi mereka, termasuk keluarganya yang mereka tinggalkan selama mereka berada di laut. *Punggawa* pada kelompok ini terbagi atas dua orang yaitu : (1) *punggawa darat* yang biasa juga digelar sebagai *pappalele*, dan (2) *punggawa laut* atau *juragan*. *Punggawa darat (pappalele)* adalah pemimpin tertinggi kelompok dan memimpin langsung berbagai kegiatan di darat. Sedang *punggawa laut* atau *juragan*, berperanan memimpin operasional penangkapan ikan dan atau pengumpulan telur ikan terbang di laut. Selanjutnya, *sawi* terdiri atas banyak orang (2 - 10) tergantung dari jenis alat tangkap yang mereka ikuti. Setiap ada *pappalele* yang ingin membentuk usaha perikanan tangkap atau darat, dalam hal tenaga kerja maka ia terlebih dahulu ia mencari keluarga dari pihak ayah dan ibunya. Umumnya *punggawa laut* yang digunakan oleh *pappalele (punggawa darat)* adalah dari pihak keluarga dekatnya. Begitu pula penggunaan *sawi* dalam suatu kelompok. Bila mana tidak ada dari pihak keluarga dan dilingkungan sekitarnya, maka *pappalele (punggawa darat)* dibantu oleh *juragan (punggawa laut)* mencari atau mendatangkan tenaga kerja (*sawi*) dari luar daerahnya (eksogami).

Aspek Nilai dalam Kelompok Kerja. Dalam perspektif sosiologi, penetrasi nilai ke dalam sistem sosial disebut sebagai nilai-nilai sosial (*social value*). Konteks tersebut tidak hanya menyatakan baik dan buruk atau tinggi dan rendah atau pun tingkatan-tingkatan secara gradual diantara keduanya sehingga melahirkan hirarki nilai-nilai sosial, tetapi juga mendasari (memberikan dasar pandangan) dan sekaligus menjadi pedoman atau ukuran terhadap tingkah laku atau tindakan sosial (Sallatang; 1984; Agusanty, 2009).

Kecenderungan seorang *pappalele* untuk memilih *sawi* (buruh) dari keluarga dekatnya didasarkan pada prinsip "*siri'na pacce*"¹⁸. Prinsip tersebut dipandang sebagai alat kontrol dalam perilaku ekonomi nelayan, baik antara individu dalam suatu kelompok, maupun antara satu kelompok dengan kelompok nelayan lainnya. Prinsip "*siri'na pacce*" merupakan wujud tingkah laku masyarakat nelayan di desa ini, yang taat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya demi kelangsungan integrasi sosial mereka. Semakin keluarga dekat yang digunakan, dipandang lebih mudah saling percaya dan adanya tingkat pengawasan yang kurang ketat terhadap *punggawa laut* dan *sawi* yang dilakukan oleh *pappalele*. Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa nilai sosial masih menempati posisi yang lebih tinggi dari pada nilai ekonomi. Bagi mereka nilai sosial yang terpelihara sejak dahulu harus dipertahankan. Hubungan yang didasarkan pada prinsip "*siri'na pacce*" sudah merupakan bagian dari sistem sosial mereka. Hal itu, terlihat pada tingkat kepekaan antara anggota kelompok atau pun antar kelompok nelayan lain saat merasakan suka dan duka dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga disamping dimensi ekonomi yang menjadi tujuan utama dalam sistem usaha mereka, dimensi sosialpun banyak terlibat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kuatnya ikatan kelompok usaha (*working group*) yang mereka geluti.

Pranata Agama dan Kepercayaan. Pada umumnya masyarakat di Desa Tamasaju, beragama Islam. Ketaatan mereka memeluk agama Islam dapat dilihat dari jumlah jemaah yang memadati ruangan Mesjid pada saat hari Jum'at, shalat lima waktu setiap hari, dan upacara-upacara keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad S.A.W. masih tetap

¹⁸ Konteks tersebut erat kaitannya dengan relevansi nilai *siri'* dalam budaya Bugis, Makassar bahwa : (1) *Siri'* dalam sistem budaya merupakan: pranata pertahanan harga diri, kesuksesan dan hukum serta agama, sebagai salah satu nilai utama yang mempengaruhi dan mewarnai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia. Sebagai konsep budaya, ia berposisi regulator dalam mendinamisasi fungsi-fungsi struktur dalam kebudayaan; (2) *Siri'* dalam sistem sosial : berfungsi mendinamisasi keseimbangan hubungan individu dan masyarakat untuk menjaga kekerabatan dan silsilah; dan (3) *Siri'* dalam sistem kepribadian adalah sebagai perwujudan konkret di dalam akal budi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, keseimbangan untuk menjaga harkat dan martabat manusia (Seminar Masalah *Siri'* di Makassar tahun1997). Oleh karena itu meskipun *siri'* menjadi salah satu dari enam nilai utama kebudayaan Bugis yakni kejujuran (*alempureng*), kecendikiawan (*amaccang*), kepatuhan (*asitinajang*), keteguhan (*agettengang*), keusahaan (*reso*) dan *siri'* (malu dan harga diri) itu sendiri, tetapi dalam perannya *siri'* nampak lebih kompleks yaitu sebagai spirit (*semangat*) dan *justifikasi* yang mewarnai aktifitas kelima nilai kebudayaan tersebut.

dipusatkan di Mesjid. Hingga saat sekarang antara upacara adat tradisional dan upacara adat keagamaan masih saja dilakukan. Juga mengenai penghormatan terhadap leluhur masih sering pula dilakukan di kuburan dan di pinggir laut dengan membacakan mantera-mantera berdasarkan budaya lokalnya dan doa-doa keselamatan berdasarkan ajaran Alqur'an. Begitu pula pada setiap pembelian peralatan baru dalam kegiatan operasional penangkapan ikan dan atau pengumpulan telur ikan terbang, seperti perahu, alat tangkap dan sebagainya kesemuanya harus diselamati melalui upacara-upacara yang biasanya dipimpin oleh seorang imam yang selalu di panggil dengan istilah "Guru Baca". Sebagian *pappalele* dan *punggawa laut* sangat mempercayai tentang adanya kekuatan-kekuatan roh yang terdapat pada pantai dan laut, batu, pohon-pohon besar yang lamanya berkisar puluhan tahun. Ada kecenderungan bagi mereka bahwa ketiga unsur tersebut adalah suatu benda hidup yang sakral¹⁹. Maka muncullah pemujaan- pemujaan dalam kegiatan ekonomi kelompok nelayan terhadap ketiga unsur alam tersebut. Mereka berharap agar supaya kekuatan-kekuatan gaib yang penuh misteri yang terdapat di darat dan laut tetap stabil dan memberikan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perjuangan hidupnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sinkritisasi antara kepercayaan lama yang bersifat imanensi dengan kepercayaan dari agama-agama profetis, khususnya Islam yang bersifat transendensi, telah melembaga di dalam masyarakat nelayan di desa ini.

Praktek Pengetahuan Lokal Nelayan dalam Aktivitas Produksi

Sistem pengetahuan lokal atau sering juga disebut *indigenous knowledge* atau *local knowledge* adalah konsep mengenai segala sesuatu gejala yang dilihat, dirasakan, dialami ataupun yang dipikirkan, diformulasikan menurut pola dan cara berpikir suatu kelompok masyarakat. Sistem pengetahuan lokal berkenaan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Ia bisa berkenaan dengan alam semesta (*cosmology*), flora, fauna, benda-benda, aktivitas, maupun peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Sistem

¹⁹ Pemitos-sakralan terhadap ketiga unsur alam tersebut, dalam kenyataannya telah melahirkan kearifan ekologi yang dilihat dari cara berpikir (*the way of thinking*) yang memandang manusia bersama dengan alam fisik berada dalam 'satu sistem' sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan internal dan bersifat persuasif. Penyimpangan-penyimpangan atau hal-hal yang mengganggu harmonisasi hubungan mikrokosmos terhadap makrokosmos dilakukan pemulihan melalui berbagai upacara ritual, oleh karena itu yang banyak dijumpai adalah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kepercayaan, khususnya mitos, kultus, dan ritus serta fetis dan magis (Sallatang, 1987).

pengetahuan lokal sangat terkait dengan lingkungan alam, sosial, maupun budaya di mana kelompok masyarakat itu hidup dan melakukan aktivitas-aktivitas utamanya dalam upaya mempertahankan hidup (termasuk aktivitas dalam bidang ekonomi/produksi). Oleh karena itu, sistem pengetahuan lokal suatu kelompok masyarakat tidak mustahil akan berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Dalam hal ini, sangat mungkin suatu fenomena yang sama, baik berupa benda, flora, fauna, maupun suatu peristiwa, akan diterjemahkan atau ditafsirkan berbeda oleh suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya (Ibrahim, I, 2018). Berdasarkan informasi dari berbagai sumber dan temuan lapangan, diperoleh keterangan mengenai praktek pengetahuan lokal nelayan dalam aktivitas perikanan tangkap di Desa Tamasaju. Konteks yang dimaksud, teruraikan sebagai berikut :

Persiapan di *Fishing Based*. Persiapan terakhir sebelum berangkat adalah upacara selamatan. Acara ini dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada perahu yang akan dipakai untuk menangkap ikan dan atau pengumpul telur ikan terbang, dan tahap kedua acara dilakukan di tepi pantai. Acara tahap pertama diawali dengan pembacaan *Barazanji* dan diakhiri dengan permohonan doa. Peserta upacara seluruhnya adalah pria, dan diutamakan bagi mereka yang dituakan. Dengan duduk bersila mengelilingi makanan berupa "*kaddominya*", bersama dengan nasi ketan (*songkolo*), pisang dan tidak ketinggalan pula pendupaan, "*Guru baca*" melakukan ritualnya yang merupakan bagian proses upacara tersebut. Setelah upacara pokok selesai, barulah peserta upacara disuguhi minuman dan kue. Kue yang disuguhkan harus ada unsur gula merah dan kelapa, biasanya *baje si'ru* atau bubur ketan campur kacang ijo. Pada waktu rangkaian acara telah selesai semua hadirin dibagikan *kaddominya* dan pisang untuk dibawa pulang. Untuk upacara tahap kedua yang dilakukan dipinggir pantai atau dikenal dengan istilah "*attoana turungan*" (keturunan yang dihormati), hanya di lakukan oleh "*guru baca*" dan di ikuti oleh beberapa orang, dengan prosesi upacara menancapkan anyaman bambu di tepi pantai, yang berisi makanan *songkolo* dan ayam. Setelah itu, dilakukan pelepasan rakit-rakit di laut yang terbuat dari batang pisang dan berisi berbagai macam jenis makanan seperti *songkolo*, telur, ayam dan lain-lain sebagainya.

Tujuan dari upacara ini, dimaksudkan agar semua warga kelompok dari perahu, selamat dalam perjalanan serta memperoleh rezeki (hasil tangkapan) yang banyak, dan sampai kembali ke daerah asal. Sebelum atau sesudah upacara *Barazanji* (selamatan) dilaksanakan, biasanya diadakan tukar pikiran dengan *Guru baca* dan tokoh masyarakat tentang waktu pemberangkatan (menentukan hari baik), dan hal-hal lain yang ada sangkut pautnya dengan kegiatan penangkapan yang akan dilakukan

Penentuan Waktu Penangkapan Ikan. Penentuan hari dan saat-saat pada hari tersebut dianggap hari baik berdasarkan tradisi daerah setempat. Biasanya untuk *pa'rengge* pada bulan Oktober atau November (Musim Barat), dan untuk *pa'torani* berangkat pada bulan Maret atau bulan April (Musim Timur). Mereka percaya, bahwa kesalahan dalam penentuan waktu pemberangkatan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bahkan dapat menimbulkan hal yang fatal. Oleh karena itu pencatatan waktu pemberangkatan harus diperhitungkan secara cermat dan seteliti mungkin. Penentuan hari baik dan hari jelek berdasarkan pada tradisi dan kebiasaan yang sudah lama dipertahankan atau berdasarkan pengalaman yang sudah berlangsung kali teruji kebenarannya, seperti hari pemberangkatan sedapat mungkin hari selasa, rabu, sabtu dan minggu. Selain hari itu merupakan pantangan untuk dijadikan sebagai hari pemberangkatan. Konteks ini mendukung dari pada temuan Arief, A. Adri at all (2021) tentang kepercayaan dan *pamali* nelayan pulau.

Jika sudah sampai waktu yang telah ditetapkan, maka pemberangkatan, segera harus dilaksanakan dan tidak boleh ditunda lagi, jika terjadi penundaan dengan alasan tertentu misalnya masih ada anggota kelompok (*sawi*) yang ditunggu, maka perahu berlabuh agak ketengah untuk menunggu yang masih ketinggalan. Kadang-kadang perahu berlabuh semalaman hanya sekedar untuk menunggu anggota kelompok yang ketinggalan, yang penting perahu sudah meninggalkan dermaga tempat menambat, sesuai dengan waktu yang dianggap baik. Semua biaya kecuali biaya upacara selamatan, termasuk biaya persiapan, panjar untuk *sawi*, dan biaya perjalanan untuk sementara ditanggung oleh *pa'palele*. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh *pa'palele* kelak diperhitungkan kembali setelah diadakan bagi hasil, yaitu pada waktu operasi penangkapan telah selesai.

Kegiatan Pemberangkatan. Upacara pemberangkatan, baik armada *pa'torani*, maupun armada *pa'rengge* mengucapkan beberapa bait "*baca*" yang merupakan penerapan dari "*erang pakboya-boyang*"²⁰, antara lain :

"...*Rammang maktonteng irate, kupaillalang sorongang. Naungko mae, pirassiang tangnana biseangku. Rassi ipantarang, rassi ilalang. Oh....., Nabi Karoppo, sareng dalleku ri Allah Taalah, siangang Nabbi Muhammad. Oh....., Nabi Pakkere, Nabbi Hedere, sareng mae dalleku ri Allah Taalah, siangang Nabbi Muhammad...*".

"Pada bait ini, kurang lebih merupakan ungkapan doa dan harapan-harapan agar dapat memperoleh hasil yang memadai. Harapan itu diibaratkan segumpal awan yang turun dari langit ke perahunya untuk mengisi semua ruang yang ada. Begitupun "*Nabi Karoppo*" (dewa-dewa ikan) bersama dengan seluruh pengikutnya rela menyerahkan dirinya sebagai rejeki bagi anggota kelompoknya" (Data Primer Setelah Diolah, 2018)

Setelah selesai diucapkan dalam hati oleh *punggawa laut*, sambil berdiri bertafakkur, setelah itu menggerakkan langkah pertama dengan kaki kanan menyentuh laut. Selanjutnya, setelah ia menuju keperahunya dan berhenti sejenak dengan membaca beberapa bait, yaitu :

"...*Ikau irumpa, areng tojennu ri Allah Taala. Inakke bitti riukkung, areng tojengku ri Allah Taalah. Ri langi tumabbutanu...*".

"Pada bait ini mengungkapkan tentang makna hakiki dari perahu yang digunakan untuk beroperasi. Ungkapan itu merupakan pandangan yang menunjukkan bahwa, perahu itu pada dasarnya menyerupai manusia yang diciptakan atas keinginan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap perahu yang ingin digunakan untuk beroperasi oleh kelompok *pa'torani* maupun *pa'rengge*, maka *punggawa laut* harus dapat berkomunikasi secara batin dengan perahunya. dalam komunikasi ini, keduanya saling memperkenalkan eksistensinya masing-masing. Di samping itu, *punggawa laut* sudah dapat mengetahui apakah perahu itu bersedia untuk mengantar dan menjaga keselamatan seluruh anggota kelompok dalam operasi pengumpulan produksi, ataukah sebaliknya. Selama dalam perjalanan menuju lokasi penangkapan, *punggawa laut* pada saat tertentu melakukan komunikasi secara batin dengan mengharapakan fungsi perahu dapat berjalan sesuai dengan harapan-harapan yang

²⁰ Pada umumnya nelayan di Desa Tamasaju memiliki dan menerapkan dua macam "*erang*", yang merupakan penjabaran dari "*pangngassengang*" (pengetahuan), yaitu : (1) *Erang passimombalang* (pengetahuan pelayaran), yang mencakup : pengetahuan tentang musim, iklim, cuaca, tata cara pelayaran, dan keselamatan pelayaran, dan (2) *Erang pakboyang-boyang* adalah mencakup : sistem penangkapan ikan, manajemen usaha, dan teknologi. Kedua hal tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang mengandung ilmu lahir dan batin. Untuk pengetahuan bathin terdiri dari dua unsur, yaitu : "*baca*" (mantera) dan "*pappasang*" (nasehat-nasehat). *Baca*, dilakukan pada setiap tahap kegiatan penangkapan ikan dan atau pengumpulan telur ikan terbang dengan mengucapkan di dalam hati yang disertai gerakan-gerakan anggota badan tertentu. Sedangkan "*pappasang*" berupa nasehat-nasehat yang merupakan pantangan-pantangan atau larangan-larangan yang dipandang sebagai suatu ketentuan yang memperkuat "*erang passimombalang*" dan "*erang pakboyang-boyang*".

ada. Harapan-harapan tersebut merupakan perwujudan dari kategori “*erang passimombalang*”. (Data Primer Setelah Diolah, 2018).

Setelah selesai membaca bait tersebut di atas, sambil menimba air dengan kedua telapak tangannya, ia membaca lagi bait-bait berikut ini sebanyak tiga kali secara berturut-turut, yaitu :

“...*Areng tojennu ri Allah Taala. Allah Taala ampakjariko biseang. Allah Taala behupahi. I bungan daeng riboko. Bunga intang ritanggana. Rimpaki dalleknu. Ri Allah Taala. siagang Nabbi Muhammad...*”.

“Pada bait ini, juga termasuk “*erang passimombalang*”. Dalam bait ini, *punggawa perahu* atau *punggawa laut* menyampaikan atau memberitahukan kepada perahu bahwa sebenarnya nama asli perahu ada di tangan Allah yang menciptakanmu. Berusahalah mencari rejeki yang diberikan kepadamu oleh Allah dan Nabi Muhammad” (Data Primer Setelah Diolah, 2018).

Setelah selesai bait di atas dibaca dalam hati, lalu kemudian air yang berada di kedua telapak tangan disapukan kebadan perahu, prosesi atau upacara untuk pemberangkatan sudah selesai dilakukan dan perahupun dengan perlahan-lahan meninggalkan Desa Tamasaju dengan istilah *assawakung* (meninggalkan desa untuk mencari daerah tangkapan ikan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan).

Operasi Penangkapan di *Fishing Ground*. Umumnya *pa'torani* mempergunakan alat tangkap berupa *pakkaja*²¹. Alat itu dipasang dengan cara meletakkan dipermukaan laut dan dibiarkan terapung-apung (*ammanyu-manyu*). Jumlah *pakkaja* yang dipergunakan sebanyak 10-20 buah. Setiap *pakkaja* diletakkan sepotong bambu yang panjangnya ± 50 cm yang diikatkan bersama “*gosse*” (sejenis rumput laut yang baunya disenangi ikan terbang). Pada bagian dalam *pakkaja* diikatkan sebuah *balla-balla*, yaitu tempat bertelurnya ikan terbang, dengan ukuran 2 X 1 meter. Selanjutnya, pada bagian luar *pakkaja* diikatkan daun kelapa bersama tandannya.

²¹ Alat tangkap *pattorani* yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk silinder dengan panjang 100 cm – 125 cm, dengan diameter berkisar 50 cm – 60 cm. Alat penangkapan bubu/*pakkaja* sebanyak 30 – 54 buah, tali nilon 20 – 45 kg, bambu yang berfungsi sebagai pelampung dan tempat mengikat alat penangkap/daun kelapa sebanyak 10 – 22 batang, daun kelapa 200 – 470 pelepah. Alat ini dipasang dengan cara meletakkan di permukaan laut dan dibiarkan terapung-apung (*ammanyu-manyu*). Setiap *pakkaja* diletakkan sepotong bambu yang panjangnya kurang lebih 50 cm yang diikat bersama “*gosse*” (sejenis rumput laut yang baunya disenangi ikan terbang). Pada bagian dalam *pakkaja* diikatkan sebuah *balla-balla*, yaitu tempat bertelurnya ikan terbang, dengan ukuran 2x1 meter. Selanjutnya, pada bagian luar *pakkaja* diikatkan daun kelapa bersama tandannya.

Dalam perjalanan menuju lokasi penangkapan dan atau pengumpulan telur ikan terbang, lokasi daerah tangkapan ditentukan oleh *punggawa laut*, dan setelah lokasi daerah penangkapan ditentukan, mulailah mereka mencari tempat berkumpulnya ikan-ikan terbang, dengan mempergunakan alat penciumannya untuk mengenali bau yang khas dari ikan tersebut. Selanjutnya, untuk meyakinkan apa benar terdapat gerombolan ikan terbang disekitar itu, maka *punggawa laut* menyelupkan tangannya sampai pada siku. Bilamana air laut “terasa hangat”, maka semakin yakinlah mereka bahwa terdapat gerombolan ikan terbang disekitar air laut itu. Disamping itu dengan kepekaan alat penciuman *pa'torani* berdasarkan pengalamannya, dapat membedakan antara bau ikan terbang dan yang bukan dengan jarak yang relatif cukup jauh. Selanjutnya *punggawa laut* dalam hal ini yang menjadi unit analisis adalah *punggawa laut pa'torani*, membacakan bait-bait sebelum menurunkan *pakkajanya* ke dalam air laut yang dapat mengundang kehadiran ikan-ikan terbang untuk bertelur di dalamnya.

Bait-bait itu antara lain :

“...*Pole torani....., Pole torani....., Pole torani....., Riallakna bombang, ritekona arusu, ribelebenna taka. Battuasengmako mae, mannuntung itimboro-irawa, irawa-rate, ripasekre-sekreanna, ripakkare-karenanna, ribennenu. I pantarammintu tulolonna satangnga lompowa pungkuna...*”.

Setelah alat *pakkaja* dipasang di air yang jaraknya dekat dengan perahu dimana bacaan bait di atas telah selesai, maka semua *sawi* harus diam sejenak sambil mengamati ikan-ikan yang mendekati *pakkaja*. Bilamana ikan-ikan sudah semakin mendekat, maka selanjutnya dibacakan bait berikut ini :

“...*la riolo, iangngallei bungasakna. la riboko, iangngallei pallatea....*”.

“Khusus pada bait-bait diatas, adalah kategori baca “*erang pakboyang-boyang*”. Ungkapan pada bait ini, merupakan suatu pernyataan yang memanggil ikan-ikan untuk berdatangan ke tempat yang telah disediakan, yaitu alat tangkap berupa *pakkaja* yang dilengkapi dengan *balla-balla*. Ungkapan itu kurang lebih berarti; “datanglah, datanglah wahai ikan terbang, disela-sela ombak, dari gerakan-gerakan arus, dan gunung-gunung karang. Datanglah semua kemari, baik yang berada di utara, di selatan, maupun yang berada dibagian bawah dan bagian atas (permukaan air). datanglah kemari ke tempat berkumpul dan tempat bermainnya istri-istrimu.”(Data Primer Setelah Diolah, 2018).

Berdasarkan pengetahuan-pengetahuan tentang *erang passimombalang* dan *erang pakboya-boyang*, nelayan-nelayan di Desa Tamasaju sangat percaya dan yakin, bahwa

tahap-tahap tersebut harus dilakukan dengan sesungguhnya. Bagi seorang *punggawa laut*, sakral baginya untuk tidak melaksanakan tahap-tahap kegiatan yang telah ada sejak dahulu. Bilamana pada tahap kegiatan itu tidak terlaksana dengan baik, maka timbul rasa kekhawatiran akan keselamatan pelayaran dan kurangnya rezeki yang akan didapatkan bagi kelompoknya. Ada kecenderungan bagi seorang *punggawa laut*, "yakni" bahwa dengan tidak terlaksananya tahap-tahap tersebut dengan baik, akan menimbulkan kemarahan bagi dewa-dewa laut. Selain itu, juga ada semacam nasehat-nasehat (*pa'pasang*) yang berupa pantangan yang harus dijaga oleh setiap anggota kelompok. Pantangan-pantangan atau larangan-larangan dipandang sebagai suatu ketentuan yang memperkuat *erang passimombalang* dan *erang pakboya-boyang*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BDT (53 tahun, *punggawa laut*) bahwa :

"Tantangan yang sering dihadapi oleh nelayan dalam melakukan operasi penangkapan ikan di laut adalah munculnya hantu laut. Adapun tradisi yang sering digunakan untuk menjinakkannya berdaarkan warisan leluhur mereka yaitu dengan memberi daun sirih atau rokok. Dengan begitu sering dilihat hasilnya dengan mengagumkan bahwa hantu laut itu tiba-tiba menghilang setelah sirih atau rokok terbuang ke laut. Penggunaan rokok dimaksudkan sebagai dupa dan daun sirih sebagai simbol roh jahat. Disamping itu ada hal semacam aturan tambahan yang harus dipenuhi setiap kali merekrut sawi baru atau mengikutkan orang baru dalam perjalanan penangkapan ikan. Kata-kata seperti tena'ji (tidak ada), bersin, dipantangan untuk diucapkan atau dilakukan dalam operasi penangkapan ikan. Semua pantangan itu dikenal dan dipercayai para punggawa laut dan sawi" (Data Primer Setelah Diolah, 2018).

Perilaku dan cara berfikir dalam sistem penangkapan dan atau pengumpulan telur ikan terbang oleh nelayan di desa ini, sesungguhnya merupakan keterangan yang didapatkan berdasarkan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang di wariskan dari para leluhur mereka. Konteks ini merupakan bentuk respon yang dilakukan oleh nelayan lokal/tradisional sebagai wujud adaptasi terhadap sumberdaya alam yang dieksploitasi. Hal tersebut sesuai dengan konsep strategi adaptasi yang dinyatakan oleh Bennett (1976), bahwa pelestarian praktek-praktek yang sifatnya lokalitas, sebagai suatu tindakan spesifik yang dipilih oleh individu atau masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan, dengan suatu derajat keberhasilan yang dapat diprediksi.

Kembali ke *Fishing Based*. Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang ada di desa ini, telah memudahkan terjadinya interaksi antara nelayan dan pelaku ekonomi lain dari luar desa dalam melakukan transaksi hasil tangkapan nelayan. Pelaku-pelaku ekonomi itu

adalah; nelayan itu sendiri (*punggawa laut* dan *sawi*), *punggawa darat* atau pemberi modal (*pappalele*), pedagang pengecer (*paggadeng*), pedagang pengumpul, dan nelayan *pa'bise-bise* (*broker*). Pendaratan ikan di TPI terjadi sebanyak dua kali, yaitu pendaratan pertama terjadi pada pagi hari, sekitar jam 06.00 WITA, dari hasil tangkapan *pa'lanra* dan *pa'rengge*. Sedang pendaratan ikan kedua terjadi pada siang hari, sekitar jam 11.00 WITA dari hasil tangkapan *pa'rere* dan *pa'jolloro*. Kesibukan di TPI mulai terlihat pada pagi hari, jam 05.30 WITA, untuk menunggu datangnya nelayan dari laut memasarkan hasil tangkapannya. Para pedagang ikan lokal maupun dari luar Desa Tamasaju, dari yang menggunakan kendaraan mobil sampai yang menggunakan sepeda "*pa'gandeng juku*", mulai nampak sibuk bernegosiasi dengan *pappalele* dari masing-masing unit kelompok nelayan dalam menentukan transaksi harga yang ditawarkan berdasarkan jenis ikan yang ditangkap oleh kelompoknya. Sekitar jam 06.00 WITA, perahu-perahu nelayan dari berbagai unit kelompok baik *pa'rengge* maupun *pa'lanra* mulai berdatangan. Setibanya di TPI, masing-masing *punggawa laut* beserta *sawi-sawinya* membawa hasil tangkapan mereka kepada *pappalele* (*punggawa darat*), yang telah menunggunya, dan selanjutnya segala urusan penjualan dan pemasaran hasil tangkapan sepenuhnya diserahkan kepada *pappalele*, yang telah menjadi bagian dari peranannya memimpin dan mengorganisasikan kelompok.

Sistem bagi hasil yang mereka perlakukan secara umum pada setiap unit kelompok adalah "Sistem Bagi Tiga" setelah ongkos dikeluarkan (biaya operasional + 10% dari hasil penjualan sebagai upah jasa pemasaran untuk *pappalele*), dengan sistem pembagian sebagai berikut : satu bagian pemilik perahu, satu bagian pemilik alat tangkap, dan satu bagian *sawi* (*juragan* + *sawi*). Dimana pelaksanaan bagi hasilnya dilakukan setelah selesai setiap satu trek (periode) atau satu siklus kegiatan operasi penangkapan ikan dan atau pengumpulan telur ikan terbang yang lamanya tergantung dari alat tangkap yang mereka operasikan atau musim penangkapan yang ditentukan oleh *punggawa laut*.

Berdasarkan keterangan dari informan bahwa, anggota-anggota kelompok (*juragan* dan *sawi*), tidak ikut menyaksikan dalam transaksi penjualan ikan hasil tangkapan, karena mereka sangat menghormati dan percaya terhadap *pappalele*nya, berapapun yang dikatakan oleh *pappalele* kepada anggota kelompoknya sebagai hasil penjualan bersih yang

harus dibagi, maka mereka harus meyakini kebenarannya berdasarkan prinsip "*siri'na pacce*" sebagai keterlekatan sosial dalam tindakan ekonomi. Konteks ini dapat dijelaskan dengan mengikuti cara berpikir Granovetter & Swedberg (1992), bahwa aktor sangat taat dan patuh terhadap aturan dari sistem dan norma yang ada. Karena ia telah menginternalisasi nilai dan norma tersebut melalui sosialisasi. Aktor hanya bertindak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh aturan moral yang ada, di luar dari itu merupakan sesuatu yang asing dan dihindari. Granovetter memandang bahwa, keterlekatan sosial berlangsung pada realitas relasi sosial antar aktor ekonomi. Keterlekatan sosial terkandung dalam relasi inter personal aktor ekonomi dan jaringan sosial. Dengan demikian, keterlekatan sosial diekspresikan dalam interaksi aktor dengan orang lain. Hal ini terjadi karena proses ekonomi terstruktur dalam hubungan non pasar seperti keluarga, kekerabatan serta komunitas.

SIMPULAN

Nelayan di Desa Tamasaju memiliki kekayaan pengetahuan lokal yang sangat menunjang aktivitas mata pencaharian mereka. Sistem pengetahuan lokal nelayan sarat dengan pola-pola yang mempraktekkan sistem pengetahuan tradisional yang bersumber dari pengalaman yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bertahannya sistem pengetahuan lokal disebabkan oleh kuatnya kepercayaan bagi nelayan lokal yang memandang nilai keseimbangan mikro kosmos terhadap makro kosmos sesuatu yang fundamental dalam interaksi manusia dan alam fisik. Pengetahuan lokal yang dimiliki oleh komunitas nelayan juga sekaligus merupakan strategi adaptasi dan wujud daya sentripetal sebagai nilai tradisi yang tetap harus dipertahankan dan direproduksi dalam menanggapi berbagai fenomena alam yang dihadapi serta dinamika perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusanty, Harnita. (2009). *Kemitraaan Usaha dan Jaringan Sosial Pembudidaya Rumput Laut di Kabupaten Takalar. Studi Kasus Desa Punaga, Kabupaten Mangarabombang*. (Disertasi). Makassar. PPS-UNHAS.
- Arief, A. Adri, Agusanty, H., & Mustafa, M. D. (2021). Kepercayaan dan Pamali Nelayan Pulau Kambuno di Sulawesi Selatan. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5 (1), 56–68.
- Bennet, J.W. (1976). *The Ecological Transition: Cultural Anthropology and Human Action*. New York: Pergamon Press Inc.
- Bourdieu, P. (1990). 'Structures, Habitus, Practices', dalam Co Lemert (peny.) *Social Theory: The Multicultural and Classic Readings*. Boulder: Westview Press. Hlm. 470-484
- Dinas PU. (2018). *Laporan Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2018*. Takalar.
- DKP. (2017). *Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2017*. Takalar.
- Granovetter & Swedberg. (1992). *The Handbook of Economic Sociology*. Amerika Serikat: Princeton University Press.
- Ibrahim, I. (2018). Sistem Kepercayaan Sebagai Basis-Struktur Sosial Masyarakat Nelayan Liukang Tupabbiring Di Kabupaten Pangkep. *Al-Qalam*, 16(2), 141–152.
- Jovchelovitch, S. (2019). *Knowledge in context: Representations, community and culture*. Routledge.
- Keraf, A.Sonny. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta. Kompas.
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Salam, (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Menggugat Doktrin Kuantitatif*. Makassar. Universitas Hasanuddin.

- Sallatang, M. Arifin. (1984). *Inventarisasi Nilai, Norma, Kepercayaan, Sistem Pengetahuan, Teknologi dan Simbolisasi*. Ujung Pandang. Proyek Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Sallatang, M. Arifin. (1987). *Perubahan Perilaku dan Cara Berpikir*. Pidato Pengukuha Guru Besar Tetap dalam Ilmu Sosiologi Pedesaan Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang. LEPHAS.
- Soekanto, Sarjono. (2001). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Strauss, C. dan N. Quinn (1997). *A Cognitive Theory of Cultural Meaning*. Cambridge: Cambridge University Press.

Chapter 4

JARINGAN SOSIAL NELAYAN

RELASI AKTOR PENGELOLAAN IKAN KARANG DI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Muhammad Dalvi Mustafa,
Ruslan Smith



Muhammad Dalvi Mustafa, adalah Dosen pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Makassar. Meraih gelar S1 Sosial Ekonomi Perikanan di Universitas Hasanuddin (2011), Master of Science di bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Universitas Gadjadaha Yogyakarta (2015).

* Email : dalvimustafa@gmail.com

PENDAHULUAN

latar Belakang

Masyarakat pesisir yang sering didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang tinggal di pinggir pantai dan menggantungkan hidupnya pada hasil sumber daya laut memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat petani. Dalam perspektif antropologis yang berada daerah pantai, menciptakan realitas masyarakat nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang menjadi kerangka berpikir atau referensi perilaku masyarakat pesisir dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Masyarakat petani yang menghadapi suatu sumberdaya yang dapat dikontrol dengan baik berbeda dengan masyarakat pesisir atau nelayan yang dimana tempat mata pencahariannya bersifat *open acces* sehingga tidak ada kepastian dalam mencari nafkah.

Komunitas nelayan Sulawesi Selatan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya perikanan dan kelautan sebagai sumber daya milik bersama. Ketidakmampuan nelayan dalam melakukan diversifikasi dan penguasaan teknologi serta pendistribusian ekonomi sehingga sangat bergantung pada kondisi sumber daya perairan yang ada disekitarnya, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam kehidupan masyarakat pesisir. Sumber daya tersebut bergerak dinamis dan fluktuasi musim penangkapan, Hal ini akan mengganggu konsistensi perolehan pendapatan nelayan. Rendahnya keterampilan para nelayan akan membuat rendahnya diversifikasi kegiatan

penangkapan dan keterikatan yang kuat terhadap satu jenis alat tangkap telah memberi kontribusi/pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan nelayan (Kusnadi, 2003,8).

Salah satu komunitas nelayan yang terdapat di Sulawesi Selatan adalah masyarakat nelayan di Pulau Desa Tarupa Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Masyarakat nelayan ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat nelayan lainnya tetapi akses pemanfaatan yang dibatasi oleh aturan formal memberikan kecenderungan penguasaan yang berbias pada pola eksploitasi berlebih. Desa Tarupa adalah salah satu desa yang berada dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate yang didalamnya terdapat beberapa suku asli sebagai pedoman tata perilaku masyarakat yaitu Suku Selayar, Suku Bugis, dan Suku Bajo. Masyarakat di Desa Tarupa didominasi oleh nelayan sebagai pekerjaan utama mereka sehingga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dalam ketersediaan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah perairan Tarupa. Konsentrasi pola hidup masyarakat nelayan yang berhubungan langsung dengan sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka, menyebabkan kondisi mereka yang terisolasi dalam satu daerah saja. Paradoks yang tercipta dalam kehidupan nelayan di Desa Tarupa sebagai wilayah Kawasan konservasi menjadi kelompok yang tidak dengan mudah atau bebas dapat melakukan aktivitas penangkapan karena adanya regulasi dan aturan yang wajib secara langsung maupun tidak langsung untuk dipatuhi oleh para nelayan tersebut.

Gejolak permasalahan layaknya dua sisi mata uang, antara pelestarian sumberdaya perikanan khususnya pengelolaan perikanan karang, dengan persoalan sosial ekonomi nelayan Desa Tarupa. Dalam hak pemanfaatan sumberdaya perairan secara umum, belum mampu membawa pada adanya solusi yang komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta keberlanjutan sumberdaya perikanan khususnya pada perikanan karang. Fokus pada manfaat kawasan konservasi perairan yang kurang berwujud dan ekonomis, menyelaraskan tujuan kawasan konservasi dengan nilai budaya dan sosial, dan tingkat transparansi yang lebih tinggi saat menggambarkan hasil kawasan konservasi adalah cara-cara yang dapat mendukung dukungan jangka panjang terhadap pelaksanaan kawasan konservasi perairan (Chaigneau & Brown, 2016).

Salah satu alternatif dalam internalisasi kebijakan dan motivasi nelayan untuk mau ikut pada proses konservasi adalah dengan adanya peran serta memberdayakan para aktor

sebagai *opinion leader* maupun *decision maker* pada komunitas nelayan di Kawasan konservasi perairan. Hal ini didasari karena kekuatan simpul modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat nelayan Desa Tarupa terhadap keberadaan para-para aktor sebagai bentuk model adaptasi sosial yang dibangun dalam bingkai relasi patron klien masih kuat di dalam komunitas nelayan. Hubungan patron-klien ini diharapkan menetralkan kegunaan sosial nelayan karena tidak memperoleh penghasilan yang memadai untuk menopang kelangsungan hidup mereka secara normal (Kusnadi, 2007,12). Hubungan patron klien dalam komunitas nelayan yang masih sangat kental sebagai suatu budaya turun temurun, yang akan menciptakan dinamika kelompok yang sangat kompleks dalam pelaksanaan hidup nelayan. Kondisi masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan menunjukkan hubungan *patron-klien* yang masih sangat signifikan jika dibandingkan dengan masyarakat pertanian atau masyarakat perkotaan, sehingga kemajuan disisi produksi akibat modernisasi yang berlangsung belum diikuti sepenuhnya oleh pergeseran hubungan *patron-klien* ke hubungan industrial yang sifatnya kontraktual (Salman,2006).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para aktor dalam model relasi sosial terhadap pengelolaan perikanan karang di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan tahun 2021 (Januari sampai Maret) di Desa Tarupa Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan aktivitas kenelayanan di lokasi tersebut masih belum mematuhi secara baik peraturan yang berlaku di Kawasan taman nasional. Metode penelitian yang dilakukan secara deskriptif ekplanatori dengan menggali fenomena-fenomena secara mendalam peran aktor yang terdapat di kehidupan masyarakat pesisir khususnya komunitas nelayan. Pengumpulan data dilakukan secara observasi dan *indept interview* dengan penentuan informan menggunakan metode *snowball sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif menggunakan runutan Miles dan Haberman (1992) yang dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Profil Wilayah Penelitian

Secara administratif Taman Nasional Taka Bonerate termasuk dalam Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari ibukota kabupaten, ditempuh perjalanan laut kurang lebih 8 jam untuk mencapai kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Sebanyak 15 pulau di Taman Nasional Taka Bonerate, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan menyelam, snorkeling dan wisata bahari lainnya. Karang atol di Taman Nasional Taka Bonerate merupakan karang atol terbesar ketiga di dunia, setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maldive, dengan luas seluruh kawasan mencapai 530.765 hektare (Balai Taman Nasional Taka Bonerate, 2009a). Selain itu, Taman Nasional Taka Bonerate kaya dengan sumberdaya alam, antara lain: karang (231 jenis), ikan (301 jenis), moluska (216 jenis), reptilia (4 jenis), krustasea (15 jenis), mamalia (3 jenis), ekinodermata (33 jenis), lamun (9 jenis), rumput laut (47 jenis), hiu (5 jenis), penyu (4 jenis), pari (4 jenis), burung darat (11 jenis), burung pantai (13 jenis), dan burung laut (9 jenis) (Marsuki, *et al.*, 2013).

Desa Tarupa adalah salah satu desa yang terletak di bagian timur laut kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Secara geografis Pulau Tarupa Besar terletak pada 06° 29' 35,9" LS dan 121°08' 01,3" BT, dengan luas daratan sekitar ± 40 Ha. Bentuk pulau memanjang Utara - Selatan dengan panjang sekitar 750 -1000 m dan lebar sekitar 200 m - 300 m. Desa tarupa yang berkependudukan kurang lebih sekitar 1400 orang dengan pembagian 3 wilayah Dusun diantaranya Dusun Tinabo, Dusun Belang-Belang dan Dusun Tinanja yang dihuni oleh 3 jenis ras suku seperti suku Buton, suku Bugis, dan suku Bajo yang mendominasi. Menurut keterangan dari beberapa narasumber, masyarakat Pulau Tarupa mayoritas berasal kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara yang melakukan pemanfaatan sumberdaya ikan lalu merasa puas dengan hasil tangkapan dan kemudian memutuskan menetap di Tarupa, selebihnya masyarakat yang berasal dari pulau Sembilan dan selayar dengan tujuan mencari ikan dan berdagang lalu menetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Aktor dalam Masyarakat Nelayan Tarupa

Kehidupan masyarakat Desa Tarupa tidak terlepas dari peran-peran tokoh masyarakat yang mampu membawa ke arah perbaikan daerah tersebut. Pembentukan tokoh adalah hasil dari proses terhadap pemberian dan sumbangsih kepada Desa Tarupa untuk melakukan perubahan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dampak geografis Desa Tarupa sebagai satu daerah yang terbentuk dalam Kawasan pulau-pulau secara langsung menciptakan tokoh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai faktor yaitu melalui aktivitas produksi ekonomi masyarakat, proses keagamaan, serta proses kebudayaan yang berlangsung secara turun temurun di wilayah tersebut dan selain itu adanya tokoh yang tercipta dari kontestasi politik masyarakat di Desa Tarupa.

Kondisi ketidakpastian hidup senantiasa membayangi kehidupan nelayan di Desa Tarupa. Untuk mengantisipasi ketidakpastian pendapatan dan menjaga kelangsungan hidup, masyarakat nelayan mengembangkan jaringan hubungan tradisional yang bersifat partron-klien untuk menciptakan rasa aman sosial. Hal ini menjadi dasar penciptaan tokoh masyarakat yang diakibatkan karena aktivitas ekonomi masyarakat di Desa tarupa. Tokoh juragan atau *punggawa* dalam bahasa local yang dianggap sebagai juru selamat bagi nelayan kecil mampu memberikan figur ketokohan dalam masyarakat Desa Tarupa sebagai pelindung perekonomian mereka dan bahkan pada sampai sisi sosial masyarakat pesisir. Putra Ahimsa (1988) menjelaskan bahwa hubungan patron klien di kalangan orang Bugis dapat dilihat pada pandangan mereka tentang konsep *ajjoareng* dan *joa*, di *ajjoareng* adalah orang yang menjadi ikutan atau panutan, dan ini bisa seorang *punggawa*, *aru* ataupun pemuka masyarakat lainnya dan *joa* adalah pengikut-pengikut yang berasal dari golongan *maradeka* (merdeka) yang setia. Dapat diartikan bahwa *punggawa* merupakan seseorang yang dapat menjadi panutan dalam lingkungan sekitarnya dan memiliki pengikut setia. Selain menjadi panutan bagi para bawahannya, syarat menjadi *punggawa* adalah bisa memberi perlindungan kepada para bawahannya sehingga bawahannya bisa tenang dan nyaman mengikuti *punggawa* tersebut. Dalam aspek lingkungan masyarakat pesisir, *punggawa* diartikan bukan hanya sebagai seorang panutan dan memiliki pengikut

saja, tetapi *punggawa* di kalangan masyarakat pesisir dikenal sebagai pemilik kapal dan alat produksi lainnya untuk melaksanakan suatu proses penangkapan.

Wilayah Desa Tarupa yang seluruh masyarakatnya memeluk agama islam menciptakan ketokohan sebagai tokoh agama yang mampu memberikan perubahan pada masyarakat Desa Tarupa. Keberadaan tokoh agama yang terdapat di Desa Tarupa mampu memberikan perubahan terhadap tata perilaku masyarakat yang negative dan menyimpang menjadi lebih baik. Soekanto (1990) menjelaskan kepemimpinan atau *leadership* adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau yang dipimpin atau sebagai pengikutnya. Awal mula tokoh agama yang datang untuk menyiarkan ajaran islam sampai saat ini telah dianggap berhasil dengan mengajarkan cara mengaji yang benar sebagai tonggak agama bagi generasi muda dan anak-anak di Tarupa untuk memberikan pondasi tata perilaku yang baik di dalam lingkungan desa tersebut. Hal ini menciptakan rasa simpatik dan hormat kepada tokoh agama yang terdapat di Tarupa sebagai salah satu tokoh yang mampu memberikan gagasan dan keputusan dalam tata Kelola kehidupan masyarakat di Desa Tarupa. (Veeger,1991:20) menjelaskan bahwa mula-mula pada awal berkembangnya akal budi manusia memakai gagasan-gagasan keagamaan untuk menerangkan semua gejala dan kejadian, sehingga semua gejala alam, hidup-mati, suka-duka, untung-rugi yang dialami oleh manusia adalah kehendak dan tindak dari Yang Mahakuasa.

Pada aspek kebudayaan sebagai warisan turun temurun masyarakat Tarupa menjadi pedoman tata kelakuan di masyarakat nelayan. Keberagaman dari setiap suku yang terdapat di wilayah ini menciptakan tokoh-tokoh kebudayaan yang berasal dari suku Bugis, Selayar dan Bajo sebagai pemimpin yang diakui untuk dapat memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah Desa Tarupa. Tradisi kebudayaan masyarakat di Desa Tarupa masih dipengaruhi oleh peninggalan kerajaan-kerajaan dulu yang terdapat di Sulawesi selatan, baik itu peninggalan benda-benda sejarah maupun pengetahuan-pengetahuan lokal yang terdapat didalamnya seperti norma, nilai-nilai, dan kepercayaan sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat. Hal ini mempengaruhi keberadaan tokoh yang berasal dari warisan secara turun temurun garis keluarga yang dianggap mampu menjadi sosok panutan dalam berperilaku di Desa Tarupa, baik pada kehidupan di

lingungan daratan maupun pada saat aktivitas produksi penangkapan. Berujuk pada teori Durkheim dimana menganggap bahwa perilaku manusia sebagai sesuatu yang dibentuk oleh kultur dan struktur social mereka, sehingga melahirkan solidaritas yang kuat didalamnya yang terbagi dua yaitu solidaritas mekanistik dan solidaritas organis. Fenomena yang terjadi di Desa Tarupa beberapa tokoh adat atau yang berasal dari kebudayaan tidak sebagai tokoh yang mampu menjadi pemberi jaminan ekonomi tetapi lebih menekankan terhadap jaminan social dan kenyamanan tinggal di dalam wilayah Desa Tarupa.

Implikasi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menetapkan wilayah Desa sebagai daerah otonom yang memiliki hak pemerintahan desa serta kewenangan dan kewajiban yang lebih luas dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi serta perkembangan desanya. Desa Tarupa juga menjadi bagian dari sistem yang dimaksud, sehingga melahirkan ajang politik yang terbangun dalam masyarakat Tarupa. Proses pemilihan Kepala Desa serta aparat pemerintahan lainnya, dilakukan secara demokrasi, sehingga menimbulkan adanya ajang adu politik dalam masyarakat dalam menarik dan mempengaruhi masyarakat. Pola tersebut secara langsung menciptakan aktor yang merupakan tokoh politik dengan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat pesisir Desa Tarupa yang diperankan oleh Kepala Desa.

Kepala Desa sebagai tokoh aktor politik yang dibuktikan dengan adanya pengikut setia dan menjadi panutan bagi para pengikutnya dalam melakukan aktivitas kehidupan sosial ekonomi di Desa Tarupa. Dapat disimpulkan bahwa, ada tiga aktor penting yang ditokohkan di desa ini, yaitu, masing-masing adalah; *punggawa* dalam hal aktivitas produksi dan ekonomi komunitas nelayan, imam desa dalam hal keagamaan, serta kepala desa dalam hal aktivitas politik desa. Jika ketokohan sebagai otoritas, maka konteks ini telah dijelaskan oleh Max Weber tentang kepemimpinan, Max Weber membagi otoritas menjadi tiga macam, yaitu otoritas yang bersifat tradisional, kharismatik dan legal rasional. Otoritas tradisional berdasarkan kepercayaan bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Otoritas

kharismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat terhadap kesaktian dan kekuatan mistik atau relegius seorang pemimpin. Otoritas legal rasional berdasarkan kepercayaan terhadap tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin (Eissenstadt dalam Budiardjo (eds.), 1991: 15; Pababbari, 2010: 588).

Perilaku Aktor dalam Masyarakat Desa Tarupa

Keberadaan tokoh yang berasal dari legitimasi aktivitas produksi ekonomi, agama maupun budaya adalah aktor yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat pesisir di Desa Tarupa. Panutan dan pengikut para tokoh tersebut menciptakan legitimasi dari masyarakat sebagai orang yang mampu membawa perubahan terhadap kondisi kehidupan masyarakat pesisir Tarupa. Dengan adanya pengakuan atau legitimasi dari masyarakat memberikan dampak terhadap terciptanya kekuasaan dari setiap aktor untuk menentukan arah pelaksanaan kehidupan masyarakat di wilayah Tarupa. Kekuatan para aktor dalam menjalankan perannya sebagai perilaku yang dapat diikuti secara tidak sadar dapat menginternalisasi cara berperilaku masyarakat Desa Tarupa mengikuti apa yang dilakukan oleh para aktor tersebut. Perilaku tersebut yang dilakukan oleh para aktor di Desa Tarupa merupakan habitus masyarakat desa tersebut yang secara praktis diikuti oleh masyarakat berdasarkan kekuasaan dan pengakuan dari para pengikut di Desa Tarupa. Bourdieu (1993) menjelaskan bahwa Habitus tumbuh dalam masyarakat secara alami melalui proses sosial yang sangat panjang, terinternalisasi dan terakulturasi dalam diri masyarakat menjadi kebiasaan yang terstruktur secara sendirinya.

Bourdieu memandang kekuasaan dalam konteks teori masyarakat, dimana ia melihat kekuasaan sebagai budaya dan simbolis dibuat, dan terus-menerus kembali dilegitimasi melalui interaksi agen dan struktur. Peran agen yang dilakukan oleh para aktor yang terdapat di Desa Tarupa memberikan gambaran penentuan tata cara berperilaku masyarakat di Desa tersebut sangat tergantung bagaiman kemampuan para aktor menjadi role model perilaku. Konteks habitus yang diperankan oleh para aktor di Desa Tarupa dibuat melalui proses sosial, bukan secara individu yang mengarah ke pola yang abadi dan ditransfer dari satu konteks ke konteks lainnya, tetapi yang juga bergeser dalam kaitannya dengan konteks tertentu dan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat diartikan peran aktor bukan hanya mampu mempengaruhi pengikutnya berdasarkan asal dari terciptanya tokoh

tersebut tetapi mampu bergeser pada bidang lainnya salah satunya adalah penerapan Kawasan konservasi perairan di wilayah Desa Tarupa.

Dinamika kehidupan lingkungan pesisir Desa Tarupa menjadikan wilayah tersebut sebagai arena dari setiap aktor untuk mampu menarik dan mempengaruhi masyarakat desa sebagai pengikat setia untuk mampu memperoleh dan menciptakan perilaku kekuasaan peran dari ketiga tokoh tersebut. Arena tersebut menjadi medan kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal), dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan bagi setiap para aktor di Desa Tarupa. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tokoh yang berasal dari perilaku ekonomi yaitu pemilik modal atau *punggawa* mampu mengungguli dari ketiga tokoh lainnya sebagai peran yang diunggulkan karena mampu menyediakan modal bukan hanya modal ekonomi saja, tetapi telah masuk pada ranah modal politik dan modal sosial bagi masyarakat di Desa Tarupa. Modalitas dalam pandangan Pierre Bourdieu *capital* (modal) adalah sesuatu hal yang memungkinkan seseorang memenangkan pertarungan di arena atau suatu bidang. Menurut Bourdieu, *capital* adalah sumber kekuasaan yang dapat diperoleh dalam berbagai arena (Jenkins, 2010).

Perilaku *punggawa* sebagai aktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat pesisir di Desa Tarupa juga telah bertransformasi sebagai kekuatan politik dan menjadi kekuasaan yang mampu memberikan pengaruh besar baik dari tata kerja produksi ekonomi maupun tata perilaku kehidupan masyarakat pesisir di Desa Tarupa. Scott (1993) menjelaskan bahwa legitimasi patron bukanlah hanya fungsi linear dari neraca-neraca pertukaran, terdapat beberapa ambang batas atau titik-titik menonjol dalam neraca tersebut, yang menimbulkan perubahan-perubahan tajam dalam legitimasi, terutama berhubungan dengan syarat minimum yang secara tradisional dituntut oleh petani (klien) yang tidak dapat ditawar berupa keamanan fisik dan kehidupan subsisten. Bourdieu menggambarkan bahwa dalam suatu komunitas masyarakat terdapat deretan asumsi dan kepercayaan yang berkembang tanpa tidak pernah mereka pertanyakan sehingga didominasi oleh suatu situasi yang sulit karena pengaruh yang kuat dari hirarki social tersebut yang disebut sebagai *doxa* (Jenkins 2004). Dengan kepercayaan yang tinggi dalam pola hirarki sosial yang bukan hanya dalam ekonomi saja memberikan keterpakauan yang tinggi karena

terciptanya kesadaran praktis (*practical consciousness*) pada komunitas nelayan kecil terhadap peran aktor oleh punggawa sebagai penyedia jaminan sosial masyarakat di Desa Tarupa. Giddens (2010) menjelaskan bahwa kesadaran praktis terdiri dari segala sesuatu yang diketahui dengan jelas oleh para aktor tentang bagaimana terus bertindak dalam konteks kehidupan sosial tanpa mereka mampu memberikan ungkapan diskursif terhadap segala sesuatu itu.

Bentuk Relasi Aktor di Desa Tarupa

Keberadaan aktor yang berasal dari adaptasi ekonomi, pola agama, dan warisan kebudayaan mampu diperankan dengan baik oleh masing-masing tokoh di wilayah Desa Tarupa. Kemampuan mempengaruhi masyarakat Tarupa untuk ikut berperilaku yang sama dari masing-masing aktor memberikan kemampuan para masing-masing tokoh menjadi orang yang dihormati dan disegani di dalam masyarakat Tarupa. Dalam pola interaksi atau relasi yang terbangun di Desa Tarupa antar setiap aktor memunculkan adanya perbedaan kualitas kekuatan yang mampu mempengaruhi atau menarik pengikut di masyarakat Tarupa. Bentuk relasi yang terjadi para aktor didominasi oleh model relasi kekuasaan dalam memunculkan sifat tokoh yang paling mampu dan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan kehidupan masyarakat Desa Tarupa. Relasi kekuasaan di antara para aktor yang tidak setara merupakan dampak dari politisasi lingkungan (*politicized environment*) (Bryant dan Bailey, 1997). Politisasi lingkungan adalah adanya pusat kekuasaan atau dominasi aktor negara dan swasta terhadap sumber daya alam. Akibat dari dominasi tersebut, membatasi akses bagi sebagian aktor lainnya, terutama aktor akar rumput yaitu aktor lokal (Bryant dan Bailey, 1997).

Tokoh *punggawa* sebagai pemilik modal dan penguasa produksi sebagai aktor yang berasal dari pola produksi ekonomi adalah tokoh yang memiliki pengaruh paling besar dibandingkan tokoh agama maupun tokoh adat atau budaya. Peran *punggawa* dalam memainkan aktornya sebagai tokoh dengan pengikut terbesar karena mampu menjadi penjamin kehidupan masyarakat kecil. Pada sisi lain ketidakmampuan tokoh agama maupun tokoh adat dalam membangun relasi aktor yang baik dalam konteks kekuasaan karena belum adanya pengaruh yang mampu diperankan kepada masyarakat langsung yang berhubungan dengan kemampuan mengakses sumberdaya perikanan di wilayah

perairan Tarupa. Relasi yang dibangun oleh tokoh agama dan tokoh adat hanya sebatas peran perilaku serta adab yang baik dalam aktivitas masyarakat di daratan Pulau Tarupa. Relasi kuasa diantara aktor berkaitan dengan kekuasaan aktor untuk mengontrol, memperoleh, dan mempertahankan aksesnya terhadap sumber daya (Ribot & Peluso, 2003).

Ciri masyarakat pesisir yang masih bersifat homogen dalam bertingkah laku serta memiliki tingkat solidaritas tinggi pada lingkungannya menyebabkan kekuatan interaksi antar nelayan masih kental akan kebudayaan yang dipercayainya turun temurun. Relasi kuasa antar *punggawa* dan nelayan kecil yang berasal dari adaptasi ekonomi juga dipercayai telah turun temurun menjadi dari bagian kehidupan masyarakat pesisir di Desa Tarupa menjadikan relasi-relasi kuasa aktor *punggawa* terorganisasi dalam suatu praktek-praktek sosial (tindakan) yang kolektif sebagai penjaga keseimbangan pelaksanaan kehidupan masyarakat nelayan di Desa Tarupa. Giddens (2010) mengemukakan bahwa dalam teori strukturalisasi, struktur dipandang sebagai aturan-aturan dan sumber daya yang terlibat secara terus menerus dalam reproduksi sosial, unsur-unsur terlembagakan sistem sosial memiliki kelengkapan-kelengkapan struktural dalam pengertian bahwa hubungan-hubungan distabilisasikan di sepanjang masa dan ruang. 'struktur' bisa dikonseptualisasikan secara abstrak sebagai dua aspek dari aturan-aturan atau unsur-unsur normative, dan kode-kode penandaan struktur relasi *punggawa* dan nelayan kecil kemudian menjadi perantara interaksi sekaligus pedoman atau instrumen pada masyarakat pesisir di Desa Tarupa, yang terbentuk dalam interaksi simbolik (tata norma kelompok) maupun dalam bentuk pemaknaan (wacana) dalam relasi patron klien atau antara majikan dan bawahan. Kemampuan *punggawa* membangun jaringan yang baik di lingkungan masyarakat pesisir Desa Tarupa dengan mentransformasi modal ekonomi yang dimilikinya menjadi modal sosial dan cultural menjadikan *punggawa* memiliki dominasi yang tinggi terhadap *sawinya*. Dengan adanya dominasi tersebut, menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial maupun ekonomi dalam relasi kuasa antara *punggawa* dan nelayan kecil di desa Tarupa. Pierre Bourdieu mengungkapkan di dalam model gaya hidup dan selera budaya, estetika kelas pekerja adalah estetika yang didominasi, yang terus menerus diwajibkan untuk mendefinisikan dirinya sendiri dengan mengacu kepada estetika dominan (Jenkins, 2010).

Peran Relasi Aktor dalam Pengelolaan Perikanan Karang

Aktivitas pengelolaan Kawasan konservasi perairan khususnya di Taman Nasional Taka Bonerate tidak boleh terlepas dari aspek sosial ekonomi sebagai salah satu ujung tombak yang mampu memberikan dukungan dan legitimasi pengaruh kepada masyarakat pesisir yang terdapat didalamnya untuk dapat ikut serta dan menerapkan segala aturan dan kebijakan yang terdapat di dalam Kawasan Taman Nasional. Komponen penting dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah dengan menilai ketiga aspek utama yaitu sosial, ekonomi dan ekologi (Pelletier et al., 2005). Keterlibatan masyarakat yang dinilai bukan hanya dari kemampuan menyediakan modal ekonomi semata tetapi juga bentuk-bentuk hubungan sosial salah satunya relasi aktor yang terdapat di wilayah Desa Tarupa. Tingkat kepentingan dan bentuk pengaruh masing-masing unsur dari para aktor terhadap keberadaan kawasan konservasi berbeda sesuai dengan fungsi dari kawasan tersebut sebagai subjek kepentingan.

Dalam masyarakat pesisir Desa Tarupa, solidaritas mekanistik yang terbangun secara kuat karena, ciri masyarakat pesisir yang masih bersifat homogen baik dalam perilaku kerja maupun perilaku kehidupan sehari-hari, dan kehidupan bersamanya berdasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai bersama dalam kesadaran kolektif mereka. Relasi kuasa *punggawa* dan para nelayan kecil bukan hanya sebagai pola kerja sama jaringan tetapi merupakan sifat yang menjadi suatu lembaga kultur yang terdapat di masyarakat Tarupa. Dalam pembuatan aturan maupun norma merupakan hasil dari interaksi yang dilakukan sejak lama maupun dibuat pada masa sekarang menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Herbert Spencer menjelaskan bahwa masyarakat dapat menjadi badan yang terintegrasi, asal anggotanya menyadari tanggung jawab mereka dan menyesuaikan perilaku dengan norma itu (Ofer, 2010). Relasi *punggawa* - nelayan buruh biasa disebutkan memiliki norma-norma dan aturan yang kemudian menjadi pegangan yang penting dalam perilaku masyarakat pesisir di Desa Tarupa. Parsons (1960) memaparkan nilai-nilai budaya yang dibagi bersama kemudian dilembagakan menjadi norma-norma social dan dibatinkan oleh individu-individu menjadi sebuah motivasi. Relasi patron-klien yang menjadi suatu lembaga non formal dalam kalangan masyarakat pesisir terbukti dapat menciptakan norma-norma dan perilaku yang seragam dalam pola hidup

mereka. Berdasarkan hasil analisis di atas yang menunjukkan bahwa bentuk perilaku dan relasi sosial yang paling mempengaruhi di Desa Tarupa diperankan oleh *punggawa* sebagai pemilik modal dan alat produksi karena adanya pengaruh yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan telah juga bertransformasi pada perilaku-perilaku sosial masyarakat di Tarupa. Keberadaan kekuatan aktor *punggawa* dapat mampu menjadi pengaruh terhadap pengelolaan perikanan karang di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

Rumusan PBB dalam Mudiyono (2013) menjelaskan bahwa *community Development* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi social ekonomi dan cultural komunitas, mengintergrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. Dari rumusan PBB tersebut dapat diartikan bahwa pengembangan masyarakat pesisir pada khususnya bukan hanya semata pembangunan infrastruktur yang lebih lengkap tetapi pengembangan komunitas yang menjadi sasaran utama untuk dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kehidupan nasional masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal ini, maka paradigma pengelolaan perikanan karang di Kawasan Konservasi khususnya pada masyarakat nelayan di Desa Tarupa harus bergeser menjadi yang lebih tepat sasaran. Komunitas nelayan yang dimiliki di Desa Tarupa dengan relasi patron klien yang terbangun bukan menjadi alasan untuk menghambat pengelolaan Kawasan konservasi di Taman Nasional Taka Bonerate karena harus dapat memutus rantai relasi tersebut kemudian dapat melakukan pembangunan.

Pemanfaatan relasi kuasa dalam sistem ekonomi produksi antara *punggawa* dan nelayan kecil di Tarupa dengan memiliki kekuatan modal sosial yang tinggi seharusnya dapat menjadi alat bagi program pemerintah sebagai jembatan untuk dapat menyentuh langsung para nelayan yang melakukan kegiatan aktivitas penangkapan khususnya di wilayah karang Kawasan konvervasi menjadi lebih baik. Investasi kepercayaan serta norma-norma yang diberlakukan oleh *punggawa* baik dalam kelompok maupun di lingkungan masyarakat pesisir dapat menjadi pondasi para pemangku kebijakan

pembangunan bagi masyarakat pesisir untuk menjadikan kehidupan masyarakat nelayan menjadi lebih baik dan meningkat. Kekuatan struktur sosial dalam relasi kuasa antara *punggawa* dan nelayan kecil yang sangat kuat disebabkan salah satunya karena adanya peran *punggawa* sebagai pemimpin tertinggi yang dapat memainkan peran dan statusnya dengan baik melalui struktur signifikansi (penandaan) maupun struktur dominasi dan legitimasi. Dalam sistem sosial dapat dibedakan menjadi tiga dimensi struktural yaitu signifikansi, dominansi dan legitimasi (Giddens, 2010). Struktur signifikansi (struktur penandaan) memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain dengan struktur dominasi (struktur penguasaan) dan struktur legitimasi (struktur pembenaran). Penguatan ketiga struktur tersebut berlangsung pada relasi patron-klien melalui rentang waktu yang sangat panjang dan cenderung telah mengkonstruksi sikap, perilaku masyarakat pesisir. Peran *punggawa* tersebut bukan hanya dikhususkan pada hubungan kerja semata, tetapi membangun hubungan dan jaringan yang lebih luas dalam keluarga nelayan kecil maupun masyarakat lingkungan pesisir di Desa Tarupa.

Penciptaan investasi perekonomian maupun investasi social dalam kehidupan masyarakat nelayan Desa Tarupa yang dapat digunakan untuk bergerak ke arah yang lebih baik dengan memberikan peran kepada para *punggawa* dan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki antara *punggawa* dan para nelayan sehingga kebijakan pengelolaan perikanan karang di kawasan konservasi dapat dirasakan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat pesisir dan dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat pesisir di Desa Tarupa. Mudiyono (2013) menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat modal sosial ibaratnya sebagai pelumas bagi terselenggaranya berbagai tindakan bersama baik untuk menjaga kelestarian hidup bermasyarakat maupun untuk meningkatkan kondisi kehidupannya.

SIMPULAN

Sifat lahan pencaharian nafkah yang *open acces*, memerlukan kebijakan yang tepat agar mendapatkan *win-win solution*, dalam kebijakan tersebut di wilayah Kawasan konservasi Taman Nasional Taka Bonerate, sehingga dapat menghindari konflik antar nelayan. Karakter masyarakat pesisir yang homogen dan keras dengan memiliki pola

interaksi dengan kedekatan emosional yang kuat, menciptakan sulitnya intervensi dalam pengembangan pembangunan masyarakat pesisir tersebut.

Pada sisi lain dengan interaksi yang kuat melalui relasi kuasa aktor yang diperankan oleh *punggawa* kepada nelayan kecil di Tarupa, menciptakan suatu modal social yang dimana bisa menjadi salah satu pertimbangan dengan memanfaatkan segala modal social yang dimiliki tanpa ada pengkhususan dalam kebijakan pengelolaan perikanan karang di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate akan menciptakan yang lebih tepat sasaran.

Peran *punggawa* sebagai pemimpin lokal yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam lingkungan masyarakat pesisir dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk dapat memanfaatkan *punggawa* sebagai salah satu pendukung program dalam pengelolaan ikan karang yang akan dilaksanakan di lingkungan pesisir Desa Tarupa melalui proses negoisasi. Selain itu, peran dari setiap aktor dalam pengelolaan serta kebijakan dapat menjadi pola negoisasi dan kompetisi yang dapat dimanfaatkan oleh Taman Nasional Taka Bonerate untuk mampu memberikan alternatif kebijakan dalam perwujudan pengelolaan Kawasan konservasi perairan di Taman Nasional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa Putra, HS. (1991). *Minawang : Ikatan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Arifin, Ansar. (2014). Pemanfaatan Ruang Kapasitas Struktur sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Pesisir di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. *Jurnal : Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 7 (1) Mei 2014.
- Bourdieu, Pierre. (1993). *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Leisure*, New York: Columbia University Press.
- Bryant, R.L dan S. Bailey. (1997). *Third World Political Ecology*. Routledge: London and New York.
- Chaigneau, t, & Brown, k. (2016). Challenging the win-win discourse on conservation and development: analyzing support for marine protected areas. *Ecology and society*. <https://doi.org/10.5751/es-08204-210136>
- Giddens, Anthony. (2010). *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Jenkins, Richard. (2010). *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Kusnadi, (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta : LKiS
- _____. (2007). *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta : LKiS
- Marsuki, ID, B. Sadarun dan RD. Palupi. (2013). Kondisi Terumbu Karang dan Kelimpahan Kima di Perairan Pulau Indo. *Jurnal Mina Laut Indonesia*, 1 (1), 61-72.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Mudiyono. (2013). *Bahan Ajar Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat*. Pasca Sarjana Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Universitas Gadjah Mada
- Ofer John. (2010). *Herbert Spencer and Social Theory*. United Kingdom: Palgrave Macmillan
- Parsons Talcott. (1960). *Structure and Process in Modern Societies*. United Kingdom: Free Press.
- Pelletier, D., García-Charton, J. A., Ferraris, J., David, G., Thébaud, O., Letourneur, Y., Claudet, J., Amand, M., Kulbicki, M., & Galzin, R. (2005). *Designing indicators for assessing the effects of marine protected areas on coral reef ecosystems: A multidisciplinary standpoint*. In Aquatic Living Resources. <https://doi.org/10.1051/alr:2005011>
- Ribot, J.C dan N.L. Peluso. (2003). *A theory of access*. *Rural Sociology*, Vol. 68 No 2, pp. 153-181
- Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Salman, Darmawan, (2006). *Jagad Maritim; Dialektika Modernitas dan Artikulasi Kapitalisme pada komunitas Konjo Pesisir di Sulawesi Selatan*. Makassar: Inninawa
- Scott, James C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- Veeger, K. J. 1991. *Realitas Sosial (Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Chapter 5

MODAL SOSIAL NELAYAN

PERAN MODAL SOSIAL DALAM POLA KEMITRAAN NELAYAN PATORANI DI KABUPATEN TAKALAR

Nadir



Nadir, adalah Dosen pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar. Meraih gelar S1 Agribisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar (2012), Magister Sains Agribisnis di Universitas Hasanuddin, Makassar (2016). Melanjutkan Pendidikan Program Doktor Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2019)

* Email : nadir@unismuh.ac.id.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan catatan *Food and Agriculture Organization* (FAO), Indonesia menduduki peringkat ke-enam sebagai negara penghasil produk perikanan di dunia, dengan penerimaan devisa sebesar USD 1,4 milyar (Nurdjana, 2001). Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi hasil perikanan yang cukup besar, ini dapat dilihat dari melimpahnya hasil perikanan yang didapatkan.

Salah satu hasil perikanan Sulawesi Selatan adalah telur ikan terbang yang banyak terdapat di Kabupaten Takalar. Produksi telur ikan terbang Kabupaten Takalar setiap tahun mengalami pasang-surut, ini dapat dilihat dari data pada tahun 2010 produksi telur ikan terbang di Kabupaten Takalar sebesar 20 ton dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 46 ton dan terakhir pada tahun 2012 produksi telur ikan terbang mengalami peningkatan yang cukup besar sebanyak 140,5 ton (BPS, 2013).

Meskipun sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk membantu perekonomian bagi pelaku usahanya, namun kondisi empiriknya berbanding terbalik potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki. Selama ini nelayan dianggap sebagai suatu komunitas dengan karakteristik "*survival of the fittest*" yang melekat, atau menjadi ciri dalam kehidupannya dan ironisnya seringkali hanya diposisikan sebagai objek eksploitatif oleh para pemilik modal.

Iskandar dan Matsuda (1989) menyebutkan bahwa, dalam hubungan produksi (*relation of production*) dan hubungan kerjasama yang terjadi antara nelayan dengan pemilik modal telah menyebabkan margin yang jatuh ke tangan nelayan dan pembudidaya hasil perikanan hanya sekitar 5 hingga 10 persen saja, selebihnya jatuh ke tangan mereka para pemilik modal, pedagang tingkat lokal, pedagang tingkat regional dan internasional.

Dalam konteks kemitraan, Jafar Hafsa, (1999) menyebutkan bahwa suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Wujud nyata kemitraan dapat disepakati sebagai sebuah konsep kerjasama di mana dalam operasionalisasinya tidak terdapat hubungan yang bersifat subordinasi namun hubungan yang setara bagi semua "*parties*". Sehingga dalam konsepsinya kemitraan memiliki prinsip yang harus menjadi kesepakatan diantara yang bermitra dan harus ditegakkan dalam pelaksanaannya meliputi: prinsip partisipasi, prinsip gotong royong, prinsip keterbukaan, dan prinsip keberlanjutan.

Nelayan di Kabupaten Takalar menjalankan aktivitasnya melalui pola kemitraan dalam mempertahankan eksistensi pekerjaan mereka sebagai seorang nelayan. Kemitraan pada nelayan di Kabupaten Takalar tergambar melalui hubungan kerja sama antara nelayan/*punggawa* dengan pemilik modal/*papalele*. Salah satu komunitas nelayan di Sulawesi Selatan yang masih menggunakan kemitraan seperti itu dalam bentuk sistem *papalele* dan *punggawa* adalah komunitas nelayan penangkap ikan terbang di Kabupaten Takalar.

Komunitas nelayan ikan terbang (*patorani*) merupakan salah satu komunitas nelayan yang tertua yang ada di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Takalar. Menurut Amir (2011) menjelaskan bahwa nelayan *patorani* merupakan salah satu komunitas nelayan di Sulawesi Selatan yang kondisi realitasnya sampai saat ini mengelola, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hayati laut berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai budaya melalui penggunaan teknologi cara (*soft ware technology*) maupun teknologi alat (*hard ware technology*) yang bersifat partisipatif, asosiatif, analogik dan

orientif yang melembaga serta dipertahankan melalui pengendalian sosial (*social control*) oleh setiaparganya.

Realitas kemitraan yang terjadi, yaitu pemberian sejumlah modal dari pemilik modal kepada nelayan untuk keperluan perlengkapan selama satu musim, dimana nelayan diberikan beberapa aturan bagi hasil yaitu nelayan wajib mengembalikan modal usaha yang dipinjam dan pembagian keuntungan sebanyak 25% - 30 % setiap penjualan telur ikan terbang, untuk pemilik modal. Perjanjian yang terjadi antara pemilik modal dengan nelayan, tidak berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak diantara kedua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang, kedudukan nelayan sangat lemah karena tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian, mereka hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak (*take it or leave it*) isi perjanjian yang disodorkan oleh pemilik modal. Apabila nelayan menerima perjanjian tersebut, maka harus siap dengan segala konsekuensi yang ada dan timbul sebagai akibat dari perjanjian tersebut, tetapi apabila nelayan menolak maka nelayan akan kehilangan kesempatan untuk melaut dan berakibat kepada pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun kemitraan yang dibangun selama ini tidak jarang merugikan nelayan, namun nyatanya ini tetap bertahan sampai sekarang.

Modal sosial (*social capital*) merupakan bagian dari kehidupan sosial, jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama-sama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (Putnan,1996:56). Modal sosial dalam kemitraan nelayan *patorani* merupakan salah satu modal yang sangat penting selain modal berupa materi ataupun barang karena sebagai perekat hubungan antara pemilik modal dengan *punggawa sawi*. Menurut James Coleman (1990) modal sosial merupakan inheren dalam struktur relasi antara individu, struktur relasi yang membentuk jaringan sosial yang menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, kesatuan norma, dan menetapkan berbagai sanksi bagi anggotanya.

Pada kemitraan *papalele*, *punggawa* dan *sawi* nelayan *patorani* di Kabupaten Takalar, tipologi modal sosial yang berkembang adalah tipologi modal sosial terikat (*bonding social capital*) dimana *papalele* memberikan sejumlah modal kepada *punggawa*

untuk keperluan melaut selama satu musim dengan membuat aturan tertentu terhadap *punggawa* dan *sawi* yang bersifat mengikat.

Penerapan modal sosial dalam kehidupan nelayan belum sepenuhnya dilaksanakan. Selama ini modal sosial dalam kehidupan nelayan, sangatlah jauh dari makna dari pada modal sosial itu sendiri, dan tentunya apabila erosi modal sosial terjadi dalam interaksi sosial dan komunitas, maka institusi lokal akan kehilangan sosial *trust* yang ditandai dengan rasa kecurigaan, rasa tidak aman, menurunnya kebersamaan, pembangkangan yang akan menyebabkan rendahnya keterbukaan sehingga intensitas komunikasi rendah, tingginya manipulasi publik dan disintegrasi sosial. Padahal menurut World Bank (1998), modal sosial berperan sebagai perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Dengan demikian, modal sosial akan tumbuh dengan baik karena adanya nilai saling berbagi (*shared values*) serta pengorganisasian peran (*rules*) yang diekspresikan dalam hubungan personal (*personal relationships*), kepercayaan (*trust*), dan *common sense* tentang tanggung jawab bersama sehingga masyarakat tidak menjadi lebih dari sekedar kumpulan individu belaka.

Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk dan peran modal sosial dalam pola kemitraan usaha nelayan *patorani* di Kabupaten Takalar

Metodologi

Penelitian dilaksanakan di Desa Palala'kang Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pada pertimbangan bahwa di desa ini mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dalam bidang perikanan (nelayan), khususnya sebagai nelayan yang menangkap dan mengumpulkan telur ikan terbang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan multi sumber bukti (*triangulasi*) artinya teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti akan menggunakan

observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. (Sugiono, 2008).

Penentuan informan dilakukan secara sengaja dengan menetapkan 4 informan kunci yakni informan kategori banyak yaitu dengan memiliki 5 unit perahu, informan yang kategori sedang dengan memiliki 3 unit perahu dan informan yang kategori sedikit dengan memiliki 1 unit perahu. Rancangan dan pelaksanaan penelitian bersifat responsif dan kreatif sesuai dengan bentuk ritme dan kemungkinan yang ada di lapangan. Dalam kajian ini, peneliti melakukan pengamatan terlibat aktif dengan berusaha memperlama keberadaan dalam komunitas, mengintensifkan observasi dan wawancara yang dilakukan sedalam mungkin (*in-depth*). Mulanya, peneliti melakukan penelusuran terhadap data lapangan, membuat kategori-kategori, dan menghubungkannya satu sama lain, serta melakukan interpretasi terhadap data. Dari sini muncul uraian-uraian berdasarkan data dan analisis menjadi konsep dan hipotesis berdasarkan data. Hasil analisis dan hipotesis dihubungkan dengan teori terkait yang menerangkan data mementingkan kedalaman dengan tujuan "Deskripsi kental" untuk memahami suatu konteks atau situasi yang ada (Geertz, 1973).

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yang dimulai pada saat memulai penelitian dengan mengumpulkan data dan diolah secara sistematis, yang dilakukan secara reduksi data dimana data yang diperoleh diseleksi, difokuskan, disederhanakan dan diabstraksikan sesuai catatan lapangan yang didapatkan. Kemudian penyajian data diklasifikasikan sesuai dengan kategori berdasarkan variabel yang dilihat dan terakhir adalah penarikan kesimpulan atau interpretasi serta verifikasi data dari hasil penyajian data yang diklasifikasikan. Miles dan Haberman dalam Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa aktivitas data dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dimana langkah-langkah analisis datanya sebagai berikut : (1) Collection data merupakan pengumpulan, pencatatan dan pengamatan sejumlah data dari lapangan dan selanjutnya. (2) Reduksi data, mengidentifikasi satuan (unit) dari bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. (3) Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan teks yang bersifat naratif, sehingga mengetahui apa isi yang disajikan. (4)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data, dan metode pencarian ulang yang digunakan.

Profil Wilayah Penelitian

Desa Pa'Lalakang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Desa Pa'Lalakang yaitu ± 174 Ha dan terdiri dari 6 (enam) Dusun dengan mayoritas penduduknya adalah bermata pencaharian nelayan/petani. Sebagai salah satu desa yang berdekatan dengan kawasan pesisir, mendorong banyaknya masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan. Secara administratif, Desa Pa'Lalakang memiliki batas-batas wilayah, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontosunggu, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalukuang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Galesong Baru dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Ibu kota Desa Pa'Lalakang yaitu Dusun Massamaturu yang berada pada posisi sebelah utara ibu kota Kecamatan Galesong. Sebagian wilayah daratan Desa Pa'Lalakang memiliki luas wilayah ± 174 Ha, dengan jarak dari ibu kota Provinsi 40 km dan 20 km dari ibu kota Kabupaten.

Penduduk Desa Pa'lalakkang saat ini dengan komposisi jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1314 KK dengan jumlah penduduk 4975 Jiwa, Laki-laki 2.487 Jiwa dan Perempuan 2.488 Jiwa. Mata pencaharian penduduk di Desa Pa'Lalakang, diantaranya bekerja sebagai nelayan sebanyak 2.951 orang, selebihnya adalah petani, buruh, tukang (kayu dan batu), PNS, pedagang dan sebagainya.

Desa Pa'Lalakang memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik untuk kehidupan masyarakatnya, baik berupa bangunan pemerintah maupun bangunan umum sebagai fasilitas umum yang dimanfaatkan masyarakat. Terdapat kantor desa, sarana pendidikan TK dan SD, posyandu, sarana peribadatan (masjid), dan lapangan olahraga. Sarana dan prasarana di Desa Pa'lalakang sudah sangat menunjang segala aktivitas masyarakat. Untuk sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Kemitraan

Nelayan *patorani* merupakan salah satu komunitas nelayan di Sulawesi Selatan yang kondisi realitasnya sampai saat ini mengelola, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hayati laut berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai budaya melalui penggunaan teknologi cara (*soft ware technology*) maupun teknologi alat (*hard ware technology*) yang bersifat partisipatif, assosiatif, analogik dan orientif yang melembaga serta dipertahankan melalui pengendalian sosial (*social control*) oleh setiap warganya, (Amir, 2011). Seperti halnya dengan nelayan *patorani* yang ada di Desa Palalakang mereka melakukan aktivitasnya melalui pola kemitraan antara *papalele* dengan *punggawa*, dalam hubungan kemitraan tersebut terdapat unsur-unsur modal sosial seperti kepercayaan dalam bermitra, aturan atau norma, jaringan dan hubungan timbal balik

HE adalah salah satu informan yang lahir di Desa Pa'la'kang 1969 tergolong salah satu *papalele* yang terbilang sukses di Desa Pa'lalakkang, terlahir di keluarga nelayan *patorani* dengan jumlah saudara 6 orang, membuat HE kecil untuk mandiri dengan berusaha sendiri, ibunya seorang *sanro*²² pamanak, atau dukun beranak, dan ayahnya juga adalah seorang nelayan *patorani*.

Pada tahun 1987, HE memulai kariernya sebagai *papalele*. Pada saat itu ia masih punya kapal satu unit, dan beberapa tahun kemudian kapalnya terus bertambah, hingga saat ini jumlah kapal *patorani* yang dimiliki HE sebanyak 10 unit. Setelah menikah dengan salah seorang gadis di Desa Pa'lalakkang yang bernama HU rejeki HE semakin bertambah dan dikarunia 3 orang anak perempuan. Menjadi *papalele* merubah status sosialnya di masyarakat yang dulu hanya sebagai pengusaha kecil, kini HE menjelma sebagai pengusaha

²² Pengobatan di Indonesia mengenal dua sistem pengobatan yaitu pengobatan medis dan pengobatan tradisional. Pengobatan medis sering menggunakan obat, dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan formal kesehatan dengan menggunakan cara, alat atau bahan yang sudah mendapat standar medis/kedokteran. Pengobatan tradisional adalah pengobatan yang dilakukan secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat *magic* maupun pengetahuan tradisional yang dikenal di masyarakat. Bagi mereka yang memiliki kemampuan pengobatan tradisional sebagai penerus warisan tradisi masa lalu, masyarakat menyebutnya dengan istilah *sanro*.

sukses di Desa Pa'lalakkang, kegigihan dan semangat kerja keraslah yang membuatnya meningkat.

Selama menjadi pengusaha, HE dan istrinya sudah beberapa kali naik haji, dan terakhir anak gadisnya pun sudah menjadi H. Lolo atau H. Muda. Dengan uang yang banyak, ia pun membangun rumah yang begitu mewah dengan perabot rumah yang begitu mahal, serta beberapa kali mengganti mobil pribadinya. Berbekal sebagai *papalele* dan karena sudah dikenal di desa tersebut, ia pun memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dan terpilih menjadi kepala desa di Desa Pa'lalakkang selama dua periode. Selama menjadi *papalele*, terkadang ia pun pernah dirugikan oleh nelayan dengan tidak adanya hasil atau keuntungan yang didapatkan oleh nelayan. Setelah adanya penambahan jumlah 10 unit kapal, mulailah bertambah pula penghasilannya. Untuk permodalan, dulunya HE mengambil uang pada mitra bisnis yang ada di Makassar.

Namun pada awal tahun 2000, HE memutuskan untuk membiayai modal nelayan dengan modal sendiri, modal ini bisa ia dapatkan di bank dengan jaminan sertifikat rumah untuk membiayai usaha *patoraninya*, dengan alasan karena permodalan yang didapatkan dari mitranya di Makassar bunganya terlalu tinggi dan alasan potongan yang tinggi dari mitranya.

Pola kemitraan yang HE terapkan terhadap nelayan adalah pola bagi hasil dengan potongan 25-30% dari hasil penjualan telur ikan terbang. Besarnya dana atau modal yang HE berikan kepada mitranya sekitar 50-100 juta per kapal untuk berangkat ke Fak-Fak²³. Sistem pemberian pinjaman dilakukan sebelum nelayan berangkat melaut dengan aturan yang telah disepakati, dan rasa saling percaya diantara mereka. Sedangkan sistem pengembalian modal akan dikembalikan setelah akhir musim, artinya ketika mereka sudah kembali melaut, jika dalam satu musim uang tidak dikembalikan maka itu dianggap hutang dan harus dikembalikan tahun depan dengan catatan mereka tetap melaut, namun jika mereka tidak melanjutkan kerjasama maka modal dianggap hangus.

Selain dana operasional, biasanya HE memberikan perbekalan kebutuhan melaut seperti beras, yang kemudian dihitung nilainya, itu untuk konsumsi mereka di Fak-Fak

²³ Fakfak adalah sebuah distrik yang terletak di Semenanjung Bomberai, provinsi Papua Barat, Perairan laut di Fak-Fak adalah salah satu target *fishing ground* yang didatangi oleh nelayan torani di Kabupaten Takalar, karena masih sangat potensial sumberdaya ikannya, khususnya ikan terbang dan telurinya.

nanti. Mengenai bahan bakar solar, HE hanya memberikan uang lalu mereka sendiri yang membeli. Menurut informasi dari HE, hasil tangkapan nelayan dalam satu musim tahun lalu hasilnya sangat sedikit, sehingga modal tidak kembali sama sekali, namun biasanya dalam satu musim mereka mendapatkan 500 kg per kapal. Hasil tangkapan tersebut kemudian HE jual kepada eksportir. Sistem penjualannya mengikuti harga pasar atau harga normal.

Menurut HE, selama bermitra ia sudah sering dirugikan, seperti tahun lalu misalnya, modal HE tidak kembali. Namun masih menjalin hubungan kemitraan dengan nelayan dengan harapan akan memperoleh keuntungan serta saling membantu dalam perekonomian tentunya antara *papalele*, *punggawa*, dan *sawi*. Meskipun terkadang rezeki yang didapatkan nelayan tidak selamanya sama hingga modal tidak kembali, namun jika hal itu terjadi, biasanya HE memberikan modal untuk tahun depan dengan harapan hasilnya akan lebih baik sehingga modal dapat dikembalikan. Sejauh ini HE masih terus menjalin hubungan kemitraan dengan nelayan, artinya masih memberikan modal dan tetap bekerja sama dengan nelayan. Namun jika modal HE tidak kembali karena mereka tidak berlaku jujur terhadap hasil tangkapan, maka HE akan tidak mau lagi bermitra dengan nelayan tersebut. Terkait dengan potongan 25-30%, aturan ini merupakan aturan yang telah diberlakukan oleh generasi sebelumnya, karena adanya pinjaman uang dari *papalele*, dengan alasan pendapatan yang tidak tetap makanya ketentuan 25-30% tidak dikurangi, HE biasanya bersedih jikalau ada *punggawa* yang tidak jujur dalam artian *punggawa appanyingkiri* alias korupsi, itu dapat diketahui dari laporan dari *sawi* mereka. Selama menjadi *papalele* ada mitranya yang sudah bekerja sama dengannya selama 20 tahun. Menurut HE hasil yang besar selalu didapatkan dari mitranya, dan senang akan kejujuran *punggawa* akan hasil yang didapatkan membuatnya bertahan untuk terus bermitra dengannya.

HE pun menjelaskan sebelum nelayan berangkat melaut pertama-tama nelayan biasanya kalau ada kerusakan diperbaiki lalu dipagal atau didempul dan dicat, mempersiapkan alat tangkap, kemudian didorong ke laut sembari mempersiapkan kebutuhan solar beras dan kebutuhan dapur lainnya, kemudian melakukan acara adat seperti *accaru-caru* yang merupakan ritual yang dilakukan oleh nelayan sebelum berangkat melaut tujuannya agar mereka diberikan keselamatan dan reski yang banyak

dalam melaut nanti. Ritual ini muncul sejak adanya *patorani* namun sekarang banyak *patorani* sudah meninggalkan tradisi seperti itu. Menurut informasi dilapangan disebutkan bahwa ritual-ritual yang dimaksud sudah tidak signifikan lagi perolehan pendapatan. Namun karena HE seorang pemimpin yang demokratis, ia pun tidak bisa memaksakan kehendak agar acara adat ini dihapus, Menurut HE upacara ritual seperti itu tergantung dari nelayannya saja, jika ia mau mengerjakan silahkan jika tidak juga silahkan karena acara ini tidak diwajibkan tergantung dari kepercayaan mereka sendiri.

Sekarang HE bukan hanya sebagai pengusaha telur ikan terbang tapi juga merambah ke usaha jual-beli rumput laut atau agar. Berikut adalah matriks hak dan kewajiban *papalele* dan *punggawa*.

Tabel 1. Matriks Hak dan Kewajiban Papalele dan Punggawa

<i>Papalele</i>		<i>Punggawa</i>	
Kewajiban	Hak Mendapat keuntungan 25-30% dari nelayan	Kewajiban Mencari modal usaha setiap satu musim	Hak Mendapatkan pinjaman modal dari <i>papalele</i>
Menyediakan modal usaha kepada nelayan	Menerima hasil tangkapan telur ikan terbang dari nelayan	Menyerahkan hasil tangkapan telur ikan terbang kepada <i>papalele</i>	Menerima keuntungan dari penjualan telur ikan terbang dari <i>papalele</i>
	<i>sawi</i> terpenuhi	Mencari <i>Sawi</i> dalam satu musim	Memberikan upah kepada <i>sawi</i> dalam satu musim
	Mendapatkan kembali secara keseluruhan dari modal yang diberikan	Mengembalikan modal secara keseluruhan usaha kepada <i>papalele</i>	Terbebas dari pinjaman yang diberikan oleh <i>papalele</i>

Sumber : Data Primer, Setelah Diolah, 2016.

Bentuk- Bentuk Modal Sosial

Adapun bentuk-bentuk modal sosial yang terperagakan di wilayah kajian, teruraikan sebagai berikut.

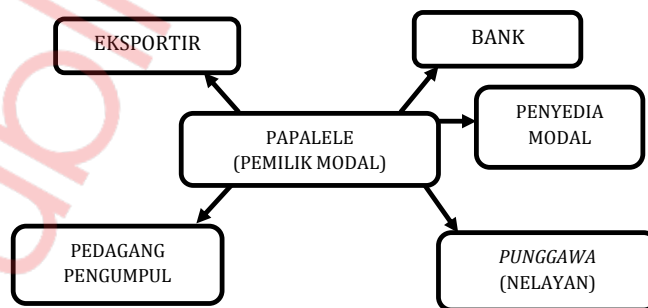
Kesalingpercayaan dalam Bermitra

Dalam mengontrol hasil tangkapan nelayannya HE hanya dengan berkomunikasi lewat telepon dan menunggu hasil tangkapan dari nelayan. Jumlah hasil tangkapan pun dilaporkan sesuai dengan yang didapat, adapun mereka menjual sebagian telur ikan

terbangnya di pulau untuk memenuhi kebutuhan mereka selama masih di laut. Jadi, antara *papalele* dengan mitra kerja harus membangun kepercayaan satu sama lain. Selama nelayan melaut, *papalele* tetap menjalin komunikasi via telepon. Bentuk kepercayaan yang HE jalin antara *papalele* dan nelayan adalah adanya nilai lokal yang diyakini secara bersama bahwa kejujuranlah yang mendatangkan rejeki. Jika mereka (nelayan) telah mendapatkan hasil maka akan langsung dilaporkan kepada *papalele*, termasuk jika mereka harus menjual sebagian hasil tangkapan di pulau karena hendak memenuhi kebutuhan selama berada di laut. Sejauh ini HE masih mempercayai mitranya dan mitranya pun masih percaya dengan HE.

Jaringan

Hubungan kerjasama yang terjalin antara *papalele* dan *punggawa* serta *sawi* sudah berjalan sejak lama, mengakibatkan terjalin hubungan kerja sama yang cukup lama, umumnya *papalele* dengan para nelayan sudah saling mengenal dengan baik, terutama bagi penduduk asli setempat, karena mereka sering berinteraksi satu sama lain, baik itu kelompok nelayan *patorani* maupun kelompok pencari ikan dan teripang. Sebagai mitra usaha kelompok, nelayan dan *papalele* memiliki hubungan yang cukup baik, mereka sering berinteraksi ketika musim pencarian telur ikan terbang dan juga ketika mereka membutuhkan bantuan, baik berupa bantuan modal melaut, maupun ketika mereka membutuhkan bantuan tambahan. Bantuan modal yang diberikan oleh *papalele* tersebut biasanya berupa uang tunai.



Gambar 1. Skema Jaringan *Papalele* pada Pola Kemitraan Nelayan *Patorani* di Kabupaten Takalar, 2016.

Kepatuhan kepada Norma

Aturan yang dimaksud adalah aturan yang diterapkan dalam hubungan kemitraan yang dilakukan antara *papalele* dengan *punggawa*. Aturan kemitraan yang diterapkan adalah aturan yang sudah lama dibuat oleh nenek moyang mereka dan aturan ini masih tetap dipakai dalam hal kerjasama kemitraan dalam pola kemitraan nelayan, aturan yang diterapkan mencakup, aturan dalam meminjam modal, kerjasama, aturan pengembalian modal, dan pola bagi hasil antara mereka.

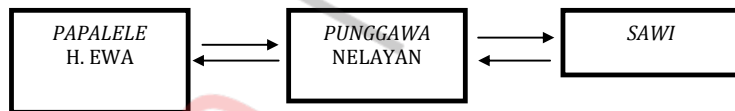
Awalnya HE memberikan sejumlah modal dengan aturan yang sudah disepakati bersama, konsekuensi yang harus diterima nelayan jika modal belum bisa dikembalikan adalah modal yang telah mereka gunakan akan menjadi hutang jika hasil penjualan mereka tidak mencapai modal, sehingga tahun depan mereka harus berusaha untuk mengembalikan modal tersebut. Aturan itu diterapkan dengan harapan modal HE yang dikeluarkan dapat kembali, namun jika mereka tidak mampu mengembalikan modal dikarenakan hasil yang sedikit maka resiko ditanggung oleh *papalele*, ia akan mengalami kerugian besar. Menurut HE, sesungguhnya aturan yang diterapkan, saling menguntungkan dan memotivasi para nelayan untuk bekerja keras lagi dalam mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak sehingga pendapatan mereka pun akan meningkat. Dengan demikian modal HE juga akan kembali dan mendapatkan keuntungan.

HE akan memberikan sanksi kepada *punggawa* jika mereka tidak jujur dalam melaporkan hasil tangkapan atau mereka dengan sengaja menjualnya kepada pihak lain yang menyebabkan modal tidak kembali. Biasanya HE akan langsung memutuskan hubungan kemitraan dengan nelayan yang tidak jujur. Namun jika kurangnya hasil tangkapan disebabkan oleh musim yang kurang bersahabat, maka tidak akan ada sanksi untuk nelayan. Adapun norma yang diterapkan dalam kemitraan nelayan patorani, meliputi : sistem kerjasama, sistem pemberian pinjaman serta aturan pengembalian modal dan bagi hasil.

Reciprocity

HE dan *punggawanya* menjalin hubungan timbal balik yaitu hubungan saling membantu ketika mereka membutuhkan bantuan, jika ada nelayan yang sedang kesulitan maka *papalele* akan membantu, misalnya saja nelayan *patorani* yang bermitra dengannya

sedang membutuhkan modal tambahan maka HE membantu mereka. Bukan hanya dari segi bantuan modal HE pun biasanya membantu nelayannya yang sedang sakit dengan cara memberikan bantuan biaya pengobatan dan langsung mengantar ke rumah sakit dengan mobilnya sendiri. Pada dasarnya kehadiran komunitas nelayan jelas akan sangat menguntungkan bagi *papalele* seperti HE, dalam arti kata HE membutuhkan nelayan untuk bermitra dalam usaha pencarian telur ikan terbang. Baginya, nelayan adalah mitra usaha. Jadi sudah sepatutnya mereka saling memperhatikan satu sama lain. Dari hubungan kerjasama ini keuntungan yang didapatkan adalah bisa meningkatkan penghasilannya sebagai *papalele*, juga dari hasil kerja sama ini membuat HE bisa terpilih sebagai pemimpin di desa. Kini HE sudah menjadi pengusaha sukses dan sebagai orang terpandang di desanya, dari hasil usaha telur ikan terbang yang digelutinya sejak dahulu. Berikut gambaran skema reciprocity HE dengan punggawa sawinya.



Gambar 2. Skema *Reciprocity* antara *Papalele* dengan Nelayan *Patorani*

Peran Modal Sosial Nelayan

Komunikasi yang intens serta aturan yang ada dalam membangun kerjasama antara para *papalele* dengan para nelayan, dan merupakan salah satu sistem kerjasama yang memiliki bentuk modal sosial. Teori modal sosial, pada intinya merupakan teori yang paling tegas. Tesis sentralnya dapat diringkas dalam dua kata : “soal hubungan”. Dengan membangun hubungan dengan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sendirian, (Field 2010).

Berikut peran modal sosial yang ditinjau dari sisi ekonomi, dimana modal sosial dapat mempengaruhi biaya transaksi, pengambilan informasi, pengambilan keputusan,

Biaya Transaksi

Dalam pola kemitraan nelayan *patorani*, peran modal sosial sangat memiliki arti penting, seperti unsur kepercayaan. Dari hasil wawancara dengan *papalele*, disebutkan bahwa dalam melakukan transaksi telur ikan terbang mereka tidak perlu membawa telurnya, cukup dengan menelpon pembeli, tidak lama kemudian anggota dari penjual langsung datang membeli telur *papalele*, jadi dengan model seperti ini biaya yang seharusnya di pakai *papalele* untuk melakukan transaksi dapat dikurangi, karena tidak perlu lagi menyewa mobil dan membeli BBM untuk mengangkut menjual telur ikan terbang. Kemudian dengan jaringan yang dimiliki seorang *papalele* tidak perlu sibuk dalam mencari pembeli cukup dengan menelpon jaringan yang dimiliki, telur ikan terbang siap di jemput untuk di beli.

Sharing Information (Pembagian Informasi)

Dalam pola kemitraan nelayan *patorani* pembagian informasi dari *papalele* ke *punggawa* semakin modern, dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa, selama melaut mereka tetap menjalin komunikasi kepada *papalele*. Jika ada hasil tangkapan di Fak-Fak, maka mereka langsung menginformasikan dan mengirim kepada *papalele*. Para nelayan juga mengatakan bahwa *papalele* sangat mempercayai mereka, jadi jumlah hasil tangkapan yang didapatkan akan langsung dilaporkan kepada *papalele*, sedikit maupun banyak hasil tangkapannya, mereka akan tetap menyampaikannya kepada *papalele* yang ditemani bermitra, sehingga hubungan antara nelayan dan *papalele* tetap terjalin dengan baik. Menurut mereka, sejauh ini hubungan kerjasama yang terjalin antara *papalele* dan nelayan masih sangat baik, yang jadi masalah jika mereka menjual hasil tangkapannya kepada *papalele* yang lain. Hal tersebut bisa membuat hilangnya kepercayaan di antara kedua belah pihak dan bisa membuat hubungan kerjasama terputus. Dapat disimpulkan bahwa salah satu cara para nelayan dan juga para *papalele* menjaga kepercayaan satu sama lain adalah dengan cara tetap menjaga komunikasi diantara mereka, terutama ketika para nelayan berada di laut serta saling jujur dan terbuka dalam bekerja.

Collective Decision Making (Pengambilan Keputusan Kolektif)

Menurut *punggawa* bahwa aturan yang berlaku dalam hubungan kerjasama dengan *papalele* diatur oleh *papalele* sendiri tanpa melibatkan *punggawa* dan *sawi*, begitupun juga

dengan penjualan hasil tangkapan, semuanya menjadi tanggung jawab *papalele* sepenuhnya. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan secara kolektif mengenai aturan ataupun norma yang berlaku dalam sistem kerja sama yang dilakukan antara *papalele* dan juga para nelayan, baik mengenai sistem pengembalian modal, sistem bagi hasilnya maupun mengenai pemasaran hasil tangkapannya semuanya dibuat oleh *papalele* yang menjadi mitranya masing-masing, jadi tidak menutup kemungkinan aturan yang dibuat oleh *papalele* yang satu berbeda dengan *papalele* yang lainnya, terutama dalam sistem bagi hasilnya, seperti yang terjadi pada sistem kerjasama *papalele* dan *punggawa* yang terjadi pada lokasi penelitian, dimana keuntungan yang diambil oleh *papalele* berbeda-beda, mulai dari 15% sampai 30%. Sedangkan *punggawa* dan *sawi* yang menjadi mitra dari *papalele* tersebut hanya mengikuti keputusan atau aturan yang ada, kemudian pengambilan keputusan terburuk ketika seorang *papalele* di khianati oleh mitra dengan keputusan pemutusan hubungan kerja di antara mereka. Pengambilan keputusan kolektif dilakukan ketika pada saat pembagian upah.

Dari kasus yang terjadi dalam pola kemitraan nelayan *patorani* di Desa Pa'lalakang, diketahui bahwa pola kemitraan yang diterapkan yaitu pemberian sejumlah modal dengan pola bagi hasil dengan potongan persen yang berbeda-beda. Kemitraan kategori besar potongan yang ditetapkan oleh *papalele* sebanyak 25-30% tergantung dari hasil yang didapatkan, kalau hasil yang didapatkan besar maka potongannya 30%, sebaliknya kalau hasil yang didapatkan sedikit maka potongannya 25%. Aturan pola bagi hasil ini merupakan aturan lama dan telah menjadi aturan tetap dalam pola kemitraan nelayan *patorani* di Kabupaten Takalar.

Modal sosial yang dimiliki masyarakat, sangat membantu dan menunjang pola kemitraan yang terjadi pada nelayan *patorani*, baik dari pihak *papalele*, *punggawa*, maupun pada *sawi* itu sendiri. Adapun unsur-unsur modal sosial yang menunjang pola kemitraan adalah : (1) Kepercayaan. Kepercayaan dalam pola kemitraan merupakan hal yang sangat penting utamanya antara *papalele* dengan *punggawa*, maupun *sawi*. Dengan kepercayaan yang terjaga dari masing-masing pihak, menyebabkan pola hutang-piutang antara *papalele* dan *sawi* dapat berjalan dengan baik. Temuan Rotrigues et al. (2012), menegaskan pentingnya kepercayaan pribadi dalam mempertahankan modal sosial. Hal yang sama

dibuktikan dengan bertahannya kemitraan yang terbangun dalam komunitas nelayan *patorani*. Seorang *papalele* biasanya memberikan modal kepada *punggawa* dalam satu musim tanpa ada jaminan baik itu berupa surat-surat berharga. Menurut *papalele* kepercayaan diberikan hanya satu kali dengan itu kepercayaan dijaga sehingga kemitraan bisa bertahan lama. (2) Jaringan dalam pola kemitraan nelayan *patorani* sangatlah diperlukan untuk menunjang kemitraan, dengan jaringan yang dimiliki seorang *papalele* nantinya tidak kesulitan untuk berinteraksi, baik itu untuk kebutuhan modal, menjual telur ikan terbang dan untuk keperluan lainnya. (3) Kepatuhan kepada norma, merupakan aturan yang dibuat dengan mitra dengan tujuan mitra dalam bekerjasama dapat berhati-hati dan sebagai pengikat agar mereka tidak lalai dalam tugas dan tanggung jawabnya. Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya terinstitusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial. (4) *Reprocity* atau hubungan timbal balik berperan untuk saling membantu ketika diantara *papalele* dan *punggawa sawi* memiliki masalah. Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri merupakan ciri modal sosial yang akan menjadi modal warga dalam melakukan tindakan kolektif dalam pencapaian tujuan (Damsar, 2002). Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa kekerabatan tanpa mengharapkan imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi. Salah satu contoh, seperti saling membantu ketika ada keluarga nelayan yang sakit dan membutuhkan biaya, begitupun sebaliknya nelayan membantu *papalele* ketika membutuhkan tenaga mereka dan membutuhkan bantuan misalnya mobilisasi massa dalam PILKADA untuk memilih calon tersendiri dari pilihan *papalelenya*.

Menurut Lesser (2000), modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas (2) menjadi media pembagian kekuasaan dalam komunitas (3) mengembangkan solidaritas (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas (5) memungkinkan pencapaian bersama dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggungjawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, pola kemitraan usaha yang dibangun pada nelayan *patorani*, merupakan kemitraan usaha melalui pemberian sejumlah modal usaha untuk kebutuhan nelayan dalam satu musim dengan aturan pola bagi hasil sebesar 15-30%. Pemberlakuan sanksi diberlakukan jika modal usaha tidak dikembalikan dan secara otomatis modal produksi akan menjadi hutang dan wajib untuk digantikan pada musim penangkapan berikutnya.

Dalam komunitas nelayan *patorani*, unsur-unsur modal sosial masyarakat dapat melanggengkan pola kemitraan yang terjadi, modal sosial itu, diantaranya; kepercayaan, norma, jaringan dan *reprocity* atau hubungan timbal balik, yang masih bertahan sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitri. (2011). *Community Development*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ali, S.A. (2012). *Biologi Ikan Terbang*. Yogyakarta : Pustaka Al Zikra.

Amir, Akzam. (2011). *Kearifan Lokal Nelayan Torani Dalam Dinamika Modernisasi Perikanan Di Kabupaten Takalar*. (Skripsi). Makassar : Universitas Hasanuddin.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta

- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2013). *Kecamatan Galesong Dalam Angka*. Sulawesi Selatan: Provinsi Sulawesi Selatan.
- Cox, Eva. 1995. *A Truly Civil Society*. Sydney: ABC Books.
- Creswell , W. John. 2010. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Dirhamsyah. (2008). *Ikan Terbang Sumber Daya Ikan yang Belum Tergarap*. www.foodreview.co.id/login/preview.php?view&id=55712. Diakses Pada Tgl 10 November 2015. Pukul 15.34 WITA.
- Bidang Perdagangan Luar Negeri Sulawesi Selatan. (2014). *Informasi Ekspor 2014*. Daglusulselinfo.blogspot.co.id/2015_01_01_Archive.html?m=1.
- Damsar. (2002). *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Field, John. (2010). *Modal Sosial*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Fukuyama, Francis. (1995). *Trust : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta : Penerbit Qalam.
- Fukuyama, Francis. (2000). *Sosial Capital and Civil Society. International Monetary Fund Working Paper. WP/00/74 dalam Elinor Ostrom dan T. K Ahn Foundations of Sosial Capital. USA : Edward Elgar Publishing. Inc.*
- Grootaert, Christiaan. (1998). *Social Capital The Missing Link?. Social . Capital Initiative Working Paper No 3*. Washington, DC: World Bank.
- Grootaert, Christiaan; Van Bastelar, Thierry. (2002). *Understanding and Measuring Social Capital : A Multidisciplinary Tool for Practitioners*. Washington, DC: World Bank.
- Hasbullah, Jousairi. (2006). *Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR United Press.
- Inayah. (2012). Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. Politeknik Negeri Semarang. Ragam. *Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 12 No. 1, April 2012.
- Linton, L., (1995), *Partnership Modal Ventura*. Jakarta : PT. IBEC.
- Marbun, B.N., (1996). *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Jafar Hafisah, (1999), *Kemitraan Usaha*. Pustaka Sinar : Harapan Jakarta.

- Mustafa D. (2013). *Modal Sosial Dalam Pola Hubungan Kerja Kelompok Nelayan Ikan Terbang Di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan*. Universitas Gajah Mada.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdjana, M. L. (2001). *Prospek Sea Farming di Indonesia. Teknologi Laut dan Pengembangan Sea farming Indonesia*. Departemen Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan JICA : Jakarta.
- Sugiono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edy. (2007). *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*. Pdf
- Sulistiyani Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gaya Media Yogyakarta.

Chapter 6

SISTEM PEMBIAYAAN NELAYAN

RELASI NELAYAN DALAM KELEMBAGAAN PEMBIAYAAN NON FORMAL DI DESA PAMBUSUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Haeruddin



Haeruddin, adalah Dosen pada Program Studi Agribisnis, Jurusan Ilmu Pertanian, Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Al Asyariah Mandar Polewali Mandar. Meraih gelar S1 Sosial Ekonomi Perikanan di Universitas Hasanuddin, Makassar (2012). Magister Sains Agribisnis di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2015).

* Email : haeruddinabidin1012@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Polewali Mandar memiliki panjang garis pantai sekitar 89,07 km² sebagai salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumberdaya perikanan laut yang cukup tinggi yaitu dengan jumlah produksi perikanan 40.666,54 ton per tahun dan khusus dari sektor perikanan tangkap jumlah produksinya mencapai 24.313,23 ton per tahun. Salah satu desa kawasan pesisir terbesar di Kecamatan Balanipa adalah Desa Pambusuang, (Tahir, 2013). Bukti empiris memperlihatkan bahwa sebagian besar sumberdaya laut Kabupaten Polewali Mandar dimanfaatkan oleh komunitas nelayan yang secara historis kegiatannya telah digeluti sebagai mata pencaharian pokok, terutama mereka yang mendiami daerah pesisir pantai. Menurut Koentjaningrat (1990) mayoritas penduduk di Indonesia yang memiliki 75% wilayah perairan bermukim di daerah pedesaan dan tersebar dalam desa-desa pantai didominasi okupasi sebagai nelayan. Dilihat dari sumberdaya yang ada, menjadi nelayan perikanan tangkap memiliki prospek yang sangat besar, baik di pasar lokal maupun pasar regional bahkan internasional.

Hasil tangkapan ikan seringkali tidak menentu, tergantung musim dan cuaca. Menurut Kusnadi (2006), ketika musim paceklik, sebagian nelayan kecil sering menggadaikan perkakas rumah tangga ke lembaga pegadaian. Bahkan tidak jarang menjual peralatan rumah tangga untuk menyambung hidup keluarganya. Namun disaat musim dan hasil tangkapan melimpah, nelayan lebih konsumtif dan cenderung boros. Berdasarkan

observasi Nurani (2014), bahwa budaya nelayan sering bertindak boros dan malas, tidak dapat memberdayakan diri dari buruknya pengelolaan keuangan secara baik dan hemat. Misalnya, ketika pendapatan saat musim ikan melimpah, mereka cenderung menghambur-hamburkan uang yang didapat. Kendala musim dan cuaca tersebut sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nelayan. Kendala lain yang dihadapi nelayan adalah keterbatasan teknologi serta keterbatasan wilayah operasi yang hanya di sekitar pantai (*inshore*). Selain itu juga kendala modal yang dihadapi nelayan serta sulitnya menjangkau lembaga ekonomi formal seperti perbankan.

Salah satu bentuk lembaga ekonomi non formal pada daerah pesisir di Sulawesi Selatan yang menjembatani kegiatan produksi masyarakatnya adalah lembaga perkreditan yang merupakan hubungan kerjasama tradisional antara pemilik modal (*pa'palele*) dengan nelayan penyewa/penyicil yang berada dalam suatu unit usaha tangkapan. Menurut Made, *at all* (2000), bahwa pada dasarnya *pa'palele* inilah yang berperan menyediakan kredit dan kebutuhan modal dari para nelayan, dengan imbalan bahwa *pa'palele* mempunyai hak untuk melelang hasil tangkapan mereka dengan ketentuan harga 10 -30 % lebih rendah.

Berdasarkan uraian diatas dan bukti empiris dilapangan khususnya di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dalam bentuk kelompok kerja *pongawa-sawi*, maka kajian tentang relasi nelayan dalam kelembagaan pembiayaan non formal menjadi penting dilakukan.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan mekanisme hubungan lembaga ekonomi non formal dalam pemenuhan kebutuhan kredit produksi masyarakat nelayan Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa.

Metodologi

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa di desa tersebut didominasi oleh nelayan perikanan tangkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitaif research*) yang bersifat deskriptif kualitatif

empirik, dan menggunakan metode *grounded research*, yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji secara mendalam dunia empirik dengan menggunakan data sebagai sumber teori. Dasar pemikiran metode ini adalah mencari kesimpulan secara induktif, dan menjadikan data sebagai sumber teori yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Penekanannya pada kondisi subjek, dengan mencari dan menemukan informasi melalui pengkajian kasus yang terbatas namun mendalam dengan penggambaran secara holistik sehingga mencirikan makna kausalitas yang menunjuk pada segi alamiah dan tidak menggambarkan perhitungan (Maleong, 2000; Bungin, 2003)

Strategi jenis penelitian adalah studi kasus. Strategi ini merupakan metode yang dianggap tepat untuk sebuah studi yang mempelajari mendalam tentang dinamika atau keadaan kehidupan sekarang dengan latar belakangnya dalam interaksi dengan lingkungan dari suatu unit sosial seperti individu, kelembagaan, komunitas dan masyarakat (Yin, 1997). Studi berdasarkan model *grounded research* tidak berpotensi untuk melakukan pembuktian atas teori yang telah ada, tetapi menghimpun data untuk membangun proposisi, konsep sekaligus teori (Geertz, 1973),

Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi literatur. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indept interview*). Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa orang tertentu (*key informan*) yang dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Mereka itu adalah *pongawa*, *pa'palele*, tokoh masyarakat, *sawi*. Selain dengan cara *purposive* pemilihan informan juga dilakukan dengan cara *snowball*, yaitu melalui informasi dari informan yang sudah diwawancari sebelumnya.

Metode analisis utama yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang analitiknya melalui penafsiran dan pemahaman (*interpretative understanding*) atau *verstehen*. Pengertian kualitatif di sini bermakna bahwa data yang disajikan berwujud kata-kata ke dalam bentuk teks yang diperluas bukan angka-angka (Miles dan Huberman, 1992). Data hasil wawancara dan pengamatan ditulis dalam suatu catatan lapangan yang terinci kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara

komponensial (*componetial analysis*) dengan melalui tiga tahap : *Tahap pertama*, Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema tersebar, dan membuat kerangka dasar penyajian data. *Tahap kedua*, penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. *Tahap ketiga*, penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data.

Profil Wilayah Penelitian

Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, terletak antara 3^o40' 00" - 3^o32' 00" Lintang Selatan dan 118^o40' 27" - 119^o32' 27" Bujur Timur, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut: (1) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa; (2) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, dan (3) sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Majene. Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar tercatat 2.022,30 Km² yang meliputi 16 (enam belas) kecamatan yang terdiri dari 167 Desa/Kelurahan, Kecamatan Tubbi Taramanu dan Kecamatan Mapili merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah kedua kecamatan tersebut mencapai 33,52% dari seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara luas wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 Km².

Desa Pambusuang terletak di pesisir teluk Mandar. Secara administratif desa ini berada dalam wilayah pemerintahan kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Mulanya Pambusuang memiliki wilayah sekitar 284 Ha dengan beberapa dusun di dalamnya. Namun pasca pemekaran, desa ini hanya tersisa tiga dusun yaitu dusun pareppe, dusun pambusuang dan dusun babbalembang.

Luas wilayah Pambusuang semakin menyempit dan menyisakan lebih banyak kawasan pesisir yang dihuni penduduk. Pemekaran pambusuang terkait pembentukan kecamatan Bala Nipa dari kecamatan Tinambung sebagai kecamatan induk. Selain itu pemekaran desa dan kecamatan dilakukan untuk mendukung rencana pembentukan Kabupaten Balanipa. Pemanfaatan lahan untuk perumahan dan pekarangan yang dominan, menunjukkan bahwa penduduk di desa ini cukup padat. Diantara rumah-rumah masyarakat tidak semua memiliki pekarangan. Rumah-rumah yang berada di lorong menuju arah pinggir laut berjejer rapat, berimpit satu sama lain.

Penduduk yang mendiami Pambusuang adalah suku Mandar, dan tergolong penduduk asli, sebagaimana daerah lain di wilayah kekuasaan Arajang Balanipa. Sejak zaman kerajaan, Pambusuang sudah dikenal sebagai daerah yang diberi perlakuan khusus oleh Arajang Balanipa dalam Lontarak atau lontara disebutkan, pemberian perlakuan khusus itu dikarenakan para pemangku adat memiliki kelebihan tersendiri dari sisi kecerdasan dan keberanian dibanding dengan yang lainnya.

Saat ini, pambusuang memiliki penduduk sebanyak 4.441 jiwa penduduk tersebut tersebar kedalam tiga dusun. Selain nelayan di desa ini banyak pula penenun yang ditekuni oleh kaum wanita, baik yang masih gadis ataupun yang sudah berkeluarga. Pilihan menenun pada masa lalu bukan hanya untuk kepentingan bisnis (ekonomi), tetapi dimaksudkan untuk pengisian waktu senggang bagi keluarga nelayan apabila suami mereka pergi melaut. Keterlibatan dalam bekerja bagi para wanita pada masa sekarang, disamping dimaksudkan untuk mengisi waktu senggang bagi keluarga nelayan, juga merupakan tuntutan tanggungjawab pemenuhan kebutuhan keluarga. Wanita bekerja tidak bertentangan dengan budaya Mandar, karena tradisi yang diberlakukan etnis Mandar memperbolehkan wanita dalam suatu keluarga untuk bekerja. Budaya ini dikenal dengan istilah "*siwali parri*" (berja bersama), yaitu laki-laki dan perempuan bersama-sama memikul beban tanggungjawab keluarga. Terutama pada pemenuhan kebutuhan hidup.

Kondisi iklim tercatat bahwa suhu udara maksimum rata-rata pada siang hari mencapai 32°C dan suhu udara minimum rata-rata pada malam hari berkisar 25°C. Jumlah curah hujan sepanjang tahun 2007 adalah 2.361,00 mm atau sebanyak 147 hari, curah hujan terbesar terjadi dari bulan Nopember hingga Mei.

Data dari dinas terkait di Polewali Mandar menunjukkan bahwa produksi perikanan Kabupaten Polman pada tahun 2007 tercatat 27.278,70 ton, yang terdiri dari 23.770,10 ton produksi perikanan laut dan 3.508,60 ton perikanan darat. Jumlah perahu/kapal penangkap ikan secara keseluruhan mengalami penurunan dari 2.425 unit menjadi 2.160 unit, yaitu; masing-masing perahu/kapal penangkap ikan tak bermotor berkurang 250 unit, motor tempel berkurang 33 unit dan hanya kapal motor yang bertambah 18 unit, sehingga secara keseluruhan berkurang 265 unit. (BPS; 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Sosial Komunitas Nelayan Pambusuang

Keberadaan nelayan di pesisir Teluk Mandar sudah terkenal sejak lama, yang ditandai dengan pembuatan perahu *sandeq* oleh salah seorang pembuat perahu di kampung Pambusuang pada tahun 1930-an, dan diklaim sebagai perahu tercepat di Nusantara. Hingga kemudian kegiatan melaut di daerah ini dilakukan secara turun-temurun. Kegiatan melaut ini dilakukan secara berkelompok sehingga ada dua hal yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Pambusuang, yaitu modal kegiatan melaut dan sistem bagi hasil. Selain itu adanya tingkatan dalam suatu kelompok nelayan, dimana nelayan di Pambusuang juga terdiri atas dua kelompok jika dilihat dari perannya, yaitu *pa'palele* (pemberi modal produksi) dan *punggawa* (penyewa atau pemilik sarana produksi (Alimuddin M. R., 2018).

Selain modal yang disediakan berasal dari para *pa'palele*, pemerintah melalui lembaga keuangan formal, semisal koperasi atau bank, juga memberikan fasilitas bantuan modal melalui sistem perkreditan. Hasil yang didapatkan dalam satu kali pelayaran, biasanya akan disimpan atau dikumpulkan sementara waktu di rumah *punggawa*. Selain itu, hasil tangkapan biasanya juga langsung dijemput oleh *pa'palele* yang sudah menunggu, dimana perahu *sandeq* akan berlabuh, kemudian mengantarkan ikan-ikan dan hasil tangkapan lainnya ke pasar. Namun sebelum menyerahkan hasil tangkapan kepada *pa'palele*, biasanya *punggawa* akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai harga ikan di pasaran berdasarkan jenisnya.

Pembagian hasil telah disepakati antara *punggawa pottana*, *punggawa posasiq*, dan para *sawi* yang telah ikut dalam kegiatan melaut. Bagian untuk *punggawa* memang dilebihkan sebab *punggawalah* yang memimpin jalannya kegiatan melaut, sementara untuk *pa'palele* yang memberikan modal, baik berupa uang maupun *sandeq* yang dipinjamkan telah mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota kelompok. Selain pembagian dalam bentuk uang, pembagian juga dapat dilakukan dengan membagikan hasil tangkapan langsung kepada *punggawa* dan para *sawi*. Hasil tangkap yang sudah dibagikan tersebut dijual oleh para istri-istri nelayan. Selain itu, aktivitas lain dari istri nelayan untuk

memenuhi kebutuhan ekonomi mereka adalah berdagang ataupun memproduksi minyak kelapa (Alimuddin M. R., 2018)

Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa, selain yang nampak adalah struktur berdasarkan produksi yang mempolakan hubungan sosial dalam sistem produksi khususnya menyangkut dengan mata pencaharian sebagai aktivitas masyarakat. Struktur ikatan komunal berdasarkan ikatan ketetanggaan, kekerabatan, dan kepercayaan atau keagamaan juga menjadi hal yang penting di desa ini. Pola hubungan sosial berdasarkan ikatan ketetanggaan terwujud dalam berbagai bentuk tindakan yang dilakukan bersama-sama, seperti kegiatan tolong-menolong dengan memberikan tenaganya baik diminta maupun tidak kepada tetangga yang melakukan kegiatan seperti hajatan sunatan, resepsi perkawinan, dan lain sebagainya. Sementara itu kegiatan tolong-menolong untuk kepentingan bersama tampak pada kegiatan kerja bakti, menyiapkan acara-acara keagamaan seperti Maulid, Isra Mi'raj dan kegiatan tradisi lainnya.

Peranan Lembaga Ekonomi Non Formal dalam Kegiatan Produksi Nelayan.

Kelembagaan dan lembaga dalam perspektif sosiologi diibaratkan organ-organ dalam tubuh manusia. Kata "social institution" menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup (*constitued*) di dalam masyarakat. Didalam satu lembaga ditemukan pemantapan perilaku (*ways*) diantara anggotanya. Ia merupakan sesuatu yang stabil, mantap dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisiensikan kehidupan sosial. Tiap lembaga memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat didalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Dalam sebuah lembaga maupun kelembagaan, terkandung dua aspek yakni; "aspek kultural" dan "aspek struktural". Aspek kultural terdiri dari hal-hal abstrak yang menentukan "jiwa" berupa nilai, norma dan aturan, kepercayaan, moral, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi, dan lain-lain. Sementara aspek struktural lebih statis, yang berisi struktur, peran, hubungan antar peran, integrasi antar bagian, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur riil, struktur kewenangan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, keanggotaan, profil, pola kekuasaan, dan lain-

lain. Kedua aspek ini secara bersama-sama membentuk dan menentukan perilaku seluruh orang dalam kelembagaan maupun lembaga tersebut (Uphof, 1986)

Apa yang menjadi konstruksi teori diatas, juga sangat tergambar dalam kelompok *punggawa-sawi* di desa ini. Hal ini, terkontekskan dengan jelas setelah modernisasi penangkapan berlangsung, dimana daya tangkap lebih besar dikarenakan alat tangkap yang lebih kompleks. Skala usaha dan hubungan kerja dalam tata produksi juga mengalami perubahan, dengan itu kebutuhan akan modal produksi juga semakin meningkat yang dialami oleh nelayan dalam meningkatkan skala usaha dan produktifitasnya, khususnya pencarian daerah-daerah *fising ground* yang potensial dan menjanjikan.

Hubungan antara *Punggawa* dan *Sawi* dalam Kelompok Kerja

Hubungan antara *punggawa* dan *sawi* sangat dipengaruhi oleh latar belakang terjadinya. Menurut Bachtiar (1997) faktor pendorong atau motif untuk menjadi *sawi* adalah hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan hidup. Hal ini menunjukkan dua dimensi yang terjaid sekaligus, yaitu dimensi sosial dan didalamnya terdapat pula segi-segi yang bersifat ekonomi yang ingin dicapai. Kelembagaan *punggawa-sawi* yang melahirkan hak dan kewajiban dalam hubungan produksi dapat dilihat pada tabel 1 :

Table 1. Pola Hubungan *Punggawa-Sawi* yang Mencirikan Peran dalam Kelompok Kerja

Aspek	Punggawa		Sawi	
	Kewajiban	Hak	Kewajiban	Hak
Fasilitas Produksi	Menyediakan: • Kapal • Mesin • Alat Tangkap	Menerima bagian hasil dari masing-masing komponen fasilitas produksi yang disediakan	Merawat fasilitas produksi	
Biaya Produksi (Operasional)	Menyediakan : • Bahan Bakar • Kebutuhan makanan • Kebutuhan non konsumsi	Menerima pengembalian biaya yang dikeluarkan sebelumnya yang dikenal dengan istilah "ongkos" yang diambil dari hasil produksi	Menjalankan kegiatan produksi dan Mengembalikan biaya produksi yang dikeluarkan oleh punggawa	Menerima bagian hasil dari punggawa sebagai bagian dari faktor produksi.

Sumber: Data primer sudah diolah, 2018.

Berikut ini salah satu contoh kasus melalui interpretasi langsung yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai mekanisme punggawa menyediakan biaya persiapan dan biaya operasional sarana penangkapan, dalam kelompok kerja yang dipimpinnya;

"... Amb (36 Thn) adalah seorang punggawa yang mengambil modal awal pada pa'palele sebesar Rp. 15.000.000 untuk biaya perbaikan kapal. Kemudian mengambil Rp. 1.000.000 yang digunakan untuk perbaikan mesin dan pengecatan kapal. Amb memberikan uang sebesar Rp. 500.000 sebagai panjar kepada masing-masing sawi yang berjumlah 4 orang untuk biaya hidup keluarganya selama melaut. Amb juga menanggung biaya operasional yaitu bahan bakar, kebutuhan makanan, dan kebutuhan non konsumsi lainnya yang berkisar Rp. 15.000.000..."

Hubungan Punggawa dengan Pa'palele

Pa'palele merupakan pemilik modal yang mangkhususkan diri memberikan pinjaman kepada kelompok kerja nelayan. *Punggawa* sebagai pemilik unit penangkapan yang pada umumnya tidak mempunyai cukup modal, sehingga melalui *pa'palele* modal produksi itu diperoleh melakukan operasi penangkapan di laut. Konsekuensi dari pola hubungan yang terjadi antara *punggawa* dan *pa'palele* ditetapkan persyaratan yang disepakati bersama sebagai berikut ; *pertama*, *punggawa* diharuskan menjual seluruh hasil tangkapan yang diperoleh dengan harga yang berlaku dipasaran atau terkadang ditentukan sendiri oleh *pa'palele*. *Kedua*, *Pa'palele* akan menerima satu bagian hasil atau 10-15% dari hasil penjualan hasil tangkapan, 15% untuk pemilik kapal, dan sisa hasil pembagian tersebut menjadi hak *punggawa* dan *sawi*-nya, belum termasuk pemotongan biaya selama beroperasi.

Jika pada akhir musim ternyata pinjaman *punggawa* kepada *pa'palele* masih belum terlunasi karena kurangnya hasil tangkapan, maka akan diperhitungkan pada musim penangkapan berikutnya (tahun mendatang). Bagi *pa'palele* dengan adanya pinjaman tersebut, merupakan jaminan yang mengkikat kepada *punggawa*, untuk tetap menjual hasil tangkapan yang dihasilkan pada musim berikutnya (tahun mendatang). *Punggawa* dapat saja pindah ke *pa'palele* yang lain dengan ketentuan harus melunasi semua pinjaman yang tersisa. Kecuali *punggawa* tersebut tidak lagi melaut seumur hidup karena sakit, maka utangnya akan diputihkan oleh *pa'palele*. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, resiprositas yang terjadi antara *pa'palele* (sebagai pelepas uang) dan *punggawa* (sebagai pemimpin/pemilik kelompok kerja) dikatakan sebagai resiprositas sebanding (*balanced*

reciprocity). Menurut Granovetter (1992) resiprositas sebanding adalah resiprositas yang menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai yang sebanding. Pertukaran ini dilakukan individu dua atau lebih, yang masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari partner-nya, namun masing-masing tidak menghendaki untuk memberi dengan nilai lebih dibandingkan dengan yang akan diterima. Jadi berbeda dengan resiprositas umum dimana individu-individu atau kelompok-kelompok terikat oleh solidaritas yang kuat sehingga mereka merupakan satu unit, satu satuan sosial yang utuh. Ciri resiprositas sebanding ditunjukkan oleh adanya norma-norma atau aturan-aturan atau sanksi-sanksi sosial untuk mengontrol individu-individu dalam melakukan transaksi. Bila individu melanggar perjanjian resiprositas, ia mungkin mendapat hukuman atau tekanan moral dalam masyarakat, keputusan untuk melakukan kerja sama resiprositas berada di tangan masing-masing individu. Kerja sama ini muncul karena adanya rasa kesetiakawanan. Resiprositas sebanding berada di antara resiprositas umum dengan dengan resiprositas negatif. Secara umum dapat dikatakan bahwa Fungsi resiprositas sebanding adalah membina solidaritas sosial dan menjamin kebutuhan ekonomi sekaligus mengurangi resiko kehilangan yang dipertukarkan. Namun demikian, fungsi sosial tersebut dapat rusak kalau salah satu pihak tidak konsekuen dalam mengembalikan.

Hubungan yang terjadi antara nelayan dengan kelembagaan ekonomi non formal ini sudah sangat lama berlangsung dan sudah mengakar pada atau menjadi budaya di komunitas nelayan. Dengan demikian, temuan ini memperlihatkan bahwa secara objektif struktur yang ada memang kelihatan berciri eksploitatif, dipihak yang meminjam (kreditor), namun kesadaran eksploitatif itu telah diselubungi oleh "kepemimpinan moral" yang dijalankan oleh *pa'palele*. Karena itu, struktur hubungan tersebut akan sangat susah dilunturkan. *Punggawa* berkepentingan bagi langgengnya hubungan dengan *pa'palele* agar kelanjutan kegiatan produksinya terjamin. Demikian halnya *pa'palele* berkepentingan dengan kebergantungan *punggawa* agar monopoli produksi yang bias padanya tak dipersoalkan. Secara teoritis konteks ini memperjelas tulisan Scott (1985), bahwa suatu perlakuan tidak adil tidak akan dianggap eksploitatif bila: (1) kerangka legitimasi atas perlakuan tersebut memang tidak bisa diterimanya, dan (2) tersedia alternatif status

selevel atau lebih rendah yang bisa menampungnya bila ia terpaksa meninggalkan hubungan tidak adil tersebut.

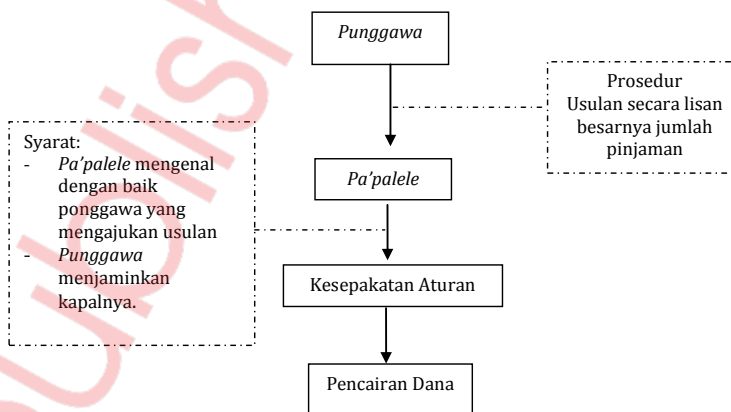
Tabel 2. Perbedaan Karakteristik Antara Lembaga Ekonomi Non Formal dan Lembaga Ekonomi Formal Dalam Implementasinya di Desa Pambusuang.

Aspek	Lembaga Keuangan Mikro	
	Non Formal	Formal
Bentuk Kelembagaan	Tidak resmi karena tidak dilindungi oleh undang-undang	Resmi karena dilindungi oleh undang-undang (undang-undang perbankan, undang-undang koperasi)
Orientasi Utama	Pemenuhan kebutuhan hidup komunal	Keuntungan profit (<i>Profit Oriented</i>)
Sifat kerja sistem sosialnya	Patron-klien	Kompetitif
Sandaran kontrol sosial	Kultural (<i>Cultural Compliance</i>)	Penuh perhitungan (<i>Remuneration compliance</i>)

Sumber: Data primer setelah diolah, 2018.

Mekanisme Penyaluran dan Pengembalian Kredit dalam Kelembagaan Non Formal.

Modal yang diperoleh punggawa dari pa'palele digunakan untuk perlengkapan penangkapan, operasional dan kebutuhan sehari-harinya. Berikut ini alur sistematis yang menunjukkan proses pencairan dana pinjaman dari pa'palele;



Gambar 1. Mekanisme Sistem Peminjaman Modal antara Pa'palele dengan Punggawa

Adapun mekanisme penyaluran dana *pa'palele* kepada *punggawa*, tergambar sebagai berikut :

- *Punggawa* tersebut mengajukan usulan secara lisan tentang jumlah pinjaman yang akan diambil. Syarat utama *pa'palele* untuk memberikan pinjaman yaitu mereka harus mengenal baik nelayan yang ingin meminjam modal.
- Setelah itu, antara *pa'palele* dan nelayan mengadakan kesepakatan aturan pinjaman mengenai bagi hasil, jaminan, dan sanksi yang akan dikenakan apabila si nelayan melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Dimana kapal yang digunakan akan diambil yang dijadikan agunan akan diambil *pa'palele* (tetapi hal tidak pernah terjadi).
- Setelah terjadi kesepakatan, nelayan/*punggawa* dapat langsung mengambil pinjaman yang diberikan oleh *pa'palele*.

Sementara mekanisme pengembalian dana yang telah diperoleh nelayan/*punggawa* biasanya dikembalikan dengan sistem menyicil. Adapun mekanisme pengembalian dana sebagai berikut :

- Setelah kegiatan penangkapan berakhir, maka *punggawa* mengumpulkan hasil tangkapan lalu menyerahkan kepada *pa'palele*.
- *Pa'palele* menghitung harga jual dari hasil tangkapan sesuai harga yang berlaku.
- Total harga penjualan dari hasil tangkapan keseluruhan akan dipotong pinjaman dari sebelum proses penangkapan hingga selesainya kegiatan penangkapan, kemudian dipotong 15% untuk bagian *pa'palele* dan 15% untuk bagian pemilik kapal.
- Sisa dari pembagian *pa'palele* dan pemilik kapal menjadi hak bagi *punggawa* dan nelayan.

Keterikatan seorang nelayan/*punggawa* kepada *pa'palele* dipengaruhi oleh adanya mekanisme pinjam-meminjam. Selain modal produksi, pada umumnya nelayan dan *punggawa* melakukan pinjaman untuk kebutuhan hidup, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, sehingga hubungan-hubungan yang tercipta antara *sawi*, *punggawa*, dan *pa'palele*, warna sosial dan ekonominya terrepresentasikan sebagai hubungan patronase. Hal yang senada sudah banyak pula diilustrasikan oleh beberapa peneliti (Sallatang,1983;

Salman, 1982; Arief 2007) bahwa ketika seorang sawi berhasrat menikah, ketika istri sawi akan melahirkan atau anaknya sakit, ketika biaya hidup sehari-hari tidak tercukupi, *pa'palele* turun tangan memberi bantuan material sehingga keluarga sawi terhindar dari krisis. Karena ekonomi sawi pada umumnya berada di wilayah rawan *subsistensi* maka bantuan *pa'palele* selalu dibutuhkan, Posisi berutang terus dialami oleh sawi maupun *punggawa* pada *pa'palele* akibatnya fenomena ketergantungan menjadi sebuah realitas pada masyarakat pesisir.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa lembaga ekonomi non formal berperan sebagai kelembagaan yang menjembatani kegiatan produksi nelayan berupa biaya usaha penangkapan sampai kepada biaya kebutuhan rumah tangga. Pemberian pinjaman kredit oleh lembaga ekonomi non formal pada masyarakat nelayan adaptif dilakukan karena adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh *pa'palele* sebagai syarat peminjaman, yang sangat berbeda dengan kelembagaan keuangan formal yang sangat prosedural dan birokratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, M. R. (2018, Desember 03). *Budayawan*. (M. D. Reksawan, Interviewer).
- Arief, A. Adri. (2007). *Artikulasi Modernisasi dan Dinamika Formasi Sosial Pada Nelayan Kepulauan di Sulawesi Selatan (Studi Kasus Nelayan Pulau Kambuno)*. (Disertasi) Pascasarjana UNHAS Makassar
- Bachtiar. (1997). *Pola Hubungan Punggawa Sawi (Studi Kasus Masyarakat di Pulau Kodingareng Kec. Ujung tanah, Kotamadya Ujung Pandang)*. Skripsi, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
- Bouman, P.J. (1992). *Ilmu Masyarakat Umum Pengantar Sosiologi* . Jakarta: PT. Pembangunan.
- Clifford Geertz, (1973), *The Interpretation of Culture*, New York: Basic Books, Inc., Publisher
- Granovetter, Mark. (1990). *The Old and the New Economic as Sociology*. 89-112 dalam *Beyond the Marketplace*, diedit oleh R. Friendland dan A.F. Robertson. New York : Aldine de Gruyter.

- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Djambatan.
- Kusnadi, (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Made S. , Mardiana E. F. , Chasyim H. , Hamzah. (2000). *Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi Yang Dibutuhkan Masyarakat Nelayan di Propinsi Sulawesi-Selatan*. Makassar: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Nurani, S., Yuwono, S.S. (2014). Pemanfaatan Tepung Kimpul (*Xanthosoma sagittifolium*) sebagai Bahan Baku Cookies (Kajian Proporsi Tepung dan Penambahan Margarin). *Jurnal Pangan dan Agroindustri*. 2(2): 50-58
- Reski. (2018, November 05). Punggawa. (M. D. Reksawan, Interviewer)
- Sallatang, A. (1982). *Pinggawa-Sawi: Suatu Studi Kelompok Kecil* (Disertasi). Universitas Hasanuddin.
- Scott. (1985). *Moral Ekonomi Petani* (terjemahan). LP3ES. Jakarta.
- Tahir, M. (2013). *Analisis Pendapatan Pola Hubungan Kerja dan Sistem Bagi Hasil Nelayan Telur Terbang (Pa'torani) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Uphoff, Norman, (1986). *Local Institutional Development : An Analycal Sourcebook With Case*. Cornell : Kumarian Press.

Chapter 7

USAHA EKONOMI NELAYAN

ANALISIS USAHA PENANGKAPAN IKAN TERBANG DI PERAIRAN SELAT MAKASSAR

Kasri



Kasri, adalah Dosen pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar. Meraih gelar S1 Sosial Ekonomi Perikanan di Universitas Hasanuddin (2015), Magister Sains Ilmu Perikanan di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2019).

* Email : kasrimuhammad@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk tiap tahunnya terus mengalami peningkatan sehingga menyebabkan tuntutan akan pendayagunaan sumberdaya yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini cenderung memicu terjadinya pengelolaan sumberdaya perikanan secara eksploitatif dan pada gilirannya akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumberdaya harus mempertimbangkan teknologi yang digunakan dan kemampuan daya dukung lingkungan atau pelestarian. Desakan ekonomi dan permintaan pasar menjadi sangat dominan mempengaruhi perilaku komunitas nelayan dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan. Kelestarian sumberdaya perikanan seringkali kurang mendapat perhatian dalam memenuhi permintaan pasar. Sementara permintaan komoditi ikan terus meningkat seiring dengan semakin bertambahnya populasi penduduk dunia.

Meskipun sumberdaya perikanan tergolong dalam sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), namun jika tidak dikelola dengan baik maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan baik kualitas maupun kuantitas persediaan (stok) sumberdaya tersebut atau bahkan kemungkinan terburuknya adalah terjadi kelangkaan ataupun kepunahan. Menurut Indra (2007) bahwa telah terjadi peningkatan eksploitasi sumberdaya ikan yang cukup signifikan dari tahun 1995–2004. Eksploitasi sumberdaya yang dimaksud telah melampaui produksi sustainable dan di

beberapa daerah di Indonesia, penangkapan ikan telah terjadi gejala *overfishing*, paling kurang *economic overfishing* yang ditandai dengan tingginya penggunaan input, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan *output* dan *returns* secara proporsional.

Selama kepemilikan dan sifat sumberdaya ini masih merupakan *common property* dan sekaligus *open access* maka fenomena *overfishing* dan degradasi sumberdaya tidak bisa dihindari. Hal ini sesuai dengan pendapat Gordon (1954), diacu dalam Fauzi (2004) menyatakan bahwa sumber daya ikan pada umumnya *open access*, artinya siapa saja bisa berpartisipasi tanpa harus memiliki sumber daya tersebut. Sehingga memungkinkan hasil tangkap lebih secara ekonomi (*economic overfishing*) akan terjadi pada perikanan yang tidak terkontrol ini.

Salah satu perairan yang cukup potensial di Indonesia bagian Timur adalah Perairan Sulawesi Selatan yang memiliki garis pantai lebih kurang 2.500 km dengan luas wilayah penangkapan 12 mil laut dan perairan umum sekitar 144.425 Ha. Salah satu potensi sumberdaya perikanan Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Takalar adalah ikan terbang (*Hyrundichthys oxycephalus*) dan telurinya (Ali, 2005). Ikan terbang termasuk ikan pelagis yang hidup di perairan tropis dan sub tropis dengan kondisi perairan yang jernih. Ikan terbang (*C. oxycephalus*) yang kini dikenal sebagai *Hyrundichthys oxycephalus* merupakan komoditas utama perikanan pelagis di Sulawesi Selatan. Usaha penangkapan ikan terbang maupun telur ikan terbang, untuk saat ini merupakan mata pencaharian yang paling dominan digeluti komunitas nelayan di Kabupaten Takalar. Kepemilikan sarana produksi pada usaha telur ikan terbang sangat bervariasi diantara aktor yang terlibat. Kepemilikan perahu umumnya didominasi oleh pemodal/*papalele*. Sebagian besar pemodal juga memiliki perahu antara 2 - 10 unit. Sedangkan aktor nelayan/*punggawa*/*nahkoda*, sebagian kecil memiliki 1-2 perahu dan selebihnya bekerja pada pemilik modal yang memiliki perahu dan sarana produksi lainnya.

Potensi ikan terbang di Perairan Selat Makassar dengan nilai potensi maksimum lestarnya sebesar 2,545 ton/tahun dengan nilai rente ekonomi sebesar Rp 11,896,495,281 dan effort sebesar 1,215. Sedangkan upaya pemanfaatan sumberdaya ikan terbang di Perairan Selat Makassar terindikasi mengalami gejala tangkapan lebih secara biologi (*biological overfishing*) dan secara ekonomi (*economic overfishing*), dengan

rata-rata tingkat pemanfaatan ikan terbang di Perairan Selat Makassar sebesar 96.75% (Kasri., *et al*, 2019).

Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan pada umumnya menggunakan jaring insang hanyut. Sedangkan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap telur ikan terbang adalah *bale-bale*. *Bale-bale* yang target utamanya adalah telur ikan terbang. *Bale-bale* terbuat dari bambu, menyerupai rakit, disisi atasnya dilengkapi daun kelapa (Ali, 2005). Perubahan alat tangkap *pakajja* ke alat tangkap *bale-bale* menyebabkan menurunnya produksi ikan terbang sedangkan produksi telur ikan terbang mengalami peningkatan (Syahailatua *et al.*, 2008). Hal ini disebabkan oleh pola penangkapan nelayan yang hanya fokus untuk menangkap telur ikan terbang. Tingginya permintaan terhadap telur ikan terbang juga menjadi penyebab meningkatnya produksi akan telur ikan terbang. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah kapal penangkap telur ikan terbang dari sekitar 112 unit menjadi 1500 unit di tahun 2001. Namun sayangnya, tingginya permintaan telur ikan terbang mulai mengalami sulit di penuhi akibat rendahnya hasil produksi, dan menyebabkan nelayan mencari *fishing ground* yang baru, salah satunya adalah di perairan Laut Seram.

Kondisi ini mengakibatkan kondisi sumberdaya ikan terbang mulai mengalami penurunan produksi dari tahun ke tahun, akibat eksploitasi induk ikan terbang dan telur ikan terbang secara besar-besaran dan terus menerus. Tentu dampak eksternalitas yang dihasilkan bukan hanya berdampak pada ekosistem tetapi juga berdampak pada kondisi sosial ekonomi komunitas nelayan ke depannya. Melihat keberadaan sumberdaya ikan terbang merupakan kebanggaan sebagai ikon perikanan di Selat Makassar akan hilang seperti halnya keberadaan ikan terubuk di perairan Sumatera. Untuk itu perlu pengelolaan dengan baik dengan mempertimbangkan nilai degradasi dan nilai depresiasi sumberdaya ikan terbang. Gejala degradasi dan depresiasi sumberdaya ini bukanlah gejala ekologi semata, namun mempengaruhi keadaan sosial ekonomi masyarakat yang menggantung hidupnya pada sumberdaya ikan terbang khususnya di Perairan Selat Makassar. Maka dari itu diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan sumberdaya ikan terbang.

Permasalahan penurunan produksi ikan terbang tentu akan berdampak pada ekonomi nelayan ikan terbang. Ekonomi nelayan tentu akan mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya hasil tangkapan ikan nelayan dan adanya perubahan harga ikan terbang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan sebuah analisis usaha penangkapan ikan terbang. Penilaian kelayakan usaha untuk memberikan gambaran usaha penangkapan ikan terbang di Perairan Selat Makassar. Kontribusi ekonomi dari aktivitas penangkapan ikan terbang sangat penting untuk kesejahteraan para nelayan. Hasil penjualan ikan yang kemudian dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga nelayan berupa konsumsi, kesehatan dan pendidikan bagi keluarga nelayan.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha penangkapan ikan terbang (*Hirundictichthys oxycephalus*) di Perairan Selat Makassar.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan alasan terdapatnya unit usaha penangkapan ikan terbang pada kecamatan ini yang khusus menangkap ikan terbang. Berbeda dengan kecamatan lainnya seperti Galesong dan Galesong Utara yang hanya berfokus pada penangkapan telur ikan terbang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan studi Pustaka.

Metode yang digunakan adalah metode survey. Menurut Sugiyono (2013:11) metode survey adalah "Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis". Populasi penelitian adalah nelayan yang menangkap ikan terbang. Ikan terbang merupakan sasaran utama bukan nelayan yang hanya fokus pada telur ikan terbang. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan, jumlah usaha penangkapan ikan terbang di Galesong Selatan yaitu sebanyak 104 usaha penangkapan ikan terbang.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2013). Sampel, 35% dari populasi yaitu, 36 sampel usaha penangkapan ikan terbang. Penentuan sampel pada penelitian juga didasarkan pada pernyataan Roscoe dalam Sugiyono (2013), cara menentukan jumlah sampel dalam penelitian bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500 orang. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menghitung nilai investasi, penerimaan, biaya, keuntungan, R/C ratio, dan Payback Period atas investasi pada usaha penangkapan ikan terbang di Perairan Selat Makassar.

Profil Wilayah Penelitian

Secara geografis, Kabupaten Takalar terletak antara 5°30' – 5°38' Lintang Selatan dan 119°22' – 119°39' Bujur Timur. Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada bagian selatan. Kabupaten Takalar memiliki luas wilayah 566,51 Km² yang terdiri dari 100 desa dan kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan dengan luas wilayah yang beragam. Wilayah kecamatan terluas pada Kabupaten Takalar adalah Kecamatan Palombangkeng Utara dengan luas wilayah 212,25 Km² atau sekitar 37% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Takalar. Untuk luas wilayah ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Pattalassang dengan luas wilayah 25,31 Km².

Secara administrasi, Kabupaten Takalar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto; Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar; Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores. Posisi Kabupaten Takalar tergolong dekat dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar yang hanya memiliki jarak mencapai mencapai 45 Km melalui Kabupaten Gowa. Posisi ini sangat menguntungkan bagi Takalar yang merupakan salah satu daerah yang menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat setempat dan masyarakat kota.

Jumlah penduduk Kota Kabupaten Takalar Pada Tahun 2017 sebanyak 292.983 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar. Jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Palombangkeng Utara dengan jumlah penduduk sebesar 49.797 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki dan

perempuan masing-masing sebesar 24.167 jiwa dan 25.630 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang terkecil terdapat pada Kecamatan Sanrobone dengan jumlah penduduk sebesar 14.048 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 6.623 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 7.425 jiwa. Jumlah ini tergolong sedikit mengingat luas wilayah pada daerah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Takalar.

Penduduk Kabupaten Takalar sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun (66,4 persen) dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 15 – 19 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa baik penduduk laki-laki maupun perempuan yang terbesar berada pada kelompok umur 15-19 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (66,39 persen) merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), sedangkan sisanya sebanyak 27,1 persen merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 6,5 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

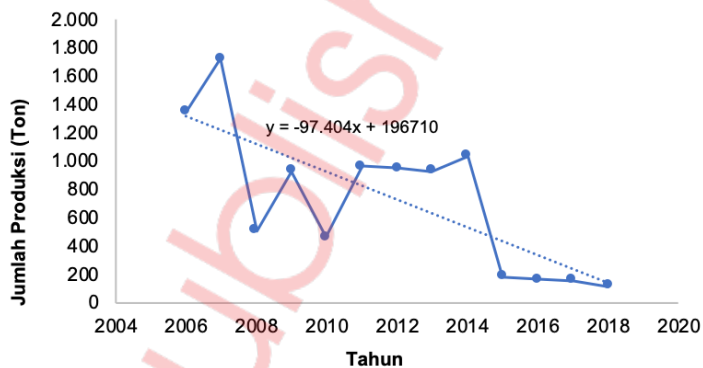
Potensi perikanan tangkap terbesar di Kabupaten Takalar terletak di Kecamatan Galesong Selatan dengan jumlah produksi sebesar 5,469.552 ton per tahun atau sekitar 19,47% dari total produksi perikanan tangkap di Kabupaten Takalar. Sedangkan jumlah produksi terkecil adalah Kecamatan Sanrobone dengan jumlah produksi sebesar 165.600 ton per tahun. Untuk saat ini, ekspor telur ikan terbang Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahun. Ekspor tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 810,8 ton/tahun. Secara umum hasil tangkapan fluktuatif. Ikan terbang sebagai ikan pelagis kecil memiliki nilai ekonomis penting karena telurnya menjadi komoditi ekspor ke beberapa Negara diantaranya Jepang, Korea dan Taiwan (Peranginangin, 2003; Zamroni, 2008).

Produksi sub sektor perikanan di Kabupaten Takalar di dominasi oleh sub sektor perikanan budidaya dengan jumlah produksi 1,004,435.7 ton atau dengan nilai produksi Rp 1,669,169,753. Potensi perikanan budidaya sangat besar di Kabupaten Takalar, hal tersebut di dominasi oleh budidaya rumput laut dan budidaya ikan. Sedangkan pada perikanan laut atau perikanan tangkap sebesar 11,444.2 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 166,513,530.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Sumberdaya Ikan Terbang

Di Sulawesi Selatan penangkapan ikan terbang dilakukan di Laut Flores dan Selat Makassar. Spesies yang paling dominan adalah jenis *Hirundichthys oxycephalus* (Bleeker) diperkirakan sekitar 80 persen. *Hirundichthys oxycephalus* (Bleeker) adalah sinonim dari *Cypselurus oxycephalus* (Bleeker) (Parin 1960), dikenal dengan nama lokal Bugis-Makassar (*torani*, *toruani*, atau *tuang-tuang*). Ikan ini tergolong sumberdaya bernilai sosial ekonomis cukup penting karena telurnya sebagai sumber devisa, sumber lapangan kerja, serta sumber protein murah bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang jauh dari laut seperti di daerah pedesaan Toraja dan Enrekang. Antara tahun 1985 dan 2002 statistik hasil perikanan Sulawesi Selatan menunjukkan produksi ikan terbang tahun 1985 sebesar 7112 ton dan turun tahun 2002 menjadi 4472 ton, sedangkan produksi telur ikan terbang tahun 1985 sebesar 197.3 ton dan tahun 2002 turun secara drastis hingga 344.5 ton. Data selanjutnya hasil tangkapan ikan terbang dari tahun 2006-2018 di Perairan Selat Makassar sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2019

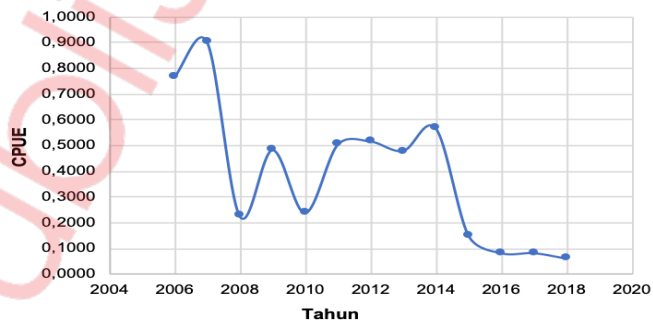
Gambar 1. Produksi Ikan Terbang di Perairan Selat Makassar

Produksi ikan terbang di perairan Selat Makassar sangat berfluktuasi. Secara umum hasil tangkapan ikan Namun jika dilihat data secara seksama jumlah produksi ikan terbang di Perairan Selat Makassar cenderung menurun dari tahun ke tahun terutama pada tahun 2008 mulai 1,722.50 ton mengalami penurunan produksi yang sangat besar sampai pada 515.00 ton. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terjadi penurunan secara signifikan sebesar 73%.

Hasil Tangkapan Per Satuan Upaya Penangkapan / Catch Per Unit Effort (CPUE)

Catch (hasil tangkapan), effort (upaya penangkapan) dan CPUE (hasil tangkapan per-unit upaya) adalah salah satu indikator pengelolaan perikanan keberlanjutan. Pola umum suatu perikanan yang di eksploitasi yang mengalami overfishing indikatornya adalah bahwa naiknya total upaya (effort) diikuti oleh naiknya hasil tangkapan (catch) yang kemudian diikuti oleh turunnya hasil tangkapan per-satuan upaya (CPUE). Hasil tangkapan per unit upaya atau Catch Per Unit Effort (CPUE) merupakan angka yang menggambarkan perbandingan antara hasil tangkapan per unit upaya atau usaha.

Catch Per Unit Effort (CPUE) pada penangkapan ikan terbang sangat bervariasi tiap tahunnya. Pada beberapa tahun adanya beberapa alat tangkap yang sudah tidak digunakan lagi. Alasannya karena produktivitasnya sudah menurun sehingga perlu menggunakan alat tangkap lainnya yang lebih efektif dan efisien untuk menangkap ikan terbang khususnya di Perairan Selat Makassar.



Sumber: Data primer diolah, 2019

Gambar 2. CPUE Sumberdaya Ikan Terbang di Perairan Selat Makassar

Melihat nilai CPUE di atas yang angkanya mulai mengalami penurunan tiap tahunnya. Jika dilihat fenomena di atas sangat mengkhawatirkan sesuai dengan pendapat King (1995) bahwa nilai CPUE dapat digunakan untuk melihat kemampuan sumberdaya apabila dieksplotasi terus menerus. Nilai CPUE yang menurun dapat menandakan bahwa potensi sumberdaya sudah tidak mampu menghasilkan lebih banyak walaupun upaya ditingkatkan.

Jenis Investasi

Komponen pembiayaan usaha penangkapan nelayan di perairan Selat Makassar terdiri dari biaya investasi dan biaya produksi. Secara umum, jenis investasi yang dibutuhkan pada usaha penangkapan ikan terbang yaitu perahu/kapal, mesin, dan alat tangkap. Rincian komponen biaya investasi dari usaha penangkapan ikan terbang di perairan Selat Makassar dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jenis Investasi Usaha Penangkapan Ikan Terbang

No	Jenis Investasi	Kuantitas	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Perahu	1	135,416,667	135,416,667
2	Mesin Perahu	2	19,000,000	38,000,000
3	Alat Tangkap	50	500,000	25,000,000
	Jumlah			198,416,667

Sumber: Data primer diolah, 2019

Biaya investasi merupakan biaya awal yang dikeluarkan pada saat akan memulai suatu usaha. Pada tabel 1, dapat diketahui jumlah biaya awal atau investasi yang dikeluarkan untuk mulai melakukan penangkapan ikan terbang di perairan Selat Makassar yaitu, sekitar Rp 198.416.667, dengan biaya investasi terbesar yaitu pembelian 1 unit kapal. Pengeluaran lain yang dikategorikan sebagai biaya investasi adalah pembelian unit mesin, dan pembuatan alat tangkap. Alat tangkap yang digunakan adalah jaring insang hanyut. Rata-rata jumlah alat tangkap yang digunakan setiap usaha penangkapan ikan sebanyak 50 buah. Besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dalam usaha penangkapan ikan layur menggunakan pancing ulur bergantung pada besar kecilnya ukuran perahu dan kekuatan mesin yang digunakan dalam kegiatan operasi penangkapan. Semakin besar ukuran perahu yang digunakan maka semakin besar pula kekuatan mesin yang digunakan dalam aktivitas penangkapan, hal tersebut berpengaruh terhadap semakin besarnya biaya modal yang dikeluarkan, begitupun sebaliknya

(Sudrajat, S. M. N. I., Rosyid, A., & Bambang, A. N, 2014).

Biaya Usaha Penangkapan Ikan Terbang

Selain biaya investasi, terdapat pula biaya produksi atau biaya operasional yang merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan pada saat menjalankan aktivitas penangkapan. Komponen biaya produksi tersusun dari komponen biaya variabel dan komponen biaya tetap. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya berubah seiring dengan perubahan besarnya volume kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan biaya per unit tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak terpengaruh dengan adanya perubahan volume kegiatan penangkapan. Besarnya komponen biaya penangkapan ikan terbang, dibagi atas biaya tetap dan biaya variabel. Gambaran komponen biaya-biaya yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jenis Biaya Usaha Penangkapan Ikan Terbang

Jenis Biaya	Biaya (Rp/Tahun)
A. Biaya Variabel	
Bahan Bakar Minyak (BBM)/Solar	114.091.250
Beras	1.390.000
Elpiji	3.451.500
Rokok	41.890.000
Teh	2.409.167
Kopi	3.540.000
Es Batu	51.330.000
Gula	4.336.500
Upah ABK	676.620.000
Total Biaya Variabel	910.058.417
B. Biaya Tetap	
Penyusutan Kapal	10.416.667
Penyusutan Mesin	3.800.000
Penyusutan Alat Tangkap	7.377.315
Perawatan Perahu	1.470.725
Perawatan Mesin	431.880
Perawatan Alat Tangkap	1.187.669
Total Biaya Tetap	24.684.255

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa total biaya tetap yang dikeluarkan selama satu tahun sebesar Rp 24.684.255 yang meliputi penyusutan kapal, penyusutan mesin, biaya perawatan kapal, dan perawatan mesin serta perbaruan alat tangkap setiap tahunnya. Biaya terbesar dalam komponen biaya tetap adalah penyusutan kapal yaitu sebesar Rp 10.416.667. Komponen biaya lain yang termasuk dalam biaya produksi adalah

biaya variabel. Jumlah biaya variabel yang tercantum pada tabel di atas adalah Rp 910.058.417 yang meliputi biaya bahan bakar, konsumsi, dan upah para anak buah kapal (ABK). Jumlah ABK dalam satu unit usaha penangkapan ikan terbang mulai 4-6 orang.

Analisis Usaha Penangkapan Ikan Terbang

Penilaian kelayakan usaha penangkapan ikan terbang yang dijalankan nelayan di Kabupaten Takalar, dilakukan penilaian dengan menggunakan dua komponen biaya tersebut di atas (biaya investasi dan biaya produksi) melalui dua cara yaitu perhitungan nilai R/C Ratio dan Payback Period yang masing-masing hasilnya tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Usaha Usaha Penangkapan Ikan Terbang

Deskripsi	Nilai
Penerimaan	1.470.735.000
Biaya	934,742,672
Keuntungan	535.992.328
R/C ratio	1.57
Payback Periode (PP)	0,37

Sumber: Data primer diolah, 2019

Hasil analisis usaha penangkapan ikan terbang di perairan Selat Makassar yang ditampilkan pada Tabel 5 di atas yang terdiri atas perhitungan penerimaan, biaya, (R/C Ratio) dan perhitungan waktu pengembalian modal (Payback Period). Jumlah penerimaan usaha penangkapan ikan terbang adalah sebesar Rp1.470.735.000/tahun, sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha sebesar Rp934,742,672/tahun. Keuntungan merupakan penerimaan dari hasil penjualan tangkapan dan dikurangi oleh semua total biaya yang dikeluarkan. Menurut Wismaningrum (2013), dengan memperoleh hasil tangkapan yang banyak dapat menambah besar penerimaan sehingga keuntungan pun juga semakin besar, atau bisa juga dengan menekan biaya operasionalnya. Keuntungan yang didapatkan nelayan dalam setahun diperoleh Rp535.992.328,-/tahun.

Perhitungan nilai R/C Ratio pada penangkapan ikan terbang menghasilkan nilai 1,57 atau lebih besar dari 1 ($R/C > 1$), yang berarti bahwa setiap Rp 1 biaya yang dikeluarkan oleh nelayan (pemilik kapal) akan memperoleh penerimaan sebesar Rp 1,57. Berdasarkan nilai R/C Ratio yang diperoleh dapat dikatakan bahwa usaha penangkapan ikan terbang di perairan Selat Makassar masih memperoleh keuntungan. Berdasarkan hasil

perhitungan didapatkan nilai Payback Period (PP) sebesar 0,37. Artinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal yang dikeluarkan nelayan untuk usahanya yaitu sekitar 4 bulan. Menurut Gunawan et al. (2016), yang menyatakan bahwa, Semakin besar nilai PP maka semakin lama pengembalian modalnya, dan semakin kecil nilai PP, maka semakin cepat pengembalian modal dari usaha tersebut.

SIMPULAN

Usaha penangkapan ikan terbang di perairan Selat Makassar termasuk dalam kategori layak dengan nilai R/C ratio pada penangkapan ikan terbang menghasilkan nilai 1.57 atau lebih besar dari 1 ($R/C > 1$) dan hasil perhitungan waktu pengembalian modal atau Payback Period (PP) usaha yaitu selama 4 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S.A.; M.N. Nessa; M.I. Djawad; S.B.A. Omar. (2005). Distribusi diameter telur dan frekuensi pemijahan ikan terbang, *Hirundichthys oxycephalus* (Bleeker, 1582) di Laut Flores Sulawesi Selatan. *Torani. Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan*. 15 (6): 396-402.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar. (2019). *Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2018*.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. (2019). *Statistik Perikanan Tangkap Sulawesi Selatan Tahun 2018*.
- Fauzi, A., (2004). *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, A.A., Ismail & Jayanto, B.B. (2016). Analisis Finansial Usaha Perikanan Jaring Klitik (Gill Net Dasar) dan Jaring Nilon (Gill Net Permukaan) di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjungsari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. Vol 5(2): 48-54. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ifrumt/article/view/11823/11478>.
- Gordon HS. (1954). The Economic Theory of a Common Property Resource: The Fishery. *Journal of Political Economy* 62:124-142.

- Indra. (2007). *Kajian Degradasi dan Depresiasi Sumberdaya Ikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh. Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala,
- Kasri, A. B., & Tahang, H. (2019). Bioeconomic Analysis of Resource Utilization of Flying Fish (*Hyrundichthys oxycephalus*) in the Makassar Strait, South Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology*. Vol-4, Issue-4, Jul-Aug- 2019.
- King. M. (1995). *Fisheries Biology, Assesment and Management*. Great Britain: Fishing News Book.
- Sudrajat, S. M. N. I., Rosyid, A., & Bambang, A. N. (2014). Analisis teknis dan finansial usaha penangkapan ikan layur (*Trichiurus* sp) dengan alat tangkap pancing ulur (handline) di pelabuhan perikanan nusantara Palabuhanratu Sukabumi. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 3(3), 141-149.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Syahailatua, A., S.A. Ali, P. Makatipu. (2008). Strategi reproduksi ikan terbang (*Exocoetidae*) dan kaitannya dengan faktor oseanografi di Perairan Indonesia. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 14 (3): 303-310.
- Wismaningrum, K,E,P. (2013). Analisis Finansial Usaha Penangkapan One Day Fishing dengan Alat Tangkap Mutigear di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang Kabupaten Kendal. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management*. 2 (3): 263-273

Chapter 8

SISTEM BAGI HASIL NELAYAN

SISTIM BAGI HASIL NELAYAN PADA USAHA PENANGKAPAN GELEMBUNG IKAN DI KABUPATEN MERAUKE

Sajriawati



Sajriawati, adalah Dosen pada Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Musamus Merauke. Meraih gelar S1 Sosial Ekonomi Perikanan di Universitas Hasanuddin, Makassar (2013), Magister Sains Ilmu Perikanan di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2016).

* Email : sajriawati_msp@unmus.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Merauke adalah salah satu dari 29 Kabupaten yang terletak di Provinsi Papua. Kabupaten Merauke adalah kabupaten yang memiliki wilayah terluas diantara kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Papua. Luas Kabupaten Merauke seluas 45.071 km² atau sekitar 11% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Papua. Secara geografis Kabupaten Merauke berada antara 137° - 141° BT dan 6°00' - 9°00' LS dan terletak di wilayah paling timur Indonesia (Bappeda Kabupaten Merauke, 2020). Memiliki potensi kekayaan sumber daya perikanan laut yang bersumber dari perairan Laut Arafura, hal ini didukung dari letak Kabupaten Merauke yang berbatasan langsung dengan Laut Arafura pada sebelah selatan dan sebelah barat. Potensi ini memberikan peluang yang cukup besar bagi para nelayan di Kabupaten Merauke untuk berlomba-lomba meningkatkan hasil tangkapan sehingga perkembangan kapal penangkap ikan di daerah ini cukup besar (KKP, 2018)

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji dari tren perkembangan penangkapan ikan di Wilayah laut Arafura khususnya oleh nelayan di Kabupaten Merauke, adalah perubahan tren target tangkapan ikan. Jika sebelumnya para nelayan hanya berfokus pada hasil tangkapan seperti ikan, udang, dan hasil laut lainnya, pada tahun 2000 awal muncul tren baru yaitu pencarian gelembung ikan, khususnya ikan kakap dan ikan gulama. Hal ini diawali ketika ada tawaran pembelian gelembung oleh orang Tiongkok

dengan harga yang sangat tinggi dan fantastis. Harga jual gelembung yang sangat tinggi membuat para nelayan berlomba-lomba mengubah target pencarian ikan yaitu khusus ikan kakap dan ikan gulama dengan terget utama yaitu gelembung ikannya. (Habshy, 2017).

Gelembung ikan dalam bahasa internasional dikenal dengan nama *Fish Maw*. Gelembung ikan merupakan organ ikan yang membantu ikan terapung di dalam air. Gelembung ikan kakap dan ikan gulama dari hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Merauke memiliki harga jual yang tinggi karena gelembung ikan ini merupakan salah satu komoditas ekspor ke luar negeri. Harga jual yang tinggi disebabkan oleh permintaan yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan manfaat dari gelembung ikan kakap dan gulama yaitu sebagai sumber kolagen, alat pemurni alkohol, dan yang paling diminati adalah sebagai bahan untuk benang operasi dalam bidang kedokteran (Balakembang, 2013).

Nelayan penangkap gelembung ikan di Kabupaten Merauke menggunakan kapal berbahan kayu yang memiliki bobot rata-rata 30 GT serta ukuran sekitar 20 x 5 meter. Kegiatan penangkapan gelembung ikan membutuhkan modal dan biaya operasional yang tinggi, hal ini dikarenakan usaha penangkapan gelembung ikan menggunakan kapal bermotor dan alat tangkap berupa jaring insang hanyut. Perairan yang menjadi tempat mencari dan menangkap ikan target di Kabupaten Merauke adalah perairan laut Arafura yang memiliki jarak yang jauh dari garis pantai, sehingga waktu melaut yang digunakan cukup lama berkisar 14 hari sampai 70 hari atau bahkan lebih sesuai dengan perbekalan yang dimiliki. Dalam kegiatan penangkapan gelembung ikan melibatkan beberapa orang, yaitu 1 (satu) orang sebagai nahkoda atau sering disebut *tekong* dan 6-8 orang ABK (Anak Buah Kapal). Pemilik kapal tidak turut serta dalam melaut, namun perannya sangat penting dalam menyediakan biaya operasional penangkapan seperti menyediakan semua biaya perbekalan sebelum melakukan penangkapan. Pola hubungan kerja ini sama dengan pendapat dari Pratama *et al.* (2016) yaitu pola antara pemilik kapal sebagai juragan dan ABK (Anak Buah Kapal) sebagai pekerja.

Kajian dan sumber literature yang membahas tentang mekanisme perhitungan dan sistim bagi hasil nelayan di Indonesia sudah banyak dilakukan. Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rolandow *et al* (2014) menyebutkan bahwa sistem bagi

hasil nelayan jaring insang dalam kelompok penangkap ikan Malos 3 di Kel. Malalayang Satu Timur Kec. Malalayang Kota Manado menganut sistem sama rata sama rasa. Anggota kelompok yang melakukan aktivitas melaut akan mendapat bagian yang sama atas ikan hasil tangkapan maupun jumlah rupiah yang sama untuk ikan hasil penjualan Berbeda dengan sistem bagi hasil yang selama ini berlaku di Kabupaten Seram Barat di Provinsi Maluku, berdasarkan penelitian Ruslan *et al* (2013) sistim bagi hasil yakni 60:40 belum mencerminkan sebuah pola bagi hasil yang optimal dari aspek keadilan, proporsionalitas, berkeuntungan dan berkelanjutan. Hal serupa mirip dengan nelayan pengguna pancing tonda di Kepulauan Aru, memberlakukan sistem bagi hasil setelah diperoleh pendapatan bersih dari hasil penjualan ikan dikurangi biaya operasional. Setelahnya, dibagi 50% antara pemilik dan awak kapal. Pendapatan dari pemilik adalah sebesar 50% dari pendapatan bersih tersebut. Selanjutnya 50% untuk awak mendapat pembagian yaitu 60% untuk nahkoda dan 40% untuk ABK (Retno dan Lathifatul , 2018).

Fenomena sistim bagi hasil, menjadi fenomena yang menarik untuk terus dikaji. Karena sesungguhnya secara aturan formal sudah tersedia landasan hukumnya, yaitu; Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan (UUBHP) Nomor 16 tahun 1964 yang ditetapkan tanggal 23 September 1964, yang mengatur penerapan bagi hasil untuk usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan tambak. Namun realitanya, nelayan masih tetap mempraktekkan sistem bagi hasil berdasarkan aturan lokal adat kenelayan setempat. Arief. A. Adri (2021) menyebutkan bahwa hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat, sehingga merupakan kristalisasi dari kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana (termasuk masyarakat pesisir). Namun kondisi empiris sebagai fakta sosial memperlihatkan bahwa, walaupun hukum adat merupakan hukum hidup, tetapi tidak selalu hukum adat merupakan hukum yang adil atau sebanding.

Penelitian sistim bagi hasil nelayan di Kabupaten Merauke khususnya bagi penangkap gelembung ikan di Kabupaten Merauke belum pernah dilakukan. Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sistem bagi hasil nelayan pada usaha penangkapan gelembung ikan di Kabupaten Merauke, Papua. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang sistim bagi

hasil yang berlaku pada nelayan penangkapan gelembung ikan, apakah mekanismenya sudah ideal bukan saja menguntungkan bagi pemilik namun juga ABK.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sistim bagi hasil yang berlaku antara pemilik kapal dan nelayan pada usaha penangkapan gelembung ikan di Kabupaten Merauke.

Metodologi

Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai April 2021 di Pantai Lampu Satu dan Pantai Kumbe Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Lokasi ini dipilih karena merupakan sentra nelayan penangkapan gelembung ikan di Kabupaten Merauke. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta data sekunder berupa laporan penelitian, serta publikasi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian.

Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dari pemilik kapal/perahu dan awak kapal/perahu (nahkoda dan ABK) yang dipilih secara *purposive*. Metode *purposive sampling* adalah suatu proses penentuan sampel dengan didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Penelitian ini mendeskripsikan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal/perahu kepada seluruh awak kapal/perahu (nahkoda dan ABK) di Kabupaten Merauke (Sugiyono, 2008).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis sistem bagi hasil pada usaha penangkapan gelembung ikan. Pada data kualitatif, informasi dari penelitian dikelompokkan, disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari data sekunder, wawancara, serta observasi lapang. Analisis data kuantitatif untuk menganalisis pendapatan dari pemilik dan awak kapal/perahu. Data kuantitatif dianalisis dalam bentuk tabulasi statistik sederhana.

Profil Wilayah Penelitian

Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Papua terletak dibagian selatan yang memiliki wilayah terluas diantara kabupaten / kota di Provinsi Papua. Secara geografis letak Kabupaten Merauke berada antara 137° - 141° BT dan 6°00' - 9°00' LS. Kabupaten Merauke terletak paling timur wilayah nusantara dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea, Sebelah Selatan : Laut Arafura, Sebelah Barat : Laut Arafura.

Secara geografis mempunyai prospek pengembangan ekonomi dengan negara tetangga PNG, Australia dan negara kawasan Pasifik Selatan. Luas Kabupaten Merauke 45.071 Km² (11% dari wilayah Provinsi). Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke terdiri dari daratan rendah dan berawa, luas areal rawa 1.425.000 Ha dan daratan tinggi di beberapa kecamatan padalaman bagian utara. Umumnya berdataran rendah, kemiringan 0-8 % , pesisir pantai berawa-rawa tergenang air, bagian Utara dan Timur agak tinggi / bergelombang dengan sedikit berbukit. Tinggi air pasang surut 5-7 m, air pasang laut masuk sampai sejauh 50-60 Km dan beberapa tempat terintrusi air asin / air laut.

Kabupaten Merauke, Papua, mempunyai tiga sektor unggulan pembangunan perikanan. Ketiga sektor unggulan tersebut adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Data tahun 2018, produksi perikanan laut Merauke sebesar 54.461 ton. Jumlah ini setara 6,9 persen potensi sumberdaya ikan (SDI) Laut Arafura. Sementara untuk perikanan budidaya, sebagian besar produksi perikanan budidaya Merauke dihasilkan dari kolam, dengan komoditas unggulan di antaranya ikan mas, lele, nila, gurame, dan arwana. Adapun potensi kekayaan sumber daya perikanan laut yang bersumber dari perairan Laut Arafura. antara lain ikan pelagis (teri, tongkol, dan kembung), ikan demersal (kakap, bawal, dan pari), udang, cumi-cumi, kerapu hingga ikan hias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Aktivitas Nelayan Pencari Gelembung Ikan

Usaha penangkapan gelembung ikan oleh nelayan di Kabupaten Merauke menggunakan jaring insang hanyut sebagai alat tangkap utama dan satu buah kapal motor dengan bobot rata-rata 30 GT. Kapal dikemudikan oleh seorang nahkoda yang biasa disebut tekong dan beberapa ABK (Anak Buah Kapal). Jumlah ABK yang diikutkan pada setiap kapal berkisar 6 sampai 8 orang ABK, tergantung kemauan tekong dan pemilik kapal.

Ikan hasil tangkapan yang diperoleh, langsung ditangani dan diambil bagian gelembungnya saja. daging ikannya hanya dijadikan ikan kering. Proses penanganan gelembung ikan dan dagingnya hampir sama yaitu dibersihkan dengan air mengalir kemudian dijemur sampai kering. Pada saat pengeluaran gelembung ikan harus sangat berhati-hati agar bentuk gelembungnya utuh dan tidak rusak. Penjualan gelembung ikan memiliki variasi harga yang berbeda-beda. Perbedaan harga jual gelembung ikan di Kabupaten Merauke ditentukan oleh beberapa faktor yaitu jenis ikan, jenis kelamin ikan, dan klasifikasi berat gelembung ikan. Semakin berat gelembung ikan maka harga jual per kg juga semakin mahal. Harga gelembung ikan gulama lebih tinggi dari pada harga gelembung ikan kakap cina, sedangkan harga gelembung ikan kakap cina jantan lebih tinggi dari harga gelembung ikan kakap cina betina. Bentuk gelembung jantan, pinggirnya cenderung tipis dan tengahnya tebal. Sementara bentuk gelembung betina, permukaannya cenderung tebal semua. Apabila hendak dijual, gelembung itu dikelompokkan dulu berdasarkan berat per gram. Kemudian gelembung yang dikumpulkan itu akan dinilai berdasarkan ukuran per 1 kg. Berikut adalah daftar harga gelembung ikan berdasarkan penuturan nelayan. Harga gelembung gulama, di bawah 10 gram, per 1 kg: Rp 8 juta, 10 gram, per 1 kg : Rp 18 juta. Gelembung kakap cina jantan, di bawah 50 gram, per 1 kg : Rp 4,5 juta, 50 gram, per 1 kg: Rp 11 juta. Gelembung Kakap Cina betina, di bawah 50 gram, per 1 kg : Rp 2,8 juta, 50 gram, per 1 kg: Rp 6,3 juta. Pembeli gelembung-gelembung ikan ini adalah para pengepul, mereka menyebutnya sebagai bos. Para nelayan mengaku tak tahu menahu sebenarnya buat apa gelembung-gelembung ikan ini, kecuali hanya sebatas informasi singkat yang tak terlalu mereka pahami (Sajriawati, 2020).

Biaya Penangkapan Gelembung Ikan

Biaya investasi adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran waktu tertentu. Walaupun tingkat aktivitas meningkat atau menurun, jumlah biaya tetap tidak berubah. Berikut adalah biaya investasi dari usaha penangkapan gelembung ikan dengan alat tangkap jaring insang hanyut (Tabel 1).

Tabel 1. Biaya Investasi Usaha Penangkapan Gelembung Ikan

No	Macam Investasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp.000)	Nilai Investasi (Rp.000)	Penyusutan Per Thn (Rp.000)	Biaya per Trip (Rp.000)
1	Kapal dan Mesin	1	Paket	400.000.	400.000.	50.000.	10.000.
2	Alat Tangkap (jaring insang)	30	Lembar	5.000.	150.000.	75.000.	12.500.
3	Coolbox	20	Buah	500.	10.000.	10.000.	1.667.
Total Biaya					560.000.	135.000.	24.167.

Sumber : Data Primer, diolah 2021.

Tabel 1 menunjukkan bahwa biaya investasi terbesar adalah pada kapal dan mesin sebesar Rp. 400.000.000. kemudian alat tangkap berupa jaring sebesar Rp.150.000.000. dan yang paling murah adalah *coolbox* yaitu Rp. 10.000.000. Untuk biaya operasional diperlukan solar serta beberapa perbekalan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Biaya Operasional Per Trip

No	Biaya Operasional	Harga Satuan	Jumlah Satuan	Satuan	Jumlah
1	Solar	6.500	8.000	Liter	52.000.000
2	Rokok	180.000	20	Slot	3.600.000
3	Beras	10.000	100	Kg	1.000.000
4	Telur	75.000	7	Rak	525.000
5	Minyak Tanah	5.000	50	Liter	250.000
6	Minyak Goreng	15.000	10	Liter	150.000
7	Gula Pasir	19.000	20	Liter	380.000
8	Mie	60.000	8	Dos	480.000
9	Kopi	9.000	20	Bungkus	180.000
10	Ikan kaleng	14.000	20	Buah	280.000
11	Obat-obatan	1.000.000	1	Paket	1.000.000
Total					59.845.000

Sumber : Data Primer, diolah 2021.

Biaya operasional pada Tabel 2 adalah perbekalan untuk 60 hari melaut dengan jumlah awak kapal sebanyak 8 orang, yaitu 7 orang ABK dan 1 orang nahkoda. Biaya

paling besar diperuntukkan untuk bahan bakar yaitu solar sebesar Rp. 52.000.000. sisanya sebesar Rp. 7.845.000 untuk biaya perbekalan seperti rokok, bahan makanan dan obat-obatan.

Tabel 3. Biaya Total Penangkapan Gelembung Ikan

No	Jenis Biaya	Jumlah (Rp)
1	Biaya Investasi	24.166.667
2	Biaya Variabel	59.845.000
	Total	84.011.667

Sumber : Data Primer, diolah 2021

Hasil Penjualan Gelembung Ikan

Berikut data penjualan hasil tangkapan gelembung ikan per jenis ikan (Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6)

Tabel 4. Hasil Penjualan Gelembung Ikan Gulama Per Trip

No	Klasifikasi Berat Gelembung	Harga Gelembung / kg (Rp)	Banyaknya (kg)	Jumlah (Rp)
1	> 10 gram	8.000.000	3,4	27.200.000
2	10 gram	18.000.000	2,1	38.160.000
3	20 gram	28.000.000	2,5	70.000.000
4	30 gram	38.000.000	1,4	53.200.000
	Total			188.560.000

Sumber : Data Primer, diolah 2021

Tabel 5. Hasil Penjualan Gelembung Ikan Kakap Cina Jantan Per Trip

No	Klasifikasi Berat Gelembung	Harga Gelembung / kg (Rp)	Banyaknya (kg)	Jumlah (Rp)
1	> 50 gram	4.500.000	4,3	19.350.000
2	50 gram	11.000.000	4,5	49.500.000
3	100 gram	17.800.000	2,0	35.600.000
4	150 gram	22.500.000	3,0	67.500.000
	Total			171.950.000

Sumber : Data Primer, diolah 2021

Tabel 6. Hasil Penjualan Gelembung Ikan Kakap Cina Betina per trip

No	Klasifikasi Berat Gelembung	Harga Gelembung / kg (Rp)	Banyaknya (kg)	Jumlah (Rp)
1	> 50 gram	2.800.000	5,2	14.560.000
2	50 gram	6.300.000	3,5	22.050.000
3	100 gram	10.600.000	3,0	31.800.000
4	150 gram	13.800.000	2,0	27.600.000
Total				96.010.000

Sumber : Data Primer. diolah 2021

Tabel 4, tabel 5, dan tabel 6 menunjukkan perbedaan penjualan harga gelembung ikan per jenis ikan. Harga ikan Gulama paling mahal dibandingkan ikan kakap cina. Selain itu, klasifikasi berat gelembung juga sangat berpengaruh terhadap harga jual per kg. Semakin tinggi klasifikasi beratnya maka semakin mahal pula harga jual per kg nya. Berdasarkan perbandingan tabel 4, tabel 5 dan tabel 6 maka penjualan gelembung ikan Gulama memperoleh penjualan tertinggi, disusul penjualan gelembung ikan Kakap Cina Jantan dan terakhir penjualan gelembung ikan Kakap Cina Betina.

Daging ikan yang telah diambil gelembungnya semuanya dijadikan ikan kering dan juga turut dijual, namun harga jualnya sangat rendah dibandingkan harga gelembung ikannya. Berikut harga penjualan ikan kering per trip (Tabel 7).

Tabel 7. Hasil Penjualan Ikan Kering per Trip

No	Penjualan	Harga Satuan / kg (Rp)	Banyaknya (kg)	Jumlah (Rp)
1	Ikan Kering	40.000	100	4.000.000
Total				4.000.000

Sumber : Data Primer. diolah 2021

Tabel 7 menunjukkan hasil penjualan daging ikan berupa ikan kering, dari total 100 kg ikan kering hanya didapatkan Rp. 4.000.000 hasil penjualan, sangat berbeda jauh dari penjualan gelembung ikannya. Pendapatan keseluruhan per trip adalah gabungan hasil penjualan gelembung dan ikan kering (Tabel 8).

Tabel 8. Total Pendapatan Penangkapan Gelembung Ikan

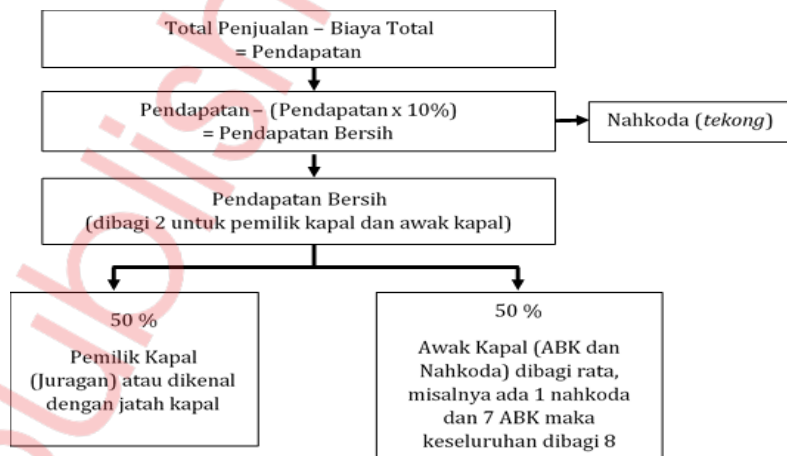
No	Penjualan	Jumlah Penjualan (Rp)
1	Gelembung Ikan	456.520.000
2	Ikan Kering	4.000.000
	Total	460.520.000

Sumber : Data Primer. diolah 2021

Tabel 8 menunjukkan total pendapatan dari penjualan gelembung ikan dan ikan kering sebesar Rp. 460.520.000. Jika persentasekan maka hasil penjualan gelembung sebesar 99% dan penjualan ikan kering hanya sebesar 1% dari total penjualan.

Sistim Bagi Hasil Usaha Penangkapan Gelembung Ikan

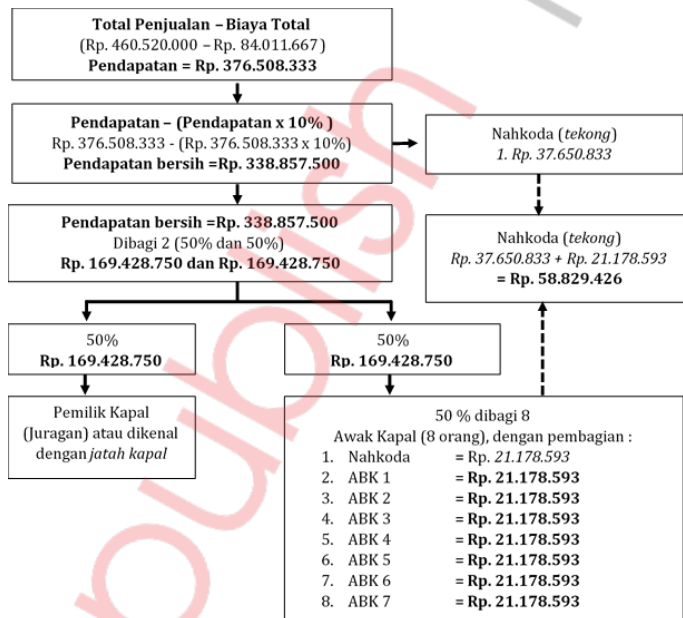
Sistim bagi hasil usaha penangkapan gelembung ikan merupakan sistim yang diberlakukan dari pemilik kapal/perahu atau juragan kepada awak kapal (nahkoda dan ABK). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sistim bagi hasil yang sama pada setiap kapal penangkapan gelembung ikan di Kabupaten Merauke. Adapun model sistim bagi hasil digambarkan melalui bagan berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Model Sistim Bagi Hasil Nelayan pada Usaha Penangkapan Gelembung Ikan

Gambar 1 menunjukkan model sistim bagi hasil, yang berlaku bagi pemilik kapal dan nelayan penangkap gelembung ikan di Kabupaten Maerauke. Mula-mula total keseluruhan penjualan yang diperoleh dikurangi dengan total biaya per trip penangkapan. Hasilnya kemudian dikali 10% untuk bagian nahkoda. Setelah dikeluarkan 10% untuk nahkoda barulah disebut pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini dibagi 2 antara pemilik kapal dan nelayan/awak kapal yaitu masing-masing sebesar 50%. Hasil 50% untuk nelayan/awak kapal dibagi lagi dengan nahkoda dan ABK. untuk sistim pembagiannya sama rata dengan jumlah keseluruhan ABK dan nahkoda. jadi misalkan ada 7 ABK dan 1 nahkoda. maka hasil 50% tadi dibagi 8 sama rata. Itulah hasil masing-masing untuk ABK. Perbedaan yang mencolok adalah pembagian untuk nahkoda yang lebih besar karena diawal telah mendapat bagian sebesar 10%.

Berdasarkan model sistim bagi hasil pada Gambar 5 di atas. jika diterapkan ke dalam perhitungan pendapatan pemilik kapal serta awak kapal maka diperoleh hasil seperti pada Gambar 2 di bawah ini :



Gambar 2. Perbandingan Pendapatan Pemilik Kapal dan Awak Kapal (Nahkoda dan ABK)

Berdasarkan Gambar 2, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan model sistim pembagian. maka diperoleh nilai pendapatan bersih masing-masing pemilik kapal Pemilik Kapal (Juragan) sebesar Rp.169.428.750 . Nahkoda (*tekong*) sebesar Rp.58.829.426 . dan ABK masing-masing sebesar Rp. 21.178.593. Jika trip penangkapan dilaksanakan selama 60 hari. maka dihitung sekitar 2 bulan masa kerja. jadi dalam sebulan ABK memiliki persentase pendapatan bersih sebesar Rp.10.589.296 . Jumlah yang cukup besar. namun jumlah ini tidak menentu karena terkadang sepanjang tahun ada waktu-waktu tertentu nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak mendukung. Untuk pesentasi pembagiannya dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini :

Tabel 9. Persentase Pendapatan Pemilik Kapal dan Awak Kapal (Nahkoda dan ABK) berdasarkan Sistim Bagi Hasil

No	Pembagian Hasil	Pendapatan (Rp)	Pesentase (%)
1	Pemilik Kapal (Juragan)	169.428.750	45.00%
2	Nahkoda (<i>tekong</i>)	58.829.426	15.62%
3	ABK 1	21.178.593	5.62%
4	ABK 2	21.178.593	5.62%
5	ABK 3	21.178.593	5.62%
6	ABK 4	21.178.593	5.62%
7	ABK 5	21.178.593	5.62%
8	ABK 6	21.178.593	5.62%
9	ABK 7	21.178.593	5.62%
	Jumlah	376.508.333	100.00%

Sumber : Data Primer. diolah 2021

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa pendapatan terbesar berdasarkan sistim bagi hasil nelayan pada usaha penangkapan gelembung ikan di Kabupaten Merauke diperoleh oleh pemilik kapal (juragan) sebesar 45 %. kemudian nahkoda sebesar 15.62 %. dan terakhir ABK masing-masing sebesar 5.62%.

Perbedaan persentase pendapatan yang cukup besar antara ke tiganya dinilai adil berdasarkan wawancara dengan para ABK. Hal ini dikarenakan pemilik kapal (juragan) memiliki resiko usaha yang paling besar. jika ada kerugian maka yang menanggung lebih besar adalah pemilik kapal. Selain itu semua pembiayaan ditanggung oleh pemilik kapal. baik biaya investasi maupun biaya operasional.

Nahkoda (*tekong*) memiliki persentase pembagian yang lebih besar dari ABK karena tugas dan perannya yang lebih besar dibandingkan ABK. Nahkoda yang bertanggungjawab

penuh terhadap wilayah penangkapan dan keselamatan kapal sedangkan ABK memiliki fungsi sebagai tenaga kerja untuk menangkap ikan saja. Meskipun hanya bertugas menangkap ikan, namun keahlian dari para ABK juga sangat diperlukan, baik itu teknik menurunkan jaring, menarik jaring sampai teknik mengeluarkan gelembung dari tubuh ikan. Semua keahlian-keahlian tersebut perlu latihan dan pengalaman, sehingga yang direkrut menjadi ABK juga bukan sembarangan orang.

Dalam kerangka ini, kelanggengan maupun kepatuhan ABK dalam sistem bagi hasil yang berlaku, dapat diamati dalam perspektif sosiologi ekonomi, dimana tindakan ekonomi terlekat pada ikatan sosial. Meskipun tidak muncul dalam permukaan sebagai keterangan yang disajikan dalam kajian ini, tetapi sesungguhnya dalam hubungan keamanan subsistensi dengan pilihan terhadap resiko, nelayan ABK lebih suka memilih sistem bagi hasil daripada sistem sewa. Karena sistem sewa mempunyai resiko subsistensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagi hasil. Karena keadaan hasil tangkapan, baik ada atau tidak, tidak punya pengaruh terhadap pembayaran sewa. Sedangkan pada sistem bagi hasil, jumlah hasil tangkapan ikan yang banyak, signifikan dengan pembagian hasil antara patron (juragan) dan klien (ABK). Disamping itu, jika musim buruk (paceklik), patron akan menjamin kebutuhan subsistensi dari klien (Scott, 1976).

SIMPULAN

Sistem bagi hasil nelayan pada usaha penangkapan gelembung ikan di Kabupaten Merauke memiliki persentase pembagian yang berbeda-beda antara pemilik kapal (juragan) dan awak kapal (nahkoda dan ABK). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik kapal (juragan) mendapatkan pembagian yang paling besar yaitu sebesar 45 %, kemudian nahkoda sebesar 15.62 %, dan terakhir 7 orang ABK masing-masing sebesar 5.62%. Persentase ini diperoleh setelah dilakukan perhitungan sesuai model sistem bagi hasil yang berlaku dikalangan pemilik kapal dan nelayan penangkap gelembung ikan di Kabupaten Merauke.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. Adri. (2021). *Nelayan Pulau Kecil dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Deepublish.
- Balakembang (2013). *Manfaat Ikan Kakap Merah*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Surakarta. Universitas Muhammadiyah.
- Bappeda Kabupaten Merauke (2020). *Gambaran Umum Kabupaten Merauke*.
- Habshy, Hasan Al (2017). *Menjala Ratusan Juta Rupiah dari Gelembung Ikan di Merauke*. Detiknews.
- KKP (2018). *Bernilai tinggi. gelembung ikan ini jadi komoditas menggiurkan*. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- Pratama. M.A.D., T.D. Hapsari, dan I. Triarso (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Produksi Unit Penangkapan Purse Seine (Gardan) di Fishing Base PPP Muncar. Banyuwangi. Jawa Timur. *Jurnal Saintek Perikanan*. Vol. 2 (2): 120-128.
- Retno Widiastuti dan Lathifatul Rosyidah (2018). Sistem Bagi Hasil pada Usaha Perikanan Tangkap di Kepulauan Aru (Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru Islands). *Jurnal Kebijakan Sosek KP*. Vol. 8 No. 1 Juni 2018: 63-75.
- Rolandow L. Dauhan, Jardie A. Andaki, dan Vonne Lumenta (2014). Analisis Pendapatan dan Sistem Bagi Hasil Nelayan Jaring Insang (Gill Net) Malos 3 Di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Akulturasi*. Vol. 2 No. 2 (Oktober 2014). ISSN. 2337-4195.
- Ruslan HS Tawari, Domu Simbolon, Ari Purbayanto, dan Am Azbas Taurusman (2013). Sistem Bagi Hasil pada Usaha Penangkapan Madidihang Skala Kecil di Kabupaten Seram Bagian Barat (Sharing System for Small Scale of Yellowfin Fishing in the West Seram District). *BULETIN PSP*. Volume 21 No. 2 Edisi Agustus 2013. Hal 237-245. ISSN: 0251-286X
- Sajriawati (2020). Variasi Harga Jual Gelembung Ikan oleh Nelayan Lampu Satu di Kabupaten Merauke. *Musamus Journal of Agribusiness (Mujagri)*. Vol.3 No. 1 Tahun 2020.
- Scott, J.C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant*. New Haven : Yale University Pres
- Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

Chapter 9

POLA HIDUP NELAYAN

KONSUMSI DAN GAYA HIDUP NELAYAN DI KELURAHAN RANGAS KABUPATEN MAJENE

Rudi Hardi



Rudi Hardi, adalah Dosen pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Meraih gelar S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Hasanuddin, Makassar (1996), Magister Sains pada Program Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2002).

* Email : rudihardi@unismuh.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tingkat kemiskinan masyarakat pesisir di Indonesia masih sangat memprihatinkan sebesar 32,4%. Padahal, Indonesia terkenal dengan negara kepulauan terbesar yang seharusnya laut menjadi potensi utama (Rahmasari, 2017). Namun. Perlu disadari bahwa penyebab kemiskinan nelayan di Indonesia sangatlah kompleks, penyebab individual, keluarga, sub budaya, agensi maupun struktural saling berkaitan (Retnowati, 2011).

Sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional (Sondakh et al., 2017) dan nelayan buruh (Husni, 2020). Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar (PUSKAS BAZNAS, 2018).

Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang dinilai rentan secara sosial ekonomi. Isu yang menyangkut kehidupan mereka pun menjadi selalu menarik bagi pemerhati sosial ekonomi baik dari kalangan akademisi, praktisi bahkan politisi (Ramadhan & Yuliati, 2017). Pembangunan kelautan dan perikanan dewasa ini lebih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan di dalam

memajukan kualitas kehidupan desa pantai melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai ekspor dari hasil perikanan (Pontoh, 2011).

Konsumsi keluarga merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa. Dari komoditi yang dikonsumsi keluarga akan mempunyai kepuasan tersendiri. Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. (Rahmasari, 2017). Pola konsumsi merupakan susunan jenis dan jumlah asupan makanan yang dikonsumsi pada waktu tertentu. Setiap kelompok masyarakat tertentu memiliki pola konsumsi yang berbeda, hal ini dikarenakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu. Tiga faktor terpenting yang mempengaruhi kebiasaan makan adalah ketersediaan pangan, pola sosial budaya dan faktor-faktor pribadi (Hamidah, 2017).

Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk mengurai aspek-aspek yang mempengaruhi pola konsumsi pangan dan gizi rumah tangga nelayan di perkampungan nelayan Kelurahan Rangas di pesisir pantai timur Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu untuk memahami lebih dalam kecukupan konsumsi energi dan protein rumah tangga nelayan yaitu sebesar 2000 kkal/kapita/hari dan 52 gram/kapita/hari. Dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi fokus telaah, yaitu: (1) pola distribusi dan alokasi waktu kerja anggota rumahtangga; (2) pola produksi atau pendapatan rumahtangga; (3) pola konsumsi atau pengeluaran rumahtangga.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan bertipekan deskriptif-kualitatif. Sumber-sumber data diperoleh melalui wawancara (interview), observasi (observation), dan dokumen-dokumen informan atau data tertulis di lembaga-lembaga pemerintah. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dianalisis secara kualitatif dan hasilnya diuraikan dalam kalimat-kalimat yang berbentuk deskripsi.

Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Rangas, Kabupaten Majene. Penetapan lokasi tersebut digunakan metode '*purposive sampling*'. Dalam hal ini lokasi penelitian

ditentukan berdasarkan alasan atau pertimbangan-pertimbangan antara lain: Kelurahan Rangas adalah termasuk salah satu kelurahan yang terletak di pesisir pantai yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian di sektor kelautan atau sebagai nelayan.

Selain itu, di kelurahan tersebut terdapat beberapa kelompok atau klasifikasi nelayan, sehingga peneliti bebas menentukan kelompok nelayan yang akan dijadikan objek pengumpulan data. Sementara itu, informan yang dipilih dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, terutama yang berkaitan dengan sistem pengetahuan pelayaran dan penangkapan ikan. Dalam hal ini informan-informan yang dimaksud tersebut antara lain: para nelayan yang sudah cukup lama bergelut dengan laut, *pongawa* nelayan khususnya *pongawa sawi* dan beberapa tokoh masyarakat setempat, termasuk tokoh agama.

Memperoleh data yang akurat, penelitian menggunakan metode: 1) pengamatan (*observation*), 2) wawancara (*interview*) dan 3) studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengamatan yang diterapkan dalam penelitian ini dipandang proporsional untuk menjangkau data yang secara langsung dapat diamati, seperti lokasi dan keadaan alam daerah penelitian, persiapan nelayan sebelum melaut, keadaan perahu dan alat tangkap yang digunakan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan materi penelitian.

Penelitian ini menggunakan informan yang berjumlah 20 informan. Dalam hal ini, informan dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, warga masyarakat nelayan, atau orang-orang tertentu yang dianggap mempunyai pengetahuan cukup luas, terutama yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Sementara itu, teknik wawancara (*interview*) dilakukan secara bebas dan mendalam terhadap para informan yang telah dipilih dan ditetapkan sebelumnya. Penerapan teknik wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*), sehingga wawancara antara peneliti dan informan dapat berlangsung secara lancar dan terarah.

Menurut Singarimbun (1981), dalam menerapkan teknik wawancara tersebut, peneliti melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang sistematis dan berstruktur. Sedangkan informan memberi jawaban-jawaban dalam bentuk praktis.

Jawaban inilah yang dicermari peneliti untuk mencari keakuratan dan kapabelnya setiap informasi.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah menyangkut 3 (tiga) aspek yang tergambarkan dalam satu rangkaian uraian, yaitu: pola distribusi dan alokasi waktu kerja anggota rumahtangga; pola produksi atau pendapatan rumahtangga; pola konsumsi atau pengeluaran rumahtangga. Untuk mengetahui pola distribusi dan alokasi waktu kerja, pola produksi (pendapatan) dan pola konsumsi (pengeluaran) rumah tangga dianalisis secara deskriptif.

Profil Wilayah Penelitian

Rangas adalah nama sebuah kelurahan yang terletak di pesisir pantai timur Kota Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Kelurahan ini juga dikenal sebagai salah satu perkampungan nelayan, khususnya di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Untuk mencapai kelurahan ini mudah karena selain ditunjang oleh prasarana jalan yang mulus (beraspal), terutama saat melintasi jalan poros, juga didukung oleh sarana transportasi yang cukup lancar, baik berupa kendaraan roda dua (motor) maupun roda empat.

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Rangas, dengan luas wilayah 2,13 Km², berada pada titik koordinat antara 03°32'52" - 03°34'15" Lintang Selatan dan antara 118°55'37" - 118°56'45" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Palipi Soreang & Desa Pamboborang Sebelah Selatan : Teluk Mandar Sebelah Barat : Selat Makassar Sebelah Timur : Kel. Totoli

Secara administratif pemerintahan, Kelurahan Rangas memiliki luas wilayah 621 ha dan membawahi 4 wilayah tingkat lingkungan, 18 RT dan 1.679 KK. Ada pun ke 4 wilayah lingkungan yang dimaksud itu, adalah: Lingkungan Rangas Timur, Lingkungan Rangas Tamalassu, Lingkungan Rangas Pa'besoang dan Lingkungan Rangas Barat (Monografi Kelurahan Rangas, 2016) (Ansaar, 2019).

Kelurahan Rangas juga dapat ditandai dengan batas-batas administratif sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Baurung, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pangaliali dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pamboborang (Sumber: Monografi Kelurahan Rangas, 2016) (Ansaar, 2019).

Orbitasi Kelurahan Rangas terhadap ibu kota kecamatan (Kecamatan Banggae), berjarak kurang lebih 3 km, begitupun ke ibu kota kabupaten (Kota Majene), jaraknya juga relatif sama yakni sekitar 3 Km. Hal ini memungkinkan karena letak ibu kota kabupaten berada di dalam wilayah Kecamatan Banggae. Ada pun orbitasi terhadap Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah berkisar 273 Km. 139—154 Jarak antara Kelurahan Rangas dengan ibu kota kecamatan sebagaimana dikemukakan di atas, termasuk relatif dekat dan hanya dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Ini dimungkinkan karena kondisi jalan yang dilalui, terutama pada jalan poros trans sulawesi sudah cukup bagus (beraspal).

Sementara itu, jalan yang menghubungkan ibu kota kelurahan dengan wilayah lingkungan yang ada di sekitarnya juga sudah memadai di mana jaringan jalan yang tersedia sebagian besar sudah berupa jalan aspal, bahkan ada yang sudah dibeton khususnya pada poros kantor Kelurahan Rangas dan sekitarnya. Jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Rangas sampai pada akhir tahun 2016, adalah 7.404 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 3.599 jiwa dan perempuan sebanyak 3.805 jiwa. Data ini menunjukkan, bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki dengan selisih jumlah perbandingannya yakni tidak lebih dari 2016 jiwa (Ansaar, 2019)

Upacara ritual berkenaan dengan laut dikenal dengan istilah *makkuliwa* dan *maqappu*²⁴. *Makkuliwa* dan *maqappu* merupakan dua ritual yang dipersiapkan untuk memberikan kekuatan psikologis kepada para nelayan agar tidak takut menghadapi segala kemungkinan yang ada di alam dalam menjalankan aktivitas mata pencahariannya. Prosesi upacara pemberangkatan yang sarat bacaan-bacaan suci, adalah sarana peneguhan hati dalam pelayaran. Ritual-ritual tersebut memberikan suntikan rohani agar para nelayan senantiasa memiliki keteguhan dan semangat di dalam dirinya. Ritual menandai suatu kesepakatan masyarakat untuk mengikat segala perkara kenelayanan kepada Yang Maha Kuasa, sebab mengimani Tuhan, akan tetap menjaga hamba-Nya, terutama yang menjalin

²⁴ *Makkuliwa* diselenggarakan apabila ada sesuatu hal yang baru bagi mereka, misalnya baru akan turun kelaut, membeli mesin baru, berahu baru, dan sebagainya. Ini dihajatkan untuk memohon keselamatan kepada Yang Maha Kuasa dalam pemakaian barang tersebut atau keselamatan perjalanan bagi yang akan turun ke laut.

hubungan dengan-Nya. Dalam konteks tersebut, ritual menjadi bermakna. Bahan sesaji atau makanan yang ditampilkan pada saat ritual menjadi simbol penghargaan atas kelimpahan rezeki. Khusus dalam ritual *makkuliwa* misalnya, makanan dan minuman yang manis harus selalu ada. Makna simbolik dari makanan dan minuman yang manis sudah menjadi pemahaman umum bagi masyarakat nelayan bahwa di dalamnya mengandung harapan kebaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Nelayan Kampung Rangas

Jenis mata pencaharian yang paling banyak digeluti penduduk setempat adalah sebagai nelayan, dengan jumlah tidak kurang dari 1.402 orang. Banyaknya warga yang menggeluti mata pencaharian di sektor tersebut, tentu tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah pemukiman mereka yang memang berada di sekitar pantai atau laut. Terkait dengan hal tersebut, salah seorang informan (nelayan) mengatakan, bahwa sejak dahulu sampai sekarang, kebanyakan warga Rangas, terutama yang berdomisili di sekitar pantai cenderung memilih sektor pekerjaan (sebagai nelayan) jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Karena menurut mereka, bekerja sebagai nelayan (terutama nelayan tradisional) tidak perlu mengeluarkan modal banyak kecuali tenaga dan keuletan bekerja, dan hasil yang didapatkan cukup untuk menopang kebutuhan keluarga.

Masyarakat yang bermukim di kampung nelayan ini sangat giat beraktifitas di laut (sebagai nelayan). Mereka rata-rata mulai turun laut pada pagi hari, sekitar pukul 06.00 wita atau sesudah salat subuh dan biasanya baru kembali sekitar pukul 22.00 sampai pukul 00.00 wita. Namun semua itu bisa sewaktu-waktu berubah berdasarkan kondisi cuaca dan keadaan alam.

Selain bekerja di sektor penangkapan ikan, sebagian di antara mereka, ada juga yang membuat perahu atau kapal bercadik yang dikenal dengan *sandeq* (perahu tradisional khas Mandar, berbadan kecil dan memiliki cadik di kedua sisinya). Bahkan tidak hanya perahu bercadik, perahu dengan ukuran yang relatif lebih besar pun mampu dibuatnya berkat pengetahuan tradisional yang dimilikinya. Kelurahan Rangas secara geografis berada di wilayah dataran rendah dan dikelilingi alam pantai yang indah. Apabila kita

berdiri di pesisir pantai, maka kita dapat melihat perahu-perahu nelayan sedang beroperasi menuju lokasi penangkapan ikan.

Masyarakat nelayan memiliki beberapa tipologi berdasarkan pada orientasinya dalam menangkap hasil laut. Ada empat tipe kelompok nelayan diantaranya adalah nelayan subsisten dimana nelayan ini menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan komersil merupakan nelayan yang menangkap ikan untuk mendapatkan keuntungan, baik berukuran kecil maupun dalam jumlah besar, dipasarkan secara domestik maupun diekspor. Jenis nelayan ketiga adalah nelayan asli yaitu nelayan yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhannya namun juga berhak memperoleh keuntungan meski dalam jumlah kecil. Yang terakhir adalah nelayan rekreasi dimana nelayan tersebut melakukan penangkapan ikan hanya demi kesenangan atau olahraga (Elanda & Alie, 2020). Nelayan di bagi dalam empat kategori utama, berdasarkan sifat, dan latar belakang, kegiatan penangkapan ikan mereka (Anthony T. Charles, 2001); (Retnowati, 2011) : (1) Nelayan subsisten: mereka yang menangkap ikan sebagai sumber makanannya sendiri; (2) Nelayan asli: mereka yang termasuk dalam kelompok pribumi, sering kali mencari nafkah; (3) Nelayan Rekreasional: mereka yang menangkap ikan terutama untuk kesenangan mereka sendiri; (4) Nelayan Komersial: mereka yang menangkap ikan untuk dijual di pasar domestik atau ekspor, para nelayan ini secara tradisional dipandang termasuk dalam kategori artisanal dan industri. Memahami Pola konsumsi Nelayan dalam empat kategori, diurai berturut-turut dalam bahasan berikut.

Pola Konsumsi Nelayan Subsisten

Pada umumnya subsistensi diartikan sebagai cara hidup minimalis yakni hanya sekedar hidup (Elanda & Alie, 2020). Menurut Clifton R. Warthon subsistensi dibedakan menjadi dua yakni subsistensi produksi dan subsistensi hidup. Subsistensi hidup yakni hanya sekedar hidup secara minim, sedangkan subsistensi produksi mempunyai karakteristik komersialisasi dan moneterisasi yang rendah (Wharton, 1963), (Elanda & Alie, 2020). Ciri khas dari perilaku ekonomi kehidupan nelayan karena mereka merupakan unit konsumsi sekaligus unit produksi. Agar bertahan sebagai suatu unit maka suatu keluarga harus memenuhi kebutuhan konsumsi secara subsisten yang tidak bisa dikurangi lagi dan tergantung pada jumlah keluarga yang dimiliki.

Nelayan subsistensi, di Kelurahan Rangas, umumnya beraktifitas sebagai nelayan dengan hanya ikut serta pada nelayan asli (pribumi), mereka memiliki kedekatan sebagai keluarga atau tetangga, mereka hanya mengandalkan tenaga dan tidak memiliki alat tangkap, dan tidak dilandasi dengan perjanjian atau kontrak pekerjaan. Selain itu, nelayan subsistensi, kadang bekerja sendiri dengan alat pancing seadanya.

Dalam hal konsumsi, nelayan subsistensi, tidak dapat merencanakan jenis konsumsi yang akan disajikan, kecuali ditentukan oleh pendapatan dari hasil tangkapan mereka. Kemudian, untuk memenuhi, kebutuhan gizi keluarga, istri mereka atau anggota keluarga yang lain (yang telah dianggap dewasa) membantu kepala keluarga yang dikenal dengan nama *Sibaliparri'* (saling membantu dalam rumah tangga). Sehingga pendapatan kepala keluarga nelayan yang tidak mencukupi, mendapat suntikan dari istri melalui usaha sampingan lain, misalnya sebagai penjual ikan, pengrajin minyak kelapa, dan sebagainya.

Subsistensi dalam kehidupan masyarakat nelayan dimaknai sebagai suatu kondisi dimana nelayan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya untuk kehidupan sehari-hari, karena mereka mendapatkan pendapatan yang rendah. Kondisi ini disebut dengan krisis subsistensi dimana nelayan tidak lagi dapat memenuhinya bahkan untuk makan dengan menggunakan bahan pangan yang utama. Strategi yang dilakukan agar nelayan subsisten dapat bertahan hidup menurut Scott adalah dengan mengencangkan sabuknya, swadaya dengan anggota keluarga (dibantu dengan keluarga, teman dan tetangga untuk mengatasi masa sulitnya), ikatan patron klien sebagai asuransi sosial, jaringan dan lembaga luar sebagai peredam kejutan di masa krisis, yang terakhir adalah bantuan dari negara (Scott, 1994); (Elanda & Alie, 2020). Salah satu penyebab masalah kemiskinan pada nelayan yaitu pendapatan nelayan yang tidak menentu (berfluktuasi) dikarenakan pekerjaannya bergantung pada kondisi iklim (cuaca) (Ismah, Khairunnisa Wan Abbas Zakaria, 2020)

Pola Konsumsi Nelayan Pribumi Asli

Pola penangkapan ikan yang lazim dilakukan oleh nelayan tradisional di kelurahan Rangas, khususnya nelayan kecil atau tradisional sangat terkait dengan sistem kerja mereka. Pada umumnya jam kerja mereka relatif singkat biasanya cukup satu hari saja (*one day fishing*). Kondisi atau kebiasaan semacam ini berdampak pada hasil tangkapan yang

tidak optimal sehingga mengakibatkan tingkat produksi rendah dan pendapatan mereka juga tidak optimal akibatnya tingkat kesejahteraan nelayan pun rendah. Sistem kerja *one day fishing* antara lain juga disebabkan kapal dan alat tangkap ikan yang mereka gunakan, selain itu budaya kerja yang hanya satu hari rupanya sudah menjadi kebiasaan.

Pola penangkapan nelayan tradisional menurut (Konoralma, Samuell, Vecky A.J, Masinambow, 2020), (Qamariah S, 2018) yaitu: (1) pola penangkapan ikan satu hari Biasanya nelayan berangkat melaut sekitar jam 14.00 kembali sekitar jam 09.00 hari berikutnya. Penangkapan ikan seperti ini biasanya dikelompokkan juga sebagai penangkapan ikan lepas pantai. (2) Pola penangkapan ikan tengah hari. Penangkapan ikan seperti ini merupakan penangkapan ikan dekat pantai. Umumnya mereka berangkat sekitar jam 03.00 dini hari atau setelah Subuh, dan kembali pagi harinya sekitar jam 09.00. Pada umumnya penangkapan ikan lepas pantai yang dilakukan dalam waktu yang lebih lama dan lebih jauh dari daerah sasaran tangkapan ikan mempunyai lebih banyak kemungkinan memperoleh hasil tangkapan (produksi) yang lebih banyak dan tentu memberikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan penangkapan ikan dekat pantai.

Masyarakat nelayan tradisional di Kelurahan Rangas, dalam memenuhi kebutuhan hidup yang serba kekurangan karena pendapatan dari hasil tangkapan ikan tidak seberapa. Sehingga dari hasil tangkapan tersebut belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dengan keterbatasan ekonomi inilah mereka menggunakan strategi jaringan dengan jalan meminjam uang kepada tetangga, atau bahkan pada tengkulak.

Rumah tangga nelayan tradisional di kelurahan Rangas, tak dapat dipungkiri memiliki persoalan dalam memenuhi kebutuhan mereka setiap hari, mengingat pendapatan yang tidak menentu, dan tergantung dengan kondisi alam. Untuk menghadapi ketidakpastian pendapatan, mereka biasanya mengkombinasikan pekerjaan sebagai pekerjaan alternatif. Pekerjaan alternatif ini berupa pekerjaan di luar bidang perikanan, seperti: bertani, tukang batu, tukang becak, atau pekerjaan lainnya. Pendapatan yang telah diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan pangan maupun non-pangan. Namun terkadang pendapatan yang didapatkan dari pekerjaan alternatif pun dirasa masih kurang untuk dapat memenuhi

semua kebutuhan mereka sehari-hari. Hal ini membuat beberapa nelayan terutama nelayan tradisional dapat terjebak dalam kategori keluarga miskin. Kemiskinan ini dapat menyebabkan hilangnya akses untuk mencukupi pangan

Nelayan tradisional masih mempertahankan cara penangkapan ikan, bekerja tanpa inovasi teknologi, tanpa dukungan modal kuat, dan tanpa kelembagaan usaha yang mapan (Handajani et al., 2016).

Pola Konsumsi Nelayan Komersial

Pendapatan nelayan akan menentukan daya beli seseorang yang selanjutnya akan mempengaruhi pola konsumsinya, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar peluangnya ia masuk ke dalam kategori kelas atas. Nelayan Komersial yang berada pada kelas sosial atas biasanya cenderung memilih atau menentukan makanan atau barang dengan lebih banyak dari biasanya, *Punggawa*/juragan yang berada pada kelas sosial menengah biasanya tidak jauh berbeda dengan Bos (istilah *Punggawa Besar* di Kabupaten Majene), dan *Punggawa laut* yang berada pada kelas sosial atas, memilih atau menentukan makanan atau barang sesuai dengan kebutuhannya.

Pada dasarnya pengeluaran atau pola konsumsi dapat diartikan sebagai kebutuhan manusia baik dalam bentuk benda maupun jasa yang dialokasikan selain untuk kepentingan pribadi juga keluarga yang didasarkan pada tata hubungan dan tanggung jawab yang dimiliki yang sifatnya terealisasi sebagai kebutuhan primer dan sekunder. Susunan tingkat kebutuhan seseorang atau rumah tangga untuk jangka waktu tertentu yang akan dipenuhi dari pendapatan. Dalam menyusun pola konsumsi, pada umumnya akan mendahulukan kebutuhan pokok. Dengan kata lain kebutuhan yang kurang atau tidak mendesak akan ditunda dalam pemenuhannya sebelum terpenuhinya kebutuhan pokok.

Adapun jenis-jenis konsumsi menurut tingkatannya adalah: 1. Konsumsi barang-barang kebutuhan pokok disebut konsumsi primer, konsumsi sekunder dan konsumsi barang-barang mewah atau disebut dengan konsumsi tersier. Konsumsi pokok dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, minimal yang harus dipenuhi untuk dapat hidup. Konsumsi yang dimiliki oleh seseorang untuk jenis konsumsi primer adalah makanan, pakaian dan perumahan. 2. Konsumsi sekunder adalah kebutuhan yang kurang begitu penting untuk dipenuhi. Tanpa terpenuhi kebutuhan ini, manusia masih dapat

hidup, misalnya kebutuhan akan meja, kursi, radio, buku-buku bacaan. Kebutuhan ini akan dipenuhi apabila kebutuhan sekunder sudah terpenuhi. Oleh karena itu, kebutuhan ini sering disebut kebutuhan kedua atau kebutuhan sampingan. 3. Konsumsi barang-barang mewah atau konsumsi tersier yang mana konsumsi ini dipenuhi apabila konsumsi kebutuhan pokok (primer) dan sekunder telah terpenuhi. Seseorang akan membutuhkan barang-barang mewah, misalnya mobil, berlian, barang-barang elektronik dan sebagainya jika mempunyai kelebihan yang maksimal. Keinginan untuk memenuhi barang-barang mewah ditentukan oleh penghasilan seseorang dan lingkungannya. Orang yang bertempat tinggal di lingkungan orang kaya, biasanya berhasrat atau berkeinginan memiliki barang-barang mewah seperti yang dimiliki orang di lingkungannya (Michael, 2001).

Bagi nelayan komersial di Kelurahan Rangas, pemenuhan konsumsi tidak lagi menjadi persoalan, baik konsumsi pada kebutuhan pokok, konsumsi sekunder, maupun kebutuhan tersier. Hal ini disebabkan bahwa pendapatan dari nelayan telah lebih dari cukup.

Pola Konsumsi Nelayan Rekreasi

Nelayan rekreasional adalah mereka yang menangkap ikan terutama untuk kesenangan mereka sendiri. Umumnya mereka orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga. Di Kelurahan Rangas, nelayan ini muncul dari keluarga yang bukan berprofesi utama sebagai nelayan, melainkan mereka hanya menyalurkan hobi. Banyak di antara mereka ikut serta mencari ikan karena ajakan teman sekantor, atau ajakan tetangga. Hasil yang diperoleh pun bukan untuk semata-mata untuk dijual, tetapi hanya dikonsumsi sendiri atau dibagikan ke keluarga.

Kelompok nelayan rekreasional ini, menyebar hampir di pinggir-pinggir pantai, dan terkadang meminjam atau menyewa perahu nelayan. Kemudian, hasil yang mereka peroleh dikonsumsi secara beramai-ramai dalam sebuah acara-acara bakar ikan.

SIMPULAN

Pola pemenuhan konsumsi bagi nelayan, baik nelayan subsistensi, nelayan pribumi, nelayan komersial, maupun nelayan rekreasional sangat ditentukan oleh jumlah pendapatan mereka. Makin tinggi pendapatan, maka makin berpeluang pula untuk melengkapi jenis dan ragam konsumsi. Kebutuhan konsumsi rumah tangga nelayan dapat dilihat berdasarkan ketersediaan pangan, daya beli, dan tingkat konsumsi rumah tangga.

Pemenuhan konsumsi rumah tangga nelayan, juga ditentukan oleh keikutsertaan anggota keluarga dalam menambah tingkat pendapatan melalui *sibaliparri* dan atau pengerjaan-pekerjaan sampingan. Besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Keynes menyatakan bahwa ada pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat (konsumsi *outonomous*) dan pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya penghasilan.

Konsumsi sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa akhir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Rumah tangga menerima pendapatan dari tenaga kerja dan modal yang mereka miliki, membayar pajak kepada pemerintah dan kemudian memutuskan berapa banyak dari pendapatan setelah pajak digunakan untuk konsumsi dan berapa banyak untuk ditabung.

Beberapa ciri fungsi konsumsi menurut Keynes yaitu, pertama penentu utama dari konsumsi adalah tingkat pendapatan. Kedua kecenderungan Mengkonsumsi Marginal (*Marginal Propensity to Consume*) – pertambahan konsumsi akibat kenaikan pendapatan sebesar satu satuan. besarnya MPC adalah antara nol dan satu. Dengan kata lain MPC adalah pertambahan atau perubahan konsumsi (ΔC) yang dilakukan masyarakat sebagai akibat pertambahan atau perubahan pendapatan disposabel atau pendapatan yang siap dibelanjakan (ΔY). Ketiga, rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut dengan Kecenderungan Mengkonsumsi Rata-rata (*Average Propensity to Consume*), turun ketika pendapatan naik, dengan demikian APC menurun dalam jangka panjang dan MPC lebih kecil dari pada APC ($MPC < APC$). Selain pendapatan, pengeluaran konsumsi juga

dipengaruhi oleh factor-faktor lain, seperti kekayaan, tingkat sosial ekonomi, selera, tingkat bunga dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansaar, A. (2019). Sistem Pengetahuan Pelayaran dan Penangkapan Ikan pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Rangas, Kabupaten Majene. *Walusuji*, 10(2), 139-154. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v10i2.2>
- Elanda, Y., & Alie, A. (2020). Strategi Masyarakat Nelayan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Subsistennya Di Desa Wisata Pasir Putih Dalegan Gresik. *Journal of Urban Sociology*, 3(2), 41-54. <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v3i2.1234>
- Hamidah, I. (2017). Studi Tentang Pola Konsumsi Masyarakat Pesisir Indramayu. *Mangifera Edu*, 1(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.31943/mangiferaedu.v1i2.81>
- Handajani, H., Relawati, R., & Handayanto, E. (2016). Peran Gender dalam Keluarga Nelayan Tradisional dan Implikasinya pada Model Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pesisir Malang Selatan. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 1(1). <https://doi.org/10.22219/jpa.v1i1.2745>
- Husni, S. (2020). Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Buruh dan Strategi Adaptasi Yang Dilakukan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pada Saat Musim Barat (Studi Kasus di Desa Sekotong Barat Kabupaten Lombok Barat. *JURNAL AGRIMANSION*, 20(1), 34-47. <https://doi.org/10.29303/agri.v21i1.318>
- Ismah, Khairunnisa Wan Abbas Zakaria, Y. I. (2020). Pola Konsumsi dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Di Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. *Urnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science*, 8(1), 145-152. <http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v8i1.145-152>
- Konoralma, Samuell, Vecky A.J, Masinambow, A. T. L. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tradisional Di Kelurahan Tumumpa Kecamatan Tuminting Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02), 103-115. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30230>
- Michael, J. (2001). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Ghalia Indonesia.
- Pontoh, O. (2011). Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Pola Konsumsi Nelayan di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. In *Pacific Journal* (Vol. 1, Issue 6, pp. 1038-1040).

- PUSKAS BAZNAS. (2018). *Kemiskinan Masyarakat Tani Indonesia dan Program Pemberdayaan Zakat*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). www.baznas.go.id; www.puskasbaznas.com
- Qamariah S, N. (2018). Analisis Pendapatan Nelayan Tangkap Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Sulawesi Barat. *Jurnal AKSARA PUBLIC*, 2(4), 153–161.
- Rahmasari, L. (2017). Analisis Pola Konsumsi , Kewirausahaan dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Nelayan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, XVII(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33556/jstm.v0i1.158>
- Ramadhan, A., & Yuliati, C. (2017). Indeks Sosial Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 12(2), 235–253. <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v12i2.6497>
- Retnowati, E. (2011). *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)*. XVI(3), 149–159. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>
- Sondakh, V. B., Andaki, J. A., & Wasak, M. P. (2017). Dinamika Kelompok Nelayan Tradisional Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado. *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 5(9). <https://doi.org/10.35800/akulturasi.5.9.2017.16984>

Chapter 10

GENDER DAN RUMAH TANGGA NELAYAN

RELASI GENDER PADA KELUARGA NELAYAN DI DISTRIK MALIND KABUPATEN MERAUKE, PAPUA

Godefridus Samderubun



Godefridus Samderubun, adalah Dosen pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus. Merauke. Meraih gelar S1 Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Manado (2001), Magister Sains bidang Sosiologi di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar (2011). Melanjutkan Pendidikan Program Doktorat pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2018).

* Email : samderubun@unmus.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keluarga merupakan lembaga terkecil dari suatu masyarakat yang di dalamnya mempunyai beberapa anggota, biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sama dengan institusi atau lembaga lainnya yang lebih besar, maka di dalam suatu keluarga, juga ada nilai-nilai yang dibangun dan disepakati bersama antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya. Nilai-nilai tersebut, biasanya juga tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dimana keluarga tersebut tinggal. Misalnya, apabila masyarakat di lingkungan sekitar bernuansa patriarkhis, maka nilai-nilai yang dibangun dalam institusi keluarga tersebut juga bersifat patriarkhis. Sebaliknya, apabila nilai yang dibangun di lingkungan masyarakat bersifat matriarkhi, maka nilai-nilai yang ada dalam keluarga tersebut juga cenderung ke matriarkhi. Sedangkan, apabila nilai-nilai modern yang bersifat liberal dan demokratis sudah menjadi tatanan umum di lingkungan suatu masyarakat, maka tidak bisa dipungkiri institusi keluarga tersebut juga akan mengikuti arus yang ada dalam suatu masyarakatnya tersebut.

Pola relasi gender dalam suatu institusi keluarga juga akan mengikuti pola nilai dan tatanan yang sudah menjejantah dan dibangun oleh masyarakat sekitar di mana keluarga tersebut hidup dan tinggal. Pola relasi gender dalam masyarakat yang bercorak

patriarkhis, tentunya lebih didominasi oleh pihak laki-laki sebagai orang yang memiliki kewenangan (kekuatan) lebih tinggi daripada perempuan. Sebaliknya dalam pola relasi gender yang bersifat matriarkhis, kewenangan lebih didominasi oleh perempuan. Sedangkan dalam masyarakat liberal-demokratis yang cenderung egaliter, maka terjadi keseimbangan dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Implikasi dari ketiga model tatanan masyarakat tersebut juga berbeda satu dengan lainnya, baik negatif maupun positif. Misalnya, dalam masyarakat patriarkhis akan terjadi ketidakseimbangan dalam pola relasi yang dibangun antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks masyarakat seperti ini, sering memunculkan adanya ketidakadilan gender yang tentunya berdampak pada diri perempuan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang disebabkan oleh tatanan masyarakat yang berbasis pada nilai patriarkhis, misalnya: diskriminasi, marginalisasi, beban ganda, stereotype dan kekerasan berbasis gender, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat pada umumnya. Berangkat dari pemikiran di atas, maka tulisan akan mengkaji lebih jauh mengenai relasi gender dalam institusi keluarga khususnya keluarga nelayan lokal di Kampung Kaiburse, kampung Onggari dan Kampung Domande yang merupakan tiga kampung lokal Suku Marind yang terletak di pesisir pantai di Distrik Malind Kabupaten Merauke.

Tujuan

Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk : Mengkaji relasi gender pada keluarga nelayan lokal di Kampung Kaiburse, Kampung Onggari dan Kampung Domande di Distrik Malind, Kabupaten Merauke; Menganalisis relasi gender pada aspek pembagian kerja, akses dan kontrol terhadap sumber daya serta pengambilan keputusan dan antar suami dan istri pada keluarga nelayan di sektor domestik dan publik.

Metodologi

Tulisan ini berangkat dari penelitian yang dilaksanakan di tiga kampung lokal di Distrik Malind, Kabupaten Merauke, yakni Kampung Kaiburse, Kampung Onggari dan Kampung Domande, yang terletak di pesisir Pantai Selatan Papua. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat lokal yakni masyarakat Suku Malind Anim (dikenal juga

dengan nama Suku Marind Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Dalam pengumpulan data, instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sampel penelitian diambil dengan teknik pengambilan sampel purposif (*purposive sampling*) sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan informan kunci ditentukan menggunakan teknik efek bola salju (*snowball sampling*), yaitu ketika bertemu informan kunci yang berpengetahuan luas dan kaya pengalaman tentang objek penelitian, informan kunci itulah yang akan memberikan informasi berikutnya tentang informan kunci lain yang mereka kenal dan berpengetahuan luas serta kaya pengalaman tentang objek penelitian. Data dalam penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion* (FGD), dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi dari berbagai dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif. Menurut Miles dan Huberman (2009), analisis kualitatif dilakukan melalui tiga alur kegiatan secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, masing-masing sesuai dengan tujuan penelitian

Profil Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke, khususnya Distrik Malind. Distrik Malind merupakan salah satu distrik dimana sebagian besar kampungnya atau wilayahnya berada di wilayah pantai atau pesisir. Kampung-kampung yang termasuk dalam wilayah Distrik Malind adalah Kampung Kumbe, Kampung Kaiburse, Kampung Onggari, Kampung Domande, Kampung Rawasari, Kampung Padang Raharja dan Kampung Sukamaju. Penelitian ini difokuskan pada 3 kampung dimana didominasi oleh masyarakat asli Suku Marind dan terletak di pesisir yakni Kampung Kaiburse, Kampung Onggari dan Kampung Domande. Kampung-kampung yang lain adalah merupakan kampung-kampung transmigrasi dimana sudah terjadi percampuran masyarakat lokal dan pendatang serta terletak lebih ke daratan dengan perhatian pada pertanian seperti sawah dan lain-lain.

Distrik Malind berpusat di Kampung Kaiburse yang menjadi pusat distrik atau kecamatan. Karena tema penelitian ini adalah relasi gender pada jeluarga nelayan lokal, maka penelitian hanya dilakukan di 3 kampung yang disebutkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender dalam Perspektif Tradisi

Mengawali pembahasan ini akan diberikan sedikit gambaran tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam tradisi Masuku malind Anim. Secara umum masyarakat Suku Marind memiliki tradisi budaya atau adat yang sangat kuat, ditandai dengan dominasi laki-laki dalam sistem sosial patriarki. Dalam sistem sosial ini pelembagaan budaya patriarki terjadi melalui pelembagaan peran gender di ranah domestik dan publik, posisi dominasi dan subordinasi serta sifat maskulin dan feminin. Pelembagaan tradisi ini membentuk struktur fungsional dan mendukung dominasi patriarkal, yang bermuara pada ketidakadilan gender dan kekerasan atas perempuan. Hal ini memperkuat sistem sosial kemasyarakatan tradisional yang terbentuk, dengan struktur sosial yang fungsional dalam mendukung sistem patriarki. Dalam hal ini, laki-laki memegang kekuasaan atas perempuan, baik di ranah domestik maupun publik. Masyarakat Suku Marind sejak dulu melakukan perbedaan atas laki-laki dan perempuan dalam sistem sosial yang mapan. Mereka dipisah dan dikonstruksi secara sosial, sehingga akhirnya pemisahan jenis kelamin ini diterima masyarakat turun-temurun tanpa protes. Bagi mereka, pemisahan ini adalah bagian dari adat dan harus diterima sebagai kewajiban adat. Perbedaan laki-laki dan perempuan itu dikonstruksi secara sosial berdasarkan adat. Perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang berbasis adat sendiri. Hal ini sesuai pendapat Oakley (1972) (Fakih, 1996). Jadi, masyarakat Suku Marind memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan menggunakan perspektif gender berbasis adat masyarakat tradisional.

Sejak anak Suku Marind lahir, mereka langsung dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi fungsionalisme struktural posisi tradisional melihat identitas antara maskulin dan feminin sebagai hasil sosialisasi. Di masyarakat Suku Marind, sosialisasi terjadi terutama pada masa kanak-kanak, di mana anak laki-laki dan perempuan mulai belajar perilaku yang pantas bagi jenis kelaminnya. Maskulinitas di masyarakat Suku Marind mengharuskan anak-anak memiliki ketegasan, selalu bersikap aktif, lincah, dan cepat mengambil inisiatif, sedangkan feminitas masyarakat Suku Marind mengharuskan perempuan dapat bekerja sama, pasif, lembut, dan emosional. Bagi masyarakat Hubula

Suku Marind, sosialisasi dianggap menyebabkan pembedaan gender ke dalam subyek feminin dan maskulin, yang dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Seperti dikemukakan oleh Walby (1990), lembaga keluarga berperan penting bagi berlangsungnya proses sosialisasi semacam itu.

Masyarakat Suku Marind melakukan pembedaan gender laki-laki dan perempuan berdasarkan harapan yang berbeda dari orangtua dan tetua adat atas anak laki-laki dan perempuan. Masyarakat Suku Marind memandang pentingnya posisi, otoritas, dan peran laki-laki pada urusan publik dibandingkan perempuan. Di masa lalu, perspektif gender itu dibutuhkan untuk mempertahankan eksistensi masyarakat tradisional. Peran laki-laki dan perempuan perlu dibedakan, khususnya berdasarkan keras dan lembutnya pekerjaan yang harus dilaksanakan. Masyarakat Suku Marind memahami bahwa laki-laki harus mengambil bagian pekerjaan kasar karena laki-laki itu kuat dan perkasa, sedangkan pekerjaan lembut diberikan kepada perempuan karena mereka lemah dan memerlukan pertolongan. Berdasarkan pertimbangan ini, masyarakat Suku Marind menetapkan perempuan bertugas mengurus rumah tangga, merawat kebun, dan memelihara babi, sedangkan laki-laki harus bertugas mengurus adat dan perang.

Pembagian kerja berbasis gender antara laki-laki dan perempuan dari masyarakat tradisional Suku Marind tersebut memberikan peluang partisipasi dan ekonomi bagi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, demikian pula dalam pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik, sebagaimana dikemukakan Giuliano (2014). Dalam masyarakat Suku Marind, kesenjangan peluang antara laki-laki dan perempuan tersebut terjadi, di mana laki-laki berspesialisasi bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan berspesialisasi melakukan kegiatan di rumah tangga. Pembagian kerja ini menghasilkan pola dan norma yang berbeda tentang posisi, otoritas, dan peran yang tepat bagi perempuan di masyarakat. Inilah awal mula terbentuknya masyarakat patriarkal yang sejak awal menyediakan tempat alami bagi perempuan dalam rumah dan tempat alami bagi laki-laki di luar rumah.

Realitas relasi gender sebagaimana yang telah dijelaskan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Suku Marind, tidak terkecuali apa yang terjadi pada Masyarakat

Marind di Kampung Kaiburse, Onggari dan Domande, khususnya kehidupan keluarga nelayan di ketiga kampung tersebut.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa karakteristik masyarakat berbeda-beda, terlebih dengan kondisi geografis yang berbeda pula seperti masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi maupun masyarakat di lereng gunung. Masyarakat pesisir yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini dipandang sebagai kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung sebagian atau seluruhnya dengan sumber daya pesisir maupun lautan. Kehidupan mereka tidak dapat dilepaskan dari laut dan pantai, terutama dalam bidang ekonomi, juga dalam ranah ritualitas, relasi sosial, hingga relasi gender dan lain sebagainya. Khususnya dalam relasi gender, berikut adalah deskripsi dan pembahasan atas relasi antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Distrik Malind sebagaimana yang menjadi topik utama dalam penelitian ini yang dilihat dalam tiga aspek yakni berkaitan dengan pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya, serta pengambilan keputusan.

Pembagian Kerja

Salah satu upaya yang pasti dilakukan oleh suatu rumah tangga untuk kehidupan berkelanjutan adalah mengelola sumber daya yang dimiliki dengan seefektif dan semaksimal mungkin. Kehidupan berkelanjutan yang dimaksud disini adalah bagaimana mereka dapat bertahan hidup di hari ini dan hari yang akan datang dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, baik dalam sektor publik maupun dalam sektor domestik. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila kemudian dalam suatu rumah tangga, tidak hanya laki-laki saja yang bekerja, melainkan juga istri atau perempuan disamping peran dan tugas mereka untuk mengurus rumah tangga. Peran istri pada masyarakat Papua secara umum yang turut mencari nafkah ini banyak disebutkan sebagai peran ganda perempuan (Linggasari, 2004; Lisnawati dan Merdekawati, 2009; Djunaedi, 2018). Akan tetapi perlu diingat bahwa nilai-nilai lokal sangat berpengaruh pada relasi gender suatu masyarakat. Dapat diketahui bahwa tingkat kesetaraan gender sebenarnya dapat dilihat melalui bagaimana akses, kontrol, dan manfaat akan sumber daya alam baik oleh laki-laki dan juga perempuan. Sakila (2015) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan

yang nyata antara beberapa variabel karakteristik dalam rumah tangga nelayan terhadap kesetaraan gender, sehingga perlu untuk melihat faktor-faktor lain yang ada di dalam rumah tangga suatu masyarakat.

Pembagian peran kerja dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam tiga kategori, yakni kerja reproduktif, kerja produktif, dan kerja sosial (Hubeis, 2010). Kerja reproduktif ialah peran yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dalam berbagai kegiatan sehari-hari yang bersifat rutin dan tidak diperhitungkan sebagai kerja produktif karena tidak dibayar. Peran produktif menyangkut berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Sementara peran kerja sosial berkaitan dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan guna menjaga relasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat di Kampung Onggari, Domande dan Kaiburse adalah tidak lain merupakan masyarakat pesisir yang memiliki pencaharian utama sebagai nelayan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan tempat tinggal mereka yang berada di wilayah pesisir. Pembagian peran kerja reproduktif masyarakat Suku Marind yang dapat digambarkan tidak berbeda jauh dengan masyarakat Papua secara umum. Disini laki-laki yang bertugas untuk mencari ikan di laut sementara perempuan bertugas untuk mengurus rumah tangga, mengurus ternak, memenuhi dan mengurus kebutuhan pangan keluarga, juga mengurus kebun. Sementara pada peran kerja produktif sebenarnya kegiatan laki-laki mencari ikan di laut selain untuk memenuhi kebutuhan makan juga untuk mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. Peran kerja produktif ini akan berhubungan dengan persoalan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Meski peran kerja produktif termasuk kegiatan yang bisa menghasilkan barang maupun jasa yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi disini kuasa atas uang dan hasil tangkapan ikan yang didapatkan lebih didominasi oleh laki-laki. Laki-laki meski sebagai kepala rumah tangga berhak untuk mengatur uang yang didapatkan dari hasil penjualan ikan termasuk membagikan kepada istrinya di rumah. Menariknya, posisi perempuan ini "tidak memiliki kuasa untuk melakukan protes pada laki-laki apabila suaminya tidak membawa hasil ke rumah.

Pengetahuan lokal menunjukkan bahwa hak atas hasil tangkapan ikan yang berada sepenuhnya di tangan laki-laki ialah karena mereka yang pergi dan mencari ikan, mereka

yang telah bekerja dengan keras maka itu menjadi hak mereka untuk menggunakannya entah untuk keluarga atau untuk dirinya sendiri. Kondisi ini dipengaruhi oleh fakta bahwa para nelayan lokal juga bahkan tidak memiliki akses kuasa untuk mengatur hasil tangkapannya. Hal ini disebabkan karena kebanyakan alat-alat yang digunakan oleh nelayan lokal tersebut adalah milik pengepul yang sudah siap membawa hasil tangkapan tersebut untuk dijual ke pasar. Para nelayan seringkali hanya mendapatkan bagian seadanya yang diberikan oleh “majikan” mereka. Hal ini tentu saja memberikan tekanan yang lebih besar dalam upaya menyediakan dan memnuhi kebutuhan rumah tangga.

Akses dan Kontrol Sumber Daya

Persoalan akses berkaitan dengan kesempatan yang diperoleh untuk menggunakan sumber daya produktif dan kontrol yakni kuasa untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya, yang dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai berbagai input usaha nelayan. Sumber daya disini dapat dilihat sebagai sumber daya ekonomi yang mereka miliki misalnya hasil tangkapan, peralatan yang digunakan, lahan dan hasil yang mereka peroleh dari sektor pertanian termasuk tanah yang juga menjadi sumber daya yang mereka miliki.

Pada sektor perikanan, berbagai kegiatan seperti kegiatan menangkap ikan dilakukan oleh laki-laki, mulai dari menangkap ikan serta memancing ikan baik dilaut maupun di sungai dan rawa-rawa. Pada umumnya jika aktifitas penangkapan itu dilakukan dilaut maka biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki. Namun jika aktifitas menjaring dan memancing ikan itu dilakukan di sungai atau rawa, maka biasanya juga dilakukan bersama-sama baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan akan sangat berperan dalam mengolah hasil yang diperoleh, baik untuk konsumsi keluarga maupun untuk dijual di pasar. Selain hasil laut, sumberdaya lain adalah lahan pertanian dan hasil kebun khususnya pertanian milik keluarga seperti kebun ubi-ubian, kebun kelapa dll. Biasanya perempuan dan laki-laki berperan bersama-sama dalam pembukaan lahan. Selanjutnya proses menanam, merawat, hingga memanen biasanya banyak dikerjakan oleh perempuan. Sedangkan hasil dari lahan kelapa misalnya segala prosesnya banyak dikerjakan oleh laki-laki. Terlihat disini bahwa perempuan berperan besar dalam atau dominan dalam urusan rumah tangga, mengurus kebutuhan makan, kesehatan keluarga, pendidikan anak, juga mengelola ternak yang dimiliki keluarganya. Lebih dari pada itu, mereka juga bertugas

untuk menjual ikan yang didapatkan suaminya di pasar atau dipinggir jalan apabila ikan-ikan tersebut tidak langsung dijual ke pengepul.

Dalam aktifitas menangkap ikan dilaut biasanya dilakukan oleh laki-laki. Kebanyakan perahu yang digunakan merupakan perahu-perahu kecil sehingga mereka hanya akan pergi menangkap ikan di perairan yang relatif dangkal dan dekat dengan daratan. Umumnya mereka hanya mencari ikan di laut sekitar tempat tinggal mereka saja, tidak sampai ke tengah laut. Meski demikian, sumber daya ikan yang melimpah membuat mereka tetap mendapatkan ikan. Sekembalinya dari menangkap ikan, yang memiliki kewenangan dalam hal pembagian ikan baik untuk dijual, dimakan, dan lain sebagainya adalah laki-laki. Apabila ketika mendarat di pantai telah ada pengepul atau tengkulak biasanya mereka akan menjual ikan langsung di pantai, bahkan terkadang sampai tidak ada lagi ikan tersisa untuk dibawa pulang. Jika demikian, terkadang mereka akan kembali lagi melaut untuk mencari ikan yang akan dikonsumsi di rumah. Namun apabila ketika mendarat di pantai tidak ada pengepul maka ikan akan dibawa ke rumah.

Sesampainya di rumah, ikan akan dibagi-bagi oleh laki-laki berapa bagian yang akan dijual dan berapa yang akan dikonsumsi. Setelah itu, baru yang mendapatkan tugas untuk menjual ikan di pasar atau ditepi jalan adalah perempuan. Uang yang didapatkan oleh perempuan dari hasil menjual ikan di pasar atau di jalan untuk mengelolanya meski ia harus memenuhi kebutuhan makan keluarga. Uang tersebut akan dibawa pulang, "dilaporkan" pada suaminya bahwa ia mendapatkan hasil sekian dari penjualan ikan. Ketika suaminya telah memberikan mandat pada istrinya untuk menggunakan semua uang itu baru kemudian uang itu bisa ia gunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga termasuk biaya pendidikan anak dan lain sebagainya.

Selain sebagai nelayan perekonomian mereka juga banyak ditompang oleh pendapatan dari aktifitas lain seperti menjual pasir untuk bahan bangunan. Pasir-pasir yang dijual ini ditambang dari wilayah tanah mereka, tanah yang merupakan hak ulayat, termasuk di sekitar rumah. Meskipun dampaknya adalah kerusakan lingkungan sekitar mereka, namun tetap saja dilaksanakan karena mereka tidak memiliki banyak akses dan aktifitas ekonomi yang menunjang penghasilan dan kehidupan mereka.

Meskipun lahan pertanian cukup tersedia, namun belum dikelola secara maksimal. Lahan mereka banyak yang digunakan atau dikuasai oleh pihak lain misalnya korporasi atau untuk lahan padi yang merupakan program pemerintah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa sektor pertanian tidak dapat berkembang secara maksimal. Suku Marind sebagai penduduk asli Merauke lekat dengan pangan lokal seperti sagu namun cenderung terpinggirkan. Menurut Widjono (2006), dalam penelitiannya juga menemukan bahwa sebagian dari masyarakat Suku Marind di Distrik Malind juga memilih padi sebagai komoditas pangan yang turut dikembangkan. Salah satu pertimbangannya ialah bahwa mereka hidup satu kampung dengan masyarakat transmigran dari Jawa dan sebagian dari mereka juga turut belajar membudidayakan padi sawah di bawah bimbingan atau dibantu petani dari Jawa. Mereka memilih mengembangkan padi dibandingkan dengan sagu maupun tanaman pangan lainnya. Akibatnya perlahan-lahan sagu sebagai pangan lokal mulai terpinggirkan. Dusun²⁵ sagu yang semula cukup mudah untuk ditemukan, beganti dengan lahan sawah yang ditanami padi.

Kebutuhan harian mereka, terutama kebutuhan akan pangan lebih banyak mengandalkan pada hasil laut. Efek sampingnya, tanah-tanah mereka menjadi tidak terurus hingga banyak diantara mereka yang memilih untuk menjual tanahnya kepada pendatang. Hal ini kemudian memunculkan kekuatan dan dominasi dari orang-orang pendatang yang kini telah memiliki akses terhadap tanah di Distrik Malind. Fenomena tersebut juga menguatkan antipati masyarakat Suku Marind terhadap para pendatang yang semakin menempatkan mereka dalam kelompok minoritas (Solossa, 2005).

Fenomena-fenomena yang memberikan gambaran mengenai akses dan kontrol yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan Suku Marind di Distrik Malind ini yang memperlihatkan bagaimana keputusan-keputusan dalam mengelola sumber daya itu lebih banyak diputuskan oleh laki-laki, meskipun dalam beberapa hal, perempuan juga menunjukkan perannya.

²⁵ Dusun yang dimaksud dalam budaya Papua ialah bidang lahan yang ditumbuhi sagu (atau tumbuhan sumber kehidupan lain) dan dikuasai oleh sekelompok masyarakat. Lebih lanjut lihat Malik et al. (2005).

Pengambilan Keputusan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam keluarga masyarakat nelayan lokal di pesisir, pengambilan keputusan pada berbagai persoalan cenderung banyak ada di tangan laki-laki. Sementara perempuan cenderung terposisikan sebagai pihak kedua yang mendukung dan menerima keputusan tersebut. Kalau-pun ada sanggahan atas keputusan yang diambil oleh laki-laki, kekuatan yang dimiliki perempuan untuk melakukan sanggahan juga kecil. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa akses pengambilan keputusan perempuan jauh lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, terutama pengambilan keputusan terhadap sumber daya. Kondisi ini juga didasari oleh nilai-nilai lokal dalam kehidupan masyarakat Suku Marind yang patriarkis.

Posisi seseorang yang dapat melakukan pengambilan keputusan merupakan posisi tertinggi bagi orang tersebut untuk dikatakan mampu atau berdaya. Ketika laki-laki lebih memiliki dominasi dalam pengambilan keputusan, maka hal ini akan menguntungkan laki-laki termasuk dalam urusan kebutuhan strategis yang berbasis gender. Perempuan yang dilekatkan secara sosial dan nilai-nilai adat dengan berbagai peran domestik, membuat mereka cenderung menempati posisi setelah laki-laki di dalam rumah tangga. Baik dalam urusan pendidikan anak yang diatur oleh perempuan, akan tetapi keputusan yang diambil oleh perempuan tetap harus mendapat persetujuan dan atas sepengetahuan juga pertimbangan laki-laki, meski untuk pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan (dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi) ini mereka mendapatkan layanan gratis dari pemerintah sehingga tidak memerlukan banyak uang. Dengan kata lain, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan pun tidak sepenuhnya mutlak. Hal ini kemudian menarik kata bahwa perempuan pada masyarakat Suku Marind memang tidak memiliki kuasa dan modal untuk mengimbangi dominasi laki-laki.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diterik beberapa kesimpulan. Pertama, pola pembagian kerja dan curahan waktu pada rumah tangga nelayan di kampung Kaiburse, Onggari dan Domande didominasi oleh perempuan. Sementara laki-laki umumnya terlibat jika diperlukan khususnya pada pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang lebih kuat. Pola pembagian kerja pada aktivitas produktif lebih didominasi oleh laki-laki. Istri terlibat

dalam aktivitas penangkapan. Aktivitas penangkapan yang dilakukan perempuan tidak dilakukan di laut, melainkan di perairan umum (rawa dan sungai) yang lokasinya dekat dengan pemukiman mereka. Istri nelayan memiliki kontribusi yang cukup besar dan memegang peranan penting dalam ekonomi rumah tangga. Curahan waktu produktif istri nelayan jauh lebih sedikit dibandingkan suami. Namun kedudukan istri dalam kegiatan produktif tetap dianggap membantu suami untuk menambah pendapatan keluarga.

Dalam hal akses dan kontrol terhadap sumberdaya terlihat dengan sangat jelas bahwa lebih banyak didominasi oleh laki-laki, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya ekonomi lain yang mereka miliki. Hal yang sama juga berlaku dalam pengambilan keputusan. Disini hampir semuanya didominasi oleh laki-laki. Perempuan "sekedarnya" mendengarkan dan menjalankan saja.

Terlihat jelas adanya ketimpangan gender baik dilihat dari aspek karakteristik sosial, ekonomi dan budaya, pada pola pembagian kerja akses dan kontrol terhadap sumberdaya maupun dalam hal pengambilan keputusan dalam rumah tangga nelayan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashcraft, C. (2000) Naming knowledge: *A Language for Reconstructing Domestic Violence and Systemic Gender Inequity*. *Women and Language*, 23, (1), 3-10
- Chaitali, D. (2012) *Barriers and Supports to Divorce for Victimized British- Indian Mothers and Consequences of Divorce: Narratives of British - Indian Adult Children of Divorce*. *Child Care in Practice*, 18, (2), 147-164.
- Chapman, R. & Rutherford, J. (2014) *Male Order: Menguk Maskulinitas*, Yogyakarta: Jalasutra
- Chowdhury, E.H. (2015) Rethinking Patriarchy, Culture and Masculinity: Transnational Narratives of Gender Violence and Human Rights Advocacy. *Journal of International Women's Studies*, 16, (2), 98-114.
- Djamba, Y.K. & Kimuna, S.R. (eds.) (2015) *GenderBased Violence: Perspectives from Africa, the Middle East, and India*, Switzerland: Springer International Publishing.
- Fakih, M. (1996) *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gheaus, A. (2012) Gender Justice, *Journal of ethics & social philosophy*. 6, (1), 1-24.

- Giuliano, P. (2014) *The Role of Women in Society: from Preindustrial to Modern Times*, CESifo Economic Studies, 61, (1), 33-53
- Habiba, U., Ali, R., & Ashfaq, A. (2016) From Patriarchy to Neopatriarchy: Experiences of Women from Pakistan, *International Journal of Humanities and Social Science*. 6, (3), 212-221
- Djunaedi. (2018). Peran Ganda Perempuan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga. Ad'ministrare, *Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, vol.5, no.1 (Januari-Juni):19-26. doi: 10.26858/ja.v5i1.6492
- Hubeis. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Lisnawati, Ester dan Pricilia Merdekawati. (2009). "Konsep Kesejahteraan Psikologis Pada Perempuan Asmat" dalam *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik*, Vol. 3.
- Linggasari, Dewi. (2004). *Yang Perkasa Yang Tertindas: Potret Hidup Perempuan Asmat*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Makarim, A.K.; M.O. Adnyana; A. Widjono; A. Hasanuddin; D. Pasaribu. (2006). *Studi Kelayakan Pengembangan Teknologi Padi di Merauke, Papua*. Laporan Tengah Tahun. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.
- Sakila, Hakim. (2015). *Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Desa Pasale, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara)*. UNG Repository. Gorontalo: Universitas Gorontalo.
- Solossa, J.P. (2005). *Otonomi Khusus Papua: mengangkat martabat rakyat Papua di dalam NKRI*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Suryadi & Idris (2004). *Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*, Bandung: Genesindo.
- Yuniarto, Paulus Rudolf. (2018). Strata Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Berbasis Komunitas: Studi kasus PNPM/RESPEK di Kabupaten Merauke. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol.20, no.3, pp:313-328

Chapter 11

KEMISKINAN NELAYAN

TIPOLOGI KEMISKINAN NELAYAN DI KABUPATEN BANTAENG

Andi Adri Arief



Andi Adri Arief adalah Dosen pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Makassar. Meraih gelar S1 Manajemen Sumberdaya Perairan di Universitas Hasanuddin (1997), Magister Sains pada Program Manajemen Lingkungan di Universitas Hasanuddin (2002) dan gelar Doktor dalam bidang Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2007).

* Email : andi_adriunhas@yahoo.com

PENDAHULUAN

Latar belakang

Sudah menjadi pemandangan umum bahwa daerah pemukiman nelayan erat kaitannya dengan simbol kemiskinan. Hampir 90% nelayan di Indonesia masih berskala kecil dan lebih dari 60% dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan (Arief, A. Adri, 2002), Upaya untuk mengatasi kemiskinan telah lama dilakukan oleh berbagai pihak, namun banyak menemui kegagalan untuk mengeluarkan nelayan dari kemiskinan dan kesulitan hidup. Ala (1981) menjelaskan tentang fenomena lingkaran setan kemiskinan yang menjerat masyarakat miskin di negara-negara miskin. Lemahnya tingkat pendapatan riil menyebabkan rendahnya kemampuan menabung dan lemahnya kapasitas modal untuk investasi yang berdampak pada rendahnya produktifitas dan akhirnya menyebabkan lemahnya tingkat pendapatan. Proses melingkar itu menyebabkan masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinannya jika tidak ada intervensi dari luar.

Tingkat kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, selain dipengaruhi sejumlah kelemahan internal, juga karena pengaruh faktor eksternal. Keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai teknologi yang lebih modern, dan akses yang rendah terhadap modal produksi diasumsikan sebagai faktor internal. Sementara sejumlah faktor eksternal, seperti makin terbatasnya potensi sumberdaya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan yang makin intensif,

mekanisme pasar, posisi tawar nelayan di hadapan tengkulak, keadaan infrastruktur perikanan, dan yurisdiksi daerah otonomi adalah beban tambahan yang makin memperparah keadaan komunitas nelayan *grassroot* (Mubyarto at all 1984).

Hasil-hasil studi tentang tingkat kesejahteraan hidup nelayan, telah menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi atau ketimpangan pendapatan merupakan persoalan krusial yang dihadapi, dan tidak mudah untuk diatasi (Kusnadi, 2007). Sementara Nikijulw (2005) menyimpulkan bahwa, tipologi kemiskinan nelayan dapat dibedakan dalam tiga model kemiskinan, yaitu : kemiskinan struktural, kemiskinan super-struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan structural disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variable-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu.

Dengan demikian, upaya penyusunan strategi dan program pengentasan kemiskinan harus lebih didasarkan atas data-data konkrit yang berhubungan dengan potret kemiskinan itu sendiri. Kondisi empiris dapat teramati bahwa kemiskinan yang dialami oleh komunitas nelayan tidak terlepas dari realitas kehidupannya sehari-hari, diantaranya; aspek keluarga seperti jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, modal yang digunakan untuk aktivitas produksi dan faktor lainnya termasuk kepemilikan alat tangkap serta pendapatan yang mereka peroleh dari kegiatan sebagai nelayan. Oleh karena itu, untuk dapat mengukur secara reel kondisi kemiskinan nelayan adalah dengan menggunakan parameter Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Nilai tukar nelayan merupakan indikator yang tepat untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga nelayan, karena mempertimbangkan seluruh aspek penerimaan (*revenue*) dan seluruh komponen pengeluaran (*expenditure*) rumah tangga nelayan. Hasil dari Nilai Tukar Nelayan akan menggambarkan kemampuan keluarga nelayan untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya. Meskipun demikian, tidak berarti factor-faktor lain tidak menjadi sorotan kajian dalam memahami tipologi kemiskinan nelayan. Pola tersebut tentu saja terbedakan karena penyebabnya yang berbeda, yang kemudian menjadi pola umum di

kalangan komunitas nelayan pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kedalaman analisis factor-faktor penyebab kemiskinan nelayan berdasarkan klasifikasi-klasifikasi penyebabnya, menjadi penting untuk diurai dengan pendekatan metode yang tepat.

Fakta empirik memperlihatkan bahwa, apa yang terjadi pada komunitas nelayan di Kabupaten Bantaeng, secara umum hampir sama atau serupa dengan komunitas nelayan lainnya di Indonesia, simbol masyarakat nelayan yang “terpinggirkan, miskin, terisolasi, kumuh, kurang berpendidikan” masih tetap saja menjadi atribut bagi komunitasnya. Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan itulah, khususnya mensejahterakan nelayan, maka kajian mengenai *Tipologi Kemiskinan Nelayan* dilakukan. Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa hanya dengan pendekatan yang tepat yang disusun dalam suatu program perencanaan kebijakan yang terpadu dan komprehensif maka upaya mensejahterakan nelayan dapat berlangsung secara efektif, membawa kemakmuran dan berkelanjutan.

Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh keterangan ilmiah terkait dengan tingkat pendapatan (*income level*) nelayan pengguna alat tangkap *drift gill net* dengan menggunakan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN); Menganalisis faktor apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan nelayan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni: studi kepustakaan; metode survey dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, sementara data primer dikumpulkan melalui metode pengumpulan data *triangulation*, yakni metode pengumpulan data dengan beberapa teknik sekaligus seperti *Indepth Interview*, wawancara dengan menggunakan kuisisioner, FGD dan observasi. Pemilihan responden dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa responden dianggap berkaitan dengan tujuan penelitian. Jumlah sampling setiap lokasi studi berdasarkan aspek pertimbangan keterwakilan.

Analisis data menggunakan gabungan pendekatan deskriptif kualitatif (Miles, B. Matthew & Huberman, A, 1992) dan kuantitatif. Data kualitatif dianalisa secara deskriptif

melalui analisis komponensial (*componetial analysis*) yang diawali dengan proses reduksi data kasar dari catatan lapangan, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan data kuantitatif dilakukan penghitungan berdasarkan rumus - rumus tertentu. Penentuan data Pendapatan rumah tangga nelayan menggunakan analisis Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan (*income level*) rumah tangga nelayan dari waktu ke waktu. Indikator NTN > 100, berarti nelayan mengalami surplus. Pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya. NTN = 100, berarti nelayan mengalami impas/break even. NTN < 100, berarti nelayan mengalami deficit.

Profil Wilayah Penelitian

Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak \pm 120 km dari Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada 05°21'15" LS sampai 05°34'3" LS dan 119°51'07" BT sampai 120°51'07"BT. Membentang antara Laut Flores dan Gunung Lompo Battang, dengan ketinggian dari permukaan laut 0 sampai ketinggian lebih dari 100 m dengan panjang pantai 21,5 km. Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km². Kabupaten Bantaeng mempunyai batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Lompo Battang Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto

Secara administrasi, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan dengan 67 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 3 kecamatan pesisir (Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan Pajukukang), dan 5 kecamatan bukan pantai (Kecamatan Uluere, Sinoa, Gantarangkeke, Tompobulu dan Eremerasa). Dengan perincian 17 desa/kelurahan pantai dan 50 desa/kelurahan bukan pantai. Letak geografis Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam 3 (tiga) dimensi, yaitu bukit pegunungan, lembah daratan dan pesisir pantai, dengan dua musim iklim di daerah ini tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan rata-rata setiap bulan 20 mm.

Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau berdiam di suatu daerah pada waktu tertentu yang dapat menjadi gambaran potensi kemampuan penduduk dalam

menjalankan suatu usaha yang berhubungan dengan kehidupannya. Adapun jumlah penduduk di tiga kecamatan pesisir sebanyak 102.496 jiwa (BPS, Bantaeng, 2016). Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan dari ketiga kecamatan pesisir adalah sebesar 20.073 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebesar 19.876 jiwa. Jumlah penduduk yang sebagian besar bermukim di wilayah pesisir merupakan potensi tenaga kerja yang dapat memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut untuk kegiatan kelautan dan perikanan termasuk pengembangan usaha penangkapan ikan. Jumlah penduduk dari tiga kecamatan yang bermata pencaharian sebagai nelayan sebesar 1.141 orang, sebagai pembudidaya sebesar 76 orang, sebagai pembudidaya rumput laut sebesar 3.197 orang, sebagai pengolah sebesar 11 orang, sebagai pedagang ikan sebesar 309 orang.

Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi masyarakat setempat untuk menunjang kegiatan usaha perekonomian dan peningkatan sumber daya manusia. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Bisappu, Kecamatan Pajukukang dan Kecamatan Bantaeng sudah cukup memadai meskipun masih banyak yang harus dilengkapi misalnya sarana kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Beberapa sarana penunjang perikanan seperti SPDN tidak beroperasi lagi karena terkendala modal, prasarana lain yang masih berfungsi baik adalah TPI yang menjadi tempat transaksi antara nelayan dan pedagang atau konsumen. BBI yang baru diresmikan tahun 2013 menjadi salah satu pendukung untuk pengembangan budidaya air tawar dan juga pensuplay ikan untuk usaha pemancingan pada wilayah pengembangan pariwisata Pantai Marina.

Sentra kegiatan pemanfaatan pesisir terletak di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bisappu disebelah barat, Kecamatan Bantaeng di tengah dan Kecamatan Pajukukang di sebelah timur. Produksi perikanan tahunan (2016) berdasarkan jenis usaha di kabupaten Bantaeng, adalah usaha penangkapan sebanyak 85.509 ton; usaha tambak 177,4 ton, dan usaha kolam 8,1 ton.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pendapatan (*Income level*) Nelayan

Salah satu pengukuran kesejahteraan dari perspektif ekonomi dapat dilakukan dengan pendekatan nilai tukar. Nilai tukar nelayan dapat menggambarkan kemampuan rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Indeks nilai tukar nelayan (NTN) memiliki korelasi signifikan pada dinamika usaha perikanan (tangkap) sebagai sumber utama pendapatan serta kemampuan daya beli rumah tangga perikanan.

Data yang ada tentunya akan dapat menjadi pertimbangan terhadap dinamika faktual kesejahteraan pada tingkat pelaku usaha perikanan maupun program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah, apakah signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan atau tidak. Bila kesejahteraan dalam perspektif ekonomi disederhanakan menjadi kemampuan untuk mencukupi semua kebutuhan hidup (pengeluaran), dari penerimaan usaha yang dijalankan oleh rumah tangga nelayan, maka perlu diidentifikasi intervensi kebijakan seperti apa yang diperlukan untuk nelayan dan rumah tangga nelayan agar dapat meningkatkan indeks diterima (pendapatan) dan indeks bayar (pengeluaran).

Saat ini, Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu pendekatan yang dianggap ideal untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan. Perbandingan antara indeks yang diterima dengan indeks yang dibayar oleh nelayan dinyatakan dalam indeks atau persentase. Secara konseptual, NTN menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan nelayan di pedesaan pesisir terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan tangkap. Secara umum dapat diartikan bahwa jika NTN lebih besar dari 100, maka dapat diartikan kemampuan daya beli nelayan (rumah tangga) tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar (tahun dasar analisis), sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan. Fluktuasi nilai NTN dalam kurun waktu tertentu, dapat diasumsikan karena adanya perubahan dinamika beberapa faktor yang mempengaruhi penghitungan. Dengan demikian, NTN yang berada pada level nasional, provinsi dan kabupaten akan berbeda satu dengan yang lainnya (RPJM DKP, 2015)

Konsepsi teori yang selama ini diadopsi dalam pengukuran NTN adalah *Modified Laspeyres Index*, yang hanya memperhitungkan pergerakan harga melalui indeks harga saja. Kenaikan harga pada musim paceklik menyebabkan NTN meningkat, sementara saat produksi melimpah, harga akan cenderung turun mengikuti mekanisme pasar menyebabkan NTN turun. Pendekatan model ini dapat digunakan untuk menilai faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya fluktuasi secara signifikan terhadap NTN serta menganalisis secara mendalam terkait NTN sebagai salah satu indikator kesejahteraan. Implikasi dari hasil NTN diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen yang tepat untuk merepresentasikan kesejahteraan rumah tangga nelayan.

Analisis Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Wilayah Studi

Analisis NTN di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng, dilakukan pada unit nelayan yang menggunakan alat tangkap *drift gill net*²⁶, sebagai alat tangkap yang dominan dipergunakan oleh nelayan. Perhitungan mengenai sumber pendapatan nelayan, terdiri atas 2 (dua) yaitu pendapatan dari usaha perikanan dan usaha non perikanan. Adapun pendapatan nelayan dengan alat tangkap *drift gill net*, terjelaskan sebagai berikut :

Perolehan Pendapatan dalam Usaha Perikanan

Nelayan yang menggunakan alat tangkap *drift gill net*, rata-rata pendapatan yang diperoleh pada bulan Februari (tahun dasar 2018) sebesar Rp 1.126.262, bulan Maret sebesar Rp 1.560.952 dan bulan April sebesar Rp 1.635.143. Hasil tangkapan yang diperoleh, dijual kepada pengumpul atau langsung ke pasar. Pendapatan yang bervariasi disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga perolehan hasil tangkapan juga fluktuatif. Selain itu, penentuan daerah tangkapan (*fishing ground*) hanya berdasarkan pada kondisi alam, pengalaman, serta informasi dari nelayan lain tanpa disertai bantuan teknologi moderen.

Pendapatan yang berfluktuasi disebabkan juga karena kondisi cuaca, kondisi kapal, satuan penjualan hasil tangkapan yang berbeda dan harga ikan yang tidak menentu. Jenis

²⁶ Jaring yang berbentuk empat persegi panjang, mempunyai mata jaring yang sama ukurannya pada seluruh jaring, lebar lebih pendek jika dibandingkan dengan panjangnya. Jumlah *mesh depth* lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah *mesh size* pada arah panjang jaring. *Drift gill net* dapat digunakan untuk mengejar gerombolan ikan, karena posisinya tidak ditentukan oleh jangkar, maka pengaruh dari kecepatan arus terhadap kekuatan tubuh jaring dapat diabaikan (Sudirman & Mallawa, 2000).

ikan yang sering tertangkap dengan alat ini, yaitu; ikan layang, ikan banyar, ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tembang (ikan lemuru). Pada gelombang tenang terjadi pada bulan Maret - November, musim pancaroba/peralihan terjadi pada pertengahan bulan Desember (tanggal 01-15) sedangkan gelombang kuat terjadi pada bulan Desember - February.

Usaha Non Perikanan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengambil 49 nelayan sampel, hanya ada 2 nelayan sampel yang memiliki pekerjaan sampingan. Tidak adanya pekerjaan sampingan, disebabkan keterampilan nelayan hanya bisa melaut, dan dipersepsikan oleh mereka bahwa menjadi nelayan sudah menjadi pekerjaan dari turun menurun, sehingga motivasi untuk mendapatkan pekerjaan lain dalam kategori rendah. Demikian halnya dengan istri-istri nelayan, juga tidak memiliki pekerjaan selain sebagai ibu rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan bahwa, perolehan pendapatan dari suami-suami mereka tidak mampu menutupi kebutuhan subsistensi rumah tangga. Dengan demikian, salah satu hipotesis yang dapat menjadi premis adalah "kemiskinan pada komunitas nelayan dapat dicirikan karena potensi tenaga kerja keluarga (istri dan anak) belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan income rumah tangga".

Pengeluaran

Analisis pengeluaran yang dihitung adalah segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga nelayan baik untuk kepentingan kegiatan produksi maupun untuk kepentingan yang lain, termasuk pengeluaran untuk kepentingan acara-acara tradisi. Gambaran pengeluaran rumah tangga sampel penelitian adalah sebagai berikut :

- **Biaya Usaha Perikanan**

Biaya yang dikeluarkan rata-rata cukup bervariasi tiap bulannya, pada bulan Februari untuk alat tangkap *drift gill net* sebesar Rp. 395.857, bulan Maret sebesar Rp. 319.235 dan pada bulan April sebesar Rp. 371.285. Biaya usaha perikanan meliputi; solar, olie, makanan, dll.

- **Konsumsi Rumah Tangga**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membeli/membayar kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Pengeluaran harian makanan dan minuman terdiri dari makanan pokok beras, mie instan, gula, kopi,

teh, makanan jadi, buah-buahan dan sayuran, telur, ikan, dan minyak goreng. Pengeluaran harian non makanan dan minuman mencakup rokok, bahan bakar (gas 3 Kg), pakaian, sabun, odol, sikat gigi, dan sampo. Data mengenai rata-rata pengeluaran konsumsi harian untuk rumah tangga pengguna alat tangkap drift *gill net* dengan mengambil kasus selama tiga bulan (February, Maret dan April) masing-masing; sebesar Rp. 776.000; Rp. 863.048 dan Rp. 870.524.

- Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan meliputi biaya transportasi, jajan, seragam, sepatu, tas sekolah, alat tulis, dan buku. Adapun rata-rata pengeluaran biaya pendidikan rumah tangga nelayan sekitar Rp. 200.000,-

- Biaya Kesehatan

Biaya untuk kesehatan digratiskan di puskesmas khususnya yang kurang mampu dengan menggunakan kartu askes. Namun tidak menutup kemungkinan keluarga nelayan mengeluarkan biaya untuk membeli obat-obatan di warung sekitar rumah dalam situasi-situasi tertentu. Estimasi biaya kesehatan yang dikeluarkan rumah tangga nelayan setiap bulan sekitar Rp. 30.000,-

- Biaya Perumahan

Umumnya rumah yang dimiliki nelayan dengan konstruksi yang tidak tahan lama, dan beratapkan seng. Ada beberapa juga rumah nelayan yang lantainya dari semen, ber dinding dan beratapkan seng, adapula yang beralaskan tegel namun jumlahnya sangat terbatas. Pemakaian listrik rumah tangga nelayan pada alat tangkap *drift gill net* berkisar antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 150.000. Sedangkan penggunaan air bersih yaitu Rp. 20.000. Biaya yang dikeluarkan antara satu rumah tangga nelayan dengan rumah tangga lainnya sangat bervariasi dan tergantung dari pemakaian dari fasilitas yang dimaksud oleh masing-masing rumah tangga nelayan.

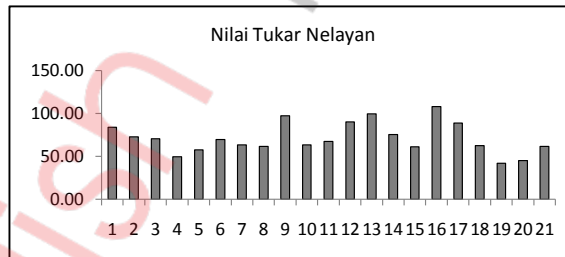
- Biaya Sandang

Biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga nelayan untuk pakaian terbilang kecil, karena biasanya dibeli hanya pada waktu tertentu saja, seperti peringatan hari-hari keagamaan (idul fitri). Untuk jenis pakaian lainnya baru mereka beli ketika mendesak.

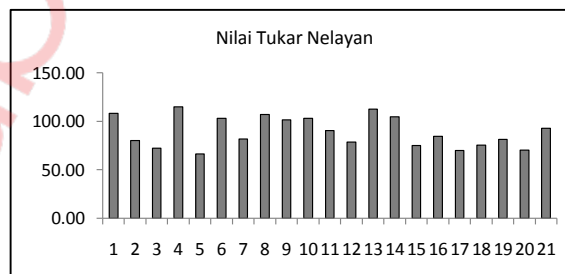
biaya yang dikeluarkan berkisar antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000 untuk satu rumah tangga.

Perhitungan Nilai Tukar Nelayan

Hasil perhitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN) rumah tangga nelayan pengguna alat tangkap *drift gill net*, menunjukkan selisih NTN yang cukup besar antara sesama rumah tangga nelayan pengguna alat tangkap *drift gill net* pada bulan Februari, walaupun mereka menggunakan alat tangkap yang sama, ukuran kapal dan mesin yang relatif sama, *catch area* yang juga hampir sama. NTN terendah pada kisaran 41,89 dan NTN tertinggi pada kisaran 107,90. Selisihnya sangat besar ini, disebabkan adanya perbedaan frekuensi melaut. Seberapa sering nelayan tersebut melaut berbanding lurus dengan banyaknya hasil tangkapan yang diperoleh. NTN rata-rata nelayan yang menggunakan alat tangkap *drift gill net* pada bulan Februari mencapai 71,01. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode itu nelayan belum bisa memenuhi pengeluaran keluarga nelayan, baik pengeluaran untuk usaha perikanan maupun untuk konsumsi rumah tangga (lihat gambar 1).

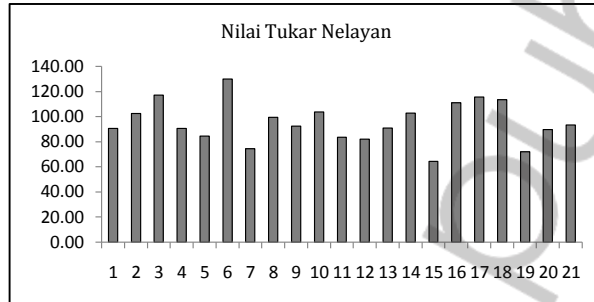


Gambar 1. NTN Nelayan *Drift Gill Net* Bulan Februari, 2018.



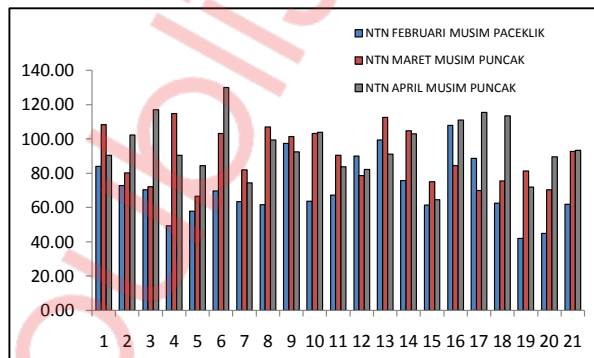
Gambar 2. NTN Bulan Maret, 2018

Diagram batang diatas menunjukkan NTN rata-rata bulan Maret sebesar 89,23. belum mencapai standar pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan penerimaan usaha dan pengeluaran rumah tangga. Meskipun demikian, NTN bulan Maret lebih baik dari rata-rata NTN bulan Februari.



Gambar 3. NTN Bulan April, 2018

Diagram batang bulan April, menunjukkan bahwa NTN tertinggi sebesar 129,93, sedangkan NTN terendah sebesar 64,51. Berdasarkan dari ketiga rata-rata NTN yang diperoleh pada bulan Februari, Maret dan April sebesar 71,01, 89,23, 95,43, menunjukkan bahwa nelayan mengalami deficit anggaran rumah tangga, karena sedikitnya penerimaan yang diperoleh, sehingga tidak mampu untuk menutupi pengeluaran subsistensi rumah tangganya. Gambaran diagram Batang NTN 3 bulan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan NTN Bulan Februari, Maret dan April, 2018.

Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan rumah tangga nelayan jika diasumsikan selama setahun, maka kondisi keuangan rumah tangga belum mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan ada kecenderungan mengalami defisit anggaran atau berada dalam kategori miskin. Jika dihubungkan dengan indikator-indikator kemiskinan dengan focus pada unit individu; Misalnya menggunakan pendekatan Sayogyo (1979; 1996), kemiskinan dihitung berdasarkan berapa kalori atau berapa kilogram beras atau makanan lain setara beras yang secara minimal diperlukan individu dalam sehari untuk bisa mempertahankan hidupnya (*survival*). Untuk daerah pedesaan, seseorang dinyatakan miskin : (1) miskin bila pengeluaran hidupnya dibawah nilai 320 kg beras/tahun; (2) miskin sekali bila pengeluaran hidupnya dibawah nilai 240 kg beras/tahun; (3) paling miskin bila pengeluaran hidupnya dibawah nilai 180 kg beras/tahun. World Bank indikator miskin adalah penghasilan individu kurang dari US\$2 (Rp. 13.863; tahun 2018)-per hari. Sementara indikator UMP (Upah Minimum Provinsi) Sulawesi Selatan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2018 sebesar Rp 2,6 juta/bulan.

Dengan mengambil data tiga bulan pendapatan (rata-rata Rp. 1.440.786) dan pengeluaran (Rp. 1.785.667) rumah tangga nelayan (responden), terjadi deficit sekitar Rp. 284.881. Kaitan dengan indicator kemiskinan seperti yang dituliskan sebelumnya, jika asumsinya individu, maka nelayan secara individu, sesungguhnya tidak miskin karena pendapatannya melebihi dari pada yang dipersyaratkan oleh Sayogyo, World Bank, kecuali UMP. Tetapi jika dikontekskan dalam rumah tangga nelayan, yang terdiri dari beberapa anggota keluarga, maka perolehan pendapatan dan akumulasi pengeluaran anggota rumah tangga mengalami deficit, disitulah kemiskinan sesungguhnya terdefiniskan.

Keberlanjutan usaha perikanan dan keberlanjutan kebutuhan rumah tangga nelayan, mereka tetap adaptif melakukan peminjaman kepada pelepas uang (*pappalele*) sebagai mekanisme kelembagaan lokal dalam menghadapi kerentangan. Kondisi ini juga dapat dijadikan penjelasan akan fenomena patronase masih tetap menjadi bagian kehidupan masyarakat pesisir di wilayah studi. Menurut Juliantono & Munandar (2016) Ketika kelembagaan sistem produksi berubah sehingga menyebabkan hubungan patron-klien yang semula terjalin dengan lembaga-lembaga formal, sekarang memudar dan beralih kepada suatu pola hubungan patron-klien dengan kelembagaan sistem produksi yang non-

formal (*pappalele, rentenir*). Ada beberapa faktor yang menyebabkan nelayan berhubungan dengan kelembagaan sistem produksi non-formal, antara lain; program-program bantuan pemerintah yang dikucurkan melalui kelembagaan sistem produksi sekarang tidak langsung dapat diakses oleh para nelayan. Selain itu, kalau pun tersedia dirasakan tidak cukup mengakomodasi kepentingan para nelayan. Sementara itu, kelembagaan sistem produksi baru yang *notabene* non-formal sangat agresif dan proaktif kepada nelayan.

Faktor lain penyebab rendahnya penerimaan nelayan adalah tidak adanya pekerjaan alternatif lain selain melaut. Mereka hanya mengandalkan melaut sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Disamping itu, faktor yang dianggap berpengaruh pula pada besar kecilnya NTN *drift gill net* yaitu faktor jumlah tanggungan dalam rumah tangga. Semakin banyak jumlah tanggungan dalam rumah tangga, semakin besar pula pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga khususnya pangan dan kebutuhan lainnya.

Dengan demikian, NTN sangat baik digunakan sebagai indikator dalam membuat kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dibanding dengan menggunakan indikator pendapatan. NTN digunakan untuk mengetahui sumber pendapatan, jenis-jenis pengeluaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dengan mengkaji secara konkrit segala hal yang berkaitan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

Kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap *drift gill net* di wilayah kajian terhadap fluktuasi yang mempengaruhi NTN dapat dirincikan sebagai berikut : (1) Tidak ada sumber pendapatan lainnya, selain dari hasil melaut, sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan substansialnya, utamanya kebutuhan pangan; (2) Keterbatasan pengetahuan dan teknologi penangkapan, sehingga hasil tangkapan kurang optimal; (3) Pemerintah belum mampu menyalurkan informasi yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan seperti lokasi penangkapan, teknologi penangkapan dan sebagainya; (4) Tidak adanya penetapan harga dan gudang logistic ikan. Sehingga hasil tangkapan yang banyak tidak signifikan dengan perolehan pendapatan

nelayan karena berlakunya hukum permintaan dan penawaran; (5) Tidak ada sumbangsih perolehan pendapatan tambahan dari anggota rumah tangga khususnya istri-istri nelayan.

Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Kemiskinan Nelayan

Perairan Kabupaten Bantaeng yang merupakan daerah penangkapan ikan nelayan memiliki pasokan ikan yang potensial, khususnya ikan-ikan pelagis kecil yang mendominasi tangkapan nelayan. ($\pm 80\%$ dari semua total hasil tangkapan ikan nelayan). Namun, kenyataannya sampai saat ini kehidupan masyarakat nelayan baik secara etik maupun emik, tetap saja berada dalam ketidakmampuan baik secara finansial maupun operasional. Dukungan sumberdaya alam yang potensial, serta terdapatnya berbagai fasilitas pendukung seperti TPI (tempat pelelangan ikan), pabrik pengalengan ikan, cold storage, penampungan ikan, masih belum mampu mendongkrak perekonomian rumah tangga nelayan ke rumah tangga yang keluar dari kondisi yang subsistensi. Sejatinya, dengan dukungan infrastruktur perikanan yang memadai, komunitas nelayan dapat menjadi sejahtera.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia nelayan di wilayah pesisir pada umumnya masih sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan nelayan ini tidak terlepas dari budaya dan lingkungan setempat. Bagi komunitas nelayan yang sejak dahulu bekerja sebagai nelayan tradisional, menurut mereka pendidikan belum menjadi kebutuhan yang begitu penting, apalagi pada saat itu kondisi sarana dan prasarana tidak mendukung, sehingga masyarakat lebih memilih untuk bekerja. Adapun Faktor utama masyarakat tidak melanjutkan pendidikan yaitu karena faktor ekonomi keluarga. Selain itu, para orang tua terpaksa memanfaatkan tenaga anaknya untuk membantu perekonomian keluarga, atau paling tidak dengan demikian dapat mengurangi beban keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan rumah tangga nelayan dalam menjangkau pelayanan pendidikan masih sangat terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan nelayan, sangat berpengaruh juga terhadap ketrampilan, pola pikir, dan mental mereka. Pekerjaan sebagai nelayan lebih banyak mengandalkan kekuatan otot, atau tenaga. Bagi nelayan pekerjaan melaut tidak memerlukan latar belakang pendidikan yang tinggi, mereka beranggapan sebagai seorang nelayan tradisional sedikit banyak merupakan pekerjaan kasar yang hanya mengandalkan otot dan pengalaman bukan pemikiran, maka setinggi apapun tingkat

pendidikan nelayan itu tidaklah akan mempengaruhi kemampuan melaut mereka. Kondisi tersebut akan mempersulit nelayan tradisional memilih atau memperoleh pekerjaan lain selain menjadi nelayan atau memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Pola kebiasaan nelayan. Nelayan adalah suatu pekerjaan yang bergantung pada kemurahan alam. Pada saat hasil tangkapan sedang tidak baik atau pada saat musim paceklik, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga nelayan mengandalkan strategi peminjaman uang kepada *juragan, punggawa* atau saudara. Atau menjual barang-barang perabot rumah tangga yang mereka miliki sebagai solusi untuk pembiayaan kebutuhan sehari-hari. Pinjaman kepada para rentenir dengan bunga pengembalian yang tinggi, dilakukan jika nelayan masih memiliki utang yang banyak kepada *punggawa* atau *pappalelenya*. Pilihan meminjam kepada rentenir, biasanya dialokasikan oleh para nelayan untuk biaya yang tak terduga, seperti kebutuhan untuk biaya kesehatan yang diperlukan tiba-tiba, seperti ketika ada anggota rumah tangga yang mengalami kecelakaan dan sebagainya. Ada juga kebutuhan yang dikategorikan kebutuhan yang insedentil seperti ada kerabat atau tetangga yang mempunyai hajatan (pernikahan, kematian dan kelahiran). Sementara pinjaman kepada saudara, biasanya dialokasikan oleh para nelayan tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan dapur, membayar listrik dan kebutuhan jajan. Selain uang pinjaman, uang hasil menangkap ikan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga sebagian dari nelayan (oknum) menggunakannya untuk minum-minuman keras dan berjudi. Kebiasaan buruk ini banyak terpraktekkan pada saat ada acara pernikahan atau ketika mereka sedang tidak melaut. Kebiasaan-kebiasaan ini menyebabkan para nelayan terjatuh hutang dan semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan. Pola hidup yang kurang memperhitungkan kebutuhan masa depan, terpraktekkan ketika mendapat hasil tangkapan yang melimpah atau lebih, maka pada saat itu pula mereka akan membelanjakan atau menghabiskannya. Misalnya mereka membeli perhiasan, pakaian, dan sebagainya. Bahkan jiwa saling pamer cukup melekat dikalangan masyarakat pesisir. Konteks yang sama telah ditulis oleh Imron (2003) bahwa adanya respon tertentu yang dilakukan oleh masyarakat miskin dalam menyikapi hidup, seperti boros dalam membelanjakan uang, mudah putus asa, merasa tidak berdaya, dan apatis. Walaupun tidak seluruhnya benar, kondisi yang demikian itu juga dialami oleh

masyarakat nelayan. Kecenderungan untuk membeli barang-barang konsumtif pada saat banyak ikan hasil tangkapan yang diperoleh paling tidak telah mendukung kebenaran tesis yang dikemukakan oleh Lewis tersebut. Kecenderungan semacam itulah yang oleh sementara pihak dipandang sebagai sikap boros, karena tidak menyimpan kelebihan uangnya untuk tabungan yang bisa digunakan pada saat musim paceklik.

Kurangnya pekerjaan alternatif. Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat nelayan. Nampak bahwa penghasilan menjadi nelayan belum bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sifatnya fluktuatif. Oleh karena itu, untuk menunjang penghasilannya, pekerjaan alternatif untuk menambah pendapatan serta untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mereka sangat diperlukan. Gambaran kondisi kehidupan masyarakat nelayan di wilayah studi, nampak secara umum masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan melaut yang dibatasi oleh musim (musim barat, musim timur dan musim peralihan) sebagai sumber pendapatan utamanya. Sesungguhnya, mata pencaharian alternative (tambahan) dapat menjadi solusi yang dapat dilakukan oleh mereka jika tidak sedang melaut.

Akses dan kepemilikan modal. Modal merupakan faktor yang paling menentukan dalam perkembangan kegiatan kenelayanan atau usaha perikanan tangkap nelayan di wilayah studi. Meskipun peralatan produksi yang mereka miliki masih sederhana, tetapi tidak jarang para nelayan harus meminjam uang kepada kerabat atau nelayan lain agar dapat membeli solar buat pergi melaut. Hasil temuan dilapangan diperoleh keterangan bahwa, sebenarnya para nelayan terkadang memiliki simpanan uang ketika mereka memperoleh hasil tangkapan yang cukup besar, akan tetapi ketika mereka melaut dan tidak memperoleh hasil tangkapan dan terjadinya kerusakan pada alat tangkap, mereka harus menggunakan kembali uang simpanan tersebut. Kesulitan untuk memperoleh modal usaha juga disebabkan oleh tidak adanya akses nelayan tradisional kepada lembaga perkreditan yang ada, seperti Bank Perkreditan dan Koprasi simpan Pinjam. Salah satu kendala yang dihadapi oleh nelayan tradisional untuk memperoleh pinjaman modal usaha adalah tidak adanya jaminan yang bisa diagunkan kepada Bank Perkreditan atau Koprasi simpan Pinjam, seperti jaminan berupa akte tanah dan Buku Kepemilikan Kendaraan

Bermotor (BPKB). Rendahnya akses terhadap permodalan untuk pengembangan usaha, menyebabkan peningkatan hasil produksi baik dari segi jumlah maupun kualitasnya juga signifikan rendah. Sejalan dengan itu, menurut (Tain, 2011) bahwa nelayan skala kecil dan tradisional selalu berada pada lingkaran kemiskinan, karena rendahnya pendapatan yang diterima berakibat pada rendahnya tabungan. Selanjutnya rendahnya tabungan berimbas kepada rendahnya investasi. Sedangkan rendahnya investasi mengakibatkan kembali terjadi kekurangan modal.

Teknologi yang digunakan. Nelayan di wilayah studi pada umumnya masih memakai teknologi penangkapan ikan yang sangat sederhana, berupa perahu yang berbahan kayu yang berukuran panjang 4-5 meter dan lebar 0,5-1 meter. Dengan tenaga penggerak mesin tempel. Jaring yang digunakan untuk proses penangkapan ikan dilaut, mereka sebut dengan jaring *lanra*. Jangkauan penangkapan terbatas. Dalam hal ini pemilihan alat tangkap ikan sangatlah berpengaruh dalam hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan. Kapal atau perahu sebagai tenaga penunjang memiliki andil besar dalam proses penangkapan ikan (khususnya pencarian daerah fishing ground yang potensial). Kapal atau perahu penangkapan ikan yang beroperasi di wilayah studi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu jenis kapal motor (KM), perahu motor tempel (PMT), dan perahu tanpa motor (PTM). Salah satu ciri dari usaha nelayan tradisional adalah teknologi penangkapan yang bersifat sederhana dengan ukuran perahu yang kecil, daya jelajah terbatas, daya muat perahu sedikit, daya jangkau alat tangkap terbatas dan perahu dayung atau mesin ber PK kecil. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, perahu yang digunakan oleh nelayan di wilayah studi, pada umumnya menggunakan mesin tempel dengan kapasitas mesin 5,5 PK dan operasi penangkapannya yang terbatas. Begitu juga dengan alat tangkap yang masih menggunakan jaring dan pancing dan kemampuan jelajah perahu sangat terbatas. Dari uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa teknologi yang digunakan dapat dikategorikan sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan nelayan di wilayah studi.

Peran lembaga ekonomi. Lembaga Ekonomi adalah faktor yang berpengaruh dan bisa menjadi salah satu kendala utama bila pasar tidak berkembang. Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan nelayan, maka upaya yang

dapat dilakukan adalah mendekatkan masyarakat dengan pasar seperti eksportir hasil perikanan dan pedagang pengumpul (*papalele*). Keuntungan dari hubungan seperti ini yaitu nelayan mendapat jaminan pasar dan harga, serta pembinaan terhadap nelayan terutama dalam hal kualitas produk bisa dilaksanakan. Disamping itu, nelayan juga dapat mendapatkan bantuan modal bagi pengembangan usaha yang dihasilkan. Selanjutnya untuk menjalin hubungan dengan para eksportir dapat dilakukan melalui pengembangan aksi kolektif, yakni melalui pengembangan koperasi atau usaha bersama, seperti Koperasi Unit Desa (KUD). Dimana mereka yang bekerja sebagai nelayan menjadi anggota koperasi tersebut, sehingga dari kegiatan melaut dapat dijual melalui koperasi. Oleh karena keberadaan lembaga ekonomi yang mewadahi aktivitas produksi dan pemasaran sangat dibutuhkan oleh nelayan. Realitas yang nampak sekarang, struktur pasar yang ada tidak menguntungkan nelayan. Ini disebabkan karena informasi yang kurang mengenai harga, sehingga harga lebih sering dimonopoli oleh *punggawa-punggawa* ikan, dimana mereka membeli dengan harga murah dan menjualnya kepada eksportir dengan harga yang berlipat ganda. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya lembaga yang mampu mewadahi atau menjadi pengontrol hasil tangkapan, proses penangkapan, permodalan serta lembaga pemasaran yang menguntungkan pihak nelayan dinilai sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan masyarakat nelayan di wilayah studi.

Kuatnya hubungan patron-klien. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, fenomena patron-klien (*punggawa-sawi*) di wilayah studi memiliki dua dimensi kepentingan yang datangnya dikedua belah pihak yaitu; (1) kepentingan *punggawa* dalam menjaga integritas kelompok sebagai kelompok produksi dengan tampil tidak hanya sebagai pemilik (*the have*) dan pemimpin *working group*, tetapi juga sekaligus memperlihatkan "kepemimpinan moral" melalui bantuan-bantuan sosial yang diberikan, (2) dimensi kepentingan *sawi* yang merupakan manifestasi dari refleksi sikap "*safety first*" (dahulukan selamat) lahir dalam kondisi ekonomi yang rawan subsistensi. Asumsinya bahwa, sepanjang keamanan subsistensi tetap terjamin dan keterlibatan dalam proses produksi tetap berlanjut, ketimpangan bagi hasil bukan sesuatu yang harus dipersoalkan. Secara teoritis konteks ini mendukung tulisan Scot (1983), bahwa suatu perlakuan tidak adil akan

dianggap eksploitatif oleh pihak yang berada dalam kondisi rawan subsistensi bila : (1) kerangka legitimasi atas perlakuan tersebut memang tidak bisa diterimanya, dan (2) tersedia alternatif status selevel atau lebih rendah yang bisa menampungnya bila ia terpaksa meninggalkan hubungan tidak adil tersebut. Fenomena “kepatuhan” dari kalangan *sawi*, merupakan sebuah kombinasi yang efektif antara remunerasi (pemberian hadiah) dan manipulasi normative. Konteks remunerasi diberikan oleh *punggawa* dalam bentuk bagi-hasil dan bonus, sementara manipulasi normatif diperlakukan dalam bentuk pemberian bantuan yang mengikat *sawi* dalam norma resiprositas. Meskipun remunerasi yang diberikan hanya cukup untuk kebutuhan subsistensi, manipulasi normatif (*sentimen group*) yang dilakukan *punggawa* cukup efektif untuk meredam ketidakpuasan *sawi* yang sekaligus berfungsi untuk mempertahankan kepatuhan individu, keutuhan kelompok, dan pencitraan yang baik dimata *sawi* maupun dalam masyarakat. Konteks ini sekaligus melegitimasi hubungan *patron-clien* dalam perspektif ekonomi dan sosial. Legitimasi *patron-clien* terciirikan melalui adanya pemberian perlindungan, keuntungan, barang dan jasa (pekerjaan) di satu pihak (*patron*), yang kemudian diterjemahkan oleh pihak yang menerima pemberian (*clien*) atau *sawi* sebagai “hubungan timbal-balik” yang kurang sepadan. Sehingga *clien* atau *sawi*, menjadikannya sebagai kewajiban moral untuk membalas pemberian patron melalui pemberian dukungan, jasa-jasa pribadi, kepatuhan, kesetiaan, ketergantungan dan mengikuti dukungan politik dan sebagainya. Hubungan inilah yang disimpulkan sebagai salah satu factor penyebab kemiskinan nelayan di wilayah studi karena tidak mampu melahirkan kreativitas dan kemandirian bagi kalangan *sawi*.

SIMPULAN

Rata-rata nilai tukar rumah tangga nelayan nelayan alat tangkap *drift gill net* berada pada kategori belum mampu memenuhi kebutuhan dasar subsistensinya, sehingga relasi patron klien menjadi solusi dalam keberlanjutan usaha tangkap yang digeluti dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga.

Faktor penyebab kemiskinan nelayan alat tangkap *drift gill net* korelasinya kuat dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia; kurang atau tidak adanya pekerjaan alternative; kebiasaan nelayan yang kontra produktif; teknologi yang digunakan masih semi moderen; fenomena patron-klien yang eksploitatif, serta; belum adanya lembaga

ekonomi atau lembaga perkumpulan nelayan yang bertugas menaungi keperluan, menyalurkan hasil tangkapan, serta memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan nelayan skala kecil maupun tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala, B. Andre. (1981). *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Arief, A. Adri. 2002. *Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Maros (Studi Kasus Desa Pajukukang, Kec. Maros Utara)*. (Tesis) PPS-UNHAS. Makassar.
- Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam masyarakat nelayan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 63-82.
- Juliantono, F. J., & Munandar, A. (2016). Fenomena kemiskinan nelayan: Perspektif teori Strukturasi. *POLITIK*, 12(2), 1857-1866.
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mubyarto, Loekman Sutrisno, dan Dove. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi-Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Nikijuluw, Victor. (2005). *Politik Ekonomi Perikanan: Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan*. Jakarta; PT. Fery Agung Corporation (FERACO).
- Sudirman dan Mallawa, (2000). *Teknik Penangkapan Ikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tain, A. (2011). Penyebab kemiskinan rumah tangga nelayan di wilayah tangkap lebih Jawa Timur. *Jurnal Humanity*, 7(1), 11551Scott. (1985). *Moral Ekonomi Petani* (Terjemahan). Jakarta: LP3ES.

Chapter 12

ADAPTASI NELAYAN TERHADAP KRISIS

RESILENSI DAN STRATEGI NAFKAH NELAYAN TORANI DI KABUPATEN TAKALAR

Hamja Abdul Halik



Hamja Abdul Halik, adalah Dosen pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Andi Jemma Palopo. Meraih gelar S1 Sosial Ekonomi Perikanan di Universitas Hasanuddin, Makassar (2004), Magister Sains Agribisnis di Universitas Hasanuddin (2011) dan gelar Doktor dalam bidang Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2021)

* Email : hamjarisda@gmail.com.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Perikanan ikan terbang merupakan sumber nafkah bagi sebagian besar nelayan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Eka et al. 2016; Yusuf et al. 2014). Kegiatan perikanan ini berimbas pada sekitar 20 ribu nelayan, *punggawa*, *papalele*, pekerja harian dan perantara di sepanjang pesisir Galesong Kabupaten Takalar. Ikan terbang memiliki keunggulan sebagai ikan ekonomis penting, dimana telurnya sebagai komoditi ekspor dan ikan terbang merupakan ikan konsumsi yang diantarpulaukan.

Keberlanjutan perikanan ikan terbang sebagai sumber nafkah memiliki beberapa kerentanan. Produksi ikan terbang dan telur ikan terbang berfluktuasi akibat eksploitasi atau kelebihan tangkapan *overfishing* (Yahya et al. 2006; Zamroni 2008; Yusuf et al. 2014). Kondisi ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup ikan terbang maupun keberlanjutan sumber nafkah nelayan penangkap ikan terbang.

Keberlanjutan perikanan ikan terbang di Sulawesi Selatan pada dimensi sosial, ekologi, ekonomi, dan teknologi, terancam (R. S. Fitrianti, 2014; R. S. R. I. Fitrianti, 2011; Yahya, Muhamad Ali., Jaya & Monintja, Daniel R., Manurung, 2006). Masyarakat nelayan di Kabuapten Takalar, umumnya menggantungkan hidup pada pemanfaatan sumberdaya alam ikan terbang yang mengalami trend cenderung menurun, mengakibatkan sebagian nelayan ikan terbang melakukan adaptasi yang beragam pada kondisi tersebut (Eka et al

2014). Bentuk adaptasi nelayan ikan terbang dalam menghadapi perubahan produksi ikan terbang antara lain : (1) diversifikasi sumber pendapatan, (2) perubahan daerah penangkapan dan (3) memanfaatkan hubungan sosial (Eka et al. 2014).

Kerentanan yang terjadi pada sumberdaya, juga terjadi pada nelayan sebagai aktor yang menggantungkan hidupnya di lautan. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim di lautan merupakan tantangan tersendiri yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Lebih lanjut menurut Kusnadi (2007) bahwa gagasan jaminan sosial bagi nelayan, lahir sebagai respon terhadap perubahan karakter sumber daya perikanan, sebagai akibat dari perubahan alam dan lingkungan. Kegiatan menangkap ikan, harus siap dalam menghadapi berbagai bahaya. Hal ini berdampak pada pendapatan nelayan. Keadaan sumberdaya perairan yang sudah overfishing, rusaknya ekosistem pesisir laut, dan rencana pembangunan yang tidak memadai untuk komunitas nelayan semuanya menambah ketidakpastian.

Oleh karena itu, kemampuan adaptasi nelayan dalam menghadapi situasi-situasi yang “penuh ketidakpastian” menjadi bagian dalam strategi hidupnya khususnya dalam menghadapi situasi yang krisis agar dapat *survive* bertahan hidup bahkan dapat meningkatkan taraf kehidupannya.

Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konteks kerentanan, serta kemampuan resiliensi dan strategi nafkah yang dilakukan oleh nelayan *torani*.

Metodologi

Kajian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dengan rentang waktu antara tahun 2020-2021. Disain penelitian mengembangkan paradigma *pospositivisme* dengan pendekatan kualitatif untuk mengulas unit kasus nelayan *torani* (telur ikan terbang). Jenis data yang digunakan dalam adalah data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk tanggapan serta persepsi dari komunitas nelayan *torani* di Kabupaten Takalar. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara dengan sejumlah informan. Partisipan atau informan adalah individu, kelompok, lembaga, baik lembaga swasta maupun pemerintah atau orang – orang yang

memiliki kepentingan untuk dengan usaha telur ikan *torani* di Kabupaten Takalar. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, catatan harian, dokumentasi, audio visual. Analisis data penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan kegiatan (Miles dan Huberman, 1992; Gunawan 2015) yaitu: 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Paparan data (*data display*), dan 3). Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).

Profil Wilayah Penelitian

Kabupaten Takalar secara geografi terletak pada koordinat $5^{\circ} 30' - 5^{\circ} 38'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 22' - 119^{\circ} 39'$ Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Takalar adalah $566,51 \text{ km}^2$. Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan sederhana maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional, nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

Kabupaten Takalar salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan lima dari sembilan kecamatan di Kabupaten Takalar memiliki wilayah pesisir dan panjang garis pantai +- 108 km. Wilayah kecamatan tersebut adalah kecamatan Mangarabombang, Mappakasunggu, Galesong Selatan, Galesong dan Galesong Utara. Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Takalar (2019) mencatat bahwa umlah armada penangkapan ukuran 1-30 GT sebanyak 1.162 unit, kawasan area perikanan budidaya laut seluas 3.046 ha, kawasan area perikanan budidaya tambak seluas 3.978 ha.

Pertumbuhan subsektor Perikanan Budidaya maupun Tangkap diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja dan peluang usaha, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan peningkatan perekonomian daerah. Subsektor perikanan. Berdasarkan Data BPS (2020), PDRB Kabupaten Takalar tahun 2019 untuk Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 49,55% atau Rp 3.121.400.000.000,- dari total PDRB Kabupaten Takalar sebesar Rp. 6.616.250.000.000,- Pada subsektor Perikanan, produksi budidaya dan perikanan tangkap pada tahun 2019

semester satu sekitar 68.185 ton (budidaya); 396.705 ton (perikanan tangkap) (BPS, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Kerentanan

Kerentanan dalam kajian ini dilihat sebagai faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (termasuk, nelayan *torani*) yang merupakan dampak langsung dari perubahan iklim dan pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Twigg (2007) bahwa konteks kerentanan adalah kumpulan dari tekanan eksternal yang merupakan faktor kunci dari penyebab kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh keterangan ilmiah mengenai konteks kerentanan yang dialami nelayan *torani*, yang teruraikan sebagai berikut :

Perubahan Iklim. Perubahan iklim adalah pergeseran jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu tertentu (*The National Oceanic and Atmospheric Administration/NOAA, 2007*). Perubahan iklim merupakan akibat dari pemanasan global yaitu suatu proses bertambah tingginya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktifitas manusia. Perubahan iklim memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang mendasarkan aktifitasnya untuk memanfaatkan sumberdaya alam baik sektor pertanian maupun pada sektor perikanan. Khususnya bagi nelayan, perubahan iklim ini sangat berpengaruh pada penurunan hasil tangkapan (Chandra et al., 2012, Purwanto., 2012, Putten et al., 2014, Perdana, Susilowati, 2015). Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan kerentanan dan mekanisme adaptasi bagi sistem nafkah nelayan (Darma et al., 2014; Robin, 2019).

Dalam aspek ini, kerentanan dilihat sebagai tingkatan dari suatu sistem terhadap kemudahan sistem tersebut terkena dampak atau ketidak mampuan mengatasi dampak dari perubahan iklim termasuk iklim yang berubah-ubah dan ekstrim. Di sini kerentanan merupakan fungsi dari karakter, magnitude, laju dari variasi iklim karena terekspose,

sensitivitas dan kapasitas adaptasinya (McCarthy *et al.*, 2001). Beberapa indikator perubahan iklim suhu permukaan laut, curah hujan serta kejadian iklim dan cuaca ekstrim.

Perubahan iklim yang mempengaruhi kegiatan produksi nelayan *torani* (telur ikan terbang) adalah curah hujan, kecepatan dan tinggi gelombang. Kegiatan produksi di nelayan *torani* baik di selat Makassar, Laut Flores maupun perairan di Kabupaten Fakfak berlangsung pada saat waktu pemijahan atau musim bertelur ikan terbang yaitu antara bulan Mei sampai Oktober sepanjang tahun. Namun cuaca ekstrim menyebabkan terjadinya perubahan jumlah bulan melaut. Kegiatan produksi yang seharusnya berlangsung selama 6 bulan, akan tetapi pada tahun 2020 ini kegiatan hanya berlangsung selama 3-4 bulan. Salah seorang nahkoda kapal penangkapan ikan mengungkapkan bahwa pada tahun ini (2020), mereka terlambat melaut disebabkan badai dan gelombang besar pada wilayah *fishing ground* di perairan Kabupaten Fakfak.

Perubahan iklim memberikan dampak negatif bagi aktifitas nelayan *torani*, berkurangnya jumlah bulan bagi nelayan telur ikan terbang untuk melaut. Berkurangnya waktu melaut bagi nelayan akan mengarah pada peningkatan resiko ekonomi dan dampak buruk pada mata pencaharian. Berkurangnya waktu melaut berarti meningkatkan pengangguran dan mengancam status sosial ekonomi mereka. Operasi penangkapan telur ikan terbang sangat bergantung pada kondisi iklim laut. Stressor ekologi menyebabkan mata pencaharian nelayan skala kecil menjadi sangat rentan (Senapati dan Gupta, 2017).

Sebagian besar rumah tangga nelayan skala kecil hanya memiliki perahu kecil, sehingga akan sangat berbahaya bagi mereka untuk melakukan penangkapan ikan dalam cuaca buruk, air pasang, dan angin kencang. Oleh karena itu, banyak dari mereka memilih untuk berhenti berlayar hingga menunggu cuaca kondusif.

Pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Pandemi menyebabkan terjadinya kerentanan pada sistem nafkah dan mekanisme resiliensi oleh masyarakat terdampak. Kerentanan sebagai faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan dampak langsung dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini. Kerentanan dianggap sebagai dampak negatif yang ditimbulkan

oleh pandemi Covid-19 terhadap sistem nafkah bagi masyarakat. Beberapa konteks kerentanan tersebut adalah :

- *Larangan memasuki area penangkapan*

Keberhasilan operasi penangkapan juga sangat dipengaruhi oleh faktor alam atau musim. Ikan terbang hanya berproduksi pada musim-musim tertentu yaitu antara bulan April-Oktober setiap tahun. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini memberikan dampak yang sangat besar bagi aktifitas nelayan termasuk nelayan telur ikan terbang Kabupaten Takalar. Adanya pembatasan sosial berskala besar pada beberapa daerah di Indonesia, membuat nelayan untuk sementara waktu tidak dapat melaut, khususnya pada wilayah penangkapan/wilayah penangkapan ikan-ikan terbang di sekitar perairan Kabupaten Fakfak. Hal tersebut diperkuat oleh adanya surat Bupati Fakfak tertanggal 27 Mei 2020 dengan nomor 523/945/BUP/2020 yang ditujukan ke Bupati Takalar tentang Larangan Pencarian dan Penangkapan Telur Ikan terbang di Kabupaten Fakfak. Beberapa kerentanan yang di timbulkan oleh pandemi covid-19 bagi nelayan ikan terbang adalah terbatasnya akses untuk melaut, karena adanya larangan dari pemerintah setempat untuk melakukan operasi di wilayah *fising ground* utama (perairan Fakfak). Pelanggaran terhadap kegiatan aturan tersebut membuat nelayan terancam untuk berurusan dengan kasus hukum. Walaupun terpaksa tetap melaut, mereka hanya bisa berada di wilayah sekitar perairan Makassar, yang bukan merupakan *fising ground* utama. Dalam realitasnya, terjadi persaingan yang ketat antara nelayan sehingga hasil tangkapan masing-masing nelayan berkurang drastis bila dibandingkan tahun sebelumnya ketika belum pandemi. Untuk menghindari berurusan dengan pihak berwajib, maka nelayan ikan terbang yang melakukan operasi penangkapan telur ikan terbang di perairan Fakfak, selama musim penangkapan berada terus di laut, tidak dapat merapat ke pulau sekitar. Hal ini menjadi kerentanan tersendiri yang mengganggu aktifitas operasi penangkapannya bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya.

- *Tidak adanya biaya operasional untuk penyediaan alat tangkap*

Kerentanan pada nelayan telur ikan terbang dapat dilihat pada tingkat modal yang dimiliki. Kepemilikan dan akses terhadap aset atau modal sangat menentukan aktifitas melaut. Pada aspek modal finansial, usaha telur ikan terbang, merupakan usaha yang

membutuhkan modal finansial atau biaya produksi yang besar. Para aktor nelayan yang melakukan operasi penangkapan, umumnya tidak memiliki tabungan untuk dijadikan biaya operasional, sehingga ketergantungan pada *papalele*/pedagang pengumpul sangat tinggi. Salah satu nelayan (NS umur 50 tahun) mengungkapkan bahwa, biaya awal yang dibutuhkan pertama berangkat kalau ke Fakfak sekitar 70 juta untuk satu kapal, sedangkan biaya total selama satu musim penangkapan sekitar 150-200 juta. Biaya operasional yang besar terkadang berat bagi nelayan, sehingga mereka ke *papalele*/pedagang pengumpul untuk meminjam biaya produksi. Usaha produksi telur ikan terbang adalah usaha yang padat modal. Hal ini menciptakan ketergantungan pada semua level aktor yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Aktor nelayan tergantung pada *papalele*/pedagang pengumpul untuk mendapatkan biaya melaut, demikian pula para *papalele* membutuhkan pedagang besar atau eksportir dalam mengakses sumber pembiayaan.

- *Pembatasan transportasi*

Kebijakan pembatasan transportasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut memberikan dampak pada aktifitas nelayan telur ikan terbang, dimana mereka kesulitan dalam memperoleh bahan bakar untuk melaut. Selain itu pembatasan sosial berskala besar juga aktivitas nelayan menjadi terganggu. Bahkan mereka tidak dapat mengurus perizinan untuk melaut pada instansi terkait, karena adanya kebijakan '*work from home*' atau bekerja dari rumah. Pandemi covid-19 yang melanda dunia juga mengakibatkan penutupan sementara ekspor komoditas perikanan ke beberapa negara tujuan seperti Amerika dan Tiongkok (Widiastuti, 2020). Hal ini menjadi salah satu faktor adanya eksportir mengalihkan sumber daya untuk usaha pada bidang lain atau non-perikanan. Kondisi ini juga berpengaruh pada *papalele*/pedagang pengumpul karena terbatas dalam memberikan sumber pendanaan kegiatan produksi. Pada akhirnya kondisi yang telah dipaparkan, menyebabkan nelayan ikan terbang dan seluruh aktor yang terkait usaha telur ikan terbang berhadapan dengan kondisi yang dapat dikatakan sebagai kerentanan atau krisis yang mereka hadapi.

Strategi dan Resiliensi Nafkah Nelayan Torani

Resiliensi adalah suatu konsep yang dapat membantu untuk memahami faktor-faktor yang memungkinkan masyarakat untuk melindungi mata pencahariannya dari konsekuensi buruk terhadap perubahan yang terjadi. Resiliensi strategi nafkah dilihat dari kemampuan masyarakat untuk melindungi dan mempertahankan mata pencahariannya (Sopamena, 2019). Konsep pengelolaan untuk resiliensi sosio-ekologis berkaitan dengan pemeliharaan sistem yang memberi sifat resiliensi tanpa mengorbankan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan mengatasi perubahan masa depan (Holling & Meppe, 1996).

Beberapa penelitian tentang resiliensi memberikan gambaran bagaimana suatu komunitas atau rumahtangga dalam merespon kerentanan nafkah yang dihadapi melalui pemanfaatan aset yang mereka miliki. Brigita dan Sihaloho (2018) melakukan analisis tentang strategi, kerentanan dan resiliensi nafkah rumahtangga petani di wilayah rawan banjir menjelaskan bahwa bencana banjir memberikan dampak karena hasil panen menurun bahkan gagal. Strategi nafkah yang dilakukan akan berpengaruh terhadap kerentanan dan ketahanan (resiliensi) rumahtangga petani dalam menghadapi situasi bencana banjir. Struktur dan strategi nafkah rumah tangga petani yang tinggal di kawasan yang terpapar banjir dapat saja berbeda dengan wilayah lain yang tidak mengalami situasi krisis atau bencana banjir. Sementara Subair dkk (2014) mengungkapkan bahwa resiliensi komunitas dalam merespon perubahan iklim melalui strategi nafkah menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Asilulu pulau Ambon mengoptimalkan penggunaan modal (modal alam, modal fisik, modal manusia, modal keuangan dan modal sosial) dan aktifitas (ditengahi oleh hubungan dan institusi) dalam menentukan sistem nafkah yang diperlukan untuk hidup.

Resiliensi juga sering di tempatkan sebagai lawan dari kerentanan (Bahadur dkk, 2010). Kerentanan dianggap sebagai penurunan resiliensi. Resiliensi juga bukan berarti bahwa masyarakat kebal (Marshal et al, 2007). Masyarakat dapat resilien dan rentan pada saat yang sama. Resiliensi sangat di tentukan oleh kepemilikan aset/modal dan akses terhadap aset-aset rumah tangga dan kemampuannya untuk pengolaannya dengan baik dalam merespon konteks kerentanan yang terjadi. Menurut Ellis (2000) kelima modal

tersebut adalah : (a) Modal sumberdaya alam (*natural capital*), yaitu modal yang diperoleh dari alam atau lingkungan baik berupa sumberdaya alam yang dapat diperbaharui ataupun yang tidak dapat diperbaharui (air, tanah, kayu atau sumberdaya mineral seperti minyak, emas dll), (b) modal fisik (*physical capital*) yaitu modal yang dapat diciptakan oleh manusia yang berbentuk infrastruktur (irigasi, jalan dan sebagainya), (c) Modal manusia (*human capital*) yaitu modal yang dimiliki atau ada dalam diri manusia (tenaga kerja yang tersedia dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan dan kesehatan), (d) modal finansial (*financial capital*) yaitu modal berupa uang yang dapat digunakan untuk modal pencarian nafkah (uang tunai, tabungan, akses dan pinjaman), (e) Modal sosial (*social capital*) yaitu modal berupa kepercayaan (*trust*), jaringan kerja (*networking*), organisasi dan segala bentuk hubungan untuk bekerjasama serta memberikan bantuan untuk memperluas akses terhadap kegiatan ekonomi.

Rumah tangga nelayan torani, dalam menghadapi kerentanan akibat pandemi covid-19, memanfaatkan aset/modal yang dimiliki dalam rangka keluar dari krisis dan menghadapi dampak buruk dari situasi tersebut. Dari hasil pengamatan dan rangkaian wawancara dengan informan dalam penelitian ini, teridentifikasi cara meningkatkan resiliensi dan mereduksi kerentanan terhadap tekanan pada sistem nafkah khususnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Strategi-strategi yang dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi tersebut, teruraikan sebagai berikut :

Modal Manusia. Dalam operasi penangkapan telur ikan terbang umumnya memberdayakan dari tenaga kerja dari keluarga inti (anak, kemandikan dan keluarga dekat). Hal ini dimaksudkan, selain untuk mengurangi konflik juga sebagai proses kaderisasi dan transformasi pengetahuan dan keterampilan kepada nelayan-nelayan baru. Pengetahuan-pengetahuan tersebut berupa pengetahuan tentang cuaca dan iklim, pola reproduksi ikan *torani* serta memperbaharui pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang mendukung sistem nafkah berkelanjutan, dengan menerima inovasi dan perkembangan teknologi. Rumah tangga nelayan *torani* juga melakukan aktifitas lain berupa pekerjaan sampingan, khususnya saat musim penangkapan selesai baik pada sektor perikanan maupun non perikanan. Sebagian dari nelayan memancing ikan sekedar untuk konsumsi

rumah tangga atau kebutuhan subsistennya saja. Lapangan pekerjaan non perikanan berupa buruh bangunan, ojek, kios dan berdagang dipasar.

Modal Alam. Nelayan menggunakan pengetahuan, pengalaman dan kemampuannya tentang keadaan laut untuk menentukan *fishing ground* dan musim penangkapan yang tepat serta akses ke sumber daya. Terjadinya eksploitasi komoditi tertentu pada *fishing ground* menyebabkan penurunan produksi pada area tersebut sehingga harus mencari *fishing ground* baru. Hal ini sejalan dengan penelitian Ali, Majika dan Salman (2017) menyatakan bahwa eksploitasi perikanan yang berlebihan serta pencemaran lingkungan dan sedimentasi telah menyebabkan penurunan produksi ikan dalam 20 tahun terakhir di danau Tempe, Sulawesi Selatan-Indonesia. Pada saat pandemi Covid-19 ini, nelayan torani tetap dapat melakukan operasi penangkapan walaupun bukan pada *fishing ground* utama karena adanya larangan oleh pemerintah setempat. Nelayan memiliki pengalaman tentang keadaan sumberdaya untuk mengantisipasi tingkat resiko yang mungkin timbul. Dalam menghadapi *fishing ground* yang open akses mereka mereka memaksimalkan trip penangkapan dan teknologi yang digunakan.

Modal Fisik. Infrastruktur, permodalan dan teknologi merupakan tiga pilar yang dapat meningkatkan daya saing pertanian (Arsal et al 2020). Kepemilikan sarana produksi dan penguasaan teknologi pada usaha pertanian maupun operasi penangkapan telur ikan torani menjadi modal untuk keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Tingkat teknologi penangkapan yang digunakan termasuk alat yang sederhana, yaitu *bale-bale* yang terbuat dari bambu dan daun kelapa. Oleh karena itu nelayan menggunakan pengalamannya tentang kebiasaan dan sasaran penangkapan yang sesuai dengan trip. Sedangkan armada penangkapan umumnya disiapkan oleh pedagang pengumpul ataupun eksportir sehingga keluarga nelayan dapat tetap melaut walaupun dengan status sebagai pekerja dengan sistem bagi hasil.

Modal Finansial. Keterbatasan modal kerja atau modal awal dalam berproduksi nelayan dapat diatasi dengan mendapatkan sumber modal dari pedagang pengumpul, perbankan maupun eksportir. Pedagang pengumpul sebagai penyedia modal bagi nelayan umumnya bersifat kekeluargaan dan kepedulian sosial. Penentuan harga oleh pengumpul, cenderung lebih terbuka karena akses pasar dapat terjangkau dengan kemajuan teknologi

informasi. Operasi penangkapan telur ikan *torani* menjadi fokus kegiatan utama pada musimnya, karena diyakini sebagai sumber pendapatan dan nilai ekonomis tinggi. Selain itu terdapat mekanisme dalam masyarakat dimana para *papalele* tetap bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan keluarga nelayan pada saat musim penangkapan (Halik, et al, 2020). Kebutuhan mendasar, seperti biaya sekolah atau kesehatan yang dibutuhkan oleh keluarga nelayan. Para nelayan dapat menyampaikan kebutuhan dananya untuk keluarga mereka, dimana sejumlah uang tersebut dimasukkan sebagai tambahan modal operasional atau sebagai utang nelayan yang akan dibayar pada saat menjual hasil tangkapan pada *papalele*.

Modal Sosial. Adanya hubungan pemasaran yang tercipta antara nelayan dan pedagang pengumpul menjadi modal sosial yang dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dalam mengantisipasi kerentanan akibat Covid-19 ini. Meskipun ada larangan untuk melakukan penangkapan telur ikan terbang di wilayah *fishing ground* utama yaitu di perairan sekitar Kabupaten Fakfak, nelayan tetap melaut. Konseskuensinya, mereka selama musim penangkapan tidak bisa naik ke darat. Dalam kondisi ini nelayan dibantu dan difasilitasi oleh pedagang pengumpul dalam hal informasi, suplay BBM dan kebutuhan hidup lainnya serta transportasi hasil tangkapan. Demikian pula dalam menghadapi resiko melaut yang tinggi seperti cuaca dan kondisi alam yang ekstrim, maka mereka membangun jaringan sosial atas dasar hubungan kekeluargaan dan melaut secara berkelompok.

SIMPULAN

Kerentanan merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan dampak langsung dari perubahan iklim dan pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan mata pencaharian nelayan skala kecil khususnya nelayan *torani* menjadi sangat rentan. Nelayan *torani* di kabupaten Takalar senantiasa meningkatkan resiliensinya dan melakukan strategi-strategi nafkah dengan memanfaatkan aset-aset rumah tangga yang dimilikinya yaitu modal manusia, modal alam, modal fisik, modal finansial dan modal sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. S. S., Majika, A., & Salman, D. (2017). Food Consumption and Production in Tempe Lake, South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Asian Rural Studies*, 1(1), 43– 52.
- Arsal, A., Salman, D., Fahmid, I.M., Mahyuddin (2020). Agricultural Competitiveness Based On The Pillars Of Infrastructure, Capital And Technology In South Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*. Volume 7, Issue 07. ISSN 2277-8616.
- Bahadur, A. V., M. Ibrahim & T. Tanner. (2010). *The Resilience Renaissance?:Unpacking of Resilience for Tackling Climate Change and Disasters*. Strengthening Climate Resilience Discussion Paper 1. Brighton: Institute of Development Studies.
- Brigita, S., & Sihaloho, M. (2018). Livelihood Strategy, Vulnerability, and Resilience of Farmer Household in Flooded Area. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(2), 239. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.2.239-254>.
- Chandra, T., Parura, P., Yuniarti, E., Studi, P., Lingkungan, T., Teknik, F., & Tanjungpura, U. (2012). *Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Perikanan di Desa Sungai Kakap Estimasi Tingkat Kesejahteraan Nelayan di Desa Sungai Kakap Berdasarkan Nilai Tukar Nelayan*. 1–10.
- Darma, R., Rahmadanih, Tenriawaru, N. A., & Amandaria, R. (2014). Climate Change Adaptation in the Perspectives of Food, Energy Crisis and Environmental Degradation for Food Sovereignty in Indonesia. *International Journal of Agriculture System*, 2(1), 77–89. <http://pasca.unhas.ac.id/ijas/pdf/8> IJAS Vol. 2 Issue 1 June 2014.pdf.
- Ellis F. (2000). *Rural Livelihood and Diversity in Developing Countries*. London (UK): Oxford University Press.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek*. Bumi Aksara. Jakarta, Edisi ke tiga.
- Halik, H.A., Salman, D., Darma, R., Arief, A.A., Rahmadanih. (2020). Mode of Production and Sustainability of Torani Fishermen Household Livelihoods in Takalar District. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 473 (2020) 012152.
- Holling, C. S. & G. K. Meffe. (1996). *Command and Control and The Pathology of Natural Resource Management*. *Conservation Biology*10 (2): 328–337.
- Kusnadi. 2007. *Jaminan Sosial Masyarakat Nelayan*. LKIS. Yogyakarta.

- Marshall, N. A., D.M.Fenton, P.A.Marshall & S.Sutton. (2007). *How Resource-Dependency Can Influence Social Resilience Within a Primary Resource Industry*. *Rural Sociology* 72: 359-390.
- McCarthy, J. J., O. F. Canziani, N. A. Leary, D. J. Dokken & K. S. White. (2001). *Climate Change: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. Cambridge UK: Cambridge University Press.
- Miles M B and A M Huberman. (1984). *Qualitatif Data Analisis*. 2nd Edition. California: Sage Publication. Inc.
- Nabli, M.K. and Nugent, J.B. (1989) *The New Institutional Economics and Its Applicability to Development*. *World Development*, 17, 1333-1347. [http://dx.doi.org/10.1016/0305-750X\(89\)90076-4](http://dx.doi.org/10.1016/0305-750X(89)90076-4)
- North. Douglass C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (1986). *An Agenda for The Study of Institutions*. *Public Choice* 48: 3-25.
- Perdana, T, A., Susilowati, I. (2015). Dampak perubahan iklim terhadap perikanan tangkap di kota Semarang. *Diponegoro Journal of economics* 4 (2), 1-7.
- Putten, I, V., Metcalf, S., Frusher, S., Marshal, N. and Tull, M. (2014), "Fishing for the impacts of climate change in the marine sector : a case study", *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, Vol. 6 No.4, pp.42-441. <https://doi.org/10.1108/IJCCSM-01-2013-0002>.
- Purwanto. (2012). *Produktivitas Kapal Pukat Cincin Pada Perikanan Lemuru Yang Beroperasi Pada Kondisi Iklim Yang Berubah Di Selat Bali*. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, Vol. 18 No. 3 Hal. 175-186.
- Ruttan, V.W. and Hayami, Y. (1984) *Toward a Theory of Induced Institutional Innovation*. *Journal of Development Studies*, 20, 203-223. <http://dx.doi.org/10.1080/00220388408421914>.
- Senapati, Sibananda and Vijaya Gupta. (2017). "Socio-Economic Vulnerability Due to Climate Change: Deriving Indicators for Fishing Communities in Mumbai." *Marine Policy* 76(November 2014):90-97.
- Subair, A., L.M. Kolopaking, S. Adiwibowo, & MB Pranowo., (2014). Resiliensi Komunitas Dalam Merespon Perubahan Iklim Melalui Strategi Nafkah: Studi Kasus Desa Nelayan Di Pulau Ambon. Maluku. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9 (1) : 77-90.
- Sopamena, J.F. (2019). *Household Livelihood Resilience In Small Island (Case Study In Wetar Island)*.

Twigg, J. (2007). *Characteristics of A Disaster-Resilient Community*. A Guidance Note to The DFID DRR Interagency Coordination Group.

Uphoff Norman, 1986. *Local Institution Development ; An Analytical sourcebook*. West Hartford. Kumarian Press. Washington DC. USA

Williamson, O.E. (1985) *The Economic Institutions of Capitalism*. The Free Press, New York.

Chapter 13

KONFLIK NELAYAN

ANALISIS KONFLIK NELAYAN DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI KECAMATAN WARU UTARA KOTA PALOPO

Muhammad Bibin



Muhammad Bibin, adalah Dosen pada Program Studi Ilmu Perikanan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidrap. Meraih gelar S1 Sosial Ekonomi Perikanan di Universitas Hasanuddin, Makassar (2013), Magister Sains Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (SPL) di Institut Pertanian Bogor (2018).

* Email : muhammad.bibin01@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Prinsip pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 dikenal dengan sistem pengelolaan bersifat *state property*, sehingga sumberdaya perikanan di Indonesia tidak sepenuhnya dapat diakses karena adanya peraturan yang mengatur. Namun permasalahan yang sering muncul ialah peraturan yang dibuat tidak dengan cara partisipatif dan merupakan hasil pertimbangan dari pemerintah pusat tanpa memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat nelayan setempat. Akibatnya suatu kebijakan yang dikeluarkan justru menimbulkan suatu permasalahan baru dikarenakan masing-masing pihak memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan dan prioritas yang ada merupakan sumber pemicu terjadinya konflik (Annisa et al., 2009).

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang merupakan karakteristik yang beragam (Rosana, 2015). Menurut (Muspawi, 2014) konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas dengan menetralkan atau mencederai dan menghancurkan pihak lawan. Konflik merupakan fenomena yang telah ada sejak dulu, bahkan sebelum era otonomi daerah, khususnya konflik nelayan. Konflik nelayan adalah ketidakharmonisan diantara pengguna sumberdaya perikanan dalam hal ini nelayan dikarenakan belum adanya atau

dilanggarkan norma kesepakatan dalam prinsip pemanfaatan sumberdaya perikanan (Kobesi et al., 2019). Keleluasaan mengeksploitasi sumberdaya perikanan merupakan konsekuensi ciri kepemilikan yang bersifat *open acces*, maka tidak jarang pemanfaatannya dapat menimbulkan masalah akibat perbedaan kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang dapat mencegah terjadinya konflik. Salah satu daerah di Kota Palopo yang berpotensi terjadinya konflik antar nelayan yaitu di Kecamatan Wara Utara. Kecamatan Wara Utara merupakan daerah pesisir di Kota Palopo yang sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Konflik antar nelayan disebabkan antara lain stok ikan di wilayah perairan Kota Palopo sudah semakin berkurang bahkan para nelayan kesulitan mencari ikan, alat tangkap didominasi oleh alat tangkap tradisional, terdapat persaingan antar nelayan dalam satu kelompok ataupun dengan kelompok lain semakin tinggi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik pengelolaan konflik nelayan khususnya di Kota Palopo.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengidentifikasi bentuk konflik kenelayanan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo; Menganalisis keterlibatan *stakeholders* seperti Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan pengelolaan konflik, serta; Menyusun strategi prioritas penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wara Utara yang merupakan daerah pesisir di Kota Palopo. Secara geografis Kecamatan Wara Utara berada pada 2°59'14.77"S LS dan 120°11'15.96"BT, sedangkan secara administratif Kecamatan Wara Utara terletak disebelah Utara Kecamatan Bara, Sebelah Timur Teluk Bone dan Kecamatan Wara Timur, Sebelah Barat Kecamatan Wara Barat dan Sebelah Selatan Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Barat. Kecamatan Wara Utara terdiri atas 6 (enam) kelurahan, dimana tiga diantaranya merupakan kelurahan pesisir. Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Penggoli Salobulo, dan Sabbamparu. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus digunakan agar hasil penelitian dapat menggambarkan secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat dan karakter yang memiliki kekhasan dari kasus yang akan diteliti (Usman & Setiady, 2008). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini mengkaji secara detail mengenai konflik-konflik/pertikaian yang terjadi pada nelayan.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara menggunakan kuesioner, wawancara mendalam (*depth interview*) dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui survey dan studi literatur dari sumber-sumber data yang terdokumentasi dari beberapa instansi pemerintahan. Metode wawancara menggunakan kuesioner dilakukan terhadap sejumlah nelayan di Kelurahan Peggoli, Salobulo, dan Sabbamparu. Sedangkan metode *depth interview* menggunakan pedoman wawancara dilakukan terhadap *stakeholder* yang terkait dengan permasalahan pengelolaan konflik nelayan ini. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumberdata dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Adapun jumlah responden yang sengaja dipilih dalam penelitian ini adalah 35 orang nelayan dan 6 orang *stakeholders* yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Tokoh Nelayan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, analisis *stakeholder*, dan analisis hirarki proses (AHP). Analisis *stakeholder* diperlukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi *stakeholder* berdasarkan kepentingan dalam kaitannya dengan isu yang ada. Tahapan analisis *stakeholder* menurut Ramirez dalam (Widodo et al., 2018) yaitu: 1) mengidentifikasi *stakeholder*; 2) membuat tabel *stakeholder* yang berisi informasi mengenai daftar *stakeholder*, kepentingan *stakeholder* dan tingkat pengaruh *stakeholder*; dan 3) membuat pemetaan *actor grid* untuk mengetahui tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder* serta posisi *stakeholder* apakah masuk kedalam kategori *subjek*, *player*, *standart* dan *actor*. Analisis AHP merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan prioritas dalam perencanaan yang tepat dengan menstruktur suatu persoalan sebagai suatu hirarki, dimana pihak-pihak

yang berkepentingan itu ditingkat yang paling tinggi karena kekuatan mereka untuk mempengaruhi hasil akhir merupakan faktor dominan.

Profil Wilayah Penelitian

Wara Utara merupakan salah satu Kecamatan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Wara Utara memiliki luas sebesar 10.58 Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 berkisar 23.621 jiwa. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Palopo, Kecamatan Wara Utara merupakan kawasan strategis dengan pengembangan kelautan dan perikanan serta pariwisata. Kecamatan Wara Utara terdiri atas 6 (enam) kelurahan, dimana tiga diantaranya merupakan kelurahan pesisir yaitu Kelurahan Penggoli, Salobulo, dan Sabbamparu. Kelurahan penggoli memiliki luas kawasan sebesar 2.11 Km² dengan jumlah penduduk sebesar 3.089 jiwa, Kelurahan Salobulo memiliki luas Kawasan sebesar 1.69 Km² dengan jumlah penduduk sebesar 7.295 jiwa, dan Kelurahan Sabbamparu memiliki luas Kawasan sebesar 1.90 Km² dengan jumlah penduduk sebesar 4.369 jiwa.

Kelurahan penggoli, Salobulo dan Sabbamparu memiliki potensi sumberdaya perikanan sangat besar. Produksi perikanan laut pada tahun 2019 sebesar 3627.2 ton, dan perikanan darat sebesar 583.64 ton. Sementara produksi perikanan laut pada tahun 2020 sebesar 3548.80 ton dan perikanan darat sebesar 8418.98 ton. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah produksi perikanan laut di Kecamatan Wara Utara mengalami penurunan pada tahun 2020 hal ini disebabkan rusaknya sebagian terumbu karang di perairan Kota Palopo. Berdasarkan penelitian (Bibin, 2018) kerusakan terumbu karang di perairan Kota Palopo disebabkan adanya aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sehingga mengakibatkan kerangka karang patah bahkan hancur. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kecamatan Wara Utara pada tahun 2020 yaitu sebanyak sebesar 249 jiwa (BPS Wara Utara, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Sebelum membahas mengenai konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, maka terlebih dahulu akan dikemukakan karakteristik responden dalam penelitian ini. Adapun karakteristik responden yang disajikan meliputi; karakteristik responden berdasarkan lama bekerjanya sebagai nelayan, tingkat pendidikan, umur serta berdasarkan tempat tinggal nelayan. Nelayan yang dijadikan responden merupakan nelayan tradisional di Kelurahan Penggoli, Salobulo, dan Sabbamparu.

Identifikasi Bentuk Konflik Nelayan di Kecamatan Wara Utara

Penyebab munculnya konflik adalah perbedaan cara pandang terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan oleh nelayan tradisional Wara Utara yang menggunakan alat tangkap sero dan pukot pantai dengan nelayan yang menggunakan kompresor untuk menyelam mencari ikan yang dilengkapi dengan alat *speargun*. Konflik pemanfaatan sumberdaya alam timbul karena beberapa pengguna berkompetisi menggunakan sumber daya yang sama dalam ruang laut yang sama dan menerapkan kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya tidak sesuai antara satu dengan yang lain (Kinseng, 2019).

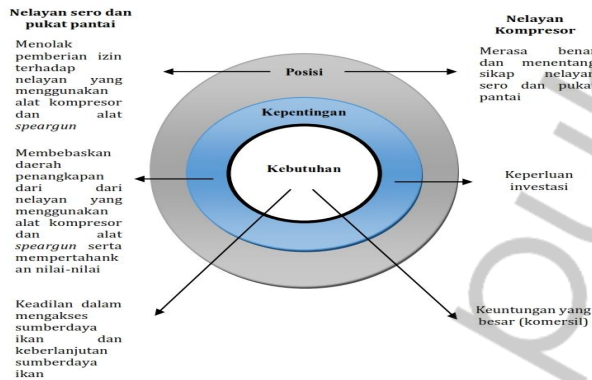
Wujud konflik antar nelayan juga disebabkan oleh adanya perbedaan nilai, kepentingan dan konflik dikalangan mereka (nelayan) yang berada pada kondisi yang sama. Misalnya konflik antara alat tangkap sero, pukot pantai dan alat kompresor. Sero dan pukot pantai menggunakan teknologi yang sederhana serta kebutuhan modal yang rendah dan ramah lingkungan. Nelayan yang mengoperasikan sero dan pukot pantai lebih dominan, sedangkan kompresor merupakan alat bantu nelayan agar dapat menyelam lebih lama lagi didalam air dengan menggunakan alat *speargun* untuk menangkap ikan dalam jumlah yang lebih banyak dan penggunaanya tidak ramah lingkungan. Hal inilah yang diduga sebagai awal mulanya terjadinya konflik nelayan di Kecamatan Wara Utara.

Faktor sosial lainnya yang ikut mendorong konflik antara nelayan sero, pukot pantai dan kompresor yaitu adanya persaingan antara kelompok nelayan untuk memperoleh objek yang sama di wilayah tangkapan yang sama. Perbedaan bentuk dan sifat

alat tangkap membuat ketiga alat tangkap ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Dengan masih adanya sebagian nelayan yang menggunakan alat kompresor dalam menangkap ikan, dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang di perairan Kota Palopo dan dapat mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan seperti sero dan pukot pantai. Jika terumbu karang rusak maka peluang nelayan untuk mendapatkan spesies ikan target juga kecil. Kecilnya peluang untuk mendapatkan ikan akan berdampak kepada pendapatan mereka. Kondisi tersebut tentu saja mendesak perekonomian rumah tangga sehingga memicu amarah nelayan sero dan pukot pantai terhadap nelayan yang menggunakan alat kompresor yang dilengkapi dengan.

Konsepsi yang berlanjut pada eksploitasi sumberdaya perikanan oleh nelayan kompresor telah melanggar tatanan sosial yang berlaku di wilayah penangkapan nelayan sero dan pukot pantai. Nelayan sero dan pukot pantai menganggap penggunaan alat kompresor untuk menangkap ikan berpotensi mengancam kelestarian sumberdaya perikanan. Anggapan negatif ini terbukti ketika nelayan menggunakan alat bantu kompresor untuk menyelam mencari ikan, maka nelayan yang menggunakan alat tangkap sero dan pukot pantai tidak mendapatkan ikan selama beberapa hari.

Perbedaan pandangan dan prinsip terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan antara nelayan sero dan pukot pantai dengan nelayan kompresor, keduanya mengartikulasikan dan memperlakukan sumberdaya perikanan yang berbeda. Nelayan sero dan pukot pantai menerapkan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan atau yang tidak mengancam kelestarian sumberdaya perikanan sedangkan nelayan kompresor mengaktualisasikan kepentingannya berdasarkan aspek ekonomi yang bersifat eksploitatif. Menurut (Mubarok et al., 2016) penggunaan kompresor sebagai alat bantu penyelaman oleh nelayan yang dilengkapi *speargun* dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang dan mengancam kelestarian sumberdaya perikanan. Hal ini dikarenakan banyaknya ikan yang tertangkap dalam waktu yang sangat pendek, mengakibatkan menurunnya jumlah ikan dan kecil kesempatan bagi ikan untuk bereproduksi. Berikut tingkat kepentingan, posisi dan kebutuhan nelayan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Konflik Nelayan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Berdasarkan Anologi "Bawang Bombai".

Identifikasi Stakeholder

Keberhasilan dalam penanganan konflik masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh bentuk respon yang timbul dari para *stakeholder*, sehingga dapat diketahui apa dan bagaimana suatu penanganan suatu konflik dapat dilaksanakan, siapa saja yang menjadi pelakunya, serta pada situasi kondisi yang bagaimana hal tersebut dapat dilakukan (Rudyanto, 2004). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang telah melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan dipengaruhi oleh peran *stakeholders*. Hasil identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan di Kecamatan Wara Utara adalah sebagai berikut: 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo memiliki peran dalam mensosialisasikan hukum dan undang-undang tentang perikanan dan sebagai mediator konflik; 2) Tokoh Nelayan, Tokoh nelayan berperan dalam menyampaikan aspirasi nelayan dan sebagai wakil nelayan; 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo, BAPPEDA Kota Palopo berperan dalam menyusun rencana strategis (RENSTRA) pemanfaatan sumberdaya ikan berkelanjutan di Kota Palopo; 4) Polisi

Perairan, Polisi perairan berperan dalam menjaga wilayah perairan Kota Palopo; 5) Camat Wara Utara, peran Camat Wara Utara adalah sebagai mediator konflik dan menyampaikan aspirasi nelayan; 6) Lurah, peran Lurah adalah sebagai mediator konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan dan sebagai saksi ialah konflik.

Pemetaan Stakeholders

Stakeholders yang terlibat dalam penanganan konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan di perairan Kota Palopo memiliki tingkat kepentingan (*interest*) serta pengaruh (*power*) yang beragam. Kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) dari *stakeholders* dalam penanganan konflik masyarakat nelayan yang beragam perlu di petakan dengan jelas. (Almutairi et al., 2019) pemetaan *stakeholders* akan membantu pemerintah bagaimana melibatkan *stakeholders* tersebut dalam mencapai tujuan.

Hasil wawancara mendalam (*depth interview*) yang melibatkan 6 *stakeholders* yang terdiri dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo, Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Palopo, Polisi Perairan Kota Palopo, Tokoh Nelayan, Camat Wara Utara dan Lurah Penggoli, diketahui berdasarkan pengaruh (*power*) dan kepentingannya (*interest*) maka *stakeholders* dalam penyelesaian konflik nelayan ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu *key players* dan *actors*. Pemetaan *stakeholders* dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Matriks Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders

Stakeholders Kelompok Key players

Stakeholders dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang tinggi di klasifikasikan dengan *Key Players* (Kuadran II). *Stakeholders* ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh dalam merencanakan dan mengevaluasi suatu kebijakan (Maxwell & Filgueira, 2020); (Lu et al., 2017); (Reed et al., 2009). Sesuai dengan pernyataan (Li et al., 2017) *stakeholders* kelompok *key players* ini merupakan kelompok *stakeholders* yang paling berpengaruh dan paling kritis. *Stakeholders* yang termasuk kelompok *key players* adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo dan Tokoh Nelayan.

Stakeholders Kelompok Actors

Stakeholders kelompok *actors* merupakan klasifikasi *stakeholders* yang memiliki kepentingan (*interest*) rendah namun mempunyai pengaruh (*power*) yang tinggi. *Stakeholders* yang termasuk ke dalam kelompok *actors* ialah Camat Wara Utara, polisi Air dan Lurah Penggoli. *Stakeholders* ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dengan baik (Wang et al., 2019); (Reed et al., 2009). Untuk mengoptimalkan peran *stakeholders* kelompok *actors* dalam penyelesaian konflik masyarakat nelayan maka perlu adanya koordinasi dengan kelompok *stakeholders key players* dalam menentukan kebijakan (Năstase et al., 2010).

Strategi Prioritas Penyelesaian Konflik Nelayan

Perencanaan program pemilihan strategi prioritas dalam penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dilakukan melalui analisis AHP dengan mensintesa kepentingan relatif antar elemen dengan hirarki AHP berupa kriteria serta alternatif kebijakan.

Kriteria prioritas dalam penyelesaian Konflik Nelayan

Berbagai kriteria perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Oleh karena itu strategi penyelesaian konflik masyarakat nelayan harus mempertimbangkan berbagai kriteria penting seperti sosial, ekonomi, kelembagaan dan teknologi. Berdasarkan analisis hirarki proses (AHP) dari 4 kriteria terkait penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang memiliki bobot paling besar adalah kriteria sosial (0.5439), ekonomi (0.2706),

kelembagaan (0.1219) dan teknologi (0.0636). Secara lengkap urutan kriteria prioritas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Bobot Kriteria Prioritas dalam Penyelesaian Konflik Nelayan

Berdasarkan perbandingan berpasangan kriteria sosial menjadi prioritas pertama. Kriteria sosial merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi dalam penyelesaian konflik pada masyarakat nelayan. Kriteria sosial mencakup nilai-nilai dan norma. Nilai senantiasa memiliki kandungan konsekuensi. Masyarakat nelayan yang memiliki pemahaman yang tinggi misalnya tentang nilai-nilai kebudayaan dalam suatu kawasan tentu akan menilai dengan baik sehingga masyarakat nelayan dapat berkembang dengan cepat. Sebaliknya masyarakat nelayan yang memiliki pemahaman yang kurang terhadap nilai-nilai kebudayaan yang ada pada suatu kawasan maka akan memiliki pandangan biasa, bahkan berpandangan buruk. Nilai sosial budaya memiliki potensi sebagai modal sosial karena sifatnya dapat memotivasi, menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab dan menyelesaikan masalah/konflik secara bersama (Hamid, 2018). Sedangkan norma biasanya dibangun, tumbuh dan dipertahankan untuk memperkuat masyarakat nelayan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma dalam bermasyarakat dapat menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat (Handoyo & Dkk, 2015).

Kriteria ekonomi menjadi prioritas kedua dalam upaya penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Kriteria ekonomi meliputi *trust*, kesejahteraan nelayan, ketersediaan modal. *Trust* merupakan salah satu norma informal dalam pemenuhan modal sosial menjadi penting agar masing masing individu atau komunitas nelayan mampu berkembang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. *Trust* sebagai landasan modal sosial memiliki peran penting guna mengembangkan kekuatan suatu komunitas (Wibowo et al., 2020) tingkat kesejahteraan nelayan biasanya dipengaruhi

oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi biasanya berkaitan dengan kemampuan nelayan dalam memperoleh pendapatan. Nelayan yang memiliki pendapatan rendah dikatakan tidak sejahtera (miskin) (Khumairah et al., 2013).

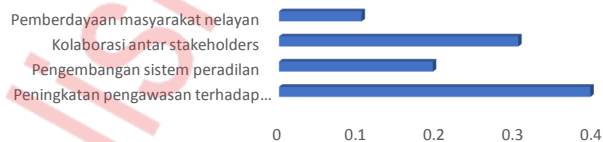
Kriteria kelembagaan menjadi prioritas ketiga dalam upaya penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Kriteria kelembagaan terdiri atas perbaikan regulasi, pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi *stakeholders*. Dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan diperlukan regulasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan yang tidak membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta tidak menimbulkan konflik sosial pada masyarakat nelayan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (5) tentang penangkapan ikan dilakukan dengan cara ramah lingkungan dengan ketentuan: a) tidak membahayakan pengguna dan orang sekitar; b) tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia; c) tidak membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan; dan d) tidak menimbulkan konflik sosial. Kebijakan penyelesaian konflik masyarakat nelayan merupakan salah satu kebijakan yang membutuhkan kajian *collaborative governance*. Menurut (Arrozaaq, 2016) kolaborasi *stakeholders* merupakan proses dari struktur jejaring multiorganisasi lintas sektoral yang membuat kesepakatan Bersama, keputusan Bersama, pencapaian konsesus melalui interaksi informal dan formal, pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan masyarakat nelayan dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif (Hamid, 2018). Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat nelayan adalah untuk memandirikan masyarakat nelayan agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Kriteria teknologi menjadi prioritas keempat dalam upaya penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Kriteria teknologi meliputi tingkat teknologi dan pola tangkapan. Struktur usaha perikanan tangkap sejauh ini masih didominasi oleh usaha skala kecil. Sebagian besar nelayan di Kecamatan Wara Utara masih

hidup dibawah garis kemiskinan dan merupakan nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan kapasitas penangkapan baik penguasaan teknologi, metode penangkapan maupun permodalan. Masalah kemiskinan juga disebabkan adanya ketimpangan pemanfaatan sumberdaya ikan. Menurut (Zebua et al., 2016) ciri utama masyarakat nelayan adalah kemiskinan yang disebabkan karena ketiadaan akses ke sumber modal, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Prioritas Penyelesaian Konflik Nelayan

Strategi prioritas dalam penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dianalisis dengan menggunakan software *expert choice*. Prioritas strategi terpilih yang pertama adalah peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan dari alat tangkap yang menimbulkan konflik dan sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan (0.396), strategi prioritas kedua ialah peningkatan kolaborasi antara *stakeholders* (0.304), strategi prioritas ketiga ialah penyusunan Peraturan Daerah mengenai pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pengembangan sistem kearifan lokal (0.195) dan strategi prioritas keempat ialah pemberdayaan masyarakat nelayan (0.105). Susunan strategi prioritas dapat dilihat pada (Gambar 4).



Gambar 4. Strategi Prioritas Penyelesaian Konflik Nelayan

Prioritas 1. Peningkatan pengawasan terhadap alat tangkap yang menimbulkan konflik dan sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan

Kota Palopo mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan lautan. Pemanfaatan potensi di wilayah pesisir dan laut tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi daerah, akan tetapi kadang kala mendatangkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti kerusakan lingkungan laut. Dalam aturan hukum yang berlaku bahwa yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan terutama

sumberdaya ikan yaitu Negara yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan sumberdaya kelautan terutama sumberdaya ikan yaitu pengawas perikanan. Organisasi di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjalankan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo untuk wilayah Kota Palopo. Upaya-upaya yang harus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam mengendalikan pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan di Kota Palopo yaitu melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Kota Palopo melalui kegiatan operasional pengawasan laut di wilayah perairan Kota Palopo, melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan Kota Palopo. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo perlu bekerjasama dengan Tokoh Nelayan untuk mengadakan sosialisasi secara rutin kepada kelompok-kelompok nelayan mengenai jenis alat tangkap ramah lingkungan yang tidak mengancam keberlanjutan sumberdaya perikanan.

Prioritas 2. Kolaborasi antar *Stakeholders*

Kolaborasi antar *stakeholders* sangat diperlukan dalam penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Dengan adanya kolaborasi antar *stakeholders* dapat menghasilkan suatu kebijakan dan menghasilkan suatu output seperti yang diharapkan. Nelayan adalah bagian dari *stakeholders* yang seharusnya menjadi perhatian utama untuk diajak berkolaborasi mengenai penyelesaian konflik dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Hal ini dikarenakan nelayan adalah pihak yang paling berperan menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan, oleh karena itu diperlukan kolaborasi yang baik antara nelayan dan pemerintah serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik masyarakat nelayan. Menurut (Kristiyanti, 2016) dengan adanya kolaborasi antar *stakeholders* maka keberlanjutan sumberdaya pesisir dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir.

Prioritas 3. Penyusunan peraturan daerah mengenai pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pengembangan sistem kearifan lokal

Pelaksanaan kegiatan perlindungan sumberdaya perikanan membutuhkan kekuatan hukum agar dapat dilaksanakan secara optimal. Peran pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan ini sangat menentukan keberhasilan keberlanjutan sumberdaya perikanan, tanpa adanya dasar hukum yang jelas maka kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan akan menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam mendukung kegiatan ini misalnya dengan penyusunan peraturan daerah mengenai pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kota Palopo. Keberadaan perundang-undangan menjadi payung hukum dalam pengelolaan, pelestarian dan perlindungan ekosistem wilayah pesisir (Iriani, 2019); (Batista et al., 2019). Selain itu kearifan lokal juga dapat menjadi solusi dalam penyelesaian masalah konflik masyarakat nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam penyelesaian konflik tersebut meliputi organisasi dan kelompok sosial, serta bentuk-bentuk kebudayaan masyarakat yang menjadi nilai kesepakatan dan komitmen antar nelayan.

Dalam penyelesaian konflik, bentuk kearifan lokal yang berupa organisasi atau kelompok sosial ini antara lain terbentuknya kelompok kerukunan nelayan secara informal maupun formal. Pada dasarnya, organisasi atau kelompok sosial ini dimunculkan agar permasalahan lokal yang terjadi antar nelayan dapat diselesaikan bersama. Organisasi atau kelompok sosial ini umumnya muncul karena adanya kesepakatan. Bentuk kearifan lokal berikutnya adalah budaya lokal yang yang diciptakan oleh masyarakat setempat dalam bentuk prosesi, maupun aktivitas yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat. Tradisi *Macerra tasi* (pesta laut) rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat pesisir di Kota Palopo. *Macerra tasi* merupakan kegiatan membuang sesajen ditengah laut diikuti pelepasan ikan mas yang sebelumnya diberi makan secuil mas murni oleh tetua adat setempat. Keterlibatan semua elemen masyarakat pesisir dalam tradisi *macerra tasi* ini secara tidak langsung dapat terjalinnya jaringan sosial antar semua elemen dan mampu menyatukan pemahaman mereka. Esensi dari kearifan lokal seperti ini dipergunakan sebagai modal sosial dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan.

Menurut Sugiarto (2014) masyarakat Indonesia merupakan masyarakat komunal yang memiliki begitu banyak nilai yang dapat dipergunakan sebagai modal sosial.

Prioritas 4. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Pemberdayaan masyarakat nelayan sangat diperlukan. Bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan tangkap yang dilakukan adalah pemberian pelatihan mesin dan navigasi kepada nelayan dengan tujuan meningkatkan keterampilan teknis nelayan. Kemudian pemberian alat tangkap yang ramah lingkungan dan penguatan kelembagaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo sendiri telah menyalurkan bantuan kepada nelayan kecil berupa perahu (Panjang 7m dan Panjang 5 m), mesin 13 PK dan alat tangkap berupa *Gill Net* dan *Fish Finder*. Dengan adanya bantuan ini diharapkan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Kota Palopo semuanya merata dan ramah lingkungan, sehingga konflik antar nelayan tidak terjadi lagi.

Pemberdayaan masyarakat nelayan dapat diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat keberlanjutan (Widjajanti, 2011).

SIMPULAN

Konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan terjadi diantara nelayan kecil/tradisional Kecamatan Wara Utara yang disebabkan adanya perbedaan nilai, kepentingan dan konflik dikalangan mereka yang berada pada posisi yang sama. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan berujung kepada kerusakan ekosistem laut dan terjadinya *over fishing* serta kerawanan sosial antar nelayan akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Berbedanya penggunaan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan, misalnya alat tangkap sero dan pukut pantai yang merupakan alat tangkap yang tergolong ramah lingkungan dan tidak merusak kelestarian sumberdaya perikanan dengan alat kompresor yang digunakan nelayan untuk menyelam mencari ikan yang dilengkapi dengan alat *speargun* yang tidak ramah

lingkungan sehingga dapat mengancam kelestarian sumberdaya perikanan. Sebagai konsekuensinya kedua model alat penangkapan ini yang digunakan oleh nelayan dengan tingkat posisi, kepentingan dan kebutuhan yang berbeda. Hal inilah yang diduga sebagai awal mula munculnya konflik. Berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholders* yang terlibat dalam penyelesaian konflik nelayan dibagi menjadi dua kelompok yaitu; 1) *stakeholders* kelompok *key players* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang tinggi. *Stakeholders* kelompok *key players* terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo dan Tokoh Nelayan; 2) *stakeholders* kelompok *actors* dengan tingkat kepentingan (*interest*) rendah namun mempunyai pengaruh (*power*) yang tinggi. *Stakeholders* kelompok *actors* terdiri dari Camat Wara Utara, Polisi Air dan Lurah.

Strategi prioritas pertama dalam penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan adalah peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan dari alat tangkap yang dapat menimbulkan konflik dan melakukan sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan, prioritas kedua adalah peningkatan kolaborasi antar *stakeholders*, prioritas ketiga adalah penyusunan peraturan daerah mengenai pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pengembangan sistem kearifan lokal dan strategi prioritas keempat adalah pemberdayaan masyarakat nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almutairi, A., Collier, Z. A., Hendrickson, D., Palma-Oliveira, J. M., Polmateer, T. L., & Lambert, J. H. (2019). *Stakeholder mapping and disruption scenarios with application to resilience of a container port. Reliability Engineering and System Safety, 182*, 219–232. <https://doi.org/10.1016/j.ress.2018.10.010>
- Annisa, L., Satria, A., & A Kinseng, R. (2009). Konflik Nelayan Di Jawa Timur : Studi Kasus Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun di Lebak, Banten. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 3*(1), 113–124. <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i1.5870>
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar *Stakeholders* Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3*, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Batista, C. M., Pereira, C. I., & Botero, C. M. (2019). Improving a decree law about coastal

- zone management in a small island developing state: The case of Cuba. *Marine Policy*, 101(March 2018), 93–107. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.12.030>
- Bibin, M. (2018). *Pengembangan Wisata Bahari Secara Berkelanjutan (Studi Kasus Pantai Labombo Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan)*. Institut Pertanian Bogor.
- BPS Wara Utara. (2020). *Kecamatan Wara Utara Dalam Angka Tahun 2020*.
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca*. De La Macca.
- Handoyo, E., & Dkk. (2015). Studi Masyarakat Indonesia. In *Studi Masyarakat Indonesia* (Issue May 2015).
- Iriani. (2019). Social Security of Traditional Fisherman in Penggoli, Palopo City. *Walusuji*, 10(1), 69–83.
- Khumairah, Ismail, & Yulianto, T. (2013). Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Purse Seine Di PPI Bulu Kabupaen Tuban Jawa Timur. *Journal of Fisheries Utilization Management and Technology*, 2, 182–191. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jfrumt>
- Kinseng, R. A. (2019). Konflik kelas nelayan di Indonesia tinjauan kasus Balikpapan. *Springer, May*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14021.47845>
- Kobesi, P., Kinseng, R. A., & Sunito, S. (2019). Kelas dan Potensi Konflik Nelayan di Kota Kupang (Studi Kasus Nelayan Di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(2), 157. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v9i2.7918>
- Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pebdekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 180, 752–760. <http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4264/1270>
- Li, Y., O'Donnell, J., García-Castro, R., & Vega-Sánchez, S. (2017). Identifying stakeholders and key performance indicators for district and building energy performance analysis. *Energy and Buildings*, 155, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.003>
- Lu, C., Liu, H. C., Tao, J., Rong, K., & Hsieh, Y. C. (2017). A key stakeholder-based financial subsidy stimulation for Chinese EV industrialization: A system dynamics simulation. *Technological Forecasting and Social Change*, 118, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.01.022>
- Maxwell, R. J., & Filgueira, R. (2020). Key players in the Grieg NL Placentia Bay Atlantic Salmon Aquaculture Project: A social network analysis. *Marine Policy*, 113, 103800. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103800>

- Mubarok, H. A., Wisudo, S. H., & Iskandar, B. H. (2016). CCRF Perspective on Spearfisheries in Karimunjawa Islands, Jepara District Central Java. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 3(2), 155. <https://doi.org/10.29244/jmf.3.2.155-122>
- Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Univeritas Jambi Seri Humaniora*, 16(2), 41–46.
- Năstase, C., Chaşovschi, C., Popescu, M., & Scutariu, A. L. (2010). The importance of stakeholders and policy influence enhancing the innovation in nature based tourism services Greece, Austria, Finland and Romania case studies. *European Research Studies Journal*, 13(2), 137–148. <https://doi.org/10.35808/ersj/279>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Rosana, E. (2015). Konflik pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern). *Al-Adyan*, 10(2), 216–230.
- Rudyanto, A. (2004). Kerangka kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. *Sosialisasi Nasional Program MFCDP, September*, 1–8.
- Usman, H., & Setiady, P. (2008). Metodologi Penelitian Sosial Budaya. In *Jakarta: Bumi Aksara* (Issue April). Media Sahabat Cendekia. https://difarepositories.uin-suka.ac.id/152/1/metodologi_penelitian_sosial.pdf
- Wang, J., Aenis, T., & Siew, T. F. (2019). Communication processes in intercultural transdisciplinary research: framework from a group perspective. *Sustainability Science*, 14(6), 1673–1684. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00661-4>
- Wibowo, A., Lestari, E., & Sugihardjo, S. (2020). Model of Conflict Resolution with Social Capital in the Development of Genilangit Tourism Village, Poncol District, Magetan Regency, East Java Province. *Jurnal Penyuluhan*, 16(1), 78–91. <https://doi.org/10.25015/16202028590>
- Widjajanti, K. (2011). Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15–27.
- Widodo, M. L., Soekmadi, R., & Arifin, H. S. (2018). Analisis Stakeholders Dalam Pengembangan Ekowisata Di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(1), 55–61.

<https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.55-61>

Zebua, Y., Wildani, P. K., Lasefa, A., & Rahmad, R. (2016). Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pesisir Pantai Sri Mersing Desa Kuala Lama Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Geografi*, 9(1), 88. <https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6923>

Chapter 14

NELAYAN DAN SUMBERDAYA PERAIRAN

PERILAKU KOMUNITAS NELAYAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR KOTA MERAUKE

Untari



Untari, adalah Dosen pada Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Musamus Merauke. Meraih gelar S1 Teknologi Hasil Pertanian di UNIPA-Indonesia Papua Barat (2006), Magister Sains Agribisnis (Konsentrasi Sosial Ekonomi Pertanian) di Universitas Hasanuddin, Makassar (2010). Melanjutkan Pendidikan Program Doktor Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2019).

* Email : untari@unmus.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. (Nikijuluw, 2001; Ferro-Azcona et al., 2019).

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, dalam BAB 1 pasal 1 ayat 3 mendefinisikan nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam BAB II Pasal 2 poin a s.d k bahwa UU RI memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, keberlanjutan, kesejahteraan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan dalam Pasal 5 dan 6 bahwa nelayan di kelompokkan menjadi 4 kelompok 1) nelayan kecil, 2) nelayan tradisional, 3) nelayan buruh,

4) nelayan pemilik (Kemenkumham RI, 2016).

Pembangunan masyarakat pesisir harus dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi secara internal (Boda, 2018). Mengemukakan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat penting antara dinamika sosial-ekonomi dan lingkungan pesisir dalam upaya pengembangan dan penilaian pengelolaan pesisir terpadu di seluruh dunia (Bowen & Riley, 2003). Peningkatan nilai ekonomi keluarga masyarakat dapat menggunakan pendekatan ekologi, sosial dan ekonomi (Pursetyo & Tjahjaningsih, 2013). Berdasarkan hal tersebut, maka penting dilakukan kajian tentang perilaku pengelolaan sumberdaya perairan pada komunitas masyarakat nelayan yang mengantungkan hidup dari sumberdaya pesisir yang ditinjau dari sektor perikanan dan non-perikanan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir sangat tergantung pada ketersediaan sumberdaya alam laut yaitu ikan. Peningkatan kondisi sosial dan ekonomi nelayan sangat ditentukan oleh upaya dalam pemanfaatan sumberdaya dan kondisi lingkungan. Masyarakat pesisir memiliki peran dalam penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran mengelola keberlanjutan ekosistem dan mengabaikan prinsip konservasi lingkungan (Arie Nurzaman, Rajib Shaw, 2020) yang akan menimbulkan masalah ekonomi (Khuman & Singh, 2019) dan meningkatkan kerentanan sosial (Hadipour, Vafaie, & Kerle, 2019). Sehingga daerah pesisir yang padat penduduk rentan terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Pricope, Halls, & Rosul, 2019). Namun, masyarakat pesisir menganggap sebagai suatu hal yang normal dan tidak menganggap sebagai suatu resiko yang serius (Bott & Braun, 2019).

Perubahan iklim menjadi salah satu penyebab meningkatnya permukaan air sehingga berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan dan kerusakan hutan mangrove dapat terjadi. Hal tersebut terjadi di Merauke yang menjadi salah satu daerah mengalami dampak perubahan iklim karena emisi carbon dari perubahan tutupan lahan dalam beberapa dekade yang secara langsung maupun tidak langsung (Rahail et al., 2019; Untari, Melmambessy, & Simatupang, 2018; Untari, Witdarko, & Sembiring, 2018). Perubahan tutupan lahan menyumbangkan emisi karbon dan berdampak terhadap pada perubahan ekologi laut dan hutan mangrove akibat abrasi pantai (Masiyah & Monika, 2017) sehingga pendapatan nelayan rendah (Imbanop, Widiastuti, & Fachriza, 2019).

Berdasarkan fenomena diatas, kami melakukan kajian pada pengelolaan sumberdaya pesisir di komunitas masyarakat nelayan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir di Distrik Merauke dan Naukejerai, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua. Dalam tulisan ini akan mengulas secara deskriptif tentang prilaku kehidupan ditinjau dari aspek sosial pada indikator tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga masyarakat nelayan, dan aspek ekonomi yang ditinjau dari sumber mata pencaharian masyarakat nelayan dari menangkap hasil perikanan yaitu ikan dan udang dan potensi sumber pendapatan sampingan yang memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan nelayan. Selain itu, gambaran pengelolaan wilayah pesisir ditinjau dari perubahan luas hutan mangrove di Merauke.

Tujuan

Tujuan dari kajian makalah kami yaitu mengidentifikasi prilaku pengelolaan sumber daya perairan oleh komunitas nelayan distrik Merauke dan Naukenjerai yang di tinjau dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan.

Metodologi

Kerangka penelitian ini menggunakan kerangka penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian survei. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell J W, 2009). Sedangkan pengumpulan data penelitian kuantitatif menggunakan metode survei dengan menggunakan teknik pengumpulan data kusioner, wawancara, review catatan terstruktur dan observasi terstruktur. Penelitian di Kabupaten Merauke dengan mengambil sampel area pengamatan pada 2 (dua) distrik yaitu Distrik Merauke dan Naukenjerai. Secara empirik alasan pemilihan area sampel pengamatan yaitu adalah kedua distrik sebagian wilayahnya adalah wilayah pesisir yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat nelayan yang berdomisili di wilayah tersebut. Data penelitian terdisi dari data primer dan sekunder. Data primer penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada keompok masyarakat, sedangkan data sekunder penelitian diperoleh dari studi literature. Data hasil penelitian kualitatif dianalisis secara deskriptif dengan langkah-langkah analisis yaitu

pengumpulan data (*data collecting*) reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) (Miles and Huberman, 1994). Analisis yang digunakan yaitu analisis biaya, pendapatan, keuntungan, R/C rasio, dan analisis nilai tukar nelayan (NTN)

Profil Wilayah Penelitian

Merauke merupakan salah satu wilayah di Propinsi Papua yang memiliki potensi produksi perikanan darat dan laut yang melimpah. Data BPS Papua dalam Angka Tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Merauke lebih tinggi di dibandingkan dengan jumlah rumah tangga perikanan di 28 kabupaten/kota di Propinsi Papua. Data Dinas Perikanan kabupaten Merauke Tahun 2019 jumlah rumah tangga perikanan mencapai 4.762 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 3.244 KK nelayan lokal dan 1.518 KK nelayan non lokal. Data produksi perikanan tangkap di tahun 2015 mencapai 100,40 ton. Namun jumlah produksi perikanan tangkap lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang ada di Papua seperti Kabupaten Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Paniai, Kerom, Waropen serta Kota Jayapura.

Merauke merupakan salah satu bagian dari Provinsi Papua yang memiliki luas wilayah 46.761,63 km² dengan luas perairan 5.089,71 km². Data Dinas Perikanan Kabupaten Merauke tahun 2019, Merauke memiliki Panjang garis pantai 677,96 km dan panjang sungai 770 km serta memiliki rawa seluas 1.425.000 ha. Wilayah pesisir di Kabupaten Merauke tersebar di 10 distrik dari 20 distrik yang ada di Merauke yaitu Distrik Kimaam, Tambonji, Waan, Ilwayab, Okaba, Tubang, Malind, Merauke, Naukenjerai dan Distrik Semangga. Penyebaran wilayah produksi perikanan di Merauke tersebar di beberapa wilayah kawasan sentra produksi (KSP). Kawasan sentra produksi (KSP) perikanan Merauke di bagi menjadi 3 (tiga) Kawasan berdasarkan WPP-RI 718 yaitu KSP I meliputi Kawasan Merauke, Naukenjerai, Okaba, Tubang, Malind, Ngguti, Kaptel, Kurik, Animha, Tabinji, Waan, dan Ilwayab. KSP II meliputi Semangga, Tanah Miring dan Jagebob. Sedangkan KSP III meliputi darrah Sota, Elokonbel, dan Muting. Berdasarkan potensi penyebaran produksi ikan, Merauke memiliki komoditi unggulan yaitu jenis ikan (kakap, gulama, kuro, bawal, layur, dan lain-lain), udang (udang putih, windu, galah, lobster air tawar), cumi, kepiting bakau, Ikan hias (Arwana irian, ikan kakap batu, ikan Bambit, udang

zebra, dan kura-kura leher Panjang). Serta olahan hasil ikan yaitu gelumbang ikan, ikan asin, terasi dan bakso ikan (Dinas Perikanan Merauke, 2019).

Berdasarkan data produksi ikan dan kondisi sarana dan prasarana perikanan di Merauke kepemilikannya tidak merata di kalangan masyarakat nelayan. Untuk menunjang perikanan tangkap, sarana yang digunakan dalam penangkapan ikan oleh masyarakat nelayan pada umumnya yaitu berupa alat perahu tanpa motor 574 unit, perahu motor tempel 114 unit dan kapal motor 83 unit (BPS Merauke, 2017). Sedangkan prasarana alat tangkap yang digunakan yaitu jaring untuk menangkap udang dan ikan.

Pada Merauke Tahun 2019 bahwa data produksi hasil perikanan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dari tahun ke tahun terus meningkat yaitu total hasil perikanan pada Tahun 2016 mencapai 17.980.288,76 kg, Tahun 2017 menjadi 20.668.960,18 kg sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 25.421.303,00 kg. Tahun 2018 sudah mulai mengeksport hasil ikan namun masih rendah yaitu 397 kg. Distribusi hasil perikanan Merauke sebagian besar dipasarkan antar pulau dan sisanya di distribusikan di pasar lokal. Nelayan lokal lebih mendominasi sebagai nelayan tangkap dibandingkan sebagai pengolahan perikanan (2.62% dari 381 kelompok nelayan). Data yang tercatat di Dinas Perikanan Merauke bahwa total kelompok nelayan berjumlah 381 kelompok, dimana 78% adalah kelompok nelayan lokal dan 21.78% adalah kelompok nelayan non lokal yang tersebar di 14 distrik yang ada di Merauke (Dinas Perikanan Merauke, 2019). Berdasarkan data potensi sektor perikanan dan data jumlah kelompok nelayan, nampak bahwa nelayan lokal mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah daerah. Melalui instansi teknis terkait bahwa banyak dukungan yang diberikan untuk masyarakat nelayan melalui kelompok-kelompok nelayan tersebut berupa program kegiatan peningkatan kapasitas nelayan dan bantuan fisik berupa peralatan tangkap seperti jaring dan perahu sapa dengan bangunan gedung sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan nelayan di pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat pesisir sebagai pengguna sumber daya perairan menghadapi tantangan langsung terhadap mata pencaharian mereka, mulai dari masalah lingkungan, hingga masalah sosial ekonomi (Kearney, Berkes, Charles, Pinkerton, & Wiber, 2007). Masyarakat nelayan sebagai suatu komunitas yang beragam dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan (Wiber, Berkes, Charles, & Kearney, 2004).

Gambaran Komunitas Nelayan

Komunitas nelayan di Distrik Merauke dan Naukenjerai sebagai area penelitian masuk dalam pemerintahan Kabupaten Merauke memiliki karakteristik latar belakang budaya/suku yang hampir sama. Secara umum, komunitas nelayan di Merauke masih digolongkan sebagai komunitas kelompok nelayan tradisional yang terdiri dari kelompok nelayan lokal dan non-lokal. *Komunitas kelompok nelayan lokal* didefinisikan sebagai nelayan yang berasal dari suku asli daerah setempat. Kelompok nelayan lokal di Perairan Kota Merauke berasal dari suku Marind. Pada area penelitian di Distrik Merauke dan Naukenjerai, kelompok nelayan lokal yang mendominasi di pesisir Distrik Merauke yaitu masyarakat nelayan dari suku Marind yang datang dari kampung Wambi Distrik Okaba. Sedangkan, kelompok masyarakat nelayan di Distrik Naukenjerai yaitu Suku Marind-Kuper, Marind-Kondo, Suku Kanum, dan Suku Marory Men-gey. *Komunitas kelompok nelayan non-lokal* didefinisikan sebagai nelayan non pribumi yang memiliki pekerjaan utama sebagai nelayan.

Karakteristik kelompok nelayan non-lokal di area penelitian yaitu di Distrik Merauke dan Naukenjerai pada umumnya di dominasi oleh nelayan dari Pulau Sulawesi yaitu suku Bugis Makassar. Namun di Distrik Naukenjerai masyarakat nelayan non-lokal lebih beragam yaitu dari Bugis dan Jawa (Kosmaryandi, 2012) serta hasil observasi dilapangan juga terdapat suku Tapa dari NTT dan Ambon. Masyarakat nelayan non-lokal di Naukenjerai sudah banyak yang melakukan perkawinan antar suku pribumi sehingga mempengaruhi kearifan lokal budaya setempat yang mulai terkikis dengan adaptasi budaya dari luar.

Distrik Naukenjerai berbatasan langsung dengan Distrik Sota yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Wasur. Dimana Taman Nasional Wasur merupakan salah satu kawasan Ramsar Site terbesar di dunia. Penetapan wilayah Naukenjerai menjadi kawasan yang dilindungi memberikan dampak terhadap mata pencaharian masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut. Penetapan kawasan tersebut membatasi akses masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, namun dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-III/2006 mengatur tentang pedoman zonasi taman nasional yang didalamnya melindungi hak-hak masyarakat yang beromisili di dalam kawasan taman nasional dalam keberlanjutan mata pecaharian serta secara turun temurun sudah mengelola wilayah tersebut. Namun pemanfaatan sumber daya alam yang diijinkan dalam kawasan taman nasional harus berdasarkan kearifan lokal adat setempat (*Pedoman Zonasi taman Nasional, 2006*).

Aktifitas Sosial Komunitas Nelayan

Prilaku nelayan ditinjau dari aspek sosial jika dipandang dari indikator pendidikan sudah cukup baik. Keluarga nelayan terutama anak-anak nelayan pada umumnya bersekolah. Saat ini, pendidikan keluarga nelayan terutama anak-anak dapat dikatakan cukup baik dimana 54% jenjang pendidikan anak-anak nelayan lokal adalah SLTP, dibandingkan dengan tingkat pendidikan nelayan lokal yang jauh lebih rendah dimana 63% tingkat pendidikan nelayan non lokal hanya mencapai jenjang pendidikan SD bahkan ada yang beberapa tidak tamat SD. Di Kampung (sebutan untuk desa di Papua) semua anak-anak usia sekolah bersekolah, baik di jenjang TK, SD, SLTA, SMU, bahkan Perguruan tinggi. Kesadaran orangtua dalam menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena ada dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang menggalakkan wajib sekolah 9 tahun dengan program sekolah gratis seluruh Indonesia. Namun hasil observasi lapangan, bertolak belakang dengan pendidikan nelayan sendiri sebagai kepala keluarga hanya berpendidikan paling tinggi taman SLTP. Kesadaran akan pentingnya pendidikan keluarga nelayan terlihat dari tingkat pendidikan anak-anak nelayan mulai dari jenjang TK hingga jenjang perguruan tinggi. Selain itu, kesadaran masyarakat didukung dengan ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai di lingkungan mereka. Bangunan sekolah dan ketersediaan guru

yang cukup di semua jenjang memberikan motivasi tersendiri bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Melalui pendidikan anak-anak nelayan berharap dapat merubah nasib kehidupan generasi mereka selanjutnya karena faktanya bahwa pendidikan ayah dan ibu keluarga nelayan memiliki pendidikan yang rendah (Muflikhati, Hartoyo, Sumarwan, Fahrudin, & Puspitawati, 2010). Tingkat pendidikan nelayan akan berdampak pada kemampuan keluarga nelayan menghadapi scenario perubahan masa depan, seperti perubahan lingkungan, tantangan tekanan modernisasi sosial bagi kehidupan ditengah-tengah masyarakat yang semakin modern, dan tekanan kebutuhan ekonomi masa depan yang mungkin akan semakin meningkat.

Pelayanan kesehatan masyarakat nelayan di Merauke telah memadai. Tersedia pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang dapat diakses masyarakat nelayan setiap saat dan tanpa ada biaya untuk kesehatan karena pelayanan kesehatan masyarakat sudah gratis. Masyarakat nelayan di wilayah pesisir semua memiliki Kartu Papua Sehat yang digunakan saat berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit rujukan pemerintah. Jika masyarakat mengalami sakit yang tidak dapat ditangani di puskesmas maka dilakukan rujukan ke rumah sakit umum daerah yaitu yang terletak di ibu kota kabupaten. Namun ada sebagian2 masyarakat nelayan memanfaatkan sistem pengobatan tradisional yang diwariskan dari para leluhur tanpa ada penanganan medis. Selain itu, sebagian masyarakat juga terkadang hanya membeli obat di warung untuk mengobati sakit yang mereka anggap bisa diatasi dengan obat dari kios atau apotek. Salah satu indikator kesejahteraan jika ditinjau dari aspek sosial yaitu bidang kesehatan dari kemampuan mengakses sarana kesehatan yaitu puskesmas atau rumah sakit umum daerah bahwa nelayan di wilayah pesisir sudah sejahtera karena masyarakat di Merauke pada umumnya dan nelayan pada khususnya sebagian besar memegang kartu sehat untuk mendapat pelayanan kesehatan. Jadi pendapatan nelayan lebih dominan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yaitu pangan (Muflikhati et al., 2010). Selain untuk pangan, pendapatan nelayan digunakan untuk pembelian rokok, sirih pinang, uang saku anak sekolah, serta minuman keras (nelayan non-lokal).

Aktifitas Ekonomi Komunitas Nelayan

Hasil observasi lapangan, menggambarkan bahwa masyarakat nelayan dalam menangkap hasil laut di wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh musim ikan yang tidak menentu. Pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret adalah musim ombak atau biasa disebut musim angin barat oleh masyarakat setempat. Jikalau masyarakat tetap mencari ikan biasanya hanya cukup untuk konsumsi rumah tangga. Hal ini terjadi di kedua area sampel penelitian. Sedangkan pada bulan April sampai dengan Bulan Juli adalah musim teduh dan dengan kata lain saat bulan-bulan tersebut adalah musim produksi tinggi ikan dan udang. Jenis ikan yang sering di tangkap masyarakat nelayan yaitu ikan Kuro, ikan Bulanak, ikan Sembilan, ikan kakap Putih dan Kakap Cina. Pada bulan Agustus sampai dengan November produksi ikan dan udang tidak terlalu tinggi namun harga jualnya tinggi. Namun pada saat produksi ikan laut rendah, masyarakat beralih menangkap ikan gabus di rawa-rawa. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat nelayan yang ada di Naukenjerai saat air di rawa-rawa mulai berkurang atau mengering.

Pada umumnya, aktifitas perekonomian masyarakat nelayan di wilayah penelitian di lakukan secara individu dan ada juga yang berkelompok. Hal tersebut seperti yang terjadi di aktifitas masyarakat nelayan Nagari Tiku Selatan (Ermayanti, 2015). Aktifitas berkelompok dalam mencari ikan hanya dilakukan oleh masyarakat di Naukenjerai. Aktifitas tersebut mereka lakukan saat menangkap ikan air tawar yaitu Ikan Gabus atau sebutan familier masyarakat Merauke yaitu Ikan Gastor. Secara umum, aktifitas masyarakat dilakukan secara pribadi karena berdasarkan wawancara dengan responden bahwa aktifitas berkelompok menimbulkan potensi konflik antar anggota kelompok. Pembentukan kelompok nelayan diinisiasi oleh pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan peralatan tangkap bagi nelayan seperti jaring, perahu motor, dan bantuan usaha pengolahan hasil perikanan.

Pada umumnya, ikan dan udang dijual dengan menggunakan satuan kg. Harga ikan dan udang dipengaruhi oleh musim dan pada umumnya dijual ke pedagang pengumpul yang ada di kampung atau yang datang datang dari kota kabupaten. Data ekonomi dari aktifitas usaha penangkapan ikan dan udang laut di sajikan pada Tabel 1. Jika musim ikan tinggi maka harga ikan rendah dan jika musim ikan rendah atau produksi rendah maka

harga ikan tinggi. Harga ikan di wilayah penelitian berkisar antara Rp. 10.000,-/kg sampai Rp. 15.000/kg. Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata produksi ikan dan udang saat produksi tinggi, jumlah hasil tangkap nelayan non-lokal lebih tinggi dibandingkan nelayan lokal yaitu 293 kg/bulan/musim ikan dan 206 kg/bulan/musim udang, sedangkan produksi nelayan lokal per musim dan 236 kg/bulan/musim ikan dan 194 kg/bulan/musim produksi udang per bulan. Hal tersebut juga terjadi saat musim produksi ikan rendah, untuk rata-rata hasil tangkap nelayan non-lokal untuk ikan 81 kg/bulan/musim dan udang 38 kg/bulan/musim. Jumlah hasil tangkapan nelayan lokal saat musim produksi rendah baik ikan dan udang yaitu 63 kg/bulan/musim dan 27 kg/bulan/musim. Perbedaan jumlah hasil tangkapan nelayan disebabkan karena jumlah jaring yang digunakan nelayan non-lokal lebih banyak daripada jaring yang digunakan nelayan lokal. Jaring yang digunakan untuk menangkap ikan dan udang di pesisir Merauke yaitu jaring tarik atau juga sering disebut sebagai jaring pukut oleh nelayan non-lokal yang berasal dari pulau Sulawesi.

Perbedaan jumlah hasil tangkapan perikanan mengakibatkan kesenjangan keuntungan nelayan. Berdasarkan Tabel 1., bahwa rata-rata keuntungan nelayan lokal lebih rendah daripada nelayan non-lokal dalam musim tangkap ikan yaitu bulan Maret sampai dengan November. Rata-rata keuntungan nelayan lokal Rp. 3.994.164,-/bulan dalam musim ikan dan udang dengan nilai rata-rata R/C ratio sebesar 3.96. hal tersebut artinya bahwa setiap Rp. 1,- biaya yang dikeluarkan nelayan lokal maka pendapatan nelayan yang dihasilkan sebesar Rp. 3.96,-. Sedangkan keuntungan nelayan non-lokal lebih tinggi yaitu Rp. 4.523.217,- per bulan dalam musim ikan dan udang dengan rata-rata nilai R/C ratio 3.64 yang artinya setiap Rp 1,- biaya atau modal yang dikeluarkan nelayan maka pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp. 3.64. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa usaha penangkapan ikan dan udang nelayan di pesisir layak diusahakan karena nilai R/C ratio > 1.

Tabel 1. Analisis Ekonomi Usaha Perikanan Masyarakat Nelayan

No.	Uraian	Nelayan -							
		Lokal				Non Lokal			
		Produksi Tinggi (4 bulan)		Produksi Rendah (5 bulan)		Produksi Tinggi (4 bulan)		Produksi Rendah (5 bulan)	
	Ikan	Udang	Ikan	Udang	Ikan	Udang	Ikan	Udang	
1	Produksi (kg/bulan)	236	194	63	27	293	206	81	38
2	Harga (Rp/kg)	10,000	35,000	15,000	50,000	10,000	35,000	15,000	50,000
3	Pendapatan (Rp) (1x2)	2,360,000	6,790,000	945,000	1,350,000	2,930,000	7,210,000	1,215,000	1,900,000
4	Pendapatan per musim per bulan (Rp) (ikan + udang)		9,150,000		2,295,000		10,140,000		3,115,000
5	Total pendapatan per musim (Rp)		36,600,000		11,475,000		40,560,000		15,575,000
6	Total pendapatan dalam 9 bulan (Rp) (produksi tinggi + produksi rendah)				48,075,000				56,135,000
7	Rata-rata pendapatan per bulan dalam musim (Rp)				5,341,667				6,237,222
8	Biaya								
8a	Biaya tetap (Rp)				805,475				1,017,315
8b	Biaya variabel (Rp)				542,028				696,690
8c	Total Biaya per bulan (Rp) (8a+8b)				1,347,503				1,714,005
9	Rata-rata Keuntungan per bulan dalam musim (Rp) (7-8c)				3,994,164				4,523,217
10	Total Keuntungan dalam musim (9 bulan) (Rp) (9x9 bulan)				35,947,473				40,708,955
11	Rata-rata keuntungan per bulan dalam setahun (Rp) (10/12)				2,995,623				3,392,413
12	R/C				3.96				3.64

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2020.

Analisis Nilai Tukar Nelayan (NTN) dilakukan untuk dapat mengetahui apakah nelayan dapat memenuhi kebutuhan substansinya. Hasil analisis NTN pada Tabel 2 menunjukkan bahwa usaha penangkapan ikan nelayan lokal dan non-lokal di pesisir Merauke bahwa nilai NTN untuk nelayan lokal sebesar 0,9 dan 1,2 nilai NTN nelayan non-lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga nelayan non-lokal lebih sejahtera dari nelayan lokal karena nilai NTN >1, yang artinya bahwa keluarga nelayan sudah mampu memenuhi kebutuhan primer, sekunder serta tersiernya atau memiliki kemampuan menabung. Potensi kemampuan keluarga nelayan non-lokal untuk menabung yaitu sebesar Rp. 1.122.217/bulan. Sedangkan nilai NTN nelayan lokal belum cukup baik karena nilai NTN <1, yang artinya keluarga nelayan lokal belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dasar keluarga, nelayan bahkan mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 923.836/bulan.

Tabel 2. Nilai Tukar Nelayan lokal dan Non-Lokal

Uraian	Nelayan	
	Lokal	Non-Lokal
Total pendapatan nelayan dari usaha perikanan (Rp/bulan) (Y_{Fi}) (Rp)	5,341,667	6,237,222
Total pendapatan nelayan dari usaha non-perikanan (Rp/bulan) (Y_{NFi}) (Rp)	600,000	1,000,000
Total pendapatan (Rp/bulan) (Y_t) (Rp)	5,941,667	7,237,222
Total pengeluaran untuk usaha perikanan (Rp/bulan) (E_{Fi}) (Rp)	1,347,503	1,714,005
Total pengeluaran untuk usaha non-perikanan (Rp/bulan) (E_{NFi}) (Rp)	5,518,000	4,401,000
Total pengeluaran Nelayan (E_t) (Rp)	6,865,503	6,115,005
$NTN_t = Y_t/E_t$	0.9	1.2

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2020.

Sumber mata pencaharian utama masyarakat di kedua wilayah penelitian yaitu sebagai nelayan, namun terdapat sumber mata pencaharian alternatif yang dijadikan sebagai pekerjaan sampingan yaitu sebagai petani, buruh dan lain-lain. Hal tersebut sama dengan yang terjadi di masyarakat nelayan di Lungkak, bahwa masyarakat memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi nelayan (Husain, 2011). Pendapatan dari pekerjaan

sampingan nelayan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier masyarakat nelayan. Namun, modernisasi perikanan pada komunitas nelayan dapat dicoba untuk dapat lebih meningkatkan hasil tangkapan perikanan dan pendapatan nelayan (Hamzah & , Nurmala K. Pandjaitan, 2008), sehingga masyarakat tidak perlu mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan fokus kepada pengembangan usaha perikanan.

Kesejahteraan nelayan lokal dapat ditingkatkan jika dapat menekan pengeluaran konsumsi rumah tangga atau konsumsi non-perikanan. Diketahui bahwa dari hasil pendalaman informasi dilapangan bahwa keluarga nelayan memiliki pola konsumsi yang berbeda dengan pola konsumsi keluarga nelayan non-lokal yaitu konsumsi sirih pinang yang cukup tinggi. Konsumsi sirih pinang adalah sejenis konsumsi jenis rempah yang sudah membudaya dikalangan masyarakat asli Papua termasuk nelayan (lokal). Konsumsi sirih pinang bagi mereka itu lebih utama daripada konsumsi nasi. Pola konsumsi ini terjadi diseluruh keluarga nelayan yang disurvei dan dilakukan oleh semua anggota keluarga baik bapak, ibu, dan bahkan anak-anak dari kecil sudah sangat konsumtif dengan konsumsi sirih pinang. Selain itu, pola konsumsi yang sulit juga ditekan di keluarga nelayan yaitu pola konsumsi tuak atau minuman beralkohol yang dilakukan oleh kepala keluarga. Lingkungan keluarga nelayan lokal sangat berpengaruh terhadap konsumsi ini. Sistem pengelolaan keuangan oleh ibu rumah tangga tidak dapat mencegah penggunaan keuangan keluarga untuk konsumsi tersebut karena otoritas kepala keluarga dalam pengambilan keputusan pada keluarga nelayan lokal sangat kuat.

Prilaku Pengelolaan Sumberdaya Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir

Kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Merauke telah mengancam ekologi lingkungan pesisir di Kabupaten Merauke yang berdampak pada ekosistem wilayah perairan dan berdampak pada aspek sosial dan ekonomi nelayan di masa yang akan datang. Dimana saat ini Kabupaten Merauke yang merupakan daerah yang memiliki perairan yang cukup luas adalah 5.089,71 Km² dimana panjang pantai garis mencapai 677,97 km dan panjang sungai 770 km dan rawa seluas 1.425.000 ha (Dinas Perikanan Merauke, 2019). Luasnya hutan mangrove karena Merauke memiliki potensi yang baik bagi kelangsungan ekosistem mangrove. Luas hutan mangrove Merauke adalah

216.196 hektar berdasarkan citra satelit (WWF Kabupaten Merauke, 2005) sedangkan menurut data Bakorsurtanal 2009 Kabupaten Merauke memiliki lahan mangrove seluas 293.061.159 hektar. Data Tata Ruang Tata Ruang Tahun 2011 yang tertuang dalam buku rencana tata guna lahan mendukung pembangunan rendah emisi Kabupaten Merauke tahun 2017 bahwa luas hutan mangrove Merauke adalah 216.001,95 Ha atau 6,98% dari luas hutan Merauke (Tahiya et al., 2017). Analisis data perubahan tata guna lahan utama di unit perencanaan Kabupaten Merauke dari periode waktu yang berbeda bahwa setiap periode hutan mangrove mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan mangrove primer menjadi hutan kayu putih pada periode 2000-2005 seluas 2.416 ha, di periode 2005-2010 seluas 2.233 Ha (Tahiya et al., 2017). Menurut satuan perencanaan tata guna lahan Kabupaten Merauke memiliki kawasan pantai berhutan mangrove seluas 242.348,01 Ha, yang berdasarkan definisi satuan perencanaan Kawasan hutan mangrove adalah kawasan pesisir pantai yang merupakan habitat alami hutan mangrove dan tempat berkembang biaknya hutan mangrove. Habitat berbagai biota laut yang berfungsi sebagai pelindung pantai dan menahan pengikisan air laut serta melindungi usaha budidaya atau kehidupan di belakangnya.

Data perubahan luasan mangrove yang selalu mengalami penurunan dan melihat potensi nilai ekonomi hutan mangrove dari pemanfaatan kayu dan non kayu yang hidup di dalamnya dapat menyebabkan tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Merauke berpotensi meningkat. Pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat di wilayah pesisir dari hasil observasi yaitu digunakan sebagai kayu bakar dan perluawasan areal pemukiman oleh masyarakat yang berdomisili di pesisir pantai. Lahan di Merauke secara khusus dan Papua secara umumnya di kuasai oleh kepemilikan adat sehingga lahan hutan mangrove dipesisir diperjual belikan oleh pemilik hak ulayat atas tanah tersebut kepada masyarakat yang ingin membangun rumah di pesisir pantai. Hal tersebut sejalan dengan hasil kajian sebelumnya bahwa kerusakan hutan mangrove terjadi diwilayah pesisir pantai dekat dengan pemukiman karena masyarakat memanfaatkan hutan mangrove sebagai sumber kayu bakar dan bahan bangunan sehingga ekosistem mangrove alami terganggu seperti kepiting mangrove dan biota perairan lainnya (Masiyah & Monika, 2017; Masiyah & Sunarni, 2015) bahkan wilayah hutan mangrove dijadikan perluasan pemukiman baru bagi

masyarakat di pesisir. Jika sistem pengelolaan hutan mangrove di Merauke dikelola dengan baik maka dapat memberikan jasa lingkungan kepada masyarakat berupa pemanfaatan kayu dan biota perairan yang hidup sekitar Rp. 8,6 juta/kepala keluarga (Widiastuti, Ruata, & Arifin, 2016).

Hasil penelitian Adrianto tahun 2016 bahwa sebagian masyarakat di wilayah pesisir berada pada garis kemiskinan karena rendahnya tingkat pendapatan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (Andrianto, Qurniati, & Setiawan, 2016) selain itu sistem pengaturan pengelolaan yang tidak terencana dan tidak terstruktur dapat menjadi penyebab menurunnya peran hutan mangrove bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar hutan (Zaitunah, 2002), untuk itu diperlukan strategi yang mendukung tumbuhnya kebijakan pengelolaan hutan mangrove dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove dengan meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dalam pengelolaan hutan mangrove (Davinsy, Kustanti, & Hilmanto, 2015; Sukma, 2017), karena selama ini masih terdapat dualisme kebijakan pemerintah, dimana di satu sisi kebijakan berupaya melindungi hutan mangrove namun di sisi lain memberikan peluang eksploitasi hutan mangrove untuk kepentingan perekonomian daerah dan masyarakat serta adanya inkonsistensi kebijakan nasional dan kebijakan daerah tentang sistem pengelolaan hutan lindung seperti hutan mangrove (Ginoga, Lugina, & Djaenudin, 2005). Untuk itu, upaya perbaikan pengelolaan dengan merestorasi hutan mangrove harus diperhatikan karena beberapa alasan, yaitu untuk meningkatkan nilai ekologi dan lingkungan hutan mangrove, tingginya ketergantungan subsistem terhadap hutan mangrove dan untuk mencegah erosi pantai, penurunan sumber daya perikanan dan lain-lain (Kairo, Bosire, & Koedam, 2001).

Keberadaan hutan mangrove di wilayah pesisir tidak hanya sebatas sebagai fungsi lindung untuk mencegah abrasi. Namun keberadaan hutan mangrove dapat menjadi sumber pendapatan dan sumber pangan bagi masyarakat lokal di berdomisili di sekitarnya. Di Merauke, hutan mangrove merupakan salah satu tempat budidaya kepiting alami. Artinya bahwa, masyarakat dapat menangkap kepiting pada musimnya tanpa ada upaya membudidayakan secara intensif. Kepiting di Merauke memiliki pangsa pasar tersendiri

selain rumah tangga terdapat rumah makan bahkan restaurant adalah pangsa pasar kepiting yang menjanjikan karena kaya protein dan harganya cenderung stabil dipasaran.

SIMPULAN

Penelitian kami menyimpulkan bahwa komunitas nelayan di wilayah penelitian baik nelayan lokal maupun nelayan non-lokal dalam pengelolaan sumberdaya perairan baik itu sumberdaya perikanan dan non perikanan yang berdampak pada keberlanjutan kehidupan nelayan yang ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi wilayah pesisir menyimpulkan bahwa ditinjau dari *aspek sosial*, masyarakat nelayan di area penelitian yang berdomisili di wilayah pesisir memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga sudah cukup baik. Kesadaran akan pentingnya pendidikan keluarga dan kesehatan keluarga ditunjang dengan ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di wilayah pesisir Merauke sudah memadai baik ditinjau dari ketersediaan bangunan sekolah, puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan lainnya, ketersediaan sumberdaya manusia baik tenaga guru maupun tenaga kesehatan di lingkungan masyarakat pesisir.

Dari *aspek ekonomi*, keluarga nelayan dari pengelolaan perikanan laut dan pesisir yaitu hasil ikan dan udang memberikan pendapatan nelayan lokal sebesar Rp. 5.341.667,-/bulan dengan tingkat keuntungan usaha perikanan yaitu Rp. 2.995.623,-/bulan dan Rp. 6.237.222,-/bulan pendapatan nelayan non-lokal dengan tingkat keuntungan sebesar Rp. 3.392.413,-/bulan. Sehingga kelayakan usaha berdasarkan analisis R/C rasio yaitu R/C rasio komunitas nelayan lokal yaitu 3.96 dan R/C rasio usaha perikanan nelayan non-lokal 3.64. Tingkat kesejahteraan komunitas nelayan lokal dan non-lokal berdasarkan analisis nilai tukar nelayan (NTN) disimpulkan nelayan non-lokal lebih sejahteraan dibandingkan komunitas nelayan lokal dengan nilai NTN nelayan non-lokal lebih besar dari 1, dengan demikian bahwa nelayan non-lokal dapat memiliki potensi menabung untuk memenuhi kebutuhan sekundernya.

Sementara dari *aspek ekologi*, pengelolaan sumber daya wilayah pesisir non-perikanan berupa pengelolaan hutan mangrove bahwa masyarakat melakukan pemanfaatan hutan mangrove dengan menebang kayu mangrove yang sudah mati untuk dijadikan kayu bakar. Kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir pantai di area penelitian diakibatkan karena pengikisan ombak pasang surut laut yang terjadi pada musim barat yang terjadi pada Bulan November sampai dengan bulan Maret. Selain itu, perubahan tutupan lahan mangrove menjadi

penggunaan lainnya seperti pembukaan lahan mangrove untuk perluasan pemukiman masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Dalam penelitian ini kami menemukan bahwa pengelolaan sumberdaya kawasan pesisir di Merauke masih perlu diperbaiki di aspek ekonomi dan aspek ekologi. Perlu sumber mata pencaharian masyarakat pesisir dari sektor perikanan dengan meningkatkan kualitas penangkaran hasil ikan seperti menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi atau sumber pendapatan lain yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga nelayan terutama nelayan lokal. Sedangkan di sektor ekologi, perlu adanya penegakan hukum dan pengawasan yang baik dalam pengelolaan sumberdaya hutan mangrove dengan menekan pertumbuhan pemukiman masyarakat di wilayah pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, A., Qurniati, R., & Setiawan, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga Terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat Sekitar Mangrove (Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran). *Jurnal Sylva Lestari*, 4(3), 107. <https://doi.org/10.23960/jsl34107-113>
- Arie Nurzaman, Rajib Shaw, M. S. R. P. (2020). Measuring community resilience against coastal hazards: Case study in Baron Beach, Gunungkidul Regency Arie. *Progress in Disaster Science*. <https://doi.org/10.1016/j.jplph.2019.153057>
- Boda, C. S. (2018). From economic choice to social choice in coastal management: A critical assessment of the use of cost-benefit analysis in the evaluation of an erosion control project in Flagler County, Florida, U.S.A. *Ocean and Coastal Management*, 162, 85–99. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.09.017>
- Bott, L. M., & Braun, B. (2019). How do households respond to coastal hazards? A framework for accommodating strategies using the example of Semarang Bay, Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 37(January), 101177. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101177>
- Bowen, R. E., & Riley, C. (2003). Socio-economic indicators and integrated coastal management. *Ocean and Coastal Management*, 46(3–4), 299–312. [https://doi.org/10.1016/S0964-5691\(03\)00008-5](https://doi.org/10.1016/S0964-5691(03)00008-5)
- BPS Merauke. (2017). *Merauke Dalam Angka* (2017th ed.). Merauke: BPS- Statistics Of Merauke Regency.
- Creswell J W. (2009). RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In SAGE. <https://doi.org/10.2307/1523157>
- Davinsky, R., Kustanti, A., & Hilmanto, R. (2015). Study Of Mangrove Forest Management In The Pahawang Island Village Marga Punduh District Pesawaran Regency. *Jurnal Sylva*

Lestari, 3(3), 95–106.

- Dinas Perikanan Merauke. (2019). *Data Sektor Perikanan Kabupaten Merauke*. Merauke.
- Ermayanti. (2015). Studi Pengembangan Kelembagaan berdasarkan Kultur Masyarakat Lokal pada Kelompok Nelayan. *Jurnal Antropologi*, 16(2), 149–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jantro.v16.n2.p149-165.2014>
- Ferro-Azcona, H., Espinoza-Tenorio, A., Calderón-Contreras, R., Ramenzoni, V. C., Gómez País, M. de las M., & Mesa-Jurado, M. A. (2019). Adaptive capacity and social-ecological resilience of coastal areas: A systematic review. *Ocean and Coastal Management*, 173(December 2018), 36–51. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.01.005>
- Ginoga, K., Lugina, M., & Djaenudin, D. (2005). Policy Analysis of Protection Forest Management. *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi*, 2(2).
- Hadipour, V., Vafaie, F., & Kerle, N. (2019). An indicator-based approach to assess social vulnerability of coastal areas to sea-level rise and flooding: A case study of Bandar Abbas city, Iran. *Ocean and Coastal Management*, (December), 105077. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.105077>
- Hamzah, A., & , Nurmala K. Pandjaitan, N. W. P. (2008). Respon Komunitas Nelayan terhadap Modernisasi Perikanan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 02(02), 191–208.
- Husain, F. (2011). Sisitem Budaya Bahari Komunitas Nelayan Lungkak Desa Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Komunitas*, 3(1), 40–50.
- Imbanop, Y. P., Widiastuti, M. M. D., & Fachriza, R. (2019). Analisis kelayakan usaha penangkapan ikan pada musim peralihan oleh nelayan di kampung onggaya distrik naukenjerai kabupaten merauke. *Musamus Journal of Agribusiness*, 1(2), 60–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/mujagri.v0i0>
- Kairo, J. G., Bosire, J., & Koedam, N. (2001). Restoration and management of mangrove systems — a lesson for and from the East African region. *Journal of South African Journal of Botany*, 67, 383–389.
- Kearney, J., Berkes, F., Charles, A., Pinkerton, E., & Wiber, M. (2007). The role of participatory governance and community-based management in integrated coastal and ocean management in Canada. *Journal of Coastal Management*, 35(1), 79–104. <https://doi.org/10.1080/10.1080/08920750600970511>
- Kemenkumham RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam*. , Pub. L. No. 7 (2016).
- Khuman, O. N., & Singh, Y. J. (2019). Fish Farmers' Perceived Constraints and Suggestions towards the Adoption of Scientific Fish Farming of Pengba (*Osteobrama belangeri*) in the Valleys of Manipur, India. *International Journal of Current Microbiology and Applied*

- Sciences*, 8(02), 2489–2494. <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2019.802.289>
- Kosmaryandi, N. (2012). Taman Nasional Wasur, Mengelola Kawasan Konservasi di Wilayah Masyarakat Adat. *Media Konservasi*, 17(1), 615.
- Masiyah, S., & Monika, N. (2017). Analisis ekologi mangrove sebagai dasar rehabilitasi di Pesisir Arafura Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 10(2), 29. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.10.2.29-35>
- Muflikhati, I., Hartoyo, H., Sumarwan, U., Fahrudin, A., & Puspitawati, H. (2010). Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus di Wilayah Pesisir Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.1.1>
- Nikijuluw, V. P. H. (2001). *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*. IPB.
- Pedoman Zonasi taman Nasional*. (2006). Kementerian Kehutanan.
- Pricope, N. G., Halls, J. N., & Rosul, L. M. (2019). Modeling residential coastal flood vulnerability using finished-floor elevations and socio-economic characteristics. *Journal of Environmental Management*, 237(October 2018), 387–398. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.078>
- Pursetyo, K. T., & Tjahjaningsih, W. (2013). *Ecology and Social Economy Studies*. 5(2), 129–137.
- Rahail, E., Untari, Herdjiono, I., Saadah, Wahyuni, C., & Dariati, T. (2019). Low-emission strategy through effective planning and public participation in Merauke. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012070>
- Sukma, R. N. (2017). Kajian pengelolaan Mangrove di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. *Jurnal PENA Akuatika Volume*, 15(1), 1–18.
- Tahiya, S., Lisabeth, D., Untari, Gusti, Bontang, N., Hendra, ... Karim, I. (2017). *Strategi Perencanaan Tata Guna Lahan Mendukung Pembangunan Rendah Emisi Kabupaten Merauke*. Merauke: POKJA TIPRE Kabupaten Merauke.
- Untari, Melmambessy, E. H. P., & Simatupang, D. O. (2018). Carbon Emissions and Mitigation Actions in Merauke. *E3S Web of Conferences*, 73, 1–6. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187302009>
- Untari, Witdarko, Y., & Sembiring, J. (2018). Analysis of Carbon Emission Level on Merauke Regency Land Cover. *E3S Web of Conferences*, 73, 0–4. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187308013>
- Wiber, M., Berkes, F., Charles, A., & Kearney, J. (2004). Participatory research supporting

community-based fishery management. *Journal of Marine Policy*, 28(6), 459–468.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2003.10.020>

WWF Kabupaten Merauke. (2005). *Luasan Mangrove Kabupaten Merauke. Dengan menggunakan data Citra*.

Zaitunah, A. (2002). *Kajian Keberadaan Hutan Mangrove: Peran, Dampak Kerusakan dan Usaha Konservasi*.

Chapter 15

NELAYAN DAN NILAI EKONOMI EKOSISTEM PESISIR

PERSEPSI NELAYAN DAN VALUASI EKONOMI EKOSISTEM MANGROVE DI KABUPATEN TAKALAR

Irma Sribianti



Irma Sribianti, adalah Dosen LLDIKTI Wilayah IX, DPK pada Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar. Meraih gelar S1 Kehutanan di Universitas Hasanuddin, Makassar (1994), Magister Ilmu Kehutanan di Universitas Mulawarman, Samarinda (1998) dan gelar Doktor dalam bidang Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2008)

* Email : irma.sribianti@unismuh.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan mangrove selain memiliki nilai ekologis, hutan mangrove juga memiliki nilai ekonomis dan sosial bagi masyarakat dan lingkungannya. Sisi ekonomi hutan mangrove berfungsi sebagai habitat ikan, udang, kerang dan jenis biota lainnya untuk memijah dan daerah asuhan bagi jenis-jenis udang yang menunjang ketersediaan sumberdaya bagi masyarakat pesisir (Fauzi, 2004). Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di daerah pesisir, berakibat semakin meningkatnya kebutuhan terhadap lahan untuk pemukiman, perkebunan, pertambangan, dan peruntukan lainnya. Peningkatan kebutuhan lahan, mengakibatkan banyak lahan mangrove mengalami kerusakan, akibat aktifitas konversi tersebut (Mulyadi & Fitriani, 2017). Persepsi yang positif dari masyarakat merupakan faktor penting yang menentukan kelestarian ekosistem mangrove tersebut. Oleh karena itu penilaian terhadap persepsi sangat penting dilakukan. Dengan mengetahui persepsi dan sikap masyarakat terhadap sumber daya alamnya, maka akan lebih mudah untuk memfasilitasi penanaman kesadaran kritis serta kepekaan terhadap nilai sosial dan ekonomi potensi sumberdaya alam yang mereka miliki sebagai *food security* (cadangan untuk kehidupan masa depan),

Menurut Ohama (2001) memfasilitasi penanaman kesadaran kritis dan kepekaan terhadap potensi sumberdaya alam (sumberdaya ekosistem pesisir) yang dimiliki oleh masyarakat lokal (nelayan dan pembudidaya) menjadi sangat penting, karena akan

menumbuhkan kemampuan masyarakat lokal untuk : (1) mengklasifikasi masalah dan mengidentifikasi kebutuhan dalam hidup sehari-hari, terkait pemanfaatan sumberdaya alam (merusak atau tidak); (2) refleksi kritis mengenai hakekat dari potensi dan hambatan mereka dari segi sumberdaya, relasi sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan dengan potensi masalah atau masalah yang dihadapi atau bakal dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya alam (over eksploitasi atau konservasi); (3) pengakuan tentang perlunya aksi kolektif bagi pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan untuk keberlanjutan sumberdaya alam yang bakal diwariskan ke generasi selanjutnya.

Salah satu agenda penting dalam pembangunan saat ini adalah suatu upaya untuk mempromosikan hutan mangrove sebagai salah satu aset ekonomi hijau di Indonesia. Ekonomi Hijau (*Green Economic*) merupakan ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial namun mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Pendekatan yang dapat digunakan untuk dapat mempertahankan kegiatan perekonomian dan menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan pendekatan valuasi ekonomi. Konsep Ekonomi Hijau muncul setelah adanya gejala-gejala perubahan iklim yang menyebabkan kerusakan lingkungan di seluruh dunia akibat aktivitas ekonomi (UNEP, 2014). Rachmawati et al., (2014) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab perubahan iklim adalah peningkatan karbondioksida di atmosfer. Keberadaan ekosistem mangrove diyakini dapat menjadi penyebab menurunnya kandungan CO₂ dari atmosfer, karena memiliki fungsi ekologis sebagai penyerap dan penyimpan karbon dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu hutan mangrove juga memiliki fungsi ekonomi yang merupakan salah satu penunjang utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir sebagai penghasil kayu, sumber pangan, sumber bahan kosmetik dan obat-obatan.

Ekosistem mangrove di Dusun Kunjung Mae, Kelurahan Takalar Lama, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar tersebar pada daerah pantai, muara dan sungai. Masyarakat memanfaatkan ekosistem mangrove sebagai tempat pemijahan ikan, kepiting, mengambil kayu bakar, penahan angin dan penahan ombak, namun meningkatnya aktivitas manusia dan pertambahan jumlah penduduk yang bermukim disekitar kawasan tersebut, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan melakukan perluasan lahan dengan

membuka lahan baru di kawasan hutan mangrove yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi jasa lingkungan ekosistem mangrove.

Selain mempunyai fungsi ekologis berupa fungsi fisik, kimiawi dan biologis, ekosistem mangrove juga mempunyai fungsi jasa-jasa lingkungan atau *environmental services*, yaitu: sebagai pengatur iklim, penghasil oksigen dan penyerap karbon (Abdul Haris Sambu et al., 2018). Untuk mengantisipasi kondisi tersebut perlu dilakukan penyadaran secara terus menerus kepada masyarakat tentang fungsi dan manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove.

Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; menganalisis persepsi masyarakat (nelayan) terhadap fungsi dan peran hutan mangrove dalam realitas kehidupannya; menganalisis valuasi ekonomi jasa lingkungan ekosistem mangrove serta kontribusinya terhadap lingkungan melalui gambaran total nilai manfaat jasa lingkungan dari ekosistem mangrove.

Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan di ekosistem mangrove Kelurahan Takalar Lama, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel secara sengaja pada responden dengan pertimbangan bahwa responden adalah masyarakat yang memperoleh manfaat dari ekosistem mangrove. Jumlah responden sebanyak 74 orang yang terdiri dari 10 orang nelayan penangkap kepiting, 1 orang petambak kepiting, 62 orang masyarakat pengguna air bersih, dan 1 orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Takalar. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada responden dengan menggunakan kuisioner. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis valuasi ekonomi. Teknik sampling yang digunakan untuk mengkaji persepsi masyarakat (nelayan dan petambak) adalah teknik terpilih (*purposive sampling*) dimana sampel ditentukan atau dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan, antara lain masyarakat setempat yang berinteraksi langsung dengan hutan mangrove terkait dengan mata pencahariannya.

Sementara analisis nilai manfaat ekonomijasa lingkungan ekosistem mangrove dilakukan prosedur, yaitu : identifikasi fungsi dan manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove, kuantifikasi seluruh fungsi dan manfaat kedalam nilai uang dan pendugaan nilai total ekonomi jasa lingkungan ekosistem mangrove dengan menjumlahkan seluruh nilai manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove yang meliputi : nilai sebagai penahan abrasi, nilai sebagai pencegah intrusi air laut, nilai sebagai penyedia pakan kepiting, nilai serapan karbondioksida, nilai produksi oksigen dan nilai pemelihara keanekaragaman hayati dengan menggunakan metode harga pasar (*market price*) dan metode biaya pengganti (*replacement cost*). Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai-nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove diuraikan sebagai berikut :

Nilai Sebagai Penahan Abrasi

Nilai manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penahan abrasi diestimasi melalui pendekatan biaya pengganti (*replacement cost*). Estimasi nilai ekosistem mangrove sebagai penahanabrasi didekati dengan biaya pembuatan pemecah gelombang (*breakwater*). Untuk menghitung nilai hutan mangrove sebagai penahan abrasi digunakan formula perhitungan menurut Nilwan dkk (2003) dalam (Tuwo et al., 2011):

$$NPA = PLT \times DT \times Pgp \times B$$

Keterangan :

- NPA = Nilai penahan abrasi (Rp/ha/tahun)
- PLT = Pemecah gelombang berukuran panjang x lebar x tinggi (m³)
- Pgp = Panjang garis pantai (m)
- DT = Daya tahan (tahun)
- B = Biaya standar beton (Rp)

Estimasi biaya pembuatan pemecah gelombang menggunakan data Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang dikeluarkan oleh BALITBANG PU, 2016 dalam (Rospita et al., 2017) dengan ketentuan data teknis konstruksi pemecah gelombang tenggelam, P = 150 m, L = 20 m, T = 5 m, sebesar Rp. 2.921.147.000.

Nilai Sebagai Pencegah Intrusi Air Laut

Nilai manfaat ekonomi jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai pencegah intrusi air laut dihitung melalui pendekatan biaya pengeluaran masyarakat dalam pemenuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga. Biaya yang dikeluarkan masyarakat dalam membeli air bersih

diestimasi setara dengan nilai hutan mangrove sebagai pencegah intrusi air laut, karena masyarakat akan kesulitan mendapat air bersih dan air tawar. jika terjadi instrusi air laut jika hutan mangrove mengalami kerusakan. Formulasi perhitungan nilai pencegah intrusi air laut sebagai berikut (Harahab, 2010).

$$NPI = JKK \times JKbta \times HA \times HR$$

Keterangan:

- NPI = Nilai pencegah instrusi air laut (Rp/ha/tahun)
- JKK = Jumlah Kepala Keluarga
- JKbta = Jumlah Kebutuhan Air/bulan
- HA = Harga Air (Rp/Bulan)
- HR = Jumlah Hari dalam 1 Tahun

Nilai Sebagai Penyedia Pakan Kepiting

Nilai manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penyedia pakan bagi kepiting dinilai secara tidak langsung berdasarkan sumberdaya yang menggantikannya, diestimasi setara dengan hasil tangkapan kepiting di wilayah perairan di sekitar hutan mangrove dikali jumlah pakan yang dibutuhkan untuk setiap kilogram kepiting yang diperoleh dikali harga pakan kepiting (Sribianti, 2008). Formulasi perhitungan nilai penghasil pakan kepiting sebagai berikut :

$$NPP = Htk \times Jpk \times Hpk$$

Keterangan :

- NPP = Nilai penyedia pakan kepiting (Rp/ha/tahun)
- Htk = Hasil tangkapan kepiting (kg)
- Jpk = Jumlah Pakan Kepiting Pabrikasi (kg)
- Hpk = Harga Pakan Kepiting Pabrikasi (Rp/kg)

Nilai Serapan Karbon Tahunan

Nilai manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penyerap karbon tahunan diperoleh dengan mengalikan nilai serapan CO₂ dengan harga karbon sebesar US\$5,8 per ton CO₂ (The World Bank, 2011) dikurangi biaya transaksi pengurangan emisi serapan karbondioksida pada sektor kehutanan sebesar US\$1,23 (Antinori & Sathaye, 2007), sehingga harga bersih serapan CO₂ sebesar US\$ 4,57 per ton. Nilai tukar rupiah terhadap dollar yaitu US\$1 adalah sebesar Rp. 14.610 (Bank International Indonesia,

2015). Serapan karbondioksida (CO₂) di estimasi dengan menggunakan rumus Hardjana (2009) dalam (Purnawan, 2016) sebagai berikut :

$$NJL_{SCO} = HJC \times CO_2$$

Keterangan:

NJL_{SCO2} = Nilai Jasa Lingkungan serapan karbon (Rp/Ha)
 HJC = Harga Jual Karbon (Rp/Ton, US\$4,57= Rp. 66.767,7)
 CO₂ = Serapan Karbondioksida (Ton/Ha)
 Nilai Produksi Oksigen (O₂)

Nilai manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penghasil oksigen diestimasi dengan menggunakan rumus pengembangan dari rumus serapan CO₂ dengan mengalikan nilai serapan CO₂ persatuan luas (Ton/Ha) dengan faktor konversi atom CO₂ ke O₂ dengan harga jual oksigen dipasaran sebagai berikut (Purnawan, 2016) :

$$NO_2 = CO_{2n} \times 0,73 \times HJO_2$$

Keterangan:

NO₂ = Nilai Produksi Oksigen (Ton/Ha)
 CO_{2n} = Serapan CO₂ persatuan luas (Ton/Ha)
 0,73 = Angka ekivalen atau konversi unsur CO₂ ke O₂ (massa atom C=12 dan O=16, CO₂(1x12)+(2x16) = 44; konversinya (32:44) = 0,73)
 HJO₂ = Harga jual O₂ (Rp/Ton)

Nilai Keanekaragaman Hayati

Nilai keanekaragaman hayati didekati dengan mengacu pada nilai keanekaragaman hayati (*biodiversity*) hutan mangrove di Indonesia yaitu US\$ 1.500/km²/tahun atau US\$15/ha/tahun. Nilai yang digunakan merupakan hasil penelitian Ruitenbeek pada tahun 1992, nilai tersebut dicompound ke tahun 2021 menurut (Osmaleli et al., 2013) sebagai berikut :

$$V_{2021} = V_{1992} (1 + i)^t$$

Keterangan :

V = Nilai biodiversity (Rp/ha/th)
 i = Tingkat suku bunga (%)
 t = Banyaknya waktu (tahun)

Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan daya beli dan harga di Kelurahan Takalar Lama, karena daya beli dan harga yang berlaku di Teluk Bintuni, Papua Barat diasumsikan

berbeda dengan lokasi kajian sehingga diharapkan hasil perhitungan yang diperoleh lebih akurat, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$UMR \text{ Takalar} \\ NB = V \times M \quad \frac{\quad}{UMR \text{ Papua Barat}}$$

Keterangan :

- NB = Nilai biodiversity ekosistem mangrove di Kabupaten Takalar tahun 2021
 - V = Nilai biodiversity ekosistem mangrove di Irian Barat
 - M = Luas ekosistem mangrove (Ha)
 - UMR = Upah Minimum Regional (Rp)
- Nilai Total Jasa Lingkungan Ekosistem Mangrove*

Nilai total jasa lingkungan ekosistem mangrove merupakan penjumlahan dari seluruh nilai manfaat ekonomi jasa lingkungan ekosistem mangrove, yaitu : nilai pencegah abrasi, nilai pencegah intrusi air laut, nilai penyedia pakan kepiting, nilai serapan karbon tahunan dan nilai produksi oksigen, dengan rumus sebagai berikut :

$$NJL_{EM} = NPA + NPI + NPP + NJL_{SCO2} + NO_2 + NB$$

Keterangan :

- NJL_{EM} = Nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove
- NPA = Nilai penahan abrasi
- NPI = Nilai pencegah intrusi air laut
- NPP = Nilai penyedia pakan kepiting
- NJL_{SCO2} = Nilai serapan karbon
- NO_2 = Nilai produksi O_2
- NB = Nilai biodiversity ekosistem mangrove

Profil Wilayah Penelitian

Hutan Mangrove terletak di Kelurahan Takalar Lama, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar. Lama jarak tempuh dari Kota Makassar ke kabupaten membutuhkan waktu 1 jam 30 menit untuk sampai ketempat lokasi tersebut. Adapun batas wilayah Kelurahan Takalar Lama adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Patani; Sebelah Selatan berbatasan Selat Makassar; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banggae dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

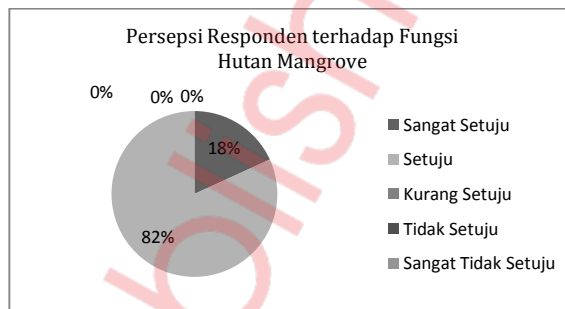
Jumlah penduduk Kelurahan Takalar Lama sebanyak 4,479 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2,186 orang dan perempuan sebanyak 2,293 orang. Sebagian

besar mata pencaharian penduduk di Kecamatan Mappakasunggu dalam memenuhi kebutuhan adalah bekerja sebagai petani dan nelayan sebanyak 145 orang, buruh tani sebanyak 147 orang, PNS sebanyak 86 orang, Pengrajin industri rumah tangga sebanyak 40 orang, dan bidan swasta sebanyak 1 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Nelayan terhadap Fungsi Hutan Mangrove

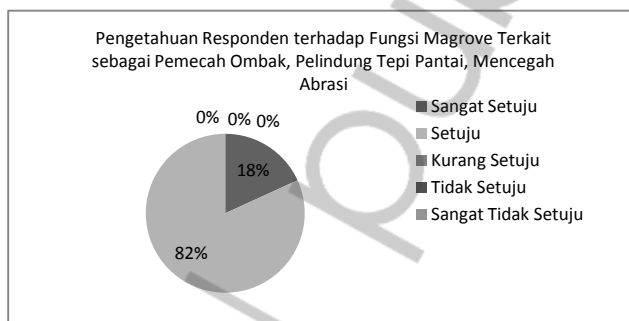
Presepsi adalah pandangan atau penilaian seseorang terhadap objek tertentu, yang dihasilkan oleh kemampuan mengorganisasi indra pengamatan. Sumberdaya di alam tidak dapat dilestarikan dan dikelola dengan baik tanpa terlebih dahulu mengetahui persepsi dan sikap masyarakat (nelayan) terhadap lingkungan (Lee, H. F. and Zhang, 2008). Gambaran persepsi nelayan bahwa hutan mangrove memiliki fungsi ekologi yang berarti melindungi potensi keanekaragaman hayati, penyangga keseimbangan, pencegah abrasi, sejalan dengan yang disampaikan oleh responden, yang ditunjukkan dengan skor jawaban sebesar 64% sangat setuju, setuju (27%) dan hanya 9% yang kurang setuju (lihat gambar 1).



Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Keberadaan ekosistem hutan mangrove dapat berfungsi sebagai pemecah ombak dan menjadi pelindung tepi pantai, sehingga mencegah terjadinya abrasi, menjaga stabilitas garis pantai, serta menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut ke darat. Selain itu akar tanaman mangrove berperan dalam menjaga keberadaan air tanah, sehingga berfungsi sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau rembesan air laut ke

darat. Gambaran pengetahuan responden terhadap hal tersebut, Dari jawaban responden diperoleh keterangan bahwa sebanyak 73% responden mengetahui fungsi mangrove terkait dengan pemecah ombak, pelindung tepi pantai dan masalah abrasi, sementara ada 18% yang kurang mengetahui, dan hanya 9% yang tidak mengetahui. Gambaran jawaban responden dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

Selain itu salah satu fungsi hutan mangrove adalah sebagai kawasan untuk berlindung, bersarang, dan berkembang biak bagi burung serta berbagai jenis biota darat maupun laut lainnya. Persepsi responden terhadap pernyataan tersebut adalah sangat setuju, dengan hasil jawaban sebesar 100%. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat memahami salah satu fungsi ekologi hutan mangrove sebagai kawasan perlindungan bagi berbagai jenis satwa.

Selain memiliki fungsi ekologi, hutan mangrove juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang bermanfaat dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Ekosistem hutan mangrove merupakan penghasil kayu yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Persepsi masyarakat terhadap fungsi hutan mangrove sebagai penghasil arang dan kayu bakar adalah setuju, yang ditunjukkan dengan skor jawaban sebesar 82%. Gambaran dari jawaban responden menunjukkan bahwa masyarakat di desa ini sering menebang pohon mangrove untuk dimanfaatkan sebagai kayu bakar dan arang. Tindakan masyarakat tersebut dilakukan dengan alasan ekonomi. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan sosialisasi yang dapat mengubah persepsi masyarakat dari pemanfaatan ekosistem hutan mangrove

tanpa batas menjadi pemanfaatan ekosistem hutan mangrove yang lestari dan berkesinambungan. Masyarakat perlu diberikan kesadaran bahwa tindakan penebangan hutan yang dilakukan tanpa penanaman kembali pohon yang telah ditebang, dapat merusak lingkungan dan menyebabkan terjadinya disfungsi hutan mangrove. Menurut Setiawan, et.al. tahun (2017) bahwa, hutan mangrove yang ditebang habis dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena dapat menyebabkan abrasi dan tidak ada lagi penahan ombak dan angin.

Nilai Jasa Lingkungan Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove mempunyai fungsi ekonomi sebagai penghasil tegakan mangrove, kayu bakar, atap nipa, ikan, kepiting dan obat-obatan (Sribianti, 2008). Selain mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi ekologis berupa fungsi fisik, kimiawi dan biologis, ekosistem mangrove juga mempunyai fungsi ekologis berupa jasa-jasa lingkungan atau *environmental services*, diantaranya :sebagai pengatur iklim, penghasil oksigen dan penyerap karbon (Abdul Haris Sambu et al., 2018).

Nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove yang diestimasi dari penelitian ini adalah nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penahan abrasi, pencegah intrusi air laut, penyedia pakan kepiting, serapan karbon dan produksi oksigen sebagai berikut :

Nilai Sebagai Penahan Abrasi

Ekosistem hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung daratan dari abrasi gelombang laut. Manfaat jasa lingkungan sebagai penahan abrasi diestimasi melalui pendekatan biaya pembuatan pemecah gelombang (*breakwater*) yang setara dengan fungsi hutan mangrove sebagai penahan abrasi. Nilai manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penahan abrasi diduga melalui pendekatan biaya pengganti (*replacement cost*). Estimasi nilai ekosistem mangrove sebagai penahan abrasi didekati dengan menghitung biaya pembuatan pemecah gelombang (*breakwater*) disepanjang pantai. Untuk menghitung biaya pembuatan pemecah gelombang (*breakwater*) sebagai penahan abrasi digunakan acuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Sumberdaya Air tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Pekerjaan Umum Tahun 2016. Estimasi nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penahan abrasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Jasa Lingkungan Ekosistem Mangrove Sebagai Penahan Abrasi

Uraian	Nilai
Ukuran pemecah gelombang/PLT (m)	150 x 20 x 5
Biaya Standar Beton (Rp)	2.921.147.000
Panjang Garis Pantai (m)	5.000
Daya Tahan (tahun)	20
Nilai Penahan Abrasi (Rp/ha/tahun)	32.457.189

Panjang garis pantai di Lingkungan Kungjung Mae yang ditutupi hutan mangrove yaitu sepanjang 5.000 meter. Berdasarkan AHSP, untuk membuat pemecah gelombang dengan ukuran panjang 150 m, lebar 20 m dan tinggi 5 m dibutuhkan biaya sebesar Rp.2.921.147.000. Sehingga untuk membangun pemecah gelombang disepanjang garis pantai di Lingkungan Kungjung Mae sepanjang 5.000 m dengan daya tahan 20 tahun maka diperoleh nilai sebesar Rp. 19.474.313 per 20 tahun. Nilai tersebut kemudian dibagi 20 untuk mendapatkan nilai per tahunnya. Dengan demikian nilai manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penahan abrasi sebesar Rp32.457.189/ha/tahun dengan luas hutan mangrove seluas 30 ha, maka diperoleh nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penahan abrasi sebesar Rp.973.715.670/tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hutan mangrove di Kelurahan Takalar Lama mempunyai manfaat yang sangat besar bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

Nilai Sebagai Pencegah Intrusi Air Laut

Nilai manfaat jasa lingkungan untuk manfaat hutan mangrove sebagai pencegah intrusi air laut dihitung melalui pendekatan biaya atau pengeluaran masyarakat dalam pemenuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga. Nilai ini dianggap setara dengan fungsi hutan mangrove sebagai pencegah intrusi dengan asumsi bahwa jika hutan mangrove tersebut hilang maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih atau tawar akibat intrusi air laut. Adapun perhitungannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Jasa Lingkungan Ekosistem Mangrove Sebagai Pencegah Intrusi Air Laut

Uraian	Nilai
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	62
Jumlah Kebutuhan Air (m ³ /bulan)	10,8
Harga Air (Rp/m ³)	416.660
Jumlah Hari Dalam 1 Tahun	365
Nilai Sebagai Pencegah Intrusi Air Laut (Rp/ha/tahun)	3.394.445.688

Jumlah kepala keluarga di pesisir Kelurahan Takalar Lama Khususnya di lingkungan Kungjung Mae adalah 62 KK. kebutuhan air tawar untuk keperluan sehari-hari masing-masing keluarga rata-rata 30 galon air/hari untuk kebutuhan air sehari-hari atau 10,8 m³/bulan dengan harga 1 galon air tawar bersih Rp.5.000 atau Rp.416.660/m³. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2. diperoleh nilai ekonomi jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai pencegah instrusi air laut sebesar Rp.3.394.445.688/ha/tahun, sehingga diperoleh nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai pencegah instrusi air laut di lokasi kajian dengan luas hutan mangrove seluas 30 Ha sebesar Rp.101.833.370.640/tahun.

Jika ekosistem mangrove dialihfungsikan ke penggunaan lain, maka fungsi jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai pencegah intrusi air laut akan hilang, sehingga masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan air tawar sebagai sumber kehidupan. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Polii et al., 2020) di hutan mangrove Kelurahan Tngkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado yang menunjukkan bahwa nilai ekonomi hutan mangrove sebagai pencegah intrusi air laut berjumlah Rp.1.781.200.000/Tahun atau Rp.17.812.000.000/10Tahun jika diproyeksikan pada 10 tahun penggunaan.

Nilai sebagai Penghasil Pakan Kepiting

Ekosistem mangrove menghasilkan serasah yang merupakan penyuplai bahan organik bagi ekosistem mangrove sehingga dapat menunjang kehidupan makhluk hidup di dalamnya (Haris et al., 2012). Salah satu fungsi hutan mangrove sebagai penyedia pakan (*feeding ground*) untuk berbagai jenis biota laut seperti kepiting. Nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penyedia pakan kepiting dihitung dengan pendekatan biaya pengganti. Nilai ini diestimasi setara dengan jumlah pakan yang dibutuhkan untuk setiap kilogram kepiting dari hasil tangkapan di sekitar hutan mangrove dikali harga pakan

kepiting pabrikan. Nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penyedia pakan kepiting disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Jasa Lingkungan Ekosistem Mangrove Sebagai Penyedia Pakan Kepiting

Uraian	Nilai
Hasil Tangkapan Kepiting (kg/tahun)	3.888
Jumlah Pakan Kepiting Pabrikan per 1 kg kepiting yang dibudidayakan (kg)	10
Harga Pakan Kepiting Pabrikan (Rp/kg)	7.000
Nilai Sebagai Penyedia Pakan Kepiting (Rp/ha/tahun)	544.320.000

Jumlah kepiting yang ditangkap disekitar hutan mangrove dari hasil wawancara 10 orang responden sebesar 3.888 kg/tahun. Harga pakan kepiting pabrikan Rp.350.000/karung kemudian dibagi 50 kilogram dalam satu karung pakan pabrikan dan didapatkan harga pakan kepiting sebesar Rp.7.000/kilogram. Dengan luas tambak 0,5 ha dihasilkan 100 kg kepiting/satu kali panen kemudian dibagi 10 karung pakan pabrikan yang dihabiskan dalam satu kali panen tersebut, dapat diperoleh kebutuhan pakan adalah 10 kilogram/satu kilogram kepiting. Berdasarkan data tersebut, diperoleh nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penyedia pakan alami dengan mengalikan nilai keseluruhan kepiting dalam satu tahun dengan harga pakan/kilogram dan kebutuhan pakan/kilogram kepiting, sehingga didapatkan nilai sebesar Rp. 272.160.000/Tahun dengan luas 0,5 ha atau Rp. 544.320.000/ha/tahun. Luas hutan mangrove di Kelurahan Takalar lama seluas 30 ha, sehingga diperoleh nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penyedia pakan kepiting sebesar Rp.16.329.600.000/tahun. Penelitian tentang nilai manfaat hutan mangrove sebagai penghasil pakan kepiting juga pernah dilakukan oleh (Nanlohy, 2015) di kawasan hutan mangrovedesa Waiheru kota Ambonyang menjelaskan bahwa nilai manfaat hutan mangrove sebagai penghasil pakan kepiting adalah sebesar Rp.12.193.167/Tahun. Nilai manfaat ekonomi ekosistem mangrove sebagai penyedia pakan di hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 2.338.650.000/ha/tahun (A.H. Sambu & Sribianti, 2016). Hal ini membuktikan bahwa hutan mangrove di samping memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, juga memiliki fungsi jasa lingkungan sebagai penyedia pakan kepiting yang sangat besar.

Nilai Serapan Karbon Tahunan

Keberadaan ekosistem mangrove diyakini sebagai salah satu upaya penurunan kandungan gas CO₂ dari atmosfer, karena memiliki fungsi ekologis sebagai penyerap dan penyimpan karbon dalam upaya mitigasi perubahan iklim (Rachmawati et al., 2014). Nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penyerap karbon disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Jasa Ekosistem Mangrove Sebagai Penyerap Karbon

Uraian	Nilai
Serapan karbon tahunan (ton/ha)	2,97
Harga jual karbon (US\$/Ton)	4,57
Nilai tukar rupiah tahun 2015 (Rp/1US\$)	14.610
Harga jual karbon (Rp/ton)	66.767,7
Nilai serapan karbon tahunan (Rp/ha/tahun)	198.300,07

Berdasarkan hasil penelitian di hutan mangrove Kecamatan Mappakasunggu diperoleh total serapan karbon tahunan sebesar 2,97 ton/ha/tahun (Sribianti et al., 2020). Berdasarkan data tersebut diperoleh nilai serapan karbon tahunan sebesar Rp. 198.300,07/ha/tahun dengan luas hutan mangrove sebesar 30 ha diperoleh nilai serapan karbon tahunan sebesar Rp.5.949.002,1/tahun, nilai tersebut diperoleh dari total serapan karbon dikalikan dengan harga jual serapan karbon sebesar US\$ 4,57 per ton = Rp. 66.767,7).

Nilai Produksi Oksigen (O₂)

Salah satu fungsi jasa lingkungan ekosistem mangrove adalah sebagai penghasil oksigen, hutan mangrove mampu menghasilkan oksigen dalam jumlah besar. Nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penghasil oksigen disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Jasa Lingkungan Ekosistem Mangrove Sebagai Penghasil Oksigen (O₂)

Uraian	Nilai
Serapan CO ₂ tahunan (Ton/ha/tahun)	2,97
Angka ekivalen atau konversi unsur CO ₂ ke O ₂	0,73
Produksi Oksigen (Ton/ha/tahun)	2,17
Harga jual O ₂ (Rp/Ton)	927.000
Nilai Produksi Oksigen (O ₂) (Rp/ha/tahun)	2.011.590

Hasil penelitian (Sribianti et al., 2020), menunjukkan bahwa total serapan karbon tahunan hutan mangrove di Kecamatan Mappakasunggu sebesar 2,97 ton/ha/tahun. Berdasarkan data tersebut diperoleh produksi O₂ sebesar 2,17 ton/ha/tahun yang

diperoleh dari serapan karbon tahunan dikali dengan faktor konversi atom CO₂ ke O₂ sebesar 0,73, jika dikali dengan harga O₂ per ton dipasaran sebesar Rp. 927.000/ton, maka diperoleh nilai produksi O₂ sebesar Rp. 2.011.590/ha/tahun. Luas hutan mangrove di lokasi penelitian sebesar 30 ha sehingga diperoleh nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai produksi oksigen sebesar Rp.60.347.700/tahun.

Nilai Pemelihara Keanekaragaman Hayati

Ekosistem mangrove berfungsi sebagai pemeliharaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang merupakan salah satu jasa lingkungan dari ekosistem tersebut. Nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove dihitung menggunakan pendekatan *transfer benefit* yang didekati dengan menggunakan nilai manfaat dari keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Nilai keanekaragaman hayati mengacu pada nilai *biodiversity* hutan mangrove di wilayah pesisir Indonesia yaitu US\$1.500/km²/Tahun atau US\$15/Ha/Tahun (Ruittenbeek, 1992). Nilai *biodiversity* ini dihitung dengan mengalikan nilai manfaatnya yaitu US\$15/hektar/tahun dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yaitu Rp.14.610 (The World Bank, 2015) kemudian nilai tersebut dicompond dari tahun 1992 ke tahun 2021 dengan menggunakan UMR Kabupaten Takalar dan Irian Barat tahun 2021 serta jumlah suku bunga pada tahun penelitian sebesar 3,75 %, sehingga didapat nilai *biodiversity* ekosistem mangrove Kelurahan Kunjung Mae dengan luas hutan mangrove seluas 30 Ha sebesar Rp.19.121.280/tahun. Perhitungan nilai *biodiversity* disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai Jasa Lingkungan Ekosistem Mngrove Sebagai Pemelihara Keanekaragaman Hayati

Uraian	Nilai
Nilai <i>biodiversity</i> Kunjung Mae (US\$ per ha per tahun)	43,62
Kurs (1 US\$ = Rp)	14.610
UMR Irian Barat	3.134.600
UMR Kabupaten Takalar	3.103.800
Luas Hutan Mangrove (Ha)	30
Tingkat Suku Bunga (%)	3,75
Nilai Sebagai Pemelihara Keanekaragaman Hayati (Rp/ha/tahun)	637.376

Penelitian yang dilakukan oleh (Osmaleli et al., 2013), menggunakan teknik perhitungan yang sama memperoleh nilai keanekaragaman hayati hutan mangrove di Pabean Udik sebesar Rp. 654.160/ha/tahun. Hal ini menjelaskan pentingnya menjaga

kelestarian ekosistem hutan mangrove agar dapat dirasakan manfaat ekonomi maupun ekologisnya di masa yang akan datang.

Total Nilai Jasa Lingkungan Ekosistem Mangrove

Nilai total jasa lingkungan ekosistem mangrove merupakan penjumlahan dari seluruh nilai manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove Kelurahan Takalar Lama, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar. Total nilai manfaat jasa lingkungan hutan mangrove dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Total Nilai Jasa Lingkungan Ekosistem Mangrove

No	Jenis Nilai Jasa Lingkungan	Nilai Manfaat (Rp/ha/tahun)	Nilai Manfaat (Rp/tahun)	Persentase (%)
1	Nilai Penahan Abrasi	32.457.189	973.715.670	0,82
2	Nilai Pencegah Intrusi Air Laut	3.394.445.688	101.833.370.640	85,41
3	Nilai Penyedia Pakan Kepiting	544.320.000	16.329.600.000	13,70
4	Nilai Serapan Karbon Tahunan	198.300,07	5.949.002,1	0,005
5	Nilai Produksi Oksigen	2.011.590	60.347.700	0,051
6	Nilai Pemeliharaan Keanekaragaman Hayati	637.376	19.121.280	0,015
Total Nilai Jasa Lingkungan		3.974.070.143,1	119.222.104.292,1	100,00

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa nilai total manfaat jasa lingkungan hutan mangrove di Kelurahan Takalar Lama, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar seluas 30 ha sebesar Rp.119.222.104.292,1/tahun atau Rp.3.974.070.143,1/ha/Tahun. Nilai manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai pencegah intrusi air laut memiliki nilai paling tinggi sebesar Rp.3.394.445.688/ha/Tahun atau Rp.101.833.370.640/tahun dengan persentase 85,41%, sedangkan yang paling rendah yaitu nilai serapan karbon sebesar Rp.198.300,07/ha/tahun atau Rp.5.949.002,1/Tahun dengan persentase 0,005%. Hal ini membuktikan bahwa hutan mangrove memiliki nilai jasa lingkungan yang sangat tinggi sehingga diharapkan dapat dijadikan dasar atau acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan mangrove di Kelurahan Takalar Lama, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar mempunyai nilai manfaat jasa lingkungan yang sangat besar yang dapat menunjang perekonomian masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat (nelayan) terhadap fungsi dan peran ekosistem mangrove di Kelurahan Takalar Lama, berada pada kategori tinggi, gambaran persepsi ini sebagai indikasi bahwa masyarakat di Kelurahan Takalar Lama menyadari pentingnya fungsi dan peran ekosistem mangrove bagi keberlangsungan hidup masyarakat (nelayan) di masa kini dan akan datang.

Nilai total jasa lingkungan ekosistem mangrove di Kelurahan Takalar Lama, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar sebesar Rp.119.222.104.292,1/tahun atau Rp.3.974.070.143,1/ha/tahun, yang terdiri dari nilai manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove sebagai penahan abrasi sebesar Rp.32.457.189/ha/tahun atau Rp.973.715.670/tahun, nilai sebagai pencegah intrusi air laut sebesar Rp.3.394.445.688/ha/Tahun atau Rp.101.833.370.640/tahun, nilai manfaat sebagai penyedia pakan kepiting sebesar Rp.544.320.000/ha/tahun atau Rp.16.329.600.000/tahun, nilai serapan karbon tahunan sebesar Rp.198.300,07/ha/Tahun atau Rp. 5.949.002,1/tahun, nilai produksi oksigen sebesar Rp. 2.011.590/ha/tahun atau Rp. 60.347.700/tahun dan nilai keanekaragaman hayati sebesar Rp.637.376/ha/tahun atau Rp.19.121.280/tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Antinori, C., & Sathaye, J. a. (2007). Assessing Transaction Costs of Project-based Greenhouse Gas Emissions Trading. *Environmental Protection*, 134. <http://are.berkeley.edu/~cmantinori/LBNL-57315.pdf>
- Badan Penelitian dan Pembangunan Pekerjaan Umum (2013). Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2013. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2013*.
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahab, N. (2010). *Penilaian ekonomi ekosistem hutan mangrove & aplikasinya dalam perencanaan wilayah pesisir*. Graha Ilmu. <https://doi.org/http://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=30608>

- Haris, A., Damar, A., Bengen, D. G., & Yulianda, F. (2012). Produksi Serasah Mangrove dan Kontribusinya terhadap Perairan Pesisir Kabupaten Sinjai. *Octopus: Jurnal Ilmu Perikanan*, 1(1), 13–18.
- Nanlohy, H. (2015). Valuasi ekonomi ekosistem hutan mangrove di desa waiheru kota ambon. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 25(1), 15–21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941>
- Ohama, Yutaka. (2002). "Participatory Approach" Bahan Pelatihan dalam JICA International Training on PLSD : Theories and Practies. Nagoya.
- Osmaleli, Kusumastanto, T., & Ekayani, M. (2013). *Analisis Ekonomi Dan Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan Di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu*.
- Polii, V. D., Durand, S. S., & Andaki, J. A. (2020). Nilai Ekonomi Tidak Langsung Ekosistem Mangrove Di Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado. *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 8(1), 13–23.
- Purnawan, E. I. (2016). *Teknik Estimasi Cadangan Karbon Serapan Karbondioksida & Produksi Oksigen Hutan Alam Dipterocarpa*. 0–20.
- Rachmawati, D., Setyobudiandi, I., & Hilmi, E. (2014). Potensi estimasi karbon tersimpan pada vegetasi mangrove di wilayah pesisir Muara Gembong Kabupaten Bekasi. *Omni-Akuatika*, 10(2), 85–91.
- Rospita, J., Zamdial, Z., & Renta, P. P. (2017). Valuasi ekonomi ekosistem mangrove di desa pasar ngalam kabupaten seluma. *Jurnal enggano*, 2(1), 115–128. <https://doi.org/10.31186/jenggano.2.1.115-128>
- Sambu, A.H., & Sribianti, I. (2016). The management of mangrove ecosystem based on mitigation: Case study in mangrove area of Tongke-Tongke, South Sulawesi. *International Journal of Oceans and Oceanography*, 10(1).
- Sambu, Abdul Haris, Pi, S., Sribianti, I., Chadijah, A., & Pi, S. (2018). *Model pengelolaan mangrove berbasis ekologi dan ekonomi*. Penerbit INTI MEDIATAMA.
- Sribianti, I. (2008). Valuasi Ekonomi Lahan Mangrove Pada Berbagai Sistem Pengelolaan Di Sulawesi Selatan. *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Sribianti, I., Daud, M., Muthmainnah, M, T., Abdullah, A. A., & Anggreini, W. (2020). *Estimasi Potensi Biomassa, Cadangan Karbon Dan Serapan Co2 Pada Beberapa Kerapatan Tegakan Mangrove Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim*. 129–136.
- Tuwo, A., dan Laut, P. E. P., & Ekologi, P. (2011). Sosial Ekonomi, Kelembagaan dan Sarana

Wilayah. Surabaya: Brilian Internasional.

The Word Bank. 2011. Words Development Indicators. Washington D.C. 20433 USA

UNEP. (2014). *Building Natural Capital: How REDD+ can Support a Green Economy*.
International Resource Panel.

Chapter 16

PEMBERDAYAAN NELAYAN

PEMBERDAYAAN NELAYAN MELALUI KOPERASI PERIKANAN SEBAGAI KATALISATOR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN GOWA

Benny Audy Jaya Gosari,
Abdul Wahid



Benny Audy Jaya Gosari adalah Dosen pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddi, Makassar. Meraih gelar S1 Ilmu Ekonomi di STIE-Indonesia Makassar (2001), S1 Ilmu Kelautan di Universitas Hasanuddin, Makassar (2002), dan Magister Sains Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsentrasi Pengelolaan Laut Dangkal dan Pantai) di Universitas Hasanuddin (2007). *Email : bennygosari@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah sebuah konsep dan kerangka yang ditujukan untuk mengikis fenomena kemiskinan dan mempromosikan keadilan serta keberlanjutan dalam perkembangan masyarakat. Dalam konsep dan kerangka pemberdayaan, kemiskinan dimaknakan secara structural, bahwa kemiskinan terjadi karena bekerjanya struktur yang memiskinkan, bukan sepenuhnya karena ketidakmampuan dari pihak miskin tersebut (Arief. A. Adri, 2002). Lebih tajam lagi, diasumsikan bahwa kemiskinan terjadi karena berlangsungnya pelemahan daya kemampuan (*capability deprivation*) terhadap golongan miskin (Sen, 2002).

Menurut Sen (2002), terdapat tiga jenis daya kemampuan pada golongan miskin yang telah terlemahkan, yakni : (1) daya sosial (*social capability*), berupa akses pada basis produksi rumah tangga seperti, lahan, sumber keuangan, informasi, pengetahuan dan keterampilan, serta partisipasi dalam organisasi sosial; (2) daya politik (*political capability*), berupa akses individu dalam pengambilan keputusan politik, bukan hanya dalam memilih melainkan juga dalam menyuarakan aspirasi dan untuk bertindak secara kolektif; (3) daya psikologis (*psychological capability*), berupa kesadaran tentang potensi diri baik dalam ranah sosial maupun ranah politik. Pemberdayaan adalah proses dimana

golongan miskin difasilitasi, didukung dan diperkuat untuk memperoleh kembali sejumlah daya yang terlemahkan tersebut.

Kaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya komunitas nelayan. Menurut UU No.45/2009-Perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam konteks itu, secara struktur, komunitas nelayan nampak hanya terdiri dua lapisan berdasarkan penguasaan alat produksi, berupa alat penangkapan dan perahu, yakni: lapisan yang menguasai alat produksi (*punggaha*) dan lapisan yang tidak menguasai alat produksi (*sahi*) dan bekerja pada *punggaha* (Arief, 2021). Masyarakat nelayan juga terbagi dua berdasarkan penguasaan dan penggunaan teknologi, yaitu : nelayan tradisional menggunakan teknologi yang sederhana, dan nelayan modern menggunakan teknologi yang lebih moderen dibandingkan dengan nelayan tradisional (Imron, 2003). Dengan demikian, nelayan *sahi* dan nelayan tradisional, secara realias pada umumnya ada pada situasi yang termarginalkan dari berbagai dimensi (sosial, ekonomi dan budaya). Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebanyakan mencari pekerjaan tambahan, seperti menjadi buruh bangunan, atau mencari pinjaman baik kepada *punggaha* atau jejaring keluarga, kerabat atau sesama nelayan lainnya.

Kondisi ini membuat nelayan tradisional atau nelayan skala kecil selalu mencari upaya dalam menambah penghasilannya agar mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Berbagai program telah diintroduksi oleh pemerintah terkait dengan mata pencaharian masyarakat pesisir. Program-program tersebut diantaranya: pengembangan usaha budidaya pantai dan laut, pengembangan usaha pengolahan hasil tangkapan, pengembangan wisata pantai dan laut agar melahirkan multiplayer ekonomi dan sebagainya. Namun demikian, berbagai program yang dimaksud nampak belum terlalu efektif dalam mendorong perkembangan ekonomi rumah tangga nelayan *grasroot*

Koperasi merupakan salah satu penggiat perekonomian yang dapat diandalkan karena terkait langsung dengan barang dan jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan masyarakat pesisir sebagai bentuk penghasilan tambahan. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi untuk mencapai kesejahteraan secara bersama. Meskipun koperasi terdapat

disetiap pelosok nusantara, namun perannya dalam memberdayakan nelayan sebagai katalisator perekonomian, jumlahnya masih sangat kecil.

Pemberdayaan nelayan oleh koperasi bukan hanya sebagai katalisator perekonomian, namun bisa berbalik memberikan dampak negatif yang menimbulkan kerugian ekonomi, jika dalam pengelolaannya tidak direncanakan atau dipersiapkan dengan baik berdasarkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Koperasi yang tidak sehat tentu saja dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat. Tulisan dalam buku ini, akan memberikan gambaran aspek ekonomi dan sosial mengenai pemberdayaan nelayan oleh koperasi.

Menurut UUD 1945 pasal 33, dinyatakan sebagai cara kooperatif bisnis yang sesuai bagi perekonomian Indonesia (Mohammad Hatta, 2015;20)

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945. Buah pikiran yang tertanam di dalam Pasal 33 UUD 1945 ini berasal dari saya sendiri, yang saya majukan dahulu waktu Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan kita sedang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sebab itu terimalah pernyataan saya, bahwa memang koperasilah yang dimaksud dengan ‘usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan itu’. Dan hanya koperasilah yang dapat merintis jalan yang aman dan sehat untuk mencapai kemakmuran rakyat, rohani, dan jasmani, yang pada gilirannya menjadi sendi kesejahteraan sosial. Koperasi menghidupkan semangat demokrasi yang sebenarnya, yaitu demokrasi politik, ekonomi dan sosial..”

Pemberdayaan nelayan tradisional oleh koperasi bukan sesuatu yang sifatnya ilusi. Peran koperasi dalam pemberdayaan nelayan tradisional, khususnya dalam penciptaan lapangan pekerjaan alternative sangat dibutuhkan. Menurut Kusnadi (2008) ciri-ciri nelayan tradisional adalah : 1) Teknologi penangkapan yang digunakan bersifat sederhana dengan ukuran perahu yang kecil, daya jelajah terbatas, daya muat perahu sedikit, daya jangkauan alat tangkap terbatas dan perahu dilajukan dengan layar, dayung, atau mesin ber-PK kecil, 2) Besaran modal usaha terbatas, 3) Jumlah anggota organisasi penangkapan kecil antara 2-3 orang, dengan pembagian peran bersifat kolektif (non-

spesifik) dan umumnya berbasis kerabat, tetangga dekat, dan/atau teman dekat, 4) Orientasi ekonomisnya terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (subsisten).

Dengan ciri demikian, sesungguhnya nelayan tradisional sangat membutuhkan untuk diberdayakan dalam hal lahirnya alternative-alternatif pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama yang digeluti selama ini. Menurut Arief, A. Adri (2002) salah satu upaya yang dapat dilakukan berdasarkan tipologi ekologis dan sumber pendapatan masyarakat pesisir adalah upaya untuk mengembangkan usaha alternatif selain usaha penangkapan ikan dalam rangka menstabilkan dan meningkatkan pendapatan nelayan dari satu sisi, dan mengurangi tekanan terhadap sumberdaya perikanan dari sisi lainnya. Usaha alternatif tersebut dapat dimulai dengan memanfaatkan waktu luang nelayan dan keluarganya sampai menjadikan usaha alternatif tersebut sebagai mata pencaharian pokok sebahagian dari pada keluarga nelayan.

Selanjutnya dikatakan bahwa, untuk mengembangkan usaha alternatif perlu mempertimbangkan variabel teknis yang biasanya menjadi kendala atau *constrain* bagi pengembangannya. Variabel teknis yang utama yang dimaksud, antara lain: minat masyarakat, ketersediaan bahan baku/sumberdaya alam, ketersediaan tenaga kerja dan peluang pasar (analisis teknis) (Arief, A. Adri, 2002).

Konteks keterlibatan lembaga seperti koperasi yang mengambil peran inisiatif menjadi lembaga pemberdayaan merupakan salah satu solusi yang progresif dalam mendorong perkembangan perekonomian pada masyarakat pesisir.

Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian adalah menganalisis peran koperasi sebagai lembaga pemberdayaan nelayan tradisional dan sekaligus sebagai peran katalisator perekonomian masyarakat pesisir”.

Metodologi

Lokasi penelitian di Koperasi Juku Lele Kabupaten Gowa yang merupakan koperasi yang bergerak di bidang perikanan, anggota koperasi aktif sebagai pembudidaya ikan Lele yang juga berprofesi sebagai nelayan tradisional. Data dikumpulkan melalui

wawancara mendalam terhadap anggota koperasi. Jumlah total sampel sebanyak 75 orang yang terdiri dari 24 orang yang merupakan anggota koperasi Juku Lele dan 51 orang yang merupakan masyarakat yang bermukim disekitar koperasi Juku Lele yang berprofesi sebagai nelayan tradisional dan memiliki keramba jaring apung untuk memelihara ikan Lele. Analisis data dilakukan secara kualitatif sementara peranan koperasi sebagai katalisator perekonomian dilakukan secara kuantitatif.

Profil Wilayah Penelitian

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 10 km dari Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, terletak di antara 5°5'-5°34.7' Lintang Selatan (LS) dan 12°33.19'-13°15.17' Bujur Timur (BT). Penyebaran penduduk Kabupaten Gowa masih bertumpu di Kecamatan Somba Opu, yakni sebesar 19,95% dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa. Kecamatan Somba Opu, kepadatan penduduknya sebanyak 4.632 orang/Km². Rata-rata anggota rumah tangga terbesar sebanyak 4,65 orang dari total jumlah rumah tangga yakni 28.002 KK. Luas Kecamatan Somba Opu 28,09Km² atau sebesar 1,49% dari luas Kabupaten Gowa yang terletak di dataran rendah (100% pada ketinggian 0-25M). (Kabupaten Gowa dalam angka 2013)

Wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km. Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Kabupaten Gowa memiliki potensi dalam pengembangan perikanan terutama budidaya perikanan darat (tambak, kolam/sawah) dengan luas areal 737 ha. Total produksi perikanan Kabupaten Gowa pada tahun 2017 sebesar 1.042 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 6.593.214.000,- Dari data diatas memperlihatkan bahwa meskipun daerah ini memiliki daerah pantai yang relative terbatas, namun peluang pengembangan

usaha pada sector perikanan khususnya perikanan darat dengan budidaya dan penangkapan ikan air tawar dapat dilakukan pada areal lahan sawah irigasi, tanggul, saluran irigasi primer, kolam dan danau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas dan Keterlibatan Nelayan Tradisional dalam Koperasi

Secara umum nelayan tradisional di Kecamatan Somba Opu, dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu : 1) Nelayan yang mulai melaut pada pagi hari dan pulang pada siang hari (rata-rata 3-6 jam). Alat tangkap yang digunakan sangat sederhana, seperti perahu bermesin tempel ber-PK kecil, pancing dan jaring bentang berukuran kecil. Kelompok ini lebih dikenal sebagai nelayan pemancing (*Pappekang*). Jarak jelajah nelayan ini dalam mencari ikan hanya berkisar 1-5 mil dari pantai dengan organisasi penangkapan terdiri dari 2-4 orang, 2) Nelayan melaut pada malam hari (berangkat malam pulang pagi). Kelompok ini lebih dikenal sebagai nelayan *Parrawe*. Alat tangkap yang digunakan lebih maju dibandingkan dengan nelayan *Pappekang*, perahu yang digunakan berukuran lebih besar, bermesin 12-15 PK, organisasi penangkapan terdiri dari 5-7 orang.

Nelayan tradisional yang menjadi anggota koperasi terdiri dari 4 kelompok *Pappekang* dan 2 kelompok *Parrawe*, sedangkan non anggota terdiri dari 6 kelompok *Pappekang* dan 5 kelompok *Parrawe*. Nelayan sebagai anggota koperasi dan non anggota pada kelompok *Pappekang* dan *Parrawe* sebelum berangkat menangkap mereka ke keramba jaring apung dulu untuk memberi makan ikan lele yang mereka budidaya dan ketika pulang menangkap. Apabila panen, semua anggota koperasi libur untuk menangkap, sedangkan non anggota tetap menangkap, setelah pulang baru mereka memanen hasil budidaya mereka hanya saja waktu berangkat menangkap setelah panen mereka kurang dengan mengundur waktu keberangkatan (rata-rata mengundurkan 3-4 jam). Hal ini mereka lakukan agar ada jeda beristirahat setelah memanen.

Koperasi Juku Lele memiliki dua unit usaha, yaitu penyediaan benih lele dan penjualan lele. Seluruh responden mengambil benih ikan lele di koperasi Juku Lele dan menjual hasil pembesaran ikan lele ke koperasi, yang kemudian koperasi Juku Lele mendistribusikan ke pasar (konsumen akhir). Semua anggota hanya menggunakan satu

unit usaha, yaitu pengadaan benih ikan lele. Penjualan lele merupakan unit koperasi yang menyalurkan hasil lele anggota. Ini merupakan bentuk pemberdayaan nelayan oleh koperasi sebagai bentuk untuk membantu anggota koperasi memperoleh pendapatan lebih dari penjualan hasil panen lele yang lebih cepat dan perputaran modal. Pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi ini menjadi katalisator bagi anggota dalam meningkatkan kesejahteraannya. Anggota koperasi dapat mengambil lagi bibit dari koperasi untuk diperbesar di keramba jaring apung mereka karena hasil panen sudah habis terjual.

Pemberdayaan nelayan oleh koperasi nampak seperti biasa-biasa saja, namun kenyataannya berdampak sangat luar biasa. Dari segi ekonomi, pengendapan modal merupakan gangguan terhadap aliran kas. Dana tunai yang seharusnya bisa digunakan untuk memulai usaha terhambat karena hasil panen belum laku. Perputaran uang jadi melambat. Ini sangat merugikan nelayan. Nelayan yang terdesak secara ekonomi akan menjual hasil panen lebih murah agar modal segera kembali. Resiko hasil panen membusuk membayangi nelayan sehingga menimbulkan kerugian material yang lebih banyak. Untuk menghadapi masalah ini maka nelayan memerlukan modal tambahan agar mampu membeli prasarana tambahan agar hasil panen mampu dipertahankan keseharannya. Apabila nelayan berani mengambil resiko, maka akan melakukan pinjaman ke lembaga keuangan non formal seperti tengkulak. Hal ini tentu akan menambah beban nelayan dalam menjalankan usahanya.

Pemberdayaan nelayan oleh koperasi juga tanpa disadari menjadi katalisator dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai anggota. Ketersediaan bibit dalam jumlah besar dan murah berperan penting sehingga aktivitas budidaya berjalan lancar. Nelayan sebagai anggota koperasi dapat mengambil bibit dalam jumlah besar tanpa dibebani bunga karena hasil panen dari budidaya nelayan dijual kembali ke koperasi sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

Perbandingan Nelayan Anggota Koperasi dan Bukan Anggota

Perbandingan anggota koperasi dengan non anggota dalam hal kepemilikan aset dapat dilihat pada tabel 1. Anggota memiliki tiga kali lipat aset jaring apung dari non anggota. Kami menemukan bahwa banyaknya jumlah keramba jaring apung memberikan

lebih banyak produksi dan pendapatan secara signifikan. Tidak ada perbedaan jarak yang signifikan ke pasar meskipun jaraknya empat kali lipat.

Tabel 1. Perbandingan Anggota Koperasi dengan Non Anggota

	Anggota (N=24)	Non Anggota (N=51)	Total Sampel (N=75)
	Kepemilikan		
Keramba Jaring Apung (KJA)	158 (75,59%)	51 (24,41%)	209 (100%)
	Hasil Panen		
Per petak KJA (Kg)	50-60	30-40	1-2x lebih banyak dari Non Anggota
	Akses Pasar		
Jarak ke pasar (Km)	0,5	2,0	4x lebih pendek dari Non Anggota
	Pendapatan dan Rasio		
Pendapatan (Rata-rata/3bulan)(Juta)	2.567,5	198,328	3.396,25
Ratio (%)	65,00	23,93	47,07 lebih tinggi dari Non Anggota

Sumber : Data Primer Diolah, 2019.

Secara kuantitas, anggota koperasi berjumlah lebih sedikit dari pada non anggota (perbandingan 1:2) namun kepemilikan aset berbanding terbalik jumlahnya (menjadi 3:1). Inilah pemberdayaan nelayan oleh koperasi secara nyata di lapangan yang tidak disadari oleh anggota koperasi itu sendiri. Koperasi selain memberikan layanan penyediaan bibit yang murah dan berkualitas, sedangkan anggota mendapat kemudahan akses menjual panen yang berdampak perputaran modal usaha cepat. Keuntungan yang didapatkan selain dibelanjakan untuk konsumsi rumah tangga, ternyata sebagian besar diputar kembali dengan menambah aset produksi berupa keramba jaring apung. Nelayan tanpa sadar berdaya dengan mandiri karena mendapatkan keuntungan yang nyata secara finansial. Insting sebagai pebisnis mendorong mereka menginvestasikan sebagian keuntungan ke aset agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Pemberdayaan nelayan oleh koperasi Juku Lele sangat signifikan, karena dalam kurun waktu lebih kurang setahun keramba jaring apung milik anggota sudah naik menjadi tiga kali lipat. Peran koperasi dalam peningkatan kepemilikan aset ini didasari oleh tiga hal utama yaitu :

Pertama. Jujur, nelayan sebagai masyarakat yang termajinalkan di wilayah pesisir sangat mendambakan kesejahteraan. Mereka bekerja keras membanting tulang agar mampu mencukupi kesejahteraan keluarga. Kurangnya hasil melaut bukan hanya karena hasil tangkapan yang kurang, namun karena ketidak-berdayaan nelayan sebagai buruh dalam melaut. Pemilik perahu sudah mengambil porsi yang besar dalam hasil tangkapan sehingga sisanya yang dibagikan ke semua pekerja di kapal. Ini adalah ungkapan hati dari sebagian besar responden. Adapun kelebihan hasil yang mereka dapatkan, diupayakan dilakukan usaha agar dapat menambah pendapatan keluarga. Koperasi Juku Lele memberikan harapan ini dengan berlaku jujur terhadap anggota koperasi yang di beri bantuan berupa bibit lele. Nelayan pun berlaku jujur dengan menyetor hasil panen lele. Keuntungan yang diperoleh lalu dibelikan keramba jaring apung yang dikelola bersama anggota lain di lahan koperasi. Adanya sinergi antara koperasi dan anggota sehingga hasil panen juga lebih baik dari non anggota, dimana hasil panen untuk anggota berkisar antara 50-60 Kg per petak keramba jaring apung sedangkan non anggota hanya berkisar 30-40 Kg. Ini membuktikan koperasi memberdayakan anggotanya bukan memperdayakan, dimana hasil panen anggota rata-rata mencapai 1-2 kali dari non anggota.

Kedua. Amanah, tidak banyak nelayan yang percaya terhadap suatu lembaga. Nanti ada bukti yang jelas, baru mereka akan menginvestasikan aset. Koperasi Juku Lele dalam hal ini sangat amanah karena hasil panen anggota disaksikan langsung dan/atau dipercayakan oleh anggota ketika mereka melaut. Terbukti dari hasil panen yang mereka dapatkan apakah disaksikan langsung atau tidak kurang lebih sama, sehingga ketika melaut, anggota tidak resah karena koperasi menjalankan amanahnya dalam memberdayakan nelayan sebagai anggotanya. "Gayung bersambut" maka anggota pun mengamankan hasil keuntungan panen dengan membuat lagi keramba jaring apung yang dititip di lahan koperasi. Hasil panen pun berlipat pada periode berikutnya. Walaupun anggota koperasi hanya sedikit namun produktivitas mereka tiga kali lipat dari nelayan yang sama-sama melakukan budidaya Lele namun bukan anggota koperasi.

Ketiga. Akad yang jelas, hal ini sangat penting karena koperasi memberikan akad yang jelas di awal sehingga anggota merasa nyaman akan amanah dan kejujuran pengurus koperasi. Pemberdayaan nelayan oleh koperasi di akad ini memberikan jaminan modal

berupa bibit lele dan keuntungan yang lebih banyak dari hasil panen karena hasil panen langsung diambil oleh koperasi dengan harga yang kompetitif di pasar. Harga beli kembali hasil panen yang kompetitif ini bahkan dinikmati oleh nelayan lain walaupun bukan anggota koperasi bila memenuhi akad yang telah ditentukan oleh koperasi. Koperasi tidak menutup akad hanya pada anggota saja namun juga diberikan juga kepada nelayan yang bermukim disekitar koperasi. Tentunya akad yang diberikan berbeda sedikit dari anggota, karena anggota mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan yang bukan anggota, namun tetap kompetitif.

Pendapatan dan Ratio

Tingkat pendapatan yang diperoleh anggota koperasi sebesar Rp.2.567.000,-, sedangkan non anggota sebesar Rp.198.000,-. Hal ini menunjukkan sangat nyata pemberdayaan koperasi terhadap anggota karena anggota mendapatkan pendapatan lebih dari 12x daripada pendapatan non anggota. Tingginya pendapatan anggota ini tentunya membuat mereka lebih berdaya dikarenakan mampu memenuhi keperluan dasar untuk sandang, pangan dan papan (kebutuhan pokok) dan kebutuhan sekunder lainnya. Beberapa responden memaparkan mereka sudah mampu membeli televisi untuk hiburan dan alat telekomunikasi yang lebih kekinian dibandingkan yang non anggota.

Tingkat pendapatan yang tinggi ini sesuai dengan akad yang anggota lakukan dengan koperasi, dimana hasil panen dijual dengan harga yang kompetitif. Hasil panen yang melimpah karena adanya sinergi antara koperasi dan anggota, dimana ketika nelayan melaut maka yang menjaga tambak adalah pengurus koperasi atau orang yang dipekerjakan oleh koperasi. Adapun jika nelayan tidak melaut maka mereka lah yang produktif menjaga dan memelihara. Koperasi juga memberdayakan nelayan dengan membekali anggota koperasi kiat dan trik budidaya lele agar hasil panen lebih optimal. Hal ini terungkap dari bebrpa responden yang mengatakan bila mereka tidak melaut maka pengurus koperasi membekali mereka dengan kiat dan trik memelihara lele secara langsung di keramba jaring apung mereka. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yolanda, Lestari, & Situmorang, (2015) pengurus koperasi memberikan pelatihan agar anggota mendapatkan tambahan pengetahuan. Anggota sangat bersyukur atas pemberdayaan koperasi, hal ini dikarenakan mereka mendapat pengetahuan tambahan seperti mengolah pakan dari limbah rumah tangga sehingga mereka tidak mengeluarkan biaya lebih

untuk membeli pakan. Tentunya hal ini memberikan dampak hasil panen yang lebih optimal dan pendapatan anggota menjadi lebih banyak dari non anggota.

Rasio keuntungan yang diperoleh anggota koperasi sebesar 65% dan 23,93% untuk non anggota (Tabel 1.) Hal ini menunjukkan keberhasilan koperasi memberdayakan anggotanya. Berkat keuntungan yang lebih besar, anggota koperasi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan hubungan sosialnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Verhotstadt, & Maertens, (2014) dimana koperasi mampu menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatnya pendapatan dari keuntungan yang didapatkan menjual hasil panen. Koperasi Juku Lele sukses memberdayakan Nelayan berkat kejujuran pengurus, amanah dan akad yang jelas di awal usaha kepada anggota.

Nelayan memiliki pendapatan tambahan yang sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka yang kadang tidak terpenuhi oleh hasil melaut. Tingginya pendapatan yang diperoleh nelayan juga karena dukungan dari koperasi yang langsung membeli hasil panen anggotanya dan menjual langsung ke konsumen akhir. Harga jual dan beli yang sangat baik ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Koperasi mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) yang tinggi dan berdampak ke anggota koperasi. Jadi nelayan bukan hanya mendapatkan keuntungan dari hasil panen lele saja, namun mendapatkan juga SHU yang cukup tinggi dari koperasi yang tidak didapatkan oleh non anggota. Sinergitas antara koperasi dan anggota membuat koperasi mampu memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi di Makassar. Pangsa pasar Makassar yang harus dipenuhi oleh koperasi Juku Lele sebesar 500 Kg/hari. Bisa kita bayangkan berapa besar keuntungan yang didapatkan oleh koperasi dan anggota. Tidaklah heran jika SHU koperasi Juku lele cukup tinggi.

Kedua unit usaha koperasi Juku lele sangat memberdayakan nelayan sebagai anggotanya. Walaupun hanya satu unit yang dimanfaatkan oleh anggota namun sudah lebih cukup meningkatkan keuntungan yang didapat oleh nelayan. Untuk unit yang satu belum bisa dimanfaatkan oleh nelayan karena memerlukan pengetahuan yang cukup dalam dan investasi modal yang lebih besar. Hal ini menjadi kendala bagi nelayan karena mereka harus melaut sehingga untuk pemanfaatan unit yang satu yaitu penyediaan benih lele tidak mereka manfaatkan. Pengurus sudah melakukan upaya pemberdayaan untuk pembenihan lele, namun

kendala waktu dan modal membuat nelayan mengambil langkah praktis dengan resiko yang kecil untuk memanfaatkan unit ini saja.

Adapun non anggota hanya sebagian kecil yang mengambil manfaat dari koperasi. Sebagian besar mengambil bibit langsung dari Surabaya dengan alasan harga lebih murah. Bibit dari koperasi lebih mahal sedikit karena dilakukan pembibitan sendiri dengan kapasitas modal seadanya. Pemerintah belum banyak memberikan bantuan kepada koperasi. Sejatinnya pemerintah harus banyak memperhatikan koperasi karena koperasi merupakan ruh dari pasal 33 UUD 1945. Dengan tumbuhnya koperasi secara sehat maka pemberdayaan masyarakat sebagai anggota juga berjalan kearah yang lebih baik. Dari penelusuran penulis kepada pengurus koperasi, pemerintah sudah memberikan bantuan berupa permodalan namun terbatas dan bantuan fasilitas sarana berupa keramba jaring apung namun juga terbatas hanya 10 unit. Terbatasnya bantuan pemerintah tidak membuat pengurus koperasi patah arang, namun berbenah dengan modal yang ada, melakukan usaha pembibitan lele dan memberikan contoh ke masyarakat nelayan di sekitar koperasi, sehingga akhirnya mereka tertarik walaupun dalam jumlah yang sedikit. Hasil yang nyata akan membuat "mata" nelayan lain terbuka ikut bergabung.

Koperasi tidak perlu menghabiskan energi untuk sekedar wacana tapi dengan memberikan aksi yang nyata sehingga masyarakat pun ikut menjadi anggota tanpa adanya paksaan. Dari awalnya hanya 6 orang yang menjadi anggota saat di rintis akhirnya menjadi 24 anggota sehingga koperasi Juku Lele sah diberdirikan karena memenuhi syarat administrasi. Hingga tulisan ini dibuat perkembangan koperasi Juku Lele seharusnya sudah maju dan memiliki banyak anggota, namun kenyataannya masih stagnan karena adanya keterbatasan sumber daya alam yang menjadi musuh utama usaha ini. Keramba jaring apung yang sedianya berkembang pesat namun stagnan bahkan mundur karena dampak masuknya air laut ke badan sungai karena suplai air tawar yang berkurang setelah penambahan kapasitas bendungan Bilibili. Koperasi Juku lele saat ini berupaya bangkit dengan melakukan budidaya kolam terpal, namun membutuhkan modal yang sangat besar sehingga stagnan bahkan mundur. Perlu inovasi yang kreatif dari pengurus agar koperasi Juku Lele dapat eksis.

SIMPULAN

Pemberdayaan nelayan oleh koperasi Juku lele sebagai katalisator perkenomian cukup signifikan. Peningkatan pendapatan anggota sebesar Rp.2.567.000,- dibandingkan non anggota yang hanya sebesar Rp.198.000,-. Rasio keuntungan sebesar 65% untuk anggota dan 23,95% untuk non anggota menunjukkan pemberdayaan nelayan oleh koperasi merupakan katalisator perekonomian agar nelayan mampu memenuhi kebutuhan dasar pokoknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. Adri. (2021). *Nelayan Pulau Kecil dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Deepublish.
- _____ (2002). *Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Maros (Studi Kasus Desa Pajukukang, Kec. Maros Utara)*. (Tesis). Makassar : PPS-UNHAS.
- Bangun, W. (2015). *Teori Ekonomi Mikro. Cet.IV*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bioeconomics Working Paper Series (Working Paper 02/2014). Can Agricultural Cooperatives Reduce Poverty? Heterogeneous Impact of Cooperative Membership on Farmers' Welfare in Rwanda. *Refernce list: Applied Economic Perspectives and Policy, art.nr.online*. Retrieved 12 June 2019, from http://ees.kuleuven.be/bioecon/working-paper-series/BioeconWP_2014_2_update.pdf
- Hanafi, M.M. dan Halim, A. (2004). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hatta, M. (2015). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun: Gagasan & Pemikiran*. Cet.1. Jakarta: Kompas.
- Imron. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Kusnadi. (2008). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Pujiyono. (2015). *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*. Solo: CV. Indotama.
- Sen, Amartya. (2002). *Devolpment as Freedom*. Oxford; Oxford University.
- Yolandika, C., Lestari, D.A.H., Situmorang, S. (2015). The success of KUD Mina Jaya in Bandar Lampung city based on tripartite approach. *JIIA Journal of Agribusiness Science*, 3(4), 385-392. doi : 10.23960/jiia.v3i4.%25p.

INDEKS